



Jalan Menuju Perbudakan

Ekonomi Pasar vs Ekonomi Terpimpin

Friedrich A. Hayek

JALAN MENUJU PERBUDAKAN

Ekonomi Pasar vs Ekonomi Terpimpin

FRIEDRICH A. HAYEK

FREEDOM INSTITUTE
FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG

JALAN MENUJU PERBUDAKAN
Ekonomi Pasar vs Ekonomi Terpimpin

© Friedrich A. Hayek

Judul asli *The Road to Serfdom*, penerbit Routledge Classics, London 2001

ISBN 978-602-99571-0-5

Penerjemah Ioanes Rakhmat

Editor Samsudin Berlian

Sampul dan tata letak Sijo Sudarsono

Diterbitkan atas kerja sama

FREEDOM INSTITUTE

Jl. Proklamasi No. 41, Menteng - Jakarta 10320

Tel: (021) 31909226 Fax: (021) 31909227

Website: <http://www.freedom-institute.org>

E-mail: office@freedom-institute.org

dan

FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG (FNS)

Jalan Rajasa II No. 7 - Jakarta 12110

Tel: (021) 7256012 Fax: (021) 7203868

Website: <http://www.fnsindonesia.org>

E-mail: indonesia@fnst.org

Cetakan pertama Oktober 2011

Jalan Menuju Perbudakan

“Buku ini sungguh sebuah karya klasik: sebuah bacaan penting bagi siapa pun yang berminat serius pada politik dalam pengertiannya yang terluas dan paling tidak partisan.”

(Milton Friedman)

“Semua orang harus membaca buku ini. Tidak ada gunanya berkata bahwa sangat banyak orang yang tidak tertarik pada politik; isu politik yang didiskusikan Hayek melibatkan semua anggota masyarakat.”

(The Listener)

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	ix
	Pengantar Freedom Institute	xiii
	Pendahuluan.....	1
BAB 1	Jalan yang Ditinggalkan	13
BAB 2	Utopia Agung	29
BAB 3	Individualisme dan Kolektivisme	39
BAB 4	“Keniscayaan” Perencanaan	53
BAB 5	Perencanaan dan Demokrasi	69
BAB 6	Perencanaan dan Kedaulatan Hukum	89
BAB 7	Kontrol Ekonomi dan Totalitarianisme	109
BAB 8	Oleh Siapa, Pada Siapa?	127
BAB 9	Ketahanan dan Kebebasan	149
BAB 10	Mengapa Orang Terburuk Mencapai Posisi Puncak	167
BAB 11	Berakhirnya Kebenaran	191
BAB 12	Akar-Akar Sosialis Nazisme	207
BAB 13	Totalitarian di Tengah Kita	225
BAB 14	Kondisi-Kondisi Material dan Tujuan-Tujuan Ideal	251
BAB 15	Prospek Tata Internasional	273
	Kesimpulan	299
	Catatan Bibliografis	303
	Indeks	307
	Tentang Penulis	311

KATA PENGANTAR

KETIKA seseorang yang secara profesional mendalami bidang kajian sosial menulis sebuah buku politik, kewajiban pertamanya adalah secara terbuka mengakui hal ini. Ini adalah sebuah buku politik. Saya tidak ingin menutup-nutupinya dengan nama lain yang lebih anggun dan ambisius, seperti yang bisa saja saya lakukan dengan menyebutnya sebuah esai filsafat sosial. Tetapi, apa pun namanya, yang tetap terpenting adalah bahwa semua yang saya katakan berasal dari nilai-nilai pamungkas tertentu. Buku ini saya harapkan mampu menunaikan tugas kedua yang tak kalah pentingnya, yakni, menjelaskan secergas mungkin nilai-nilai pamungkas yang mendasari seluruh argumennya.

Namun ada satu hal yang ingin saya tambahkan. Meskipun buku ini adalah buku politik, saya bisa pastikan bahwa seluruh kepercayaan yang ditegaskan buku ini tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan pribadi saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari yang bakal dinikmati mayoritas bangsa di negeri ini dari tipe masyarakat yang menurut saya diperlukan. Kenyataannya, saya selalu diberitahu oleh para kolega sosialis saya bahwa, sebagai seorang ekonom, saya bakal menduduki posisi yang jauh lebih penting di dalam tipe masyarakat yang saya lawan, asalkan, tentu saja, saya bersedia menerima berbagai pandangan mereka. Saya juga sangat yakin bahwa penentangan saya terhadap berbagai pandangan itu timbul bukan karena pandangan-pandangan itu berbeda dari

yang sudah saya kenal semenjak muda, melainkan justru karena berbagai pandangan itulah yang saya pegang sebagai seorang muda dan yang telah mendorong saya menjadikan kajian ekonomi sebagai profesi saya. Bagi mereka yang, menurut kecenderungan masa kini, mencari berbagai motif kepentingan di dalam setiap profesi yang mengharuskan orang menyatakan sebuah pendapat politik, mungkin saya dapat diizinkan untuk menambahkan bahwa saya punya cukup alasan yang bisa diajukan untuk *tidak* menulis atau menerbitkan buku ini. Buku ini pasti menyerang banyak orang yang ingin saya ajak bersahabat dalam kehidupan ini; buku ini telah memaksa saya melepaskan pekerjaan yang saya rasa lebih saya kuasai, dan yang pada akhirnya saya anggap lebih penting; dan, khususnya, buku ini pasti membuat orang nanti kurang suka menerima hasil-hasil kajian yang secara akademik lebih kokoh, yang menjadi muara dari semua kecondongan pemikiran saya.

Kendatipun demikian, saya memandang penulisan buku ini sebagai kewajiban yang tidak boleh saya hindari, terutama karena ciri serius dan khas dari diskusi-diskusi masa kini tentang masalah-masalah kebijakan ekonomi masa depan hampir-hampir tidak disadari publik. Faktanya adalah bahwa mayoritas ekonom selama beberapa tahun terakhir terserap oleh mesin perang, dan terbungkam oleh posisi-posisi resmi mereka, dan bahwa sebagai akibatnya opini publik tentang berbagai masalah ini, sampai pada tingkat yang mengejutkan, dipandu oleh para amatir dan orang-orang eksentrik, oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi atau oleh mereka yang berniat jualan obat cespleng mereka. Dalam situasi semacam ini, orang yang masih memiliki waktu luang untuk menulis tidak lagi berhak menyimpan bagi dirinya sendiri bermacam kecemasan yang pastilah timbul akibat berbagai kecenderungan masa kini di dalam pikiran banyak orang yang tidak dapat mengungkapkannya secara terbuka—meskipun di dalam situasi yang berbeda saya akan dengan senang hati menyerahkan diskusi tentang berbagai masalah kebijakan nasional kepada mereka yang memiliki otoritas dan kualitas yang

lebih baik untuk tugas ini.

Argumen pokok buku ini pertama kali dijabarkan secara umum dalam artikel yang berjudul “Freedom and the Economic System”, yang muncul dalam *Contemporary Review* edisi April 1938, dan yang kemudian dicetak ulang dalam bentuk yang lebih luas sebagai salah satu tulisan dalam “Public Policy Pamphlets”, yang disunting oleh Prof. H.D. Gideonse untuk University of Chicago Press (1939). Saya harus berterima kasih kepada para penyunting dan penerbit kedua publikasi itu atas izin mereproduksi bagian-bagian tertentu di dalam keduanya.

*London School of Economics,
Cambridge, Desember 1943*

PENGANTAR FREEDOM INSTITUTE

DARI sudut sejarah ide-ide, abad ke-20 barangkali bisa disebut sebagai abad pertarungan puncak ideologi antara sosialisme dan liberalisme. Tentu saja banyak isu dan perdebatan lain yang penting dan menarik dalam kurun waktu yang sama. Tetapi dari segi dampak dan pengaruhnya, kompetisi dua ideologi besar itulah yang menjadi semacam payung bagi begitu banyak perdebatan tajam dan menarik lainnya.

Kaum terpelajar Indonesia cukup akrab dengan ide-ide dan tokoh-tokoh yang muncul dari kubu sosialisme. Bahkan bisa dikatakan bahwa praktis semua tokoh-tokoh kebangsaan kita yang terdepan adalah penganut ideologi sosialisme dengan varian-varian yang berbeda. Tapi sayangnya, publik Indonesia hampir tidak pernah mendengar, apalagi mengenal ketokohan dan pemikiran dari orang-orang seperti Ludwig von Mises, Robert Nozick, Irving Kristol, William Buckley Jr. Tokoh seperti Milton Friedman memang sudah cukup kita kenal, tetapi ide-idenya lebih banyak dibicarakan oleh kaum ekonom dan kalangan pebisnis.

Jadi bisa diibaratkan bahwa sejarah Indonesia, dari segi perkembangan ide-ide, adalah sebuah sejarah yang timpang. Indonesia memandang hanya dengan satu mata panorama intelektual yang begitu luas dari dinamika abad ke-20 yang begitu intens.

Karena itulah, terbitnya terjemahan buku Friedrich Hayek patut disambut baik. Di antara nama-nama yang saya sebut di atas, Hayek, lewat *The Road to Serfdom* (1944), pada umumnya dianggap sebagai pemikir terdepan yang pertama-tama melakukan pembelaan sistematis dan populer terhadap demokrasi, kapitalisme, dan liberalisme pada saat paham sosialisme sedang berada di puncak kejayaannya, yaitu pada kurun akhir 1940-an dan sepanjang dekade 1950an.

Kalau dilihat secara *post-factum*, sejarah kelihatannya berjalan sendiri dengan begitu mudah dan terang benderang. Tetapi di Eropa, saat Hayek menerbitkan *The Road to Serfdom*, ia lebih dianggap sebagai kaum pinggiran yang berusaha membendung arus deras perubahan. Dibutuhkan hampir tiga dekade sebelum Hayek, bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Milton Friedman, pada akhirnya mulai mencuri perhatian publik, dan kemudian, dengan munculnya Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, dianggap sebagai kaum visioner yang mengubah sejarah.

Kalau sekarang kita membaca kembali karya-karya Hayek tidak berarti bahwa kita bersikap romantis terhadap sejarah yang tidak mungkin lagi berulang. Pandangan Hayek terhadap kebebasan dan kaitannya dengan sistem ekonomi dan sistem politik masih terus relevan dan perlu kita pelajari. Hayek tidak melihat sistem ekonomi, politik, hukum dan perilaku alamiah manusia sebagai kotak-kotak yang terpisah. Ia mengaitkan semua itu dalam sebuah pandangan yang menyeluruh dan mengaitkannya dengan satu hal yang menjadi titik tolak pemikirannya, yaitu kebebasan manusia.

Mudah-mudahan buku ini bisa membantu, khususnya kaum muda di negeri kita, dalam melihat panorama intelektual dunia secara lebih lengkap.

Jakarta, 9 Oktober 2011
Rizal Mallarangeng
Direktur Freedom Institute



PENDAHULUAN

*Tidak banyak penemuan yang lebih mengganggu
ketimbang penemuan yang mengungkapkan
sejarah ide-ide.*

Lord Acton

PERISTIWA masa kini berbeda dari sejarah dalam hal kita tidak mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Jika kita memandang ke belakang, kita dapat mengukur pentingnya suatu kejadian masa lampau dan menelusuri akibat-akibat yang kemudian telah ditimbulkannya. Tetapi ketika sejarah sedang berjalan, bagi kita ini bukanlah sejarah, melainkan masa kini yang sedang membawa kita ke suatu negeri yang tak dikenal, dan jarang kita dapat menangkap pertanda apa yang akan terjadi. Akan berbeda halnya jika kepada kita diberikan kesempatan kedua untuk melewati kejadian-kejadian yang sama, sambil memiliki semua pengetahuan tentang apa yang telah kita lihat sebelumnya. Betapa segala sesuatunya akan tampak berbeda bagi kita, betapa penting dan seringkali betapa mengejutkan tampaknya berbagai perubahan yang telah terjadi yang sekarang hampir tak kita perhatikan! Mungkin beruntung bahwa manusia tak pernah dapat memiliki pengalaman ini dan tak mengetahui hukum-hukum yang harus ditaati sejarah.

Namun, kendatipun sejarah relatif tidak pernah mengulang dirinya sendiri, dan justru karena tidak ada perkembangan yang

niscaya, kita dapat, sampai batas tertentu, belajar dari masa lampau agar tidak mengulangi proses yang sama. Orang tak perlu menjadi ahli nجوم untuk menyadari bahaya-bahaya yang sedang mengancam. Suatu kombinasi kebetulan antara pengalaman dan kepentingan akan acap kali menyingkapkan berbagai segi dari bermacam kejadian yang hanya teramati oleh sedikit orang.

Buku ini adalah hasil dari suatu pengalaman yang mirip dengan pengalaman dua kali menjalani periode yang sama—atau paling tidak mirip dengan pengalaman dua kali memantau evolusi ide yang sangat serupa. Walaupun ini adalah pengalaman yang mungkin tidak akan didapatkan seseorang di dalam suatu negeri, dalam situasi-situasi tertentu, pengalaman ini mungkin diperoleh dengan hidup secara berturut-turut selama periode yang panjang di beberapa negeri yang berbeda. Terlepas dari serupanya berbagai pengaruh kecondongan pemikiran di kebanyakan negeri beradab, pengaruh itu tidak bekerja secara otomatis dalam waktu maupun kecepatan yang sama. Jadi, dengan bergerak dari satu negeri ke negeri lain, orang kadangkala dapat dua kali memantau fase-fase perkembangan intelektual yang serupa. Indra-indra khususnya dengan demikian menjadi peka. Ketika seseorang mendengar untuk kedua kalinya berbagai macam opini diungkapkan atau serangkaian tindakan didukung, yang telah dijumpainya pertama kali 20 atau 25 tahun lampau, berbagai opini atau tindakan itu pun mendapatkan makna baru sebagai gejala suatu tren tertentu. Walaupun bukan hal yang pasti, tapi setidaknya sebagai probabilitas, serangkaian opini dan tindakan itu menyiratkan miripnya jalan berbagai perkembangan yang terjadi.

Kini waktunya untuk menyatakan kebenaran yang menyakitkan, bahwa kita sedang terancam untuk mengulangi nasib Jerman. Memang benar, hal itu belum terasa nyata di depan mata, dan berbagai kondisi di negeri ini masih sangat jauh dari kondisi-kondisi yang telah disaksikan di Jerman dalam tahun-tahun belakangan ini, sehingga orang sulit percaya bahwa kita sedang bergerak ke arah yang sama. Namun, meskipun jalannya

panjang, sekali jalan ini ditempuh, maka arahnya pun akan sulit untuk dibalik lagi. Walaupun pada jangka panjang kita menjadi penentu nasib kita sendiri, pada jangka pendek kita adalah tawanan ide-ide yang telah kita ciptakan. Hanya kecuali kita mengenali bahaya ini pada waktu yang tepat, kita dapat berharap bisa mengelakkannya.

Bukan dengan Jerman masa Hitler, juga bukan dengan Jerman dalam perang masa kini, bahwa negeri ini memiliki keserupaan. Tetapi para peneliti yang mendalami arus perputaran ide-ide masa kini sudah semestinya mafhum bahwa ada keserupaan yang jelas antara tren pemikiran di Jerman selama dan sesudah perang terakhir dan arus perputaran ide-ide masa kini di negeri ini. Tekad yang sama ini tampak di Inggris sekarang bahwa tatanan bangsa ini, yang telah kita bentuk demi pertahanan diri, harus tetap dipertahankan demi berbagai tujuan penciptaan baru. Ada penistaan yang mirip terhadap liberalisme abad ke-19, “realisme” palsu dan bahkan sinisme yang sama, penerimaan fatalistik yang sama terhadap “perkembangan-perkembangan yang niscaya”. Dan setidaknya sembilan dari setiap sepuluh pelajaran, yang dikatakan oleh para tokoh pembaru kita yang paling lantang mutlak kita pelajari dari perang ini, persis adalah berbagai pelajaran yang telah sungguh dipelajari bangsa Jerman dari perang terakhir, dan yang telah berperan banyak dalam melahirkan sistem Nazi. Di sepanjang buku ini, kita akan berkesempatan menunjukkan bahwa kita, dengan jarak yang terpisah antara 15 hingga 25 tahun, sedang mengikuti contoh Jerman. Kendatipun orang tak suka diingatkan, kini baru berlalu beberapa tahun ketika kebijakan sosialis negeri itu secara umum didukung oleh kalangan progresif sebagai sebuah contoh yang harus ditiru, sama seperti bagaimana akhir-akhir ini Swedia telah menjadi sebuah model negeri yang diperhatikan kalangan progresif. Semua orang yang masih ingat berbagai kejadian yang lebih jauh di masa lalu tahu betapa dalamnya, selama paling tidak satu generasi sebelum perang terakhir, pemikiran dan praktik Jerman mempengaruhi cita-cita dan kebijakan di negeri ini.

Penulis buku ini telah menggunakan kurang lebih separuh masa kehidupan dewasanya di negeri asalnya Austria, dengan kontak yang sangat dekat dengan kehidupan intelektual Jerman, dan separuhnya lagi di Amerika Serikat dan Inggris. Selama 12 tahun hidup di negeri ini, yang kini telah menjadi tanahairnya sendiri, dia telah menjadi semakin yakin bahwa paling tidak ada beberapa kekuatan yang telah menghancurkan kebebasan di Jerman, yang kini juga sedang bekerja di sini, dan bahwa karakter dan sumber bahaya ini bahkan kurang dipahami di sini ketimbang di Jerman. Tragedi terbesar belum juga dilihat bahwa di Jerman, sejumlah besar orang yang berkemauan baik, orang yang dikagumi dan dijadikan model di negeri ini, adalah orang-orang yang telah menyiapkan, kalau bukan dalam kenyataannya menciptakan, jalan bagi kemunculan berbagai kekuatan yang sekarang ini memihak pada segala sesuatu yang mereka benci. Bagaimana pun juga, kesempatan kita untuk mengelakkan suatu nasib yang serupa bergantung pada kemauan kita untuk menghadapi bahaya ini, dan pada kesigapan kita untuk merevisi harapan dan ambisi kita yang paling kita sukai jika harapan dan ambisi ini terbukti adalah sumber bahaya itu. Sejauh ini hanya ada sedikit pertanda yang menyatakan bahwa kita memiliki suatu keberanian intelektual untuk mengaku pada diri kita sendiri bahwa kita mungkin telah salah. Sedikit saja orang yang siap mengakui bahwa bangkitnya fasisme dan Nazisme bukanlah suatu reaksi terhadap berbagai perkembangan sosialis dari masa sebelumnya, melainkan suatu akibat yang tak terhindari dari perkembangan itu. Ini adalah suatu kebenaran yang kebanyakan orang tak ingin lihat, bahkan ketika di mana-mana diakui bahwa ada banyak kemiripan dalam hal cirinya yang menjijikkan antara rezim-rezim internal di Rusia komunis dan Jerman nasional-sosialis. Alhasil, banyak orang yang memandang diri mereka sendiri sangat superior dibandingkan abnormalitas Nazisme, dan sungguh-sungguh membenci semua manifestasinya, tetapi bersamaan dengan itu sekaligus bekerja demi cita-cita yang kalau diwujudkan akan langsung membawa mereka ke tirani yang

menjijikkan itu.

Semua kesejajaran di antara berbagai perkembangan di negeri-negeri yang berbeda tentu saja menyesatkan; tetapi saya tidak sedang mendasarkan argumen saya terutama pada berbagai kesejajaran semacam itu. Saya juga tidak sedang memperdebatkan bahwa berbagai perkembangan ini niscaya. Seandainya demikian, maka tak ada gunanya menulis buku ini. Berbagai perkembangan ini dapat dicegah jika orang menyadari pada waktunya ke mana segala upaya mereka akan bermuara. Tetapi, hingga belum lama ini, hanya ada sedikit harapan bahwa ada upaya yang akan berhasil membuat mereka melihat bahayanya. Namun tampaknya kini waktunya telah tiba bagi suatu diskusi yang lebih mendalam mengenai seluruh persoalan. Bukan saja sekarang ini masalahnya sudah dikenali secara luas, tetapi juga terdapat alasan-alasan khusus yang pada saat ini mengharuskan kita untuk langsung menghadapi masalah-masalah ini.

Mungkin akan dikatakan orang bahwa sekarang ini bukanlah waktunya untuk mengangkat masalah yang akan menimbulkan benturan pandangan yang tajam. Tetapi sosialisme yang sedang kita bicarakan bukanlah suatu masalah partai, dan berbagai persoalan yang sedang kita diskusikan hanya sedikit saja yang berhubungan dengan berbagai persoalan yang kini sedang diperdebatkan di antara partai-partai politik. Tidaklah mempengaruhi masalah kita jika ada beberapa kelompok kurang menginginkan sosialisme dibandingkan kelompok lain, jika beberapa menginginkan sosialisme terutama demi kepentingan satu kelompok dan beberapa demi kepentingan kelompok lain. Yang terpenting adalah bahwa, jika kita memperhatikan kelompok orang yang memiliki pandangan yang mempengaruhi perkembangan, mereka kini di dalam negeri ini dalam batas-batas tertentu semuanya sosialis. Jika sekarang tidak lagi ditekankan bahwa “kita semua kini sosialis”, maka ini karena faktanya sudah sangat jelas. Hampir tak ada orang yang meragukan bahwa kita harus meneruskan gerak kita ke arah sosialisme; dan kebanyakan orang hanya mencoba untuk membelokkan gerakan ini demi

melayani kepentingan suatu kelas atau suatu kelompok tertentu.

Karena hampir setiap orang menginginkannya, kini kita bergerak ke arah itu. Tidak ada fakta-fakta objektif yang membuat hal ini niscaya. Nanti kita akan mengatakan sesuatu mengenai “perencanaan” yang konon tak terhindarkan. Pertanyaan utamanya adalah ke mana gerakan ini akan membawa kita. Bukankah mungkin bahwa jika orang-orang, yang memiliki keyakinan-keyakinan yang kini memberi gerakan ini suatu momentum yang tak dapat dilawan, mulai melihat apa yang hingga kini hanya dapat dipahami sedikit orang, mereka akan menarik diri karena ketakutan dan meninggalkan upaya mereka, yang telah selama setengah abad melibatkan sangat banyak orang yang memiliki kemauan baik? Ke mana kepercayaan-kepercayaan umum generasi kita akan membawa kita adalah suatu problem bukan hanya untuk satu partai, tetapi untuk setiap orang, suatu problem yang sangat penting artinya. Adakah tragedi yang lebih besar yang dapat dibayangkan, ketimbang bahwa di dalam usaha sadar kita untuk membentuk masa depan kita yang sejalan dengan ideal-ideal agung kita, kita akan dalam kenyataannya tanpa disengaja menghasilkan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang sedang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh?

Sebenarnya ada alasan yang lebih mendesak mengapa sekarang ini kita harus dengan serius berupaya memahami berbagai kekuatan yang telah menciptakan Nasional-Sosialisme: yakni bahwa hal ini akan memungkinkan kita untuk memahami musuh kita dan persoalan yang sedang dipertaruhkan di antara kita. Tak dapat disangkal bahwa sejauh ini hanya ada sedikit pengakuan mengenai cita-cita positif yang sedang kita bela. Kita tahu bahwa kita sedang bertarung untuk mendapatkan kemerdekaan untuk membentuk kehidupan kita yang sejalan dengan ide-ide kita sendiri. Ini adalah suatu pertarungan besar, tetapi tidak cukup. Tidak cukup untuk memberi kita kepercayaan kokoh yang kita perlukan untuk melawan musuh yang menggunakan propaganda sebagai salah satu senjata utama mereka, bukan hanya dalam bentuknya yang paling terang-terangan, tetapi juga dalam bentuk

yang paling bulus. Malah lebih tidak memadai lagi jika kita harus melawan propaganda ini di antara orang-orang di negeri-negeri yang ada di bawah kontrol mereka dan di tempat-tempat lain, di mana efek propaganda ini tak akan lenyap meskipun kekuatan-kekuatan Axis telah dikalahkan. Tidaklah cukup jika kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa apa yang sedang kita perjuangkan patut mereka dukung, dan tidaklah cukup untuk memandu kita dalam membangun suatu Eropa baru yang aman dari bahaya-bahaya yang telah menaklukkan Eropa lama.

Adalah suatu fakta yang dapat diratapi bahwa orang Inggris, dalam berhubungan dengan para diktator sebelum perang, juga dalam usaha-usaha mereka berpropaganda dan berdiskusi mengenai tujuan-tujuan perang mereka, telah memperlihatkan keraguan jiwa dan ketidakpastian tujuan. Dua hal yang disebut terakhir ini dapat dijelaskan hanya timbul karena kebingungan mereka mengenai cita-cita mereka sendiri dan mengenai ciri dasar dari berbagai perbedaan yang memisahkan mereka dari musuh mereka. Kita telah tersesat karena kita menolak untuk percaya bahwa musuh kita bersungguh-sungguh ketika mengakui beberapa kepercayaan yang juga kita akui, dan karena kita percaya pada kesungguhan beberapa klaim lain yang dipertahankan musuh. Bukankah partai-partai Kiri dan juga partai-partai Kanan telah tertipu karena mempercayai bahwa Partai Nasional Sosialis melayani kepentingan kalangan kapitalis dan melawan semua bentuk sosialisme? Bukankah sudah banyak fitur sistem Hitler yang direkomendasikan, oleh pihak-pihak yang paling tak terduga-duga, untuk kita tiru, tanpa mereka sadar bahwa fitur-fitur itu adalah bagian integral dari sistem itu dan tak sejalan dengan masyarakat merdeka yang ingin kita pelihara? Sangatlah besar jumlah kesalahan berbahaya yang telah kita buat sebelum dan sejak pecahnya perang, berhubung kita tak memahami musuh yang sedang kita hadapi. Tampaknya seolah-olah kita tidak ingin memahami berbagai perkembangan yang telah melahirkan totalitarianisme, karena pemahaman semacam itu dapat menghancurkan beberapa ilusi yang paling kita sukai,

yang dengan segenap hati mau kita jadikan tempat bergantung.

Kita tak akan pernah berhasil menghadapi orang Jerman sampai kita memahami karakter dan pertumbuhan ide-ide yang sekarang mengendalikan mereka. Teori yang sekali lagi diajukan, bahwa orang Jerman pada diri mereka sendiri pada dasarnya kejam, hampir-hampir tak dapat dipertahankan dan menurunkan derajat orang yang mempercayainya. Teori ini meremehkan sederetan panjang orang Inggris yang selama beberapa ratus tahun lampau telah dengan senang mengambil alih apa yang paling baik, dan bukan hanya yang terbaik, dari pemikiran Jerman. Teori ini mengabaikan fakta bahwa ketika 80 tahun lalu John Stuart Mill menulis esainya yang berjudul *On Liberty*, dia mendapatkan inspirasinya dari, tidak lain tidak bukan, dua orang Jerman, Goethe dan Wilhelm von Humboldt,¹ dan melupakan fakta bahwa dua nenek moyang intelektual yang paling berpengaruh dari Nasional-Sosialisme, Thomas Carlyle dan Houston Stewart Chamberlain, adalah seorang Skot dan seorang Inggris. Dalam bentuknya yang lebih sederhana, pandangan ini membuat hina orang-orang yang, melalui usaha mereka mempertahankan, mengadopsi fitur-fitur paling buruk dari teori-teori rasial Jerman. Masalahnya bukanlah mengapa orang Jerman sendiri kejam, sementara mereka secara alamiah mungkin sekali tidak lebih kejam daripada orang lain, melainkan bagaimana mencari tahu situasi-situasi yang selama 70 tahun terakhir telah memungkinkan pertumbuhan progresif dan kemenangan pamungkas seperangkat khusus ide-ide, dan mengapa pada akhirnya kemenangan ide-ide itu telah membawa orang-orang paling keji di antara mereka ke posisi puncak. Lagi pula, semata-mata kebencian terhadap segala sesuatu yang berbau Jerman, ketimbang terhadap ide-ide tertentu yang

1 Sementara beberapa orang menganggap pernyataan ini terlalu dibesar-besarkan, kesaksian Lord Morley patut dikutip, yang di dalam karyanya yang berjudul *Recollections* berbicara tentang "poin yang diakui" bahwa argumen utama esai *On Liberty* "tidak orisinal tetapi datang dari Jerman."

kini mendominasi orang Jerman, sangatlah berbahaya, karena kebencian ini menutup mata kita untuk melihat ancaman yang sebenarnya. Orang haruslah takut bahwa sikap mental semacam ini seringkali hanyalah semacam eskapisme, yang muncul dari keengganan untuk mengenali berbagai kecenderungan yang tidak dapat dibatasi hanya pada Jerman, dan dari suatu ketidakinginan untuk memeriksa kembali, dan jika perlu membuang, semua kepercayaan yang telah kita ambil alih dari orang Jerman dan yang olehnya kita, sama seperti orang Jerman, telah tertipu. Bahayanya menjadi ganda karena pendapat yang menyatakan bahwa hanya kekejaman tertentu orang Jermanlah yang telah menghasilkan sistem Nazi, mungkin sekali menjadi suatu dalih untuk memaksa kita menerima lembaga-lembaga yang telah menghasilkan kekejaman itu sendiri.

Penafsiran atas berbagai perkembangan di Jerman dan Italia yang akan segera diajukan dalam buku ini sangat berbeda dari penafsiran yang diberikan oleh kebanyakan pengamat asing dan oleh mayoritas orang yang telah dibuang dari kedua negeri itu. Tetapi jika penafsiran ini benar, maka ini akan juga menjelaskan mengapa hampir mustahil bagi seseorang yang, seperti kebanyakan orang yang dibuang itu dan wartawan asing dari surat-surat kabar Inggris dan Amerika, memegang pandangan-pandangan sosialis yang kini mendominasi, untuk melihat peristiwa-peristiwa itu dalam perspektif yang benar.²

-
- 2 Bahwa pandangan-pandangan yang dipegang oleh semua sektor seluruh negeri, bahkan di dalam sektor yang paling konservatif, dapat sepenuhnya diwarnai oleh prasangka Kiri para wartawan asing yang mewakili surat kabar negeri mereka, tergambarkan dengan baik oleh pandangan-pandangan yang hampir umum dipegang di Amerika mengenai hubungan antara Britania Raya dan India. Orang Inggris yang ingin melihat peristiwa di Eropa dalam perspektif yang benar harus dengan serius mempertimbangkan kemungkinan bahwa pandangan mereka bisa jadi telah terdistorsi dengan cara yang sama persis, dan karena alasan yang sama pula. Hal ini sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk mempertanyakan kesungguhan pandangan-pandangan para wartawan asing Amerika dan Inggris. Tetapi siapa pun juga yang

Ada sebuah pandangan yang dangkal dan menyesatkan, yang menganggap Nasionalisme-Sosialis hanya sebagai reaksi yang dimunculkan oleh orang-orang berprivilese, atau yang kepentingan-kepentingannya terancam oleh perkembangan sosialisme. Pandangan semacam ini dengan sendirinya didukung oleh semua orang yang, meskipun mereka pernah pada satu waktu aktif di dalam gerakan ide-ide yang telah bermuara pada Nasional-Sosialisme, telah berhenti pada suatu titik tertentu dari perkembangan itu dan, karena konflik mereka, yang disebabkan hal ini, dengan para pendukung Nazi, dipaksa untuk meninggalkan negeri mereka. Tetapi fakta bahwa mereka, karena jumlah mereka yang besar, adalah satu-satunya oposisi yang signifikan terhadap para pendukung Nazi, tidak lebih berarti bahwa, dalam pengertian yang lebih luas, semua orang Jerman pada dasarnya telah menjadi sosialis, dan bahwa liberalisme dalam pengertiannya yang lama telah didorong keluar oleh sosialisme. Sebagaimana akan kita lihat, konflik yang ada antara Nasional-Sosialis “Kanan” dan kalangan “Kiri” di Jerman adalah sejenis konflik yang akan selalu muncul di antara faksi-faksi sosialis yang bersaing. Jika penafsiran ini benar, berarti banyak pengungsi sosialis itu, sementara berpegang pada kepercayaan-kepercayaan mereka, kini, meskipun dengan kehendak terbaik mereka, sedang menolong membawa negeri yang telah mereka adopsi ini ke jalan yang sudah Jerman tempuh.

Saya tahu bahwa banyak sahabat saya yang berkebangsaan Inggris kadang kala dikejutkan oleh pandangan-pandangan semi-fasis yang sekali-sekali mereka dengar diungkapkan oleh pengungsi-pengungsi Jerman, yang jelas sekali memegang keyakinan-keyakinan sosialis. Tetapi sementara para pengamat kebangsaan Inggris ini mengaitkan hal ini pada status mereka sebagai orang Jerman, penjelasan yang benar adalah bahwa mereka adalah sosialis yang memiliki pengalaman yang telah membawa

mengenal kalangan-kalangan bumi putera yang memiliki hubungan-hubungan yang dekat dengan para wartawan asing tak akan sulit memahami sumber-sumber prasangka dan distorsi ini.

mereka beberapa tahap lebih jauh daripada tahap yang sejauh ini telah dicapai kalangan sosialis di negeri ini. Tentu benar bahwa kaum sosialis Jerman telah menemukan bahwa banyak fitur tertentu tradisi Prusia di negeri mereka mendukung sosialisme; dan tali kekerabatan antara Prusianisme dan sosialisme ini, keduanyadiagungkan di Jerman, memberikan dukungan tambahan terhadap pendapat utama kita.³ Tetapi keliru jika kita percaya bahwa Jerman khususnya, lebih daripada unsur sosialis, telah melahirkan totalitarianisme. Adalah dominasi pandangan-pandangan sosialis, dan bukan Prusianisme, yang sama-sama terdapat di Jerman, Italia dan Rusia—dan adalah dari kalangan massa Nasional-Sosialisme muncul, bukan dari kelas-kelas yang berakar dalam tradisi Prusia, dan juga bukan dari kelas-kelas yang didukung oleh tradisi Prusia.



3 Bahwa ada tali kekerabatan tertentu antara sosialisme dan organisasi Negara Prusia, yang dengan sadar diorganisir dari atas, tidak seperti di negeri lain mana pun, tidaklah dapat disangkal dan telah dengan bebas diakui oleh kalangan sosialis Prancis. Lama sebelum cita-cita menjalankan seluruh negara dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang sama seperti yang dipakai dalam mengelola sebuah pabrik tunggal mengilhami sosialisme abad ke-19, pujangga Prusia yang bernama Novalis telah mengkritik bahwa “tidak ada negara lain yang dikelola sama seperti mengelola sebuah pabrik selain Prusia sejak kematian Frederick William.” (Bdk. Novalis [Friedrich von Hardenberg], *Glauben und Liebe, oder der König und die Königin*, 1798).

BAB 1

JALAN YANG DITINGGALKAN

Sebuah program yang tesis dasarnya adalah bahwa bukan sistem usaha bebas untuk meraih keuntungan telah gagal di dalam generasi ini, melainkan bahwa sistem semacam ini belum dicoba.

F.D. Roosevelt

KETIKA gerak maju sebuah peradaban secara tiba-tiba berbelok, ketika bukannya kemajuan berkesinambungan yang kita harapkan yang terjadi melainkan terancamnya kita oleh hal-hal jahat yang kita anggap pernah kita alami semasa zaman barbarisme lampau, secara alamiah kita tidak akan menyalahkan diri kita sendiri, melainkan hal lain. Bukankah kita semua sudah berjuang keras sejalan dengan pedoman terbaik kita, dan bukankah banyak dari tokoh pemikir terbaik kita telah bekerja tanpa henti untuk membuat dunia ini lebih baik? Bukankah semua usaha dan harapan kita sudah diarahkan ke kebebasan, keadilan, dan kemakmuran yang lebih besar? Jika hasilnya sangat berbeda dari tujuan-tujuan kita, jika, ketimbang kebebasan dan kemakmuran, belenggu dan nestapa menatap wajah kita, bukankah sudah jelas bahwa pasti kekuatan-kekuatan jahatlah yang telah menggagalkan maksud-maksud kita, bahwa kita adalah korban suatu kekuatan jahat yang harus dikalahkan sebelum kita dapat meneruskan jalan menuju hal-hal yang

lebih baik? Betapa pun kita dapat banyak berbeda ketika kita menamakan pihak yang harus disalahkan, entah si kapitalis jahat atau si roh jahat dari suatu bangsa tertentu, atau kedunguan para sesepuh kita, atau suatu sistem sosial yang masih belum sepenuhnya ditumbangkan meskipun kita sudah berjuang melawannya selama setengah abad—kita semuanya, atau setidaknya kita hingga baru-baru ini, meyakini satu hal: bahwa ide-ide terkemuka, yang selama generasi terakhir telah dikenal kebanyakan orang yang berkemauan baik dan telah menentukan berbagai perubahan besar di dalam kehidupan sosial kita, tidak mungkin keliru. Kita siap menerima hampir semua penjelasan apa pun mengenai krisis masa kini peradaban kita kecuali satu: bahwa keadaan dunia masa kini mungkin murni adalah hasil dari kesalahan yang telah kita buat, dan bahwa pengejaran atas beberapa ideal yang paling kita dambakan tampaknya telah mendatangkan hasil-hasil yang sangat berbeda dari hasil-hasil yang kita harapkan.

Sementara semua tenaga kita diarahkan untuk mengakhiri perang ini dengan suatu kemenangan, kadangkala sulit untuk mengingat bahwa sebelum perang pun nilai-nilai yang sekarang sedang kita perjuangkan telah terancam di sini dan telah dihancurkan di tempat lain. Meskipun sementara ini ideal-ideal yang berlainan dibela oleh bangsa-bangsa yang bermusuhan, yang sedang bertarung demi eksistensi mereka, kita tidak boleh lupa bahwa konflik ini tumbuh dari suatu pergumulan ide-ide yang, hingga belum lama ini, telah membentuk suatu peradaban Eropa yang sama; dan bahwa berbagai perkembangan yang telah memuncak dalam bentuk penciptaan sistem-sistem totalitarian tidaklah terbatas pada negeri-negeri yang telah takluk pada sistem itu. Meskipun tugas pertama sekarang ini haruslah memenangkan perang, memenangkan perang ini sendiri hanya akan memberi kita satu lagi kesempatan lain untuk menghadapi masalah-masalah mendasar dan untuk menemukan sebuah jalan yang mengelakkan nasib yang telah menenggelamkan peradaban sesaudara kita.

Sekarang, agak sulit untuk berpikir bahwa Jerman dan Italia, atau Rusia, bukan sebagai dunia-dunia yang berbeda, bahwa mereka semua adalah hasil-hasil perkembangan pemikiran yang juga kita anut bersama. Setidaknya sejauh menyangkut musuh-musuh kita, adalah lebih mudah dan lebih menghibur jika kita berpikir bahwa mereka sepenuhnya berbeda dari kita dan bahwa apa yang telah terjadi di sana tidak mungkin terjadi di sini. Namun sejarah negeri-negeri itu dalam tahun-tahun terakhir sebelum bangkitnya sistem totalitarian menunjukkan sedikit fitur yang tidak asing dengan kita saat ini. Konflik eksternal adalah hasil transformasi pemikiran Eropa, yang di dalamnya negeri-negeri lain telah bergerak jauh lebih cepat sehingga membawa mereka ke dalam konflik yang tak dapat diperdamaikan dengan ideal-ideal kita, tetapi yang bukannya tidak berpengaruh pada kita.

Bahwa suatu perubahan ide, dan kekuatan kemauan manusia, telah membuat dunia seperti apa adanya sekarang, meskipun manusia tidak bisa membayangkan berbagai akibatnya sebelumnya, dan bahwa tidak ada perubahan fakta yang berlangsung spontan yang mengharuskan kita untuk mengadaptasi pemikiran kita, mungkin agak sulit dilihat orang Inggris, hanya karena di dalam perkembangan ini orang Inggris, beruntunlah mereka, telah ketinggalan ketimbang kebanyakan orang Eropa. Kita masih memikirkan ideal-ideal yang kini memandu kita dan telah menuntun kita selama generasi yang telah lewat, sebagai ideal-ideal yang baru akan diwujudkan di masa depan, dan kita tidak menyadari betapa dalam 25 tahun terakhir ini ideal-ideal itu telah mengubah bukan hanya dunia, tetapi juga negeri ini. Kita masih percaya bahwa sampai relatif baru-baru ini kita diatur oleh apa yang secara samar disebut ide-ide abad ke-19 atau prinsip *laissez-faire*. Dibandingkan dengan beberapa negeri lain, dan dari sudut pandang orang-orang yang tidak sabar untuk mempercepat perubahan, bisa jadi kepercayaan semacam itu memang benar adanya. Tetapi meskipun sampai 1931 negeri ini telah mengikuti hanya dengan perlahan saja jalan yang telah dijalani negeri-negeri lain, pada waktu itu pun kita telah bergerak sangat jauh

sehingga hanya orang yang ingatannya kembali ke tahun-tahun sebelum perang terakhir mengetahui seperti apa bentuk dunia yang liberal itu.¹

Bagaimana pun juga, poin penting yang masih sangat sedikit disadari orang di Inggris bukan cuma soal besarnya perubahan-perubahan yang telah terjadi selama generasi terakhir, tetapi fakta bahwa berbagai perubahan itu menandakan perubahan arah evolusi ide-ide dan tatanan sosial kita. Selama sedikitnya 25 tahun sebelum hantu totalitarisme menjadi ancaman nyata, kita telah dan sedang secara progresif bergerak menjauh dari ide-ide dasar yang membangun peradaban Eropa. Bahwa gerakan ini, yang kita masuki dengan harapan dan ambisi sangat tinggi, telah membawa kita berhadapan muka dengan horor totalitarian, adalah suatu kejutan besar bagi generasi ini, yang masih menolak menghubungkan kedua fakta ini. Bagaimana pun juga, perkembangan ini hanyalah mengonfirmasi peringatan-peringatan para sesepuh filsafat liberal yang masih kita hormati. Kita secara progresif telah meninggalkan kebebasan dalam berbagai urusan ekonomi, padahal, tanpa kebebasan ekonomi, kebebasan politik dan kebebasan pribadi tak akan pernah ada di masa lampau. Meskipun kita sudah diperingatkan oleh beberapa pemikir politik terbesar abad ke-19, de Tocqueville dan Lord Acton, bahwa sosialisme bermakna perbudakan, kita tetap

1 Bahkan dalam tahun itu Macmillan Report sudah dapat berkata-kata tentang “perubahan pandangan pemerintah negara ini belakangan ini, obsesi yang terus bertumbuh untuk, tanpa mempedulikan partai, menjalankan manajemen kehidupan rakyat” dan menambahkan bahwa “Parlemen mendapati dirinya sendiri semakin terlibat dalam legislasi yang memiliki, untuk tujuan yang disadari, peraturan yang mengatur urusan kehidupan sehari-hari masyarakat dan kini mencampuri hal-hal yang sebelumnya dipandang berada di luar wewenangnya sama sekali.” Hal ini sudah dikatakan sebelum negara akhirnya (belakangan dalam tahun yang sama) terjun sepenuhnya dan, dalam jangka pendek yang memalukan antara 1931 sampai 1939, mentransformasi sistem ekonominya besar-besaran hingga tak bisa dikenali lagi

bergerak mantap ke arah sosialisme. Sekalipun sekarang ini kita telah melihat bentuk baru perbudakan muncul di depan mata kita, kita sepenuhnya melupakan peringatan ini, sehingga kita hampir-hampir tidak menyadari bahwa kedua hal ini berhubungan.²

Ihwal seberapa tajam keterputusan yang telah ditimbulkan oleh perkembangan modern menuju sosialisme, bukan saja dengan masa yang baru berlalu tetapi juga dengan seluruh evolusi peradaban Barat, menjadi lebih jelas jika kita memandangnya bukan hanya dengan latar belakang abad ke-19, tetapi di dalam perspektif sejarah yang lebih panjang. Kita dengan cepat sedang meninggalkan bukan hanya pandangan-pandangan Cobden dan Bright, Adam Smith dan Hume, atau bahkan Locke dan Milton, tetapi juga meninggalkan karakteristik terpenting peradaban Barat, karakteristik yang tumbuh dari fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Kekristenan dan oleh orang Yunani dan orang Romawi. Bukan hanya liberalisme abad ke-18 dan ke-19, tetapi juga individualisme dasar yang diwariskan kepada kita dari Erasmus dan Montaigne, dari Cicero dan Tacitus, Perikles dan Thusydides, secara progresif ditinggalkan.

Sang pemimpin Nazi yang menggambarkan revolusi Nasional-Sosialis sebagai gerakan yang melawan Renaisans telah tanpa sengaja berkata dengan benar. Revolusi ini adalah langkah yang penting dan menentukan dalam menghancurkan peradaban yang telah dibangun manusia modern sejak zaman Renaisans, yang khususnya merupakan peradaban individualis. Individualisme dewasa ini telah menjadi nama buruk, dan istilah ini dihubungkan

2 Berbagai peringatan yang lebih mutakhir pun, yang telah terbukti sangat benar, hampir seluruhnya terlupakan. Belumlah 30 tahun berlalu sejak Mr. Hilaire Belloc, dalam sebuah buku yang menjelaskan lebih banyak tentang apa yang telah terjadi sejak saat itu di Jerman daripada kebanyakan karya yang ditulis setelah peristiwa itu, menerangkan bahwa “doktrin sosialis tentang masyarakat Kapitalis menghasilkan hal ketiga, yang berbeda dari kedua hal yang melahirkannya— yaitu, Negara Budak” (*The Servile State*, 1913, edisi ketiga, 1927, hlm. xiv).

dengan egotisme dan keserakahan. Tetapi individualisme yang sedang kita bicarakan, yang bertolakbelakang dengan sosialisme dan semua bentuk lain kolektivisme, tidak berkaitan langsung dengan egotisme dan keserakahan. Hanya secara bertahap di sepanjang buku ini kita akan dapat menjelaskan kontras yang ada di antara kedua prinsip yang berlawanan ini. Tetapi fitur-fitur terpenting individualisme yang dibentuk dari elemen-elemen yang disediakan oleh Kekristenan dan filsafat klasik dari zaman kuno, pertama kali sepenuhnya dikembangkan selama Renaisans dan sejak itu telah tumbuh dan menyebar ke dalam apa yang kita kenal sebagai peradaban Barat. Fitur-fitur individualisme itu adalah: penghargaan terhadap manusia *sebagai* manusia, yakni pengakuan terhadap pandangan dan citarasanya sendiri sebagai hal-hal agung di dalam wilayahnya sendiri, betapapun sempit batas-batas wilayahnya itu, dan kepercayaan bahwa manusia perlu mengembangkan berbagai bakat dan kecondongan alamiah individual mereka. “Kebebasan” dan “kemerdekaan” kini adalah kata-kata yang sangat rusak ketika digunakan dan disalahgunakan, sehingga orang merasa ragu ketika mau menggunakan keduanya untuk mengungkapkan ideal-ideal yang terdapat dalam makna kata-kata tersebut pada zaman tersebut. Mungkin toleransi adalah satu-satunya kata yang masih memelihara makna penuh dari prinsip yang terus naik daun selama keseluruhan kurun ini, yang baru belakangan ini kembali merosot nilainya, dan lenyap sama sekali seiring dengan bangkitnya negara totalitarian.

Transformasi bertahap, dari sistem hierarkis yang diorganisasi secara kaku menjadi sistem di mana manusia dapat sedikitnya mencoba untuk membentuk kehidupan mereka sendiri, di mana manusia mendapatkan kesempatan untuk mengetahui dan memilih di antara berbagai bentuk kehidupan yang berbeda-beda, terhubung erat dengan pertumbuhan perdagangan. Dari kota-kota perdagangan di Italia Utara, pandangan baru tentang kehidupan menyebar bersama perdagangan ke barat dan ke utara, melalui Prancis dan barat-daya Jerman ke Negeri-Negeri Rendah (*Low Countries*) dan Kepulauan Britania, dan berakar

kokoh di tempat-tempat di mana tidak ada kekuatan politis totalitarian yang dapat menindasnya. Di Negeri-Negeri Rendah dan Britania, pandangan baru ini untuk waktu yang lama mengalami perkembangan terpenuh, dan untuk pertama kalinya memiliki kesempatan tumbuh dengan bebas, dan untuk menjadi fondasi kehidupan sosial dan politis negeri-negeri ini. Dan dari sana, pada akhir abad ke-17, pandangan baru ini kembali mulai menyebar dalam bentuk yang lebih matang ke Barat dan ke Timur, ke Dunia Baru dan ke pusat benua Eropa, di mana perang yang menghancurkan dan penindasan politis telah menenggelamkan pandangan ini sehingga tidak bisa berkembang.³

Sepanjang periode modern sejarah Eropa, arah umum perkembangan sosial adalah membebaskan setiap individu dari ikatan-ikatan yang telah mengikatnya pada adat istiadat dan hal-hal tradisional atau cara-cara yang diresepkan sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan biasa. Keinsafan dan kesadaran bahwa usaha-usaha yang spontan dan bebas kontrol yang dilakukan setiap individu dapat menghasilkan tata kegiatan ekonomi yang rumit, baru bisa muncul setelah perkembangan ini membuat sejumlah kemajuan. Elaborasi berikut dari suatu argumen yang konsisten, yang mendukung kebebasan ekonomi, adalah hasil atau perolehan dari pertumbuhan bebas kegiatan ekonomi, yang merupakan hasil sampingan dari kebebasan politik yang tidak dirancang dan tidak terduga sebelumnya.

Mungkin hasil terbesar dari pembebasan energi individu dari rantai pengekangannya adalah pertumbuhan sains secara menakjubkan, yang mengikuti derap maju kebebasan individu dari Italia ke Inggris dan ke kawasan-kawasan lebih jauh. Bahwa kemampuan manusia untuk menemukan sesuatu yang baru tidaklah kurang dalam periode-periode sebelumnya diperlihatkan

3 Yang paling menentukan dari perkembangan ini, yang penuh dengan berbagai akibat yang belum juga hilang hingga sekarang, adalah penaklukan dan penghancuran sebagian kalangan borjuis Jerman oleh para penguasa teritorial pada abad ke-15 dan ke-16.

oleh banyak mainan anak-anak yang serba otomatis dan sangat kreatif, dan peralatan mekanik lain yang dikonstruksi sementara teknik industri masih tetap statis, dan oleh perkembangan di dalam beberapa industri yang tidak mengalami kontrol pembatasan, seperti pertambangan atau industri pembuatan jam mekanik. Tetapi sedikit upaya untuk tiba pada berbagai penemuan mekanik yang dapat digunakan dalam industri yang lebih luas, yang beberapa di antaranya telah luar biasa maju, dengan cepat ditindas, dan keinginan untuk mendapatkan pengetahuan dihambat, selama pandangan-pandangan yang dominan dipaksakan untuk mengikat semua orang: berbagai macam kepercayaan mayoritas besar mengenai apa yang benar dan apa yang pantas diizinkan menjegal jalan para individu inovator. Hanya ketika kebebasan industrial membuka jalan ke penggunaan secara bebas pengetahuan baru, hanya semenjak segala sesuatu boleh dicoba—asal orang mau membiayainya dengan risiko sendiri—dan, harus ditambahkan, hanya jika semua ini dapat dilakukan sesering mungkin oleh orang-orang yang berada di luar otoritas resmi yang dipercayakan tugas mengembangkan pembelajaran, barulah sains mampu membuat langkah-langkah besar yang dalam 150 tahun terakhir ini telah mengubah wajah dunia.

Seringkali benar bahwa kodrat peradaban kita terlihat lebih jelas oleh musuh-musuhnya ketimbang oleh kebanyakan sahabatnya: “masalah permanen yang dihadapi Barat, pemberontakan individu terhadap spesies,” sebagaimana digambarkan seorang totalitarian abad ke-19, Auguste Comte, sesungguhnya adalah kekuatan yang telah membangun peradaban kita. Apa yang telah ditambahkan abad ke-19 kepada individualisme kurun sebelumnya hanyalah sekadar membuat semua kelas sadar akan kebebasan, untuk mengembangkan secara sistematis dan berkesinambungan apa yang sebelumnya telah tumbuh secara tak teratur dan tak konsisten, dan untuk menyebarkan dari Inggris dan Belanda ke sebagian besar Benua Eropa.

Hasil pertumbuhan ini melampaui semua harapan. Setiap kali penghalang terhadap penggunaan bebas kecerdasan manusia

disingkirkan, maka manusia dengan cepat menjadi mampu memenuhi keinginan mereka di dalam banyak bidang yang terus bertambah luas. Dan walaupun standar yang terus meningkat itu dengan cepat bermuara pada penemuan noda-noda sangat gelap di dalam masyarakat, noda-noda yang tidak lagi sedia ditolerir manusia, mungkin sekali tidak ada kelas yang tidak mendapatkan keuntungan besar dari kemajuan umum itu. Kita tak dapat menghargai pertumbuhan yang mengejutkan ini setinggi yang sepatutnya jika kita mengukurnya dengan standar kita masa kini, yang sebetulnya adalah hasil dari pertumbuhan ini, standar yang kini membuat banyak cacat tampak jelas. Untuk menghargai apa maksud ini semua bagi orang yang dahulu mengambil bagian di dalamnya, kita harus mengukurnya dengan harapan dan keinginan yang dipegang manusia pada waktu hal itu dimulai: dan tidak ada keraguan bahwa keberhasilannya telah melampaui impian-impian terliar manusia, bahwa pada permulaan abad ke-20 manusia pekerja di dunia Barat telah mencapai peringkat kenyamanan material, keamanan, dan kemerdekaan pribadi yang 100 tahun sebelumnya tampak hampir mustahil.

Apa yang di masa depan akan mungkin sekali tampak sebagai akibat yang paling signifikan dan paling berjangkauan jauh adalah suatu perasaan baru bahwa manusia berkuasa atas nasib mereka sendiri, kepercayaan pada adanya kemungkinan-kemungkinan tak terbatas untuk meningkatkan dan memperbaiki nasib mereka sendiri, perasaan dan kepercayaan pada diri manusia yang ditimbulkan oleh sukses yang telah dicapainya. Dengan sukses ini, ambisi pun tumbuh, dan setiap manusia berhak untuk ambisius. Apa yang sebelumnya merupakan janji yang inspiratif kini tampaknya tak lagi cukup, angka kemajuan jauh terlalu lambat; dan prinsip-prinsip yang telah memungkinkan kemajuan ini di masa lampau kini mulai dipandang sebagai hambatan bagi kemajuan yang lebih cepat, yang harus segera disingkirkan, ketimbang sebagai kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pemeliharaan dan pengembangan atas apa yang telah dicapai sebelumnya.

Tidak ada sesuatu pun di dalam prinsip-prinsip dasar liberalisme yang dapat menjadikannya suatu credo yang statis; tidak ada aturan-aturan yang kaku, yang dipasang mati sekali untuk selamanya. Prinsip dasar, bahwa dalam menata urusan-urusan kita, kita harus membuat dan menggunakan sebanyak mungkin kekuatan-kekuatan spontan masyarakat, dan memakai sesedikit mungkin tekanan dan kekerasan, dapat diterapkan dalam ragam yang tak terbatas. Secara khusus, ada banyak perbedaan antara menciptakan dengan hati-hati suatu sistem yang di dalamnya kompetisi akan berjalan dengan sebisa mungkin menguntungkan, dan menerima dengan pasif lembaga-lembaga yang sudah ada. Mungkin tidak ada hal lain apa pun yang lebih merusak nama baik prinsip liberal daripada penekanan yang kaku dari beberapa orang liberal atas prinsip praktis tertentu yang kurang terperinci, khususnya prinsip *laissez-faire*. Namun dalam arti tertentu hal ini perlu dan tak dapat dielakkan. Karena banyak sekali kepentingan orang yang dapat menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tertentu akan memberikan keuntungan yang langsung dan jelas pada sebagian orang, sementara kerusakan yang ditimbulkannya tidak bersifat langsung dan sukar dilihat, hanya aturan kakulah yang bisa efektif. Dan karena dukungan kuat pada kebebasan industrial telah mapan tanpa keraguan, godaan untuk menyajikannya sebagai aturan yang tidak mengenal kekecualian senantiasa terlalu kuat untuk dilawan.

Tetapi dengan sikap semacam ini, yang diperlihatkan oleh banyak orang yang memopulerkan doktrin liberal, nyaris tak terhindarkan bahwa, sekali posisi mereka ditembus pada beberapa titik, seluruh bangunan pun runtuh. Posisi ini lebih jauh diperlemah oleh kemajuan yang lambat, yang tak terhindarkan, dari kebijakan yang bertujuan memperbaiki secara bertahap struktur kelembagaan suatu masyarakat merdeka. Kemajuan ini bergantung pada pertumbuhan pemahaman kita atas kekuatan-kekuatan masyarakat, dan kondisi-kondisi yang paling menguntungkan bagi bekerjanya kekuatan-kekuatan itu dalam cara yang dikehendaki. Karena tugasnya adalah untuk

membantu, dan di mana perlu melengkapi, berfungsinya kekuatan-kekuatan sosial itu, maka hal penting pertama adalah memahami kekuatan-kekuatan itu. Sikap orang liberal terhadap masyarakat adalah seperti sikap seorang pekebun yang merawat tanaman dan, supaya bisa menciptakan kondisi-kondisi yang paling menguntungkan bagi pertumbuhannya, harus mengetahui sebanyak mungkin strukturnya dan caranya berfungsi.

Tak ada orang waras yang meragukan bahwa aturan-aturan mentah yang dinyatakan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi abad ke-19 hanyalah suatu awal, bahwa kita masih harus belajar banyak, dan bahwa masih ada banyak sekali kemungkinan untuk membuat kemajuan-kemajuan di jalur yang sedang kita jalani. Tetapi kemajuan ini hanya dapat terjadi kalau kita makin mampu secara intelektual menguasai kekuatan-kekuatan yang akan kita gunakan. Ada banyak tugas yang sudah jelas, seperti penanganan sistem moneter, pencegahan atau pengendalian monopoli, dan tugas-tugas lain yang kurang jelas tetapi tak kurang penting, yang jumlahnya lebih besar lagi, yang harus dipikul di bidang-bidang lain, di mana tak diragukan lagi pemerintah-pemerintah memiliki kekuasaan besar untuk mendatangkan kebaikan atau keburukan; dan ada alasan yang cukup untuk berharap bahwa, dengan adanya pemahaman yang lebih baik atas permasalahan-permasalahan yang ada, kita suatu saat pasti dapat menggunakan kekuasaan ini dengan sukses.

Tetapi sementara gerak maju ke apa yang umumnya disebut aksi “positif” pada dasarnya lambat, dan sementara untuk mencapai kemajuan cepat liberalisme harus bergantung banyak pada peningkatan bertahap kekayaan yang telah dihasilkan oleh kebebasan, para pembela liberalisme dengan konstan harus bertarung melawan proposal yang mengancam kemajuan ini. Paham ini mulai dipandang sebagai suatu credo “negatif” karena paham ini dapat menawarkan kepada individu-individu tertentu tidak lebih daripada satu bagian kecil di dalam kemajuan bersama—suatu kemajuan yang makin dipandang sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dan tidak lagi diakui

sebagai hasil kebijakan yang memberi ruang kepada kebebasan. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan liberalisme sendiri menjadi penyebab kemundurannya. Karena sudah banyak sukses yang dicapai, orang semakin tidak ingin menenggang keburukan-keburukan yang masih ada, yang kini tampaknya tak terperikan dan tak perlu.



Akibat ketidaksabaran yang semakin meningkat terhadap lambatnya kemajuan kebijakan liberal, perasaan jengkel terhadap orang yang menggunakan fraseologi liberal dalam membela privilese yang antisosial, dan ambisi tanpa batas yang kelihatannya dibenarkan oleh kemajuan-kemajuan material yang sudah dicapai, maka menjelang permulaan abad ini kepercayaan terhadap prinsip-prinsip liberalisme makin ditinggalkan. Apa yang telah diraih semakin dipandang sebagai sesuatu yang permanen yang telah terlindungi dan yang tak bisa hancur lagi, yang telah dicapai sekali dan untuk selamanya. Mata orang jadi tertuju pada permintaan-permintaan baru, yang pemenuhannya dalam waktu cepat tampak terhalangi oleh prinsip-prinsip lama yang masih kuat dianut. Makin meluas diterima bahwa kemajuan lebih jauh tak akan tercapai jika orang bergerak di jalur lama di dalam struktur umum yang dulu memungkinkan kemajuan dicapai, kecuali kalau orang melakukan perombakan menyeluruh atas masyarakat. Kini masalahnya bukan lagi menambah atau mengembangkan mekanisme yang sudah ada, melainkan meninggalkan dan menggantikannya secara menyeluruh. Dan ketika harapan generasi baru terpusat pada sesuatu yang seluruhnya baru, perhatian dan pemahaman terhadap ihwal berfungsinya masyarakat yang ada dengan cepat merosot; dan dengan merosotnya pemahaman terhadap cara bekerjanya sistem bebas, kesadaran kita tentang hal apa saja yang bergantung pada sistem ini juga berkurang.

Di sini bukanlah tempatnya untuk mendiskusikan bagaimana

perubahan pandangan ini didorong oleh perpindahan yang tidak kritis ke berbagai persolan yang melanda masyarakat, bagaimana kebiasaan berpikir orang yang berkutat dengan masalah-masalah teknologis, bagaimana kebiasaan berpikir ilmuwan alam dan insinyur, bagaimana hal-hal ini pada waktu yang sama condong mendiskreditkan hasil-hasil kajian masa lampau tentang masyarakat yang tidak sejalan dengan prasangka-prasangka mereka, dan memaksakan ideal-ideal pengorganisasian ke lingkup masalah yang tidak cocok dengan ideal-ideal ini.⁴ Yang ingin kita tunjukkan di sini dengan prihatin adalah betapa menyeluruhnya perubahan sikap kita terhadap masyarakat, meskipun perubahan ini berlangsung perlahan dan dalam tahap-tahap yang hampir tak kelihatan. Apa yang pada setiap tahap proses perubahan ini tampak sebagai perbedaan kecil saja, dalam akibat kumulatifnya telah menghasilkan perbedaan mendasar antara sikap liberal lama terhadap masyarakat dan pendekatan masa kini terhadap masalah-masalah sosial. Perubahan ini sama dengan pembalikan menyeluruh atas perkembangan yang telah kita rintis, suatu tindakan meninggalkan secara total tradisi individualis yang telah menciptakan peradaban Barat.

Menurut pandangan yang kini mendominasi, pertanyaannya bukan lagi bagaimana kita dapat menggunakan secara sebaik mungkin kekuatan-kekuatan spontan yang ada dalam masyarakat merdeka. Akibatnya kita telah berusaha membuang semua kekuatan yang telah menghasilkan berbagai perkembangan yang tak terlihat sebelumnya dan menggantikan mekanisme pasar yang netral dan anonim dengan pengendalian kolektif dan “sadar” atas semua kekuatan sosial ke arah sasaran-sasaran yang sudah dipilih secara sengaja. Tidak ada yang bisa menunjukkan perbedaan ini lebih baik daripada posisi ekstrim yang diambil dalam sebuah buku yang dipuji luas, buku yang menawarkan program yang disebut “perencanaan untuk kebebasan”, yang masih akan kita

4 Penulis telah mencoba menelusuri awal perkembangan ini dalam dua seri artikel mengenai “Scientism and the Study of Society” dan “The Counter-Revolution of Science” yang terbit di *Economica*, 1941-4.

beri komentar lebih dari sekali.

Kita tidak pernah harus membangun dan mengarahkan [tulis Dr. Karl Mannheim] seluruh sistem alam seperti yang terpaksa kita lakukan kini terhadap masyarakat.... Manusia semakin cenderung untuk mengatur keseluruhan kehidupan sosialnya, meskipun belum pernah mencoba untuk menciptakan suatu dunia kedua.⁵

Perubahan dalam perkembangan ide-ide ini signifikan karena berlangsung persis seirama dengan pembalikan arah dalam pergerakan ide-ide di dunia. Lebih dari 200 tahun lamanya, ide-ide Inggris telah menyebar ke timur. Kekuasaan berdasarkan kebebasan yang telah dicapai di Inggris tampaknya ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh dunia. Kira-kira pada 1870 kejayaan ide-ide ini mungkin sekali telah meluas sampai ke kawasan-kawasan paling timur. Sejak itu, kejayaan ide-ide kebebasan itu memudar, dan serangkaian ide yang berbeda, tidak sungguh-sungguh baru bahkan sangat tua, mulai berkembang dan menyebar dari Timur. Inggris kehilangan kepemimpinan intelektualnya di wilayah sosial dan politik, dan menjadi negeri pengimpor ide-ide. Selama 60 tahun selanjutnya, Jerman menjadi pusat yang darinya ide-ide, yang ditakdirkan untuk menguasai dunia abad ke-20, menyebar ke timur dan ke barat. Entah Hegel atau Marx, List atau Schmoller, Sombart atau Mannheim, entah sosialisme dalam bentuknya yang lebih radikal atau semata-mata “pengorganisasian” atau “perencanaan” dari jenis yang kurang radikal, pendek kata ide-ide Jerman di mana-mana dengan cepat diimpor dan lembaga-lembaga Jerman ditiru. Meskipun kebanyakan ide baru itu, khususnya sosialisme, tidak berasal-usul di Jerman, sesungguhnya ide-ide itu disempurnakan di Jerman, dan, selama perempatan terakhir abad ke-19 dan perempatan pertama abad ke-20, ide-ide itu mencapai

5 *Man and Society in an Age of Reconstruction*, 1940, hlm. 175.

perkembangan terpenuhinya. Kini sering dilupakan bahwa selama periode ini, dalam perkembangan teori dan praktik sosialisme, kepemimpinan Jerman sangat luas; bahwa, satu generasi sebelum sosialisme menjadi isu serius di negeri ini, Jerman telah memiliki sebuah partai sosialis besar di dalam parlemennya, dan bahwa sampai belum lama ini perkembangan doktrin sosialisme hampir seluruhnya berlangsung di Jerman dan Austria, sehingga bahkan dewasa ini diskusi di Rusia pun kebanyakan berlangsung mulai pada titik di mana orang Jerman telah berhenti. Kebanyakan orang Inggris sosialis masih belum menyadari bahwa mayoritas permasalahan yang baru mulai mereka temukan sebetulnya telah didiskusikan sepenuhnya oleh para sosialis Jerman jauh sebelumnya.

Pengaruh intelektual yang mampu disebarakan para pemikir Jerman selama periode ini di seluruh dunia ditopang bukan hanya oleh kemajuan besar material negara Jerman, tetapi bahkan lebih lagi oleh reputasi luar biasa yang telah didapatkan para pemikir dan saintis Jerman selama 100 tahun sebelumnya, ketika Jerman sekali lagi menjadi anggota integral bahkan terkemuka dari peradaban umum Eropa. Tetapi keadaan ini segera membantu persebaran dari Jerman ide-ide yang diarahkan untuk melawan fondasi-fondasi peradaban itu. Orang Jerman sendiri—atau setidaknya di antara mereka yang menyebarkan ide-ide ini—menyadari sepenuhnya konflik ini: jauh sebelum kelahiran Nazi, apa yang merupakan warisan bersama peradaban Eropa bagi mereka telah lama berubah menjadi peradaban “Barat”, di mana kata “Barat” tidak lagi digunakan dalam pengertian lama “*Occident*” (“belahan barat Bumi”), tetapi menjadi bermakna sebelah barat sungai Rhein. “Barat” dalam arti ini adalah Liberalisme dan Demokrasi, Kapitalisme dan Individualisme, Perdagangan Bebas dan setiap bentuk Internasionalisme atau cinta perdamaian.

Tetapi terlepas dari ketidaksenangan yang kentara dalam diri semakin banyak orang Jerman terhadap ideal-ideal Barat yang “dangkal” itu, atau mungkin justru dikarenakan ketidaksenangan

itu, orang Barat terus saja mengimpor ide-ide Jerman dan bahkan terbujuk untuk percaya bahwa berbagai keyakinan mereka sebelumnya hanyalah pembenaran-pembenaran semata atas berbagai kepentingan serakah mereka, bahwa Perdagangan Bebas adalah sebuah doktrin yang diciptakan untuk mengembangkan berbagai kepentingan Britania, dan bahwa ideal-ideal politik yang disumbangkan Inggris kepada dunia ini telah ketinggalan zaman dan merupakan sesuatu yang memalukan.



BAB 2

UTOPIA AGUNG

Yang selalu membuat negara jadi neraka di bumi ini adalah manusia yang justru ingin mengubahnya jadi surga baginya.

F. Hoelderlin

BAHWA sosialisme telah menggantikan liberalisme sebagai doktrin yang dipegang mayoritas besar orang progresif tidak cuma berarti bahwa orang telah melupakan berbagai peringatan yang telah disampaikan oleh para pemikir besar liberal masa lampau mengenai konsekuensi kolektivisme. Hal ini terjadi karena mereka terbujuk oleh hal-hal yang berlawanan dari apa yang telah diprediksikan orang-orang ini. Yang luar biasa adalah bahwa sosialisme yang sama, yang bukan saja sudah dikenali sejak tahap dini sebagai ancaman terberat bagi kebebasan, tetapi juga secara terang-terangan bermula sebagai reaksi terhadap liberalisme Revolusi Prancis, diterima umum di bawah bendera kebebasan. Jarang diingat kini bahwa sosialisme pada awalnya terang-terangan otoritarian. Para penulis Prancis yang telah meletakkan fondasi sosialisme modern tak ragu bahwa ide-ide mereka dapat dipraktikkan hanya oleh suatu pemerintahan diktatorial yang kuat. Bagi mereka, sosialisme berarti usaha untuk “mengakhiri revolusi” melalui reorganisasi yang terencana atas masyarakat berdasarkan kebijakan-kebijakan hierarkis dan pemaksaan dengan “kekuatan spiritual” yang menindas. Sejauh

mengenai kebebasan, para pendiri sosialisme sama sekali tidak menyembunyikan maksud-maksud mereka. Kebebasan berpikir bagi mereka adalah akar kejahatan masyarakat abad ke-19, dan salah seorang perencana modern, Saint-Simon, bahkan meramalkan bahwa orang-orang yang tidak menaati badan perencanaan yang diusulkannya akan “diperlakukan sebagai ternak”.

Baru di bawah pengaruh arus kuat demokratis yang mendahului revolusi 1848, sosialisme mulai mempersekutukan dirinya dengan kekuatan-kekuatan kebebasan. Tetapi dibutuhkan waktu lama bagi “sosialisme demokratis” untuk menundukkan berbagai kecurigaan terhadapnya yang timbul akibat masa lalunya. Tak seorang pun melihat sejelas de Tocqueville bahwa demokrasi sebagai lembaga yang pada intinya individualis berada dalam konflik yang tak dapat diperdamaikan dengan sosialisme:

Demokrasi memperluas wilayah kebebasan individu [dia mengatakan hal ini di tahun 1848], sosialisme membatasinya. Demokrasi melekatkan semua nilai yang mungkin kepada setiap orang; sosialisme membuat semua orang semata-mata sebagai alat yang dipekerjakan, hanya sebagai angka. Demokrasi dan sosialisme tidak memiliki kesamaan kecuali satu kata: kesetaraan. Tetapi perhatikan perbedaannya: sementara demokrasi memperjuangkan kesetaraan di dalam kebebasan, sosialisme mencari kesetaraan dalam kontrol dan penghambaan.¹

Untuk mengurangi kecurigaan ini dan untuk menempelkan pada dirinya motif politik terkuat itu, yakni, kehausan akan kebebasan, sosialisme mulai makin mengiming-imingkan janji akan “kebebasan baru”. Kedatangan sosialisme akan menjadi lompatan dari dunia pemenuhan kebutuhan ke dunia kebebasan.

1 “Discours prononcé à l’assemblée constituante le 12 Septembre 1848 sur la question du droit au travail.” *Œuvres complètes d’Alexis de Tocqueville*, vol. IX, 1866, hlm. 546.

Sosialisme akan membawa “kebebasan ekonomi”, yang tanpanya kebebasan politik yang sudah didapat “tak bernilai untuk dimiliki”. Hanya sosialisme yang dapat mewujudkan hasil pergumulan yang sudah lama untuk mendapatkan kemerdekaan, yang di dalamnya pencapaian kebebasan politik hanyalah langkah pertama.

Perubahan halus dalam makna yang diberikan kepada kata kebebasan supaya argumen ini terdengar masuk akal penting diperhatikan. Bagi para rasul agung kebebasan politik, kata ini berarti kebebasan dari penindasan, kebebasan dari kekuasaan sewenang-wenang orang lain, kebebasan dari ikatan-ikatan yang tidak memberikan pilihan kepada seorang individu kecuali ketaatan kepada perintah orang yang lebih tinggi yang mengikat dirinya. Namun kebebasan baru yang dijanjikan adalah kebebasan dari keharusan pemenuhan kebutuhan, kebebasan dari tekanan bermacam keadaan yang mau tak mau membatasi aneka ragam pilihan kita semua, meskipun bagi beberapa orang pembatasan ini lebih luas ketimbang orang lain. Sebelum orang betul-betul dapat bebas, “despotisme tuntutan kebutuhan fisik” harus dihancurkan, “berbagai hambatan sistem ekonomi” harus dikurangi.

Kebebasan dalam pengertian ini, tentu saja, hanyalah nama lain dari kekuasaan² atau kekayaan. Namun, kendatipun jnji-

-
- 2 Pencampuradukan yang khas antara kebebasan dan kekuasaan, yang akan kita temukan berulang kali di sepanjang diskusi ini, adalah subjek yang terlalu besar untuk dikaji secara menyeluruh di sini. Sama tuanya dengan sosialisme sendiri, kebebasan sangat erat terikat dengan kekuasaan sehingga hampir 70 tahun yang lampau seorang sarjana Prancis, yang mendiskusikan asal-usul pencampuradukan ini dalam Saint-Simonianisme, akhirnya tergiring untuk mengatakan bahwa teori tentang kebebasan ini “*est à elle seule tout le socialisme*”, “seluruhnya adalah sosialisme” (P. Janet, *Saint-Simon et le Saint-Simonisme*, 1878, hlm. 26, catatan). Adalah signifikan bahwa pembela paling eksplisit pencampuradukan ini adalah filsuf terkemuka sayap kiri Amerika, John Dewey, yang menurutnya “kebebasan adalah kekuasaan efektif untuk melakukan hal-hal tertentu” sehingga “tuntutan akan kebebasan adalah tuntutan akan kekuasaan” (“*Liberty and Social Control*”, *The Social*

janji kebebasan baru ini sering disertai dengan janji-janji yang tak bertanggungjawab tentang peningkatan kekayaan material dalam jumlah besar di dalam suatu masyarakat sosialis, kebebasan ekonomi yang diharapkan tidaklah berasal dari penaklukan absolut atas alam yang pelit itu. Janji ini sebenarnya adalah bahwa disparitas pilihan di antara orang-orang yang berbeda akan lenyap. Tuntutan akan kebebasan baru itu dengan demikian hanyalah nama lain bagi tuntutan lama atas penyebaran kekayaan yang setara. Tetapi nama baru itu memberikan kepada kalangan sosialis sebuah kata lain yang juga dipakai kalangan liberal, dan mereka sepenuhnya memanfaatkannya. Dan kendatipun kata ini digunakan dalam pengertian yang berbeda oleh kedua kubu itu, sedikit saja orang yang memperhatikan hal itu dan bahkan lebih sedikit lagi yang bertanya kepada diri mereka sendiri apakah kedua jenis kebebasan yang dijanjikan itu benar-benar dapat digabungkan.

Janji akan kebebasan yang lebih besar tak pelak lagi telah menjadi salah satu senjata paling efektif propaganda sosialis, dan kepercayaan bahwa sosialisme akan dapat mendatangkan kebebasan adalah kepercayaan yang murni dan jujur. Tetapi hal ini hanya akan memperparah tragedi jika terbukti bahwa apa yang dijanjikan kepada kita sebagai Jalan Menuju Kebebasan ternyata adalah Jalan Bebas Hambatan Ke Perbudakan. Tak terbantahkan lagi, janji akan kebebasanlah yang menyebabkan lebih banyak orang liberal tertarik menempuh jalan sosialis, dan yang membuat mereka tak melihat konflik yang ada di antara prinsip-prinsip dasar sosialisme dan liberalisme, serta yang sering memungkinkan kalangan sosialis merongrong nama partai kebebasan yang lama. Sosialisme diyakini oleh sebagian besar cendekiawan sebagai penerus tradisi liberal: karena itu tidaklah mengherankan bahwa mereka sulit percaya bahwa sosialisme justru membawa orang ke dalam keadaan yang bertentangan dengan kebebasan.



Akan tetapi, dalam tahun-tahun belakangan ini, ketakutan lama akan adanya konsekuensi-konsekuensi tak terduga dari sosialisme telah sekali lagi disuarakan dengan lantang oleh bagian-bagian masyarakat yang paling tak disangka-sangka. Pengamat demi pengamat, kendatipun mendekati pokok bahasan ini dengan harapan yang berlawanan, telah terkesan oleh keserupaan luar biasa dalam banyak hal antara kondisi-kondisi di bawah “fasisme” dan “komunisme”. Sementara kalangan “progresif” di negeri ini dan di tempat lain masih menipu diri sendiri bahwa komunisme dan fasisme menampilkan kutub-kutub yang berlawanan, semakin banyak orang mulai bertanya pada diri sendiri apakah tirani-tirani baru ini bukannya dihasilkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sama. Bahkan orang komunis sedikit banyak terguncang oleh testimoni-testimoni dari orang semacam Mr. Max Eastman, sahabat lama Lenin, yang terpaksa mengakui bahwa “bukannya bertambah baik, Stalinisme bahkan lebih buruk daripada fasisme, lebih kejam, lebih barbar, lebih tak adil, lebih tak bermoral, lebih antidemokratis, tak tergantikan oleh harapan atau penyesalan apa pun”, dan bahwa ini “lebih baik digambarkan sebagai suprafasis”; dan ketika kita menemukan penulis yang sama mengakui bahwa “Stalinisme adalah sosialisme, dalam arti bahwa Stalinisme adalah akibat politik yang niscaya, walaupun tak terduga sebelumnya, dari nasionalisasi dan kolektivisasi yang dia andalkan sebagai bagian dari rencananya membangun masyarakat tanpa kelas”,³ kesimpulannya jelas mendapatkan makna yang lebih luas.

Kasus Mr. Eastman mungkin paling luar biasa, namun dia sama sekali bukanlah orang pertama atau satu-satunya pengamat yang simpatik pada eksperimen Rusia, yang kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan serupa. Beberapa tahun sebelumnya Mr. W.H. Chamberlin, yang selama 12 tahun berada di Rusia

3 Max Eastman, *Stalin's Russia and the Crisis of Socialism*, 1940, hlm. 82.

sebagai seorang wartawan Amerika telah melihat semua ideal-idealnya dirontokkan, meringkaskan kesimpulan bermacam kajiannya di sana serta di Jerman dan Italia dalam pernyataan bahwa “sosialisme jelas telah membuktikan, sedikitnya pada awalnya, bahwa dirinya BUKAN jalan menuju kebebasan, tetapi menuju kediktatoran dan kontra-kediktatoran, menuju perang saudara yang paling sengit. Sosialisme yang bisa didapatkan dan dipertahankan oleh sarana-sarana demokratis sudah jelas hanya ada di dunia utopia.”⁴ Begitu juga, seorang penulis Britania, Mr. F.A. Voigt, setelah sekian tahun mengadakan pengamatan seksama atas berbagai perkembangan di Eropa sebagai seorang wartawan asing, menyimpulkan bahwa “Marxisme telah bermuara pada Fasisme dan Nasional-Sosialisme, karena, dalam segala hal dasarnya, Marxisme adalah Fasisme dan Nasional-Sosialisme.”⁵ Dan Dr. Walter Lippmann tiba pada keyakinan bahwa

Generasi kita kini sedang belajar dari pengalaman tentang apa yang terjadi ketika orang mundur dari kebebasan lalu masuk ke dalam suatu pengorganisasian koersif atas urusan-urusan mereka. Meskipun mereka menjanjikan kepada diri mereka sendiri suatu kehidupan yang lebih berlimpah, mereka dalam praktiknya harus melepaskannya; ketika pengarahan terorganisasi meningkat, keanekaragaman tujuan digantikan oleh keseragaman. Beginilah nasib masyarakat terencana dan prinsip otoritarian di dalam perkara-perkara insani.⁶

Banyak lagi pernyataan serupa, dari orang-orang yang berada dalam posisi untuk menilai, yang dapat dipilihkan dari berbagai publikasi dalam tahun-tahun terakhir, khususnya publikasi dari orang-orang yang, sebagai warganegara dari negeri-negeri yang

4 W. H. Chamberlin, *A False Utopia*, 1937, hlm. 202-203.

5 F. A. Voigt, *Unto Caesar*, 1939. Hlm. 95.

6 *Atlantic Monthly*, November 1936, hlm. 552.

sekarang totalitarian, telah menjalani masa transformasi dan telah dipaksa oleh pengalaman mereka untuk merevisi banyak kepercayaan yang dulu disukai. Sebagai satu contoh lagi, kita akan mengutip seorang penulis Jerman yang mengungkapkan kesimpulan yang sama, yang mungkin lebih benar ketimbang kesimpulan orang-orang yang sudah dikutip sebelumnya.

Keruntuhan menyeluruh kepercayaan akan tersedianya kebebasan dan kesetaraan melalui Marxisme [tulis Mr. Peter Drucker⁷] telah memaksa Rusia menempuh jalan yang sama, yang telah dan sedang ditempuh Jerman, menuju ke suatu masyarakat totalitarian, yang sepenuhnya negatif, non-ekonomi, yang dicirikan oleh ketiadaan kebebasan dan ketidaksetaraan. Bukan bahwa komunisme dan fasisme pada hakikatnya sama. Fasisme adalah tahap yang dicapai setelah komunisme terbukti suatu ilusi, dan telah terbukti bahwa fasisme juga adalah ilusi di Rusia Stalinis dan di Jerman pra-Hitler.

Tak kurang pentingnya adalah sejarah intelektual para pemimpin Nazi dan Fasis. Setiap orang yang memperhatikan pertumbuhan bermacam gerakan ini di Italia⁸ atau di Jerman sangat terkesan oleh jumlah orang terkemuka, dari Mussolini dan seterusnya (dan tak terkecuali Laval dan Quisling), yang memulai karir sebagai sosialis lalu berakhir sebagai Fasis atau Nazi. Apa yang benar bagi para pemimpin bahkan lebih benar lagi bagi anggota-anggota biasa gerakan ini. Mudah-mudahan seorang komunis muda berubah menjadi Nazi atau sebaliknya sudah umum diketahui di Jerman, dan sangat diketahui para juru propaganda kedua partai. Banyak dosen universitas dalam negeri

7 *The End of Economic Man*, 1939, hlm. 230.

8 Sebuah uraian yang mencerahkan mengenai sejarah intelektual dari banyak pemimpin fasis dapat ditemukan dalam R. Michels (seorang fasis eks-Marxis), *Sozialismus und Faschismus*, Munich 1925, jilid 2, hlm. 264-266, dan 311-312.

ini selama 1930-an telah melihat mahasiswa-mahasiswa Inggris dan Amerika pulang dari Benua Eropa, tak yakin apakah mereka komunis atau Nazi, tetapi sangat yakin dalam satu hal, bahwa mereka membenci peradaban liberal Barat.

Tentu benar bahwa di Jerman sebelum 1933 dan di Italia sebelum 1922 kalangan komunis dan Nazi atau Fasis lebih sering berbenturan satu sama lain, ketimbang dengan partai-partai lain. Mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang berpikiran sama, dan menyimpan kebencian satu sama lain, yang masing-masing mereka pandang sebagai bidah. Tetapi praktik mereka memperlihatkan bahwa mereka sangat erat berhubungan. Bagi keduanya, musuh yang sebenarnya, yakni orang yang tak memiliki kesamaan apa pun dengan mereka, dan yang mereka tahu tidak dapat mereka yakinkan, adalah orang liberal jenis lama. Sementara bagi Nazi, orang komunis—dan bagi komunis, orang Nazi—dan bagi keduanya, orang sosialis—adalah orang-orang baru, terbuat dari bahan mentah yang cocok, yang potensial mereka rekrut, kendatipun mereka mendengarkan nabi-nabi palsu; mereka keduanya tahu, bahwa tidak ada kompromi antara mereka dan orang-orang yang sungguh percaya pada kebebasan individu.

Supaya hal ini tidak diragukan oleh orang yang sudah terpengaruh oleh propaganda resmi dari kedua belah pihak, baiklah saya mengutip satu pernyataan lagi dari seorang yang memiliki otoritas yang tak seharusnya dicurigai. Dalam sebuah artikel yang judulnya signifikan, “The Rediscovery of Liberalism”, Prof. Eduard Heimann, salah seorang pemimpin sosialisme religius Jerman, menulis:

Hitlerisme memproklamasikan diri sendiri baik sebagai demokrasi sejati maupun sebagai sosialisme sejati, dan kebenaran yang menakutkan adalah bahwa klaim-klaim semacam itu ada benarnya—memang kebenarannya sangat kecil, tetapi bagaimana pun juga cukup untuk difungsikan sebagai basis bagi distorsi-distorsi fantastis semacam itu. Bahkan

Hitlerisme sampai mengklaim berperan sebagai pelindung Kekristenan, dan kebenaran yang menakutkan adalah bahwa bahkan penyalahafsiran habis-habisan ini membuat sebagian orang percaya. Tetapi ada satu fakta yang tampak dengan jelas sejelas-jelasnya di dalam semua kerancuan ini: Hitler tak pernah mengklaim mewakili liberalisme sejati. Liberalisme memiliki kekhasan sebagai doktrin yang paling dibenci Hitler.⁹

Harus ditambahkan bahwa kebencian ini hampir tidak muncul dalam kenyataan hanya karena, pada waktu Hitler mulai berkuasa, liberalisme sebetulnya telah mati di Jerman. Dan yang telah membunuhnya adalah sosialisme.



Walaupun bagi banyak orang, yang telah memperhatikan langsung transisi dari sosialisme ke fasisme, koneksi di antara kedua sistem ini telah tampak semakin jelas, di negeri ini mayoritas penduduk masih percaya bahwa sosialisme dan kebebasan dapat dikombinasikan. Memang kebanyakan kaum sosialis di sini masih percaya sekali pada ideal liberal mengenai kebebasan, dan mereka akan menarik diri jika mereka menjadi yakin bahwa realisasi program mereka akan menyebabkan kehancuran kebebasan. Masih sangat sedikit masalah yang terlihat, masih sangat mudah ideal-ideal yang paling bertolak belakang hidup bersama, sehingga kita masih dapat mendengar kontradiksi dalam terminologi seperti “sosialisme individualis”

9 *Social Research* (New York), vol. viii, no. 4, November 1941. Dalam hubungan ini, patut diingat bahwa, apa pun alasannya, Hitler berpikir adalah menguntungkan untuk mengumumkan dalam salah satu pidato publiknya di akhir Februari 1941 bahwa “pada dasarnya Nasional-Sosialisme dan Marxisme adalah sama.” (Bdk. *The Bulletin of International News*, yang diterbitkan oleh Royal Institute of International Affairs, vol. xviii, no. 5, hlm. 269).

didiskusikan dengan serius. Jika demikianlah keadaan pikiran yang membuat kita hanyut ke dalam suatu dunia baru, tak ada yang lebih mendesak ketimbang bahwa kita harus benar-benar memeriksa arti penting evolusi yang telah terjadi di tempat lain. Meskipun kesimpulan-kesimpulan kita akan menegaskan kekhawatiran yang telah diungkapkan orang lain, alasan-alasan mengapa perkembangan ini tidak boleh dianggap kebetulan tak akan tampak tanpa kajian penuh dan menyeluruh atas aspek-aspek pokok transformasi kehidupan sosial ini. Banyak orang tidak akan percaya bahwa sosialisme demokratis, yang sudah menjadi utopia agung beberapa generasi, bukan hanya tak dapat dicapai, tetapi bahwa usaha keras ke arah itu justru akan menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda, sehingga sedikit saja orang yang kini menginginkannya akan siap menerima berbagai macam konsekuensinya, kecuali bila kaitannya dibentangkan dalam semua seginya.

BAB 3

INDIVIDUALISME DAN KOLEKTIVISME

Kaum sosialis percaya pada dua hal yang mutlak berbeda dan mungkin bahkan bertolak belakang: kebebasan dan organisasi.

Elie Halévy

SEBELUM kita dapat membahas problem utama kita, masih ada satu hambatan yang harus diatasi. Suatu kerancuan yang bertanggungjawab besar menghanyutkan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan siapa pun, harus dibereskan.

Kerancuan ini sebagian besar berkaitan dengan konsep sosialisme itu sendiri. Konsep ini bisa semata berarti, dan sering digunakan untuk mendeskripsikan, ideal-ideal berupa keadilan sosial, kesetaraan yang lebih besar, dan rasa aman yang merupakan tujuan akhir sosialisme. Tetapi konsep ini juga berarti metode khusus yang oleh kebanyakan orang sosialis diharapkan dapat dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan itu, dan yang dipandang banyak orang yang berkompeten sebagai satu-satunya metode yang bisa dengan sepenuhnya dan secepatnya dipakai mencapai tujuan-tujuan itu. Dalam arti ini sosialisme berarti penghilangan setiap usaha pribadi, kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, dan penciptaan sistem “ekonomi terencana” yang di dalamnya pewiraswasta yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan digantikan oleh badan perencanaan pusat.

Banyak orang menyebut diri mereka sosialis meskipun mereka hanya peduli pada yang pertama, pada konsep sosialisme, dan bukan pada metode sosialis; dan mereka secara fanatik percaya pada tujuan-tujuan pamungkas sosialisme tetapi tidak mempedulikan dan juga tak memahami bagaimana tujuan-tujuan itu dapat dicapai, dan hanya yakin bahwa tujuan-tujuan itu harus dicapai berapa pun ongkosnya. Tetapi bagi hampir semua orang yang memandang sosialisme bukan sekadar sebagai harapan, tetapi juga sebagai objek politik praktis, metode-metode khas sosialisme modern sama pentingnya dengan tujuan-tujuannya sendiri. Pada pihak lain, banyak orang, yang penghargaan mereka terhadap tujuan-tujuan pamungkas sosialisme tidak kurang tingginya dibanding kaum sosialis, menolak mendukung sosialisme dikarenakan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya terhadap nilai-nilai lain yang mereka lihat ada di dalam metode-metode yang diusulkan kalangan sosialis. Debat mengenai sosialisme dengan demikian telah menjadi debat terutama tentang sarana dan bukan tentang tujuan—meskipun tercakup juga persoalan apakah tujuan-tujuan sosialisme yang berbeda-beda dapat serentak dicapai.

Hal ini cukup untuk menciptakan kerancuan. Dan kerancuan ini ditambah oleh kebiasaan umum menyangkali fakta bahwa ada orang yang walaupun menolak sarana toh dapat menghargai tujuan. Tetapi ini belum semua. Situasinya masih lebih rumit oleh fakta bahwa sarana-sarana yang sama, yakni “perencanaan ekonomi” yang merupakan instrumen pokok reformasi sosialis, dapat digunakan untuk banyak tujuan lain. Kita harus mengendalikan aktivitas ekonomi secara terpusat jika kita ingin distribusi pendapatan berjalan seiring dengan ide-ide masa kini tentang keadilan sosial. Karena itu, “perencanaan” diinginkan oleh semua orang yang menuntut bahwa “produksi untuk penggunaan” harus menggantikan produksi demi keuntungan. Namun perencanaan semacam itu bisa menjadi sangat penting ketika kita ingin mengatur distribusi pendapatan yang menurut kita masih tampak jauh dari adil. Entah kita menginginkan lebih

banyak barang yang baik dari dunia ini mengalir ke kalangan elit rasial, orang Nordik, atau anggota-anggota suatu partai atau seorang bangsawan, metode-metode yang harus kita gunakan adalah sama dengan metode-metode yang dapat menjamin suatu distribusi yang adil.

Mungkin tampak tak adil jika istilah sosialisme digunakan untuk menggambarkan metodenya ketimbang tujuannya, jika sebuah istilah dipakai dalam arti metode khusus padahal bagi banyak orang istilah itu menggambarkan ideal pamungkas. Mungkin lebih baik menggambarkan metode-metode yang dapat digunakan bagi beraneka ragam tujuan sebagai kolektivisme, dan memandang sosialisme sebagai salah satu spesies dari genus itu. Namun, meskipun bagi kebanyakan sosialis hanya ada satu spesies kolektivisme yang mewakili sosialisme sejati, haruslah selalu diingat bahwa sosialisme adalah salah satu spesies kolektivisme, dan bahwa karenanya segala sesuatu yang berlaku bagi kolektivisme dengan sendirinya berlaku juga bagi sosialisme. Hampir semua hal yang diperdebatkan antara kalangan sosialis dan kalangan liberal menyangkut metode-metode yang dipakai bersama oleh semua bentuk kolektivisme, dan bukan menyangkut tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai kaum sosialis dengan menggunakan metode-metode itu. Dan semua konsekuensi yang akan menjadi perhatian kita dalam buku ini muncul dari metode-metode kolektivisme, terlepas dari tujuan-tujuan yang diharapkan dicapai metode-metode itu. Juga tidak boleh dilupakan bahwa sosialisme sejauh ini bukan hanya spesies terpenting dari kolektivisme atau “perencanaan”; tetapi bahwa sosialisme telah membujuk kalangan yang berpikiran liberal untuk sekali lagi takluk pada pengorganisasian secara kaku atas kehidupan ekonomi yang telah pernah mereka tumbangkan karena, memakai kata-kata Adam Smith, pengorganisasian semacam itu menempatkan pemerintah dalam posisi di mana “untuk mendukung diri mereka sendiri, mereka terpaksa harus

opresif dan sewenang-wenang.”¹

Kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh kekaburan berbagai istilah politik umum masih belum teratasi walaupun kita sepakat menggunakan istilah kolektivisme untuk mencakup semua jenis “ekonomi terencana”, apa pun tujuan perencanaan itu. Makna istilah itu menjadi sedikit lebih pasti jika kita menyatakan dengan jelas bahwa yang kita maksudkan adalah jenis perencanaan yang diperlukan untuk merealisasikan ideal-ideal distributif tertentu. Tetapi karena ide tentang perencanaan ekonomi terpusat mendapatkan daya tariknya terutama dari ketidakjelasan makna itu sendiri, adalah penting kalau kita sepakat mengenai makna persisnya sebelum kita mendiskusikan konsekuensi-konsekuensinya.

“Perencanaan” menjadi populer terutama karena fakta bahwa setiap orang tentu saja ingin kita menangani problem-problem umum kita serasional mungkin, dan bahwa dalam melakukannya kita menggunakan hikmat dan pertimbangan kita sepenuhnya. Dalam pengertian ini, setiap orang yang bukan fatalis total adalah perencana, setiap tindakan politis adalah (atau seharusnya) tindakan perencanaan, dan perbedaan-perbedaan hanya ada di antara perencanaan yang baik dan yang buruk, antara perencanaan yang bijak penuh pertimbangan dan perencanaan yang bodoh tanpa pertimbangan. Seorang ekonom, yang tugas menyeluruhnya adalah mengkaji ihwal bagaimana orang sebetulnya bertindak dan bagaimana mereka merencanakan urusan-urusan mereka, adalah orang terakhir yang akan berkeberatan terhadap perencanaan dalam pengertian umum ini. Tetapi orang yang sangat fanatik terhadap suatu masyarakat yang direncanakan kini menggunakan istilah itu bukan dalam arti ini, dan juga bukan hanya dalam arti ini kita harus merencanakan, jika kita ingin distribusi pendapatan atau kekayaan berjalan mengikuti standar tertentu. Menurut para perencana modern, dan demi

1 Dikutip dalam karya Dugald Stewart, *Memoir of Adam Smith*, dari memorandum yang ditulis oleh Smith pada 1755.

tujuan-tujuan mereka, tidaklah cukup merancang struktur permanen yang paling rasional, yang di dalamnya bermacam-macam aktivitas dilangsungkan oleh orang-orang yang berbeda menurut rencana-rencana mereka sendiri. Perencanaan liberal ini, menurut mereka, bukanlah perencanaan—dan sesungguhnya memang bukan perencanaan yang dirancang untuk memuaskan pandangan-pandangan tertentu mengenai siapa harus memiliki apa. Yang dituntut para perencana kita adalah pengarahan terpusat dari semua kegiatan ekonomi menurut suatu perencanaan tunggal, dengan pemaparan tentang bagaimana sumber-sumber daya masyarakat harus “diarahkan dengan sadar”, untuk melayani tujuan-tujuan tertentu dengan suatu cara yang pasti.

Karena itu, debat antara para perencana modern dan lawan-lawan mereka *bukanlah* debat mengenai apakah kita harus memilih dengan cerdas di antara berbagai organisasi masyarakat yang mungkin dibangun; ini bukanlah debat mengenai apakah kita harus menggunakan pertimbangan dan pemikiran sistematis dalam merencanakan urusan-urusan umum kita. Ini adalah debat tentang apa cara terbaik yang dapat kita ambil dalam mengerjakan hal-hal itu. Persoalannya adalah apakah, untuk tujuan ini, lebih baik jika si pemegang kekuasaan koersif membatasi dirinya sendiri secara umum, pada penciptaan kondisi-kondisi yang di dalamnya pengetahuan dan inisiatif individu-individu dibebaskan ruang terbaik, sehingga *mereka* dapat membangun perencanaan dengan paling sukses; atau apakah pemanfaatan yang rasional atas sumber-sumber daya kita memerlukan arah dan organisasi *terpusat* atas semua kegiatan kita menurut suatu “cetak biru” yang dikonstruksi dengan sadar. Kaum sosialis dari semua golongan memakai istilah perencanaan dalam arti yang disebut terakhir, dan sekarang ini umumnya dalam pengertian inilah istilah perencanaan telah diterima. Tetapi meskipun hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa inilah satu-satunya cara rasional dalam menangani urusan-urusan kita, tentu saja hal ini tidak terbukti benar. Poin ini tetap menjadi titik sengketa di

antara kalangan perencana dan kalangan liberal.



Adalah penting untuk tidak merancukan penentangan terhadap perencanaan jenis ini dengan sikap mental *laissez-faire* dogmatis. Argumen kalangan liberal mendukung pemanfaatan yang sebaik-baiknya atas berbagai kekuatan kompetisi sebagai sarana untuk mengoordinasikan usaha-usaha manusia, bukan membiarkan segala sesuatu sebagaimana adanya. Argumen liberal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kompetisi efektif, bila dapat diciptakan, adalah cara yang lebih baik dalam menuntun usaha-usaha individu ketimbang usaha-usaha lain mana pun. Argumen ini tidak menyangkali, bahkan menekankan, bahwa suatu kerangka hukum yang dipikirkan dengan hati-hati diperlukan supaya kompetisi berjalan dan memberikan bermanfaat; dan bahwa tidak ada aturan-aturan hukum yang ada sekarang atau dulu yang bebas dari cacat berat. Argumen ini juga tidak menyangkali fakta bahwa apabila kondisi-kondisi yang diperlukan untuk membuat kompetisi efektif tidak bisa diciptakan, kita harus menggunakan metode-metode lain untuk memandu kegiatan ekonomi. Namun, liberalisme ekonomi akan melawan jika kompetisi digantikan oleh metode-metode inferior yang mengoordinasikan usaha-usaha individu. Liberalisme ekonomi memandang kompetisi lebih unggul, bukan hanya karena kompetisi, dalam kebanyakan situasi, merupakan metode paling efisien yang sudah dikenal, tetapi bahkan terlebih lagi karena kompetisi adalah satu-satunya metode yang melaluinya aktivitas kita dapat saling disesuaikan tanpa intervensi penguasa yang koersif atau sewenang-wenang. Sesungguhnya, salah satu argumen pokok yang mendukung kompetisi adalah bahwa kompetisi menyingkirkan kebutuhan terhadap “kontrol sosial yang sadar”, dan bahwa kompetisi memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk memutuskan apakah prospek suatu pekerjaan tertentu cukup untuk mengompensasi kerugian

dan risiko yang terkait dengannya.

Pemanfaatan yang berhasil atas kompetisi sebagai prinsip organisasi sosial mencegah gangguan jenis-jenis tertentu yang dilakukan dengan paksa terhadap kehidupan ekonomi. Tetapi kompetisi memperbolehkan gangguan lain yang kadang kala dapat membantu secara luas jalannya kompetisi, dan bahkan tindakan pemerintah dalam bentuk-bentuk tertentu diperlukan. Tetapi ada alasan yang baik mengapa persyaratan negatif, yakni poin-poin di mana kekuasaan atau pemaksaan tidak boleh digunakan, ditekankan secara khusus. Pertama-tama, adalah perlu bahwa pihak-pihak di dalam pasar bebas untuk menjual dan bebas untuk membeli pada harga berapa pun seandainya mereka dapat menemukan seorang mitra untuk bertransaksi, dan bahwa setiap orang harus juga bebas untuk memproduksi, menjual, dan membeli apa pun yang dapat diproduksi atau dijual. Adalah penting bahwa akses ke perdagangan yang berbeda-beda harus terbuka bagi semua orang berdasarkan persyaratan yang sama, dan bahwa hukum tidak boleh menolerir upaya apa pun dari individu atau kelompok tertentu untuk membatasi akses ini melalui penggunaan kekuasaan secara terbuka atau secara diam-diam. Setiap usaha yang mau mengontrol harga atau kuantitas komoditas tertentu akan menghilangkan kekuatan kompetisi untuk menghasilkan koordinasi yang efektif atas usaha-usaha individual, karena, dalam kondisi itu, perubahan-perubahan harga tak lagi mengungkapkan semua perubahan yang relevan, dan tak lagi menyediakan pemandu yang dapat dipercaya bagi tindakan-tindakan individu.

Namun hal ini tidak dengan sendirinya benar bagi berbagai tindakan yang hanya membatasi metode-metode produksi yang diizinkan, selama pembatasan ini berlaku bagi semua produsen potensial, dan tidak digunakan sebagai cara tak langsung untuk mengontrol harga dan jumlah produksi barang. Meskipun semua kontrol atas metode dan produksi semacam itu mengakibatkan biaya ekstra, yakni menimbulkan kebutuhan untuk menggunakan lebih banyak sumber daya untuk memproduksi suatu hasil

tertentu, kontrol itu dapat tetap berguna. Mengeluarkan larangan untuk menggunakan zat-zat beracun tertentu, atau mengharuskan tindakan preventif khusus dalam menggunakan zat-zat itu, atau membatasi jumlah jam kerja, atau mengharuskan perencanaan higienis tertentu, semuanya sejalan penuh dengan usaha melanggengkan kompetisi. Satu-satunya pertanyaan di sini adalah apakah dalam kasus-kasus tertentu keuntungan yang didapat akan lebih besar dibandingkan biaya sosial yang dibebankan oleh tindakan-tindakan itu. Melanggengkan kompetisi juga tak bertentangan dengan suatu sistem ekstensif yang mengatur berbagai pelayanan sosial—sejauh organisasi pelayanan itu tidak dirancang sedemikian rupa sehingga membuat kompetisi menjadi tidak efektif di berbagai bidang yang luas.

Meskipun tak sulit untuk diterangkan, patut disayangkan bahwa dibandingkan dengan perhatian yang diberikan kepada berbagai hal negatif ini, kurang sekali perhatian diberikan di masa lampau kepada berbagai persyaratan positif untuk membuat sistem kompetisi berjalan dengan sukses. Supaya kompetisi berfungsi, yang diperlukan bukan hanya pengorganisasian yang memadai atas lembaga-lembaga tertentu seperti uang, pasar, dan saluran-saluran informasi—beberapa di antaranya tidak akan pernah dapat disediakan dengan memadai oleh usaha-usaha privat—tetapi kompetisi bergantung terutama pada tersedianya sistem hukum yang layak, sistem hukum yang didesain untuk memelihara kompetisi sekaligus untuk membuat kompetisi beroperasi dengan bermanfaat sebisa mungkin. Sama sekali tidak cukup bahwa hukum harus mengakui prinsip kepemilikan pribadi dan kebebasan membuat kontrak; banyak hal bergantung pada definisi yang setepat-tepatnya tentang hak kepemilikan ketika diterapkan pada banyak hal berbeda. Kajian sistematis atas berbagai bentuk lembaga hukum yang akan membuat sistem kompetitif berjalan dengan efisien sayang sekali telah diabaikan. Dan bermacam argumen kuat dapat dikembangkan bahwa berbagai kelemahan serius di sini, teristimewa yang menyangkut hukum korporasi dan hukum paten, bukan hanya telah membuat

kompetisi berlangsung lebih buruk daripada seharusnya, tetapi bahkan telah bermuara pada kehancuran kompetisi di banyak bidang.

Akhirnya, pasti ada bidang-bidang tertentu di mana pengaturan hukum tidak dapat menciptakan kondisi utama yang membuat sistem kompetisi dan kepemilikan pribadi bermanfaat: yakni, bahwa si pemilik mendapat keuntungan dari semua pelayanan bermanfaat yang disediakan oleh hak miliknya, dan mengalami kerugian dari semua kerusakan yang ditimbulkannya pada orang lain atas penggunaan hak miliknya itu. Apabila, misalnya, tidak praktis untuk menyediakan pelayanan tertentu yang pemakaiannya bisa dibayar menurut harga tertentu, kompetisi tidak akan menghasilkan pelayanan itu; dan sistem harga pun tidak akan efektif apabila kerusakan yang ditimbulkan pada orang lain oleh penggunaan tertentu atas kepemilikan tidak dapat dengan efektif dibebankan pada si pemilik barang tersebut. Dalam semua contoh ini, ada divergensi antara barang-barang yang masuk ke dalam kalkulasi privat dan barang-barang yang mempengaruhi kesejahteraan sosial; dan apabila divergensi ini menjadi penting, metode lain yang bukan kompetisi boleh jadi harus ditemukan untuk menyediakan berbagai pelayanan yang bersangkutan. Jadi, baik penyediaan papan petunjuk di jalan raya, maupun, dalam kebanyakan situasi, penyediaan jalan itu sendiri, tidak dapat dibiayai oleh setiap individu pengguna. Demikian juga, akibat-akibat berbahaya dari penggundulan hutan, atau dari metode pertanian tertentu, atau dari asap dan kebisingan pabrik-pabrik, tak dapat dibatasi hanya pada si pemilik properti tersebut atau hanya pada orang-orang yang bersedia membayar kompensasi yang disepakati atas kerusakan yang terjadi. Dalam kasus-kasus seperti ini, kita harus menemukan substitusi bagi regulasi melalui mekanisme harga. Tetapi fakta bahwa kita harus menggunakan substitusi berupa regulasi langsung oleh pihak berwenang apabila kondisi-kondisi yang diperlukan agar kompetisi berlangsung dengan baik tidak dapat diciptakan, tidak membuktikan bahwa kita harus menindas kompetisi apabila

kompetisi dapat berfungsi.

Untuk menciptakan kondisi-kondisi yang di dalamnya kompetisi akan berlangsung seefektif mungkin, untuk melengkapinya kalau kompetisi tidak bisa efektif, untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang, memakai kata-kata Adam Smith, “meskipun memberikan manfaat besar kepada masyarakat luas, namun bersifat sedemikian rupa sehingga keuntungannya tidak pernah cukup untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan individu atau sekelompok individu”—semua tugas ini sesungguhnya menyediakan bidang yang luas dan tak terbantahkan bagi aktivitas negara. Tidak ada sistem yang dapat dipertahankan secara rasional, yang di dalamnya negara tak melakukan apa pun. Sistem kompetitif yang efektif memerlukan kerangka hukum yang dirancang secara cerdas dan dapat disesuaikan terus-menerus, sama seperti sistem lain mana pun. Bahkan persyaratan paling penting agar sistem kompetitif bekerja dengan benar, yakni, pencegahan penipuan dan pemalsuan (termasuk eksploitasi ketidaktahuan), adalah tujuan besar yang perlu dikerjakan pihak legislatif, yang belum tercapai sepenuhnya.



Namun, usaha menciptakan kerangka yang pas untuk membuat kompetisi bekerja dengan baik masih belum lama diupayakan ketika berbagai negeri di mana-mana meninggalkannya dan berpaling ke bermacam upaya menggantikan kompetisi dengan prinsip lain yang bertentangan. Persoalannya bukan lagi bagaimana membuat kompetisi berjalan dan melengkapinya, melainkan bagaimana menggantikan kompetisi sama sekali. Mengenai hal ini, penting sekali dinyatakan dengan sangat jelas: gerakan modern untuk menerapkan perencanaan adalah gerakan melawan kompetisi itu sendiri, sebuah bendera baru yang di bawahnya semua musuh lama kompetisi telah berkumpul. Dan kendatipun semua jenis kepentingan sekarang ini sedang mencoba untuk menegakkan kembali, di bawah bendera ini, hak-

hak istimewa yang pada era liberal telah dibuang, propaganda sosialis mengenai perencanaanlah yang telah membangun kembali oposisi terhadap kompetisi dan membuatnya dihormati di kalangan liberal, dan yang telah dengan efektif memadamkan kecurigaan yang sehat, yang dulu biasa ditimbulkan oleh setiap usaha menindas kompetisi.² Sebetulnya, hal yang mempersatukan kalangan sosialis Kiri dan kalangan sosialis Kanan adalah permusuhan bersama mereka terhadap kompetisi dan keinginan bersama mereka untuk menggantikannya dengan suatu ekonomi terpimpin. Meskipun istilah kapitalisme dan istilah sosialisme umumnya masih digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk masyarakat masa lampau dan masa depan, istilah-istilah ini menyembunyikan ketimbang menjelaskan sifat dari transisi yang kini sedang kita lalui.

Kendatipun semua perubahan yang sedang kita amati condong bergerak ke arah aktivitas ekonomi yang secara luas diatur dari pusat, perjuangan universal melawan kompetisi akan meng-

-
- 2 Betul bahwa belakangan beberapa akademisi sosialis, di bawah desakan kritik, dan dirangsang oleh kekhawatiran yang sama akan hilangnya kebebasan di dalam masyarakat yang direncanakan secara terpusat, telah menciptakan jenis baru “sosialisme kompetitif” yang mereka harapkan akan mengelakkan kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya dari perencanaan terpusat, dan akan mengombinasikan penghilangan kepemilikan pribadi dengan pemeliharaan penuh kebebasan individu. Meskipun beberapa diskusi tentang jenis baru sosialisme itu telah berlangsung di dalam jurnal-jurnal ilmiah, hampir tak mungkin diskusi-diskusi ini disambut baik para politikus praktis. Kalaupun ada politikus yang mau mencobanya, tak sulit untuk memperlihatkan (sebagaimana telah penulis coba lakukan di tempat lain—lihat *Economica*, 1940) bahwa rencana-rencana ini berpijak pada suatu delusi dan mengandung kontradiksi mendasar. Mustahil memberlakukan kontrol atas semua sumber daya produksi tanpa juga memutuskan untuk siapa dan oleh siapa semua sumber daya itu harus digunakan. Kendatipun, di bawah apa yang dinamakan sosialisme kompetitif, perencanaan oleh otoritas pusat akan mengambil bentuk-bentuk yang agak kurang tegas, akibat-akibatnya tidak akan berbeda secara fundamental, dan unsur kompetisi di dalamnya akan tidak lebih dari suatu penipuan.

hasilkan pertama-tama sesuatu yang dalam banyak segi bahkan lebih buruk, suatu keadaan yang tak akan memuaskan baik para perencana maupun kalangan liberal: semacam organisasi industri sindikalis atau “korporatif”, yang di dalamnya kompetisi kurang lebih ditindas tetapi perencanaan diserahkan ke tangan para pemonopoli independen industri-industri terpisah. Ini adalah akibat pertama yang niscaya dari suatu situasi yang di dalamnya orang dipersatukan dalam permusuhan terhadap kompetisi, tetapi hanya sedikit bersepakat tentang hal lain. Dengan menghancurkan kompetisi di dalam satu industri ke industri lain, kebijakan ini menyerahkan nasib konsumen ke dalam tangan aksi gabungan kapitalis monopolis dan para buruh industri yang paling terorganisir. Namun, meskipun ini adalah kenyataan yang telah terjadi untuk beberapa waktu lamanya di bidang-bidang yang luas, dan meskipun banyak dari agitasi kacau-balau (dan sebagian besar punya kepentingan tersendiri) yang membela perencanaan bertujuan ke arah itu, ini bukanlah suatu keadaan yang akan bertahan lama atau dapat secara rasional dibenarkan. Perencanaan independen semacam itu, yang disusun oleh kalangan pemonopoli industri, sebetulnya justru akan menimbulkan berbagai akibat yang berlawanan dengan yang ingin dicapai menurut argumen para pembela perencanaan. Sekali tahap ini dicapai, satu-satunya alternatif untuk kembali ke kompetisi adalah pengontrolan oleh negara terhadap monopoli, suatu pengontrolan yang, jika ingin dibuat efektif, harus makin lama makin bersifat total dan terperinci. Tahap inilah yang dengan cepat sedang kita dekati. Tak lama sebelum perang, ketika salah satu mingguan menunjukkan bahwa “ada banyak tanda yang memperlihatkan bahwa para pemimpin Britania semakin terbiasa berpikir mengenai pembangunan nasional melalui monopoli-monopoli terkontrol”,³ ini mungkin sekali merupakan suatu tafsiran yang tepat atas keadaan yang ada pada waktu itu. Sejak saat itu, proses ini semakin sangat dipercepat oleh perang,

3 *The Spectator*, 3 Maret 1939, hlm. 337.

dan berbagai kerusakan dan bahaya-bahayanya yang besar akan makin nyata terlihat seiring dengan berjalannya waktu.

Ide tentang aktivitas ekonomi yang sepenuhnya diarahkan dari pusat masih mengejutkan kebanyakan orang, bukan hanya karena kegiatan ini sangat sulit dilakukan, tetapi bahkan lebih lagi, karena horor yang ditimbulkan oleh ide bahwa segala sesuatu diarahkan dari suatu pusat tunggal. Kita sedang dengan cepat bergerak menuju negara semacam itu karena kebanyakan orang masih percaya bahwa masih mungkin menemukan suatu Jalan Tengah antara kompetisi “atomistik” dan pengarahannya dari pusat. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu pun yang pada awalnya tampak lebih masuk akal, atau lebih menarik bagi orang-orang rasional, ketimbang ide bahwa tujuan kita haruslah bukan kompetisi bebas yang didesentralisasi secara ekstrim, dan juga bukan sentralisasi secara menyeluruh dari suatu rencana tunggal, melainkan campuran dari kedua metode yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Namun akal sehat saja terbukti merupakan pemandu yang tak dapat dipercaya dalam hal ini. Meskipun kompetisi dapat bertahan di dalam suatu regulasi campuran, kompetisi tak dapat dikombinasikan dengan perencanaan sesuka hati kita tanpa membuat kompetisi itu berhenti berfungsi sebagai pemandu efektif bagi produksi. “Perencanaan” juga bukan obat yang, dalam dosis rendah, dapat menimbulkan akibat-akibat yang diharapkan timbul dari penggunaannya yang menyeluruh. Baik kompetisi maupun pengarahannya terpusat akan menjadi sarana-sarana yang buruk dan tak efisien jika keduanya tidak lengkap; keduanya adalah prinsip-prinsip alternatif yang dipakai untuk memecahkan problem yang sama, dan campuran dari keduanya berarti bahwa tidak ada satu pun yang akan benar-benar bekerja, dan bahwa hasilnya akan lebih buruk ketimbang jika salah satu sistem ini dipakai secara konsisten. Atau, dengan kata lain, perencanaan dan kompetisi dapat dikombinasikan hanya apabila perencanaan dipakai untuk mendukung, bukan untuk menentang kompetisi.

Hal terpenting bagi argumen buku ini, yang harus tetap

pembaca ingat, adalah bahwa perencanaan yang sedang kita kritik hanyalah perencanaan yang menentang kompetisi—perencanaan yang menjadi substitusi kompetisi. Hal ini menjadi lebih penting karena kita tidak dapat, dalam ruang cakup buku ini, memasuki diskusi mengenai perencanaan yang penting itu sendiri, yang diperlukan untuk membuat kompetisi sebisa mungkin efektif dan menguntungkan. Tetapi karena sekarang ini “perencanaan” dipakai hampir sinonim dengan jenis perencanaan yang disebut terdahulu, maka kadang kala tak akan terelakkan, supaya ringkas, untuk menyebutnya hanya sebagai perencanaan, meskipun hal ini berarti membiarkan lawan-lawan kita menjadi pemilik kata yang sangat bagus itu, yang patut mendapatkan nasib yang lebih baik.



BAB 4

“KENISCAYAAN” PERENCANAAN

*Kamilah yang pertama kali menyatakan
bahwa semakin rumit bentuk suatu peradaban,
semakin harus terbatas kebebasan individu.*

B. Mussolini

ADALAH suatu fakta menarik bahwa hanya ada sedikit perencana yang sudah puas dengan mengatakan bahwa perencanaan terpusat adalah hal yang diinginkan. Kebanyakan mereka menegaskan bahwa kita tak dapat lagi memilih, tetapi dipaksa oleh berbagai keadaan yang berada di luar kontrol kita untuk menjadikan perencanaan sebagai pengganti kompetisi. Mitos itu dengan sengaja ditanamkan dan ditumbuhkan, bahwa kita sedang memasuki jalur baru bukan karena kehendak bebas, melainkan karena kompetisi dengan sendirinya akan dieliminasi oleh berbagai macam perubahan teknologi yang arahnya tak dapat kita putar balik dan cegah. Argumen ini jarang dikembangkan secara terperinci—ini adalah salah satu pernyataan yang diambil alih oleh seorang penulis dari penulis lain sampai, melalui pengulangan semata, akhirnya diterima sebagai fakta yang mapan. Namun pernyataan ini tak memiliki dasar. Kecenderungan menuju monopoli dan perencanaan bukanlah hasil dari “fakta-fakta objektif” apa pun yang berada di luar kontrol kita, melainkan produk dari bermacam opini yang ditumbuhkan dan disebarluaskan selama setengah abad sampai

akhirnya mendominasi semua kebijakan kita.

Dari berbagai argumen yang digunakan untuk menunjukkan perencanaan sebagai sesuatu yang niscaya, argumen yang paling sering diperdengarkan adalah bahwa berbagai perubahan teknologi telah membuat kompetisi menjadi sesuatu yang tak mungkin dijalankan di dalam semakin banyak bidang, dan bahwa pilihan satu-satunya yang tertinggal untuk kita adalah pilihan antara kontrol produksi oleh monopoli swasta dan pengarahan oleh pemerintah. Kepercayaan ini berasal terutama dari doktrin Marxis mengenai “konsentrasi industri”, meskipun, seperti sangat banyak ide Marxis, kini ditemukan pada orang-orang yang menerimanya dari tangan ketiga atau tangan keempat dan yang tidak mengetahui dari mana asalnya.

Fakta historis mengenai pertumbuhan progresif monopoli selama 50 tahun terakhir dan semakin meningkatnya pembatasan terhadap kompetisi, tentu saja, tak dapat dibantah—meskipun keluasan jangkauan fenomena ini sering terlalu dibesar-besarkan.¹ Pertanyaan pentingnya adalah apakah perkembangan ini merupakan konsekuensi yang harus terjadi akibat perkembangan teknologi, atau apakah ini semata-mata merupakan hasil berbagai kebijakan yang dipraktikkan di banyak negeri. Nanti segera akan kita lihat bahwa sejarah aktual perkembangan ini membuktikan hal yang disebut terakhir. Tetapi kita pertama-tama harus memikirkan seberapa jauh berbagai perkembangan teknologis modern telah berlangsung hingga pertumbuhan monopoli dalam bidang-bidang yang luas tak terelakkan.

Penyebab teknologis yang disinyalir sebagai penyebab pertumbuhan monopoli adalah keunggulan perusahaan besar atas perusahaan kecil, yang terbentuk karena efisiensi yang lebih besar di dalam metode-metode modern yang dipakai untuk menghasilkan produk massal. Dikatakan bahwa metode-metode modern telah menciptakan berbagai kondisi di dalam

1 Untuk suatu diskusi yang lebih lengkap mengenai permasalahan ini, lihat esai Prof. L. Robbins yang berjudul “The Inevitability of Monopoly” dalam *The Economic Basis of Class Conflict*, 1939, hlm. 45-80.

kebanyakan industri di mana produksi perusahaan besar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ongkos per unit, dengan akibat perusahaan besar di mana-mana dapat menjual lebih murah dan menyingkirkan perusahaan kecil. Proses ini akan terus berjalan sampai akhirnya di dalam setiap industri hanya tertinggal satu perusahaan atau paling banter sejumlah kecil perusahaan raksasa. Argumen ini memberikan perhatian khusus pada satu akibat yang seringkali menyertai kemajuan teknologis; tetapi tidak mempedulikan akibat-akibat lain yang berkembang ke arah yang berlawanan. Argumen ini tidak banyak didukung kajian fakta yang serius. Di sini kita tidak dapat menyelidiki persoalan ini secara terperinci dan harus puas menerima bukti-bukti terbaik yang tersedia. Kajian paling komprehensif mengenai fakta, yang dilaksanakan baru-baru ini, adalah kajian “Temporary National Economic Committee” Amerika yang berfokus pada *Konsentrasi Kekuatan Ekonomi*. Laporan akhir Komite ini (yang pasti tak sepatutnya dituduh berbias liberal) tiba pada kesimpulan bahwa pandangan yang menyatakan efisiensi yang lebih besar di dalam produksi berskala besar adalah penyebab lenyapnya kompetisi “mendapatkan sedikit sekali dukungan dari bukti yang sekarang ada di tangan.”² Dan monograf terperinci yang membahas ihwal ini, yang disiapkan oleh Komite itu, meringkaskan jawabannya dalam pernyataan ini:

Keunggulan efisiensi perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan belum terbukti; berbagai keunggulan yang dianggap akan menghancurkan kompetisi di dalam banyak bidang telah gagal terbukti. Demikian pula ekonomi yang menekankan ukuran besar, pada tempatnya, tidak selalu menjurus ke monopoli.... Ukuran-ukuran efisiensi optimal mungkin sudah tercapai jauh sebelum bagian terbesar dari pasokan penawaran dikontrol. Kesimpulan bahwa

2 *Final Report and Recommendations of the Temporary National Economic Committee*, Kongres ke-77, Sesi pertama, Senate Document No. 35, 1941, hlm. 89.

keunggulan produksi berskala besar pasti akan bermuara pada penghilangan kompetisi tidak dapat diterima. Selain itu, harus dicatat bahwa monopoli seringkali adalah produk dari faktor-faktor lain, bukan faktor ongkos produksi yang lebih rendah jika produk yang dihasilkan berjumlah besar. Monopoli dicapai melalui kesepakatan persekongkolan dan didorong oleh kebijakan-kebijakan publik. Kalau berbagai kesepakatan itu dibatalkan dan kebijakan-kebijakan itu dihapuskan, maka kondisi-kondisi yang mendukung kompetisi akan pulih.³

Suatu penelitian atas berbagai kondisi di dalam negeri ini akan bermuara pada hasil-hasil yang sangat serupa. Siapa pun yang telah mengamati ihwal bagaimana para pemonopoli yang bercita-cita tinggi secara teratur mencari dan seringkali mendapatkan bantuan dari kekuasaan negara untuk melancarkan kontrol mereka, tidak akan ragu bahwa tidak ada keniscayaan apa pun dalam perkembangan ini.



Kesimpulan ini didukung kuat oleh serangkaian kejadian historis di mana kemunduran kompetisi dan pertumbuhan monopoli mewujud di berbagai negeri yang berbeda. Jika kedua hal ini merupakan akibat perkembangan teknologis atau produk tak terhindarkan dari evolusi “kapitalisme”, maka tentulah keduanya muncul lebih dahulu di negeri-negeri yang memiliki sistem ekonomi paling maju. Faktanya, keduanya muncul pertama-tama selama pertigaan terakhir abad ke-19 di beberapa negeri yang pada waktu itu masih relatif muda, yakni Amerika Serikat dan Jerman. Teristimewa di Jerman, yang dipandang sebagai model negeri yang memperlihatkan evolusi kapitalisme yang pasti terjadi, pertumbuhan kartel dan sindikat sejak 1878 telah dengan

3 C. Wilcox, *Competition and Monopoly in American Industry*, Temporary National Economic Committee, Monograph No. 21, 1940, hlm. 314.

sistematis didorong oleh kebijakan yang disengaja. Bukan hanya instrumen proteksi, tetapi juga insentif langsung dan akhirnya pemaksaan, dipakai oleh pemerintah untuk meningkatkan penciptaan berbagai monopoli demi regulasi harga dan penjualan. Di sinilah, dengan bantuan negara, eksperimen besar pertama dalam “perencanaan ilmiah” dan “pengorganisasian industri yang dilakukan dengan sadar” akhirnya menciptakan berbagai monopoli raksasa, yang digambarkan sebagai pertumbuhan yang tak terhindarkan selama 50 tahun sebelum hal yang sama terjadi di Britania Raya. Terutama karena pengaruh para teoretikus sosialis Jerman, khususnya Sombart, yang menarik kesimpulan-kesimpulan dari pengalaman negeri mereka, maka perkembangan niscaya dari sistem kompetitif ke “kapitalisme monopoli” dipercaya luas. Bahwa di Amerika Serikat kebijakan yang sangat proteksionis membuat perkembangan yang agak serupa juga terjadi, tampaknya mengonfirmasi kesimpulan ini. Namun perkembangan di Jerman, lebih daripada di Amerika Serikat, dipandang sebagai perkembangan yang menggambarkan kecenderungan universal; dan sudah lumrah bagi orang untuk berbicara—mengutip sebuah esai politik baru-baru ini yang dibaca kalangan luas—mengenai “Jerman di mana semua kekuatan sosial dan kekuatan politis dari peradaban modern telah mencapai bentuk yang paling maju.”⁴

Betapa sedikitnya keniscayaan dalam semua ini, bahkan banyak di antaranya adalah akibat dari kebijakan yang disengaja, menjadi jelas kalau kita mempertimbangkan posisi di negeri ini hingga 1931, dan perkembangan sejak tahun itu ketika Britania Raya juga mulai memberlakukan kebijakan proteksi umum. Baru 12 tahun berlalu, namun industri Britania secara keseluruhan, kecuali sedikit industri yang telah mendapatkan proteksi lebih awal, berdaya saing tinggi, mungkin tertinggi dalam sepanjang sejarahnya. Meskipun selama tahun 1920-an Britania sangat menderita akibat berbagai kebijakan yang saling bertentangan

4 R. Niebuhr, *Moral Man and Immoral Society*, 1932.

yang berkenaan dengan gaji dan uang, keadaan dalam tahun-tahun menjelang 1929 itu setidaknya tidak seburuk keadaan 1930-an dalam berbagai hal ketenagakerjaan dan kegiatan umum. Barulah setelah transisi ke proteksi berikut perubahan umum di dalam kebijakan ekonomi Britania, pertumbuhan monopoli berlangsung dengan sangat cepat dan mengubah industri Britania sampai ke tingkat yang masih belum lagi disadari publik. Berargumentasi bahwa perkembangan ini ada hubungannya dengan kemajuan teknologis selama kurun itu, bahwa keharusan-keharusan teknologis yang sudah terjadi di Jerman dalam 1880-an dan 1890-an, sekarang dirasakan di negeri ini dalam 1930-an, tidak kurang menggelikan dibandingkan klaim yang tersirat dalam pernyataan Mussolini (dikutip pada epigراف bab ini), bahwa Italia harus menyingkirkan kebebasan individu sebelum hal itu dilakukan bangsa Eropa lain karena peradaban Italia telah berkembang sangat jauh meninggalkan yang lain!

Sejauh berkaitan dengan negeri ini, tesis bahwa perubahan opini dan kebijakan sekadar mengikuti perubahan fakta yang tidak dapat ditawar-tawar, bisa sedikit dianggap benar, semata-mata karena Inggris mengekor perkembangan intelektual yang terjadi di negeri-negeri lain. Kalau demikian, dapat juga dikatakan bahwa pengorganisasian monopolistik dalam industri akan tumbuh kendatipun opini publik masih condong memihak kompetisi, dan bahwa berbagai kejadian di luar telah menggagalkan keinginan-keinginan mereka. Bagaimana pun juga, hubungan yang sejati antara teori dan praktik menjadi jelas kalau kita melihat prototipe perkembangan ini, Jerman. Bahwa *di sana* penindasan terhadap kompetisi merupakan kebijakan yang disengaja, bahwa hal itu dilakukan untuk melayani ideal yang kini kita namakan perencanaan, tidaklah dapat diragukan. Dalam perkembangan progresif menuju masyarakat yang direncanakan secara menyeluruh, orang Jerman, dan semua orang lain yang meniru mereka, hanyalah mengikuti rute yang telah dipetakan para pemikir abad ke-19, khususnya para pemikir Jerman, untuk mereka. Sejarah intelektual 60 atau 80 tahun terakhir

sesungguhnya adalah suatu ilustrasi sempurna mengenai kebenaran bahwa dalam evolusi sosial tak ada sesuatu pun yang niscaya, tetapi pemikiran manusia membuatnya demikian.



Pernyataan bahwa kemajuan teknologis modern membuat perencanaan menjadi niscaya dapat juga ditafsirkan secara lain. Ini dapat berarti bahwa kompleksitas peradaban industrial modern kita menciptakan masalah-masalah baru yang tidak dapat kita tangani dengan efektif kecuali melalui perencanaan terpusat. Dalam arti tertentu, hal ini benar—namun bukan dalam arti yang luas sebagaimana biasa diklaim. Sudah merupakan kelaziman bahwa, misalnya, banyak masalah yang diciptakan oleh sebuah kota modern, seperti juga banyak masalah lain yang ditimbulkan oleh kepadatan penduduk, tidak bisa dengan memadai diselesaikan melalui kompetisi. Tetapi bukanlah masalah-masalah ini, seperti juga masalah-masalah “kemaslahatan publik”, dan sebagainya, yang terutama ada dalam benak orang-orang yang mengacu ke kompleksitas peradaban modern sebagai sebuah argumen untuk mendukung perencanaan terpusat. Apa yang umumnya mereka sarankan adalah bahwa kesulitan yang makin bertambah untuk mendapatkan gambaran yang koheren mengenai proses ekonomi yang menyeluruh mengharuskan segala sesuatu dikoordinasikan oleh suatu badan pusat, agar kehidupan sosial tak berakhir dalam kekacauan.

Argumen ini didasarkan pada kesalahpahaman menyeluruh tentang cara kerja kompetisi. Bukan saja kompetisi cocok untuk berbagai kondisi yang relatif sederhana, justru metode ini satu-satunya metode yang bisa mengkoordinasikan secara memadai kompleksitas pembagian kerja di bawah kondisi-kondisi modern itu. Kontrol atau pun perencanaan yang efisien tidak akan sulit jika kondisi-kondisinya sangat bersahaja, sehingga satu orang atau satu badan dapat dengan efektif menyelidiki semua fakta yang relevan. Justru ketika faktor-faktor yang harus diperhitungkan

sangat banyak hingga mustahil untuk mendapatkan sebuah pandangan sinoptik mengenai semua faktor itu, desentralisasi menjadi suatu keharusan. Tetapi sekali desentralisasi menjadi keharusan, masalah koordinasi pun muncul, suatu koordinasi yang membiarkan lembaga-lembaga yang saling terpisah dengan bebas menyesuaikan semua aktivitas mereka dengan fakta-fakta yang dapat diketahui hanya oleh mereka, sekaligus menghasilkan penyesuaian timbal-balik terhadap rencana-rencana mereka masing-masing. Oleh sebab desentralisasi diperlukan karena tak seorangpun dapat dengan sadar memperhitungkan semua pertimbangan yang berkaitan dengan berbagai keputusan banyak orang, koordinasi jelas tak dapat dilaksanakan oleh “kontrol yang sadar”, tetapi hanya oleh penataan yang menyampaikannya kepada masing-masing pelaku informasi yang harus dimilikinya supaya pelaku itu dapat dengan efektif menyesuaikan keputusan-keputusannya dengan keputusan-keputusan orang lain. Dan karena semua detail perubahan, yang terus-menerus mempengaruhi kondisi-kondisi permintaan dan penawaran atas berbagai komoditas, tidak pernah dapat diketahui sepenuhnya, atau tak pernah dapat dengan cukup cepat dikumpulkan dan disebarluaskan, oleh satu pusat apa pun, maka hal yang diperlukan adalah mekanisme registrasi yang dengan otomatis mencatat semua efek yang relevan dari tindakan-tindakan individu, dan yang petunjuk-petunjuknya pada waktu yang bersamaan merupakan hasil dari, dan pemandu bagi, semua keputusan individu.

Inilah persisnya fungsi sistem harga di bawah kompetisi, dan tak ada sistem lain mana pun yang dapat melakukannya, atau bahkan sekadar mungkin dapat melakukannya. Sistem ini memungkinkan para wiraswastawan, dengan hanya mengawasi relatif sedikit pergerakan harga-harga, seperti seorang pengawas mengawasi sedikit tuas-tuas panel pengendali, menyesuaikan aktivitas mereka dengan aktivitas rekan-rekan mereka. Poin penting di sini adalah bahwa sistem harga akan memenuhi fungsi ini hanya jika kompetisi berlaku, maksudnya, jika individu

produsen harus menyesuaikan dirinya terhadap perubahan harga dan tidak dapat mengontrolnya. Semakin rumit keseluruhannya, semakin bergantung kita jadinya pada pemilahan pengetahuan di antara individu-individu yang memiliki usaha-usaha terpisah yang harus dikoordinasikan oleh suatu mekanisme netral dalam menyebarkan informasi yang relevan yang dikenal oleh kita sebagai sistem harga.

Tidaklah dibesar-besarkan jika kita mengatakan bahwa jika kita harus bergantung pada perencanaan terpusat yang dibuat dengan sadar untuk pertumbuhan sistem industrial kita, sistem ini tak akan pernah mencapai tingkat diferensiasi, kompleksitas, dan fleksibilitas yang telah dicapainya kini. Dibandingkan dengan metode memecahkan masalah ekonomi melalui desentralisasi plus koordinasi otomatis, metode pengarahan terpusat yang seolah-olah lebih mudah dilakukan adalah metode yang luar biasa janggal, primitif, dan terbatas ruang geraknya. Pembagian kerja telah mencapai taraf yang memungkinkan hadirnya peradaban modern, dan dalam hal ini kita berhutang pada fakta bahwa pembagian ini tidaklah harus diciptakan dengan sadar, tetapi bahwa manusia secara kebetulan menemukan metode yang telah memungkinkan pembagian kerja diperluas melampaui batas-batas yang pasti tak mungkin dilampaui apabila pembagian kerja itu direncanakan. Dengan demikian, yang dibutuhkannya ketika kompleksitasnya semakin berkembang bukanlah pengarahan terpusat, melainkan justru teknik yang tak bergantung pada kontrol yang sadarlah yang lebih penting.



Masih ada teori lain yang menghubungkan pertumbuhan monopoli dengan kemajuan teknologis, yang menggunakan argumen yang hampir berlawanan dengan argumen-argumen yang baru saja kita pertimbangkan. Meskipun tidak sering dinyatakan, teori ini juga berpengaruh luas. Teori ini menyatakan, bukan bahwa teknik modern menghancurkan kompetisi,

tetapi bahwa, sebaliknya, akan mustahil memanfaatkan banyak kemungkinan teknologis baru kecuali proteksi yang menghambat kompetisi diberikan, maksudnya, kecuali monopoli diberikan. Argumen jenis ini tidak dengan sendirinya dirancang untuk menipu, sebagaimana mungkin akan dicurigai pembaca kritis: jawaban jelasnya, bahwa jika suatu teknik baru untuk memuaskan keinginan kita sungguh-sungguh lebih baik, teknik baru itu seharusnya mampu bersaing dengan semua cara yang ada serta seharusnya tidak membuang berbagai contoh yang menjadi rujukannya. Dalam banyak kasus, tak diragukan bahwa argumen ini dipakai semata-mata untuk menguntungkan pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu. Bahkan lebih sering, argumen ini mungkin sekali didasarkan pada kerancuan antara keunggulan teknis yang dilihat dari suatu sudut pandang teknis yang sempit dan kebutuhan yang dilihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan.

Bagaimana pun juga, argumen ini masih memiliki kekuatan dalam keadaan tertentu. Paling sedikit dapat dibayangkan, misalnya, bahwa industri permobilan Britania dapat memasok mobil yang lebih murah dan lebih baik daripada mobil-mobil yang biasa dipakai di Amerika Serikat jika setiap orang dalam negeri ini diharuskan memakai jenis mobil yang sama itu; atau bahwa penggunaan listrik untuk semua keperluan dapat dibuat lebih murah ketimbang batu bara atau gas jika setiap orang diharuskan menggunakan hanya listrik. Dalam kasus-kasus ini, paling sedikit dimungkinkan bahwa kita semua akan lebih baik keadaannya, dan pasti akan lebih menyukai situasi baru itu jika kita memiliki pilihan—tetapi tak seorang individu pun berhak memilih, sebab alternatifnya adalah bahwa entah kita semua memakai mobil murah yang sama (atau kita semua memakai hanya listrik), atau kita bisa memilih di antara hal-hal ini, tetapi dengan masing-masing pilihan berharga jauh lebih mahal. Saya tak tahu apakah kasus yang saya ajukan ini benar. Tetapi harus diakui bahwa mungkin saja lewat standardisasi yang diwajibkan atau lewat pelarangan terhadap keanekaragaman pilihan sampai

batas tertentu, kelimpahan atau kekayaan dapat meningkat lebih dari cukup di dalam beberapa bidang untuk mengompensasi pembatasan pilihan konsumen itu. Bahkan dapat dibayangkan bahwa akan ada nanti penemuan baru yang, jika diterima, tampaknya akan pasti menguntungkan, tetapi bisa digunakan hanya jika banyak atau semua orang diharuskan memakainya pada waktu yang sama.

Entah kasus-kasus semacam itu memiliki kepentingan yang besar dan langgeng atau tidak, yang jelas tidak bisa dikatakan dengan tegas bahwa kasus-kasus itu membuktikan bahwa kemajuan teknis mengharuskan pengarah dan kendali terpusat. Kasus-kasus itu hanya mengharuskan orang untuk memilih antara mendapatkan dan tidak mendapatkan keuntungan tertentu melalui pemaksaan—atau, dalam kebanyakan kasus, mendapatkannya sedikit belakangan, ketika kemajuan teknis lebih jauh telah mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu itu. Adalah benar bahwa dalam situasi-situasi semacam itu kita mungkin harus mengorbankan kemungkinan mendapatkan keuntungan yang segera sebagai biaya kebebasan kita—tetapi, pada pihak lain, kita menghindari keharusan membuat perkembangan di masa depan bergantung pada pengetahuan yang hanya dimiliki orang-orang tertentu. Dengan mengorbankan keuntungan-keuntungan semacam itu, yang mungkin diperoleh pada masa kini, kita memelihara suatu stimulus yang penting demi kemajuan lebih jauh. Meskipun dalam jangka pendek harga yang harus kita bayar untuk keanekaragaman dan kebebasan pilihan kadang kala tinggi, dalam jangka panjang kemajuan material bahkan akan bergantung pada keanekaragaman itu sendiri, sebab kita tak pernah dapat memprediksi dari mana akan datang suatu perkembangan yang lebih baik dari sekian banyak bentuk yang menyediakan barang atau pelayanan itu. Tentu saja tak dapat dikatakan bahwa pemeliharaan kebebasan, dengan mengorbankan tambahan pada kesejahteraan material kita sekarang, akan pasti lebih bermanfaat dalam semua kasus. Tetapi argumen bagi kebebasan persisnya adalah bahwa kita harus menyediakan ruang bagi pertumbuhan

bebas yang tidak terduga. Dengan demikian, argumen ini juga tetap berlaku ketika, berdasarkan pengetahuan kita sekarang, pemaksaan oleh negara bisa tampak mendatangkan hanya keuntungan, dan meskipun dalam kasus tertentu pemaksaan ini mungkin dalam kenyataannya tidak mendatangkan bahaya.

Dalam banyak diskusi pada masa kini mengenai akibat-akibat kemajuan teknologis, kemajuan ini disajikan kepada kita seolah-olah sebagai sesuatu yang berada di luar diri kita, yang dapat memaksa kita memakai pengetahuan baru dengan cara tertentu. Walaupun tentu saja benar bahwa penemuan-penemuan teknologis telah memberikan kita kekuatan yang dahsyat, adalah tak masuk akal untuk menyatakan bahwa kita mesti memakai kekuatan ini untuk menghancurkan warisan kita yang paling mulia, yakni kebebasan. Tapi ini memang berarti bahwa, jika kita ingin memelihara kebebasan, kita mesti menjaganya dengan lebih kuat lagi, lebih daripada sebelumnya, dan bahwa kita harus siap berkorban baginya. Walaupun tak ada hal apa pun dalam perkembangan teknologis modern yang memaksa kita menuju perencanaan ekonomis yang komprehensif, ada banyak hal di dalam perkembangan ini yang akan membuat kekuasaan di tangan suatu otoritas perencana menjadi amat sangat lebih berbahaya.



Jadi walaupun tidak ada keraguan bahwa gerakan menuju perencanaan adalah hasil dari aksi yang disengaja, dan bahwa tidak ada keharusan eksternal yang memaksa kita menuju ke situ, patut diselidiki mengapa sejumlah besar ahli teknis berada di jajaran terdepan para perencana. Penjelasan atas fenomena ini terkait erat dengan fakta penting yang harus selalu diingat pengkritik para perencana itu; sudah pasti bahwa hampir setiap ideal teknis dari para ahli kita dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat, jika yang dijadikan satu-satunya tujuan kemanusiaan adalah mencapai ideal itu. Ada jumlah tak terbatas hal-hal

yang baik, yang, kita semua setuju, sangat dibutuhkan dan juga dimungkinkan, tetapi kita hanya berharap akan mendapatkan sebagian kecil saja sepanjang hidup kita, atau kita hanya berharap memperolehnya dengan sangat tak sempurna. Karena gagal memenuhi ambisi-ambisinya dalam bidangnya sendiri, seorang spesialis memberontak melawan tata sosial yang ada. Kita semua merasa sulit melihat banyak hal gagal dikerjakan, hal yang, harus diakui setiap orang, dibutuhkan dan dimungkinkan. Bahwa hal-hal itu tidak dapat semuanya dikerjakan serempak, bahwa ada di antara hal-hal itu yang dapat dicapai hanya dengan mengorbankan hal lain, dapat dilihat hanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berada di luar spesialisme apa pun, faktor-faktor yang dapat dianggap penting hanya melalui usaha intelektual yang menyakitkan—sangat menyakitkan karena usaha ini memaksa kita melihat, dengan latarbelakang yang lebih luas, objek-objek yang menjadi arah kebanyakan usaha kita, dan memaksa kita menyeimbangkannya dengan hal-hal lain yang berada di luar kepentingan langsung kita dan yang terhadapnya, karena alasan itu, kita kurang peduli.

Setiap satu dari banyak hal yang, jika dipertimbangkan sendiri-sendiri, akan bisa dicapai dalam suatu masyarakat yang terencana, menciptakan banyak orang yang fanatik terhadap perencanaan, yang merasa yakin bahwa mereka dapat menanamkan ke dalam benak para pengarah dalam masyarakat semacam itu pemahaman mereka mengenai nilai penting tujuan tertentu itu. Sebagian harapan mereka jelas akan bisa terpenuhi, sebab suatu masyarakat terencana pasti akan mengembangkan lebih jauh beberapa tujuan mereka, melebihi keadaannya pada masa kini. Sungguh bodoh jika ada yang menganggap bahwa berbagai contoh ilustrasi untuk mendukung masyarakat terencana atau setengah terencana, bahwa hal-hal baik yang dinikmati penduduk di negeri-negeri itu, sepenuhnya adalah hasil perencanaan. Jalan-jalan kendaraan bermotor yang menakjubkan di Jerman dan di Italia adalah contoh yang sering dikutip—meskipun jalan-jalan itu bukan contoh jenis perencanaan yang tidak mungkin dicapai dalam

masyarakat liberal. Tetapi sama bodohnya jika orang mengutip contoh-contoh keunggulan teknologis semacam itu, yang hanya terjadi dalam bidang-bidang khusus, sebagai bukti keunggulan umum perencanaan. Lebih betul jika orang mengatakan bahwa keunggulan teknis yang sedemikian ekstrim, yang tidak sesuai dengan kondisi umum, adalah bukti kesalahan pengarahannya dalam penggunaan sumber-sumber daya. Siapa pun yang telah berkendara di sepanjang jalan kendaraan bermotor Jerman yang terkenal itu, dan menjumpai bahwa jumlah kendaraan yang lalu lalang di atas jalan-jalan itu kurang dari jumlah kendaraan di atas jalan sekunder di Inggris, tidak mungkin ragu bahwa, jika tidak terkait dengan tujuan-tujuan damai, maka sedikit sekali alasan pembenar bagi pembangunan jalan-jalan semacam itu. Apakah ini bukan kasus di mana para perencana telah memutuskan untuk memilih “senjata” ketimbang “mentega” adalah soal lain.⁵ Tetapi dalam standar kita, tidak banyak yang bisa membangkitkan semangat.

Ilusi para spesialis bahwa di dalam masyarakat terencana mereka akan mendapatkan lebih banyak perhatian untuk tujuan-tujuan yang paling mereka pedulikan adalah fenomena yang lebih umum daripada makna yang terkandung dalam istilah spesialis. Dalam hal-hal yang kita sukai dan yang memuat kepentingan-kepentingan kita, kita semua dalam beberapa ukuran tertentu adalah spesialis. Dan kita semua berpikir bahwa urutan nilai-nilai pribadi kita bukan semata-mata pribadi, tetapi bahwa dalam suatu diskusi bebas di antara orang rasional kita akan bisa meyakinkan orang lain bahwa skala prioritas nilai-nilai kitalah yang benar. Orang yang menyukai kawasan pedesaan khususnya menginginkan wajah tradisionalnya terpelihara dan cacat-cacat yang telah dibuat oleh industri pada wajahnya yang cerah harus disingkirkan. Begitu juga, kalangan penggemar kesehatan menginginkan semua pondok tua yang menawan

5 Tetapi sementara saya mengoreksi ini, sebuah berita datang bahwa pekerjaan pemeliharaan pada jalan-jalan kendaraan bermotor Jerman telah dihentikan sementara!

tetapi kotor disingkirkan, atau para pengendara kendaraan bermotor menginginkan negeri mereka dipotong-potong oleh jalan-jalan kendaraan bermotor yang lebar. Sama juga, para fanatik efisiensi menginginkan spesialisasi dan mekanisasi maksimum, dan para idealis, demi perkembangan pribadi, ingin mempertahankan sebanyak mungkin pengrajin yang mandiri. Mereka semua tahu bahwa tujuan-tujuan mereka dapat sepenuhnya tercapai hanya melalui perencanaan—dan mereka semua menginginkan perencanaan untuk alasan itu. Tetapi tentu saja pengadopsian perencanaan sosial yang mereka teriakkan hanya akan menunjukkan konflik tersembunyi di antara tujuan-tujuan mereka.

Gerakan untuk perencanaan semakin kuat sekarang terutama karena fakta bahwa, sementara perencanaan pada pokoknya masih merupakan sebuah ambisi, gerakan ini mempersatukan hampir semua idealis yang hanya memiliki satu pemikiran, semua laki-laki dan perempuan yang mengabdikan kehidupan mereka pada satu tugas tunggal. Namun, harapan yang mereka letakkan pada perencanaan bukanlah hasil dari pandangan komprehensif mengenai masyarakat, melainkan hasil dari pandangan yang sangat sempit, dan seringkali merupakan akibat dari pembesaran yang berlebihan atas kepentingan tujuan-tujuan yang mereka letakkan sebagai tujuan-tujuan utama. Ini bukanlah untuk merendahkan nilai pragmatis orang-orang jenis ini di dalam suatu masyarakat merdeka seperti masyarakat kita, yang membuat mereka subjek dari kekaguman yang memang layak mereka dapatkan. Tetapi ini akan membuat orang-orang ini, yang paling bersemangat untuk merencanakan masyarakat, sebagai orang-orang yang paling berbahaya jika mereka diperbolehkan melakukan hal itu—dan orang-orang yang paling tidak toleran terhadap perencanaan yang disusun orang lain. Dari idealis yang saleh dan berpikiran tunggal lalu berubah menjadi fanatik, seringkali hanya satu langkah saja. Meskipun kejengkelan spesialis yang frustrasilah yang memberikan dorongan terkuat pada tuntutan bagi perencanaan, hampir tak mungkin ada

dunia yang lebih parah—dan lebih tidak rasional—ketimbang dunia yang di dalamnya para spesialis yang paling terkemuka dalam masing-masing bidang diizinkan untuk tanpa hambatan meneruskan usaha mereka mewujudkan ideal-ideal mereka. Begitu juga, “koordinasi”, sebagaimana tampaknya dibayangkan beberapa perencana, tidak dapat menjadi suatu spesialisme baru. Ekonom adalah orang terakhir yang akan mengklaim bahwa dia memiliki pengetahuan yang diperlukan oleh sang koordinator. Yang diinginkan para ekonom adalah metode yang menghasilkan koordinasi semacam itu tanpa perlu ada diktator mahatahu. Tetapi hal itu persisnya berarti dipertahankannya beberapa pembatasan yang sangat netral dan seringkali tak bisa dipahami terhadap usaha-usaha individu, pembatasan yang mendongkolkan semua spesialis.

BAB 5

PERENCANAAN DAN DEMOKRASI

Negarawan yang ingin mengatur bagaimana perorangan dalam masyarakat memanfaatkan modal mereka sendiri bukan hanya akan membebani diri sendiri untuk menjadi pusat perhatian yang tak perlu, tapi juga mengambil kewenangan yang keamanannya tidak mampu dijamin kepada dewan dan senat mana pun, dan yang pasti sangat berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang dungu yang beranggapan dirinya cocok menjalankannya.

Adam Smith

FITUR-FITUR umum semua sistem kolektivis dapat digambarkan, dalam sebuah frasa yang senantiasa disukai kaum sosialis semua mazhab, sebagai pengorganisasian secara sengaja seluruh kerja masyarakat demi suatu tujuan sosial yang pasti. Ihwal bahwa masyarakat kita masa kini tidak memiliki arah “sadar” ke tujuan tunggal semacam itu, ihwal bahwa aktivitas-aktivitasnya dipandu oleh dorongan dan fantasi individu-individu yang tak bertanggungjawab, selalu menjadi salah satu keluhan utama para pengkritik sosialisnya.

Dalam banyak hal ini sangat memperjelas persoalan pokoknya. Dan ini segera mengarahkan kita ke titik munculnya konflik antara kebebasan individu dan kolektivisme. Aneka ragam

kolektivisme, komunisme, fasisme, dan lain-lain, masing-masing berbeda dalam hal sifat tujuan dari semua usaha masyarakat yang ingin mereka jadikan arah. Tetapi semua paham ini berbeda dari liberalisme dan individualisme dalam hal bahwa paham-paham tersebut ingin mengorganisasi seluruh masyarakat dan semua sumbernya untuk mencapai suatu tujuan tunggal, dan dalam hal bahwa paham-paham tersebut menolak untuk mengakui adanya wilayah-wilayah otonom yang di dalamnya tujuan-tujuan individu adalah junjungan tertinggi. Pendek kata, paham-paham itu bersifat totalitarian dalam arti sebenarnya dari kata baru ini, yang telah kita adopsi untuk menggambarkan berbagai wujud yang tak terduga namun tak dapat dipisahkan dari apa yang dalam teori kita namakan kolektivisme.

“Tujuan sosial”, atau “tujuan bersama”, yang untuknya masyarakat harus diorganisasikan, biasanya dideskripsikan secara tersamar sebagai “kemaslahatan bersama”, atau “kesejahteraan umum”, atau “kepentingan umum”. Tidak perlu banyak pere-nungan untuk melihat bahwa berbagai istilah ini tidak memiliki makna definitif yang memadai untuk menentukan suatu strategi atau rencana aksi khusus.

Kesejahteraan dan kebahagiaan jutaan orang tak dapat diukur berdasarkan satu skala tunggal mengenai kekurangan atau kelebihan. Kesejahteraan masyarakat, seperti juga kebahagiaan seorang manusia, bergantung pada bermacam ragam kombinasi faktor yang jumlahnya tak terbatas. Ini tidak cukup diungkapkan hanya sebagai satu tujuan tunggal, melainkan sebagai hierarki dari berbagai tujuan, sebuah skala luas nilai-nilai yang di dalamnya semua kebutuhan setiap orang diberi tempat. Mengarahkan semua aktivitas kita berdasarkan hanya pada satu rencana tunggal mengandaikan bahwa setiap kebutuhan kita diberikan peringkatnya sesuai dengan urutan nilai-nilai yang harus cukup lengkap yang memungkinkan bagi sang perencana untuk melakukan pemilihan di antara berbagai alur perencanaan yang berbeda. Hal ini mengasumsikan, ringkas kata, keberadaan suatu kode etis yang lengkap yang di dalamnya semua nilai insani yang

berbeda diberikan urutan kedudukannya yang layak.

Suatu konsepsi kode etis yang lengkap adalah sesuatu yang tak biasa dan dibutuhkan imajinasi tinggi untuk melihat hal apa saja yang tercakup di dalamnya. Kita tak terbiasa memikirkan kode moral sebagai sesuatu yang kurang lebih lengkap. Fakta bahwa kita tetap memilih di antara nilai-nilai yang berbeda tanpa suatu kode moral sosial yang mengatur bagaimana kita harus memilih, tidaklah mengejutkan kita, dan tidak menyatakan kepada kita bahwa kode moral kita tidak lengkap. Dalam masyarakat kita, tidak ada dasar dan alasan mengapa orang harus mengembangkan suatu pandangan bersama tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi semacam itu. Tetapi apabila semua sarana yang digunakan dimiliki masyarakat, dan harus dipakai atas nama masyarakat menurut rencana yang seragam, maka harus ada suatu pandangan “sosial” tentang apa yang harus dilakukan, yang memandu semua keputusan. Dalam dunia semacam itu kita akan segera menemukan bahwa kode moral kita penuh dengan kesenjangan.

Di sini kita tidak khawatir dengan persoalan apakah suatu kode etis yang lengkap semacam itu adalah sesuatu yang dikehendaki atau tidak. Cukuplah untuk kita nyatakan saja bahwa pertumbuhan peradaban kita hingga sekarang ditandai oleh semakin menyusutnya wilayah-wilayah tindakan individu yang diikat oleh aturan-aturan yang kaku. Aturan-aturan yang memuat berbagai kode moral umum kita telah berkurang secara progresif dan menjadi lebih umum sifatnya. Dari manusia primitif yang diikat oleh berbagai ritual yang rumit dalam hampir segala hal dalam aktivitas sehari-harinya, yang dibatasi oleh tabu-tabu yang tak terhitung banyaknya, dan yang hampir-hampir tak dapat membayangkan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan sesamanya, moral telah semakin berkembang menjadi batasan semata yang melingkupi wilayah otonom tindakan individu. Pengadopsian suatu kode etis umum yang cukup luas untuk menentukan suatu rencana perekonomian yang seragam akan berarti pembalikan menyeluruh arah tren ini.

Yang terpenting bagi kita di sini adalah bahwa suatu kode etis yang lengkap semacam itu tidak ada. Usaha untuk mengarahkan semua kegiatan ekonomi berdasarkan suatu rencana tunggal akan menimbulkan problem yang tak terhitung jumlahnya, yang penyelesaiannya hanya dapat disediakan melalui suatu aturan moral, namun yang tidak mampu disediakan oleh moral yang berlaku sekarang ini di mana tidak ada kesatuan pandangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Orang akan entah tak memiliki pandangan yang pasti atau memiliki pandangan yang saling bertentangan mengenai berbagai persoalan semacam itu, karena di dalam masyarakat merdeka yang kita jalani tidak ada alasan untuk memikirkan semua itu, apalagi untuk membentuk opini-opini umum mengenai semua itu.



Bukan saja kita tidak memiliki skala nilai-nilai yang mencakup semua hal; tetapi juga tidaklah mungkin bagi pikiran siapa pun untuk memahami keanekaragaman tak terbatas dari berbagai kebutuhan yang berbeda dari orang-orang yang berlainan, yang bersaing untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia, dan untuk memberikan bobot yang pasti terhadap masing-masing kebutuhan itu. Bagi masalah kita, tidak begitu penting apakah tujuan-tujuan yang diperhatikan seseorang mencakup hanya kebutuhan-kebutuhan individunya sendiri saja, atau apakah tujuan-tujuan itu merangkum juga berbagai kebutuhan sesamanya yang lebih dekat atau sesamanya yang lebih jauh—maksudnya, apakah dia egoistik atau altruistik dalam arti umum kata-kata ini. Yang terpenting adalah fakta dasar bahwa mustahil bagi siapa pun untuk memahami lebih dari suatu bidang yang terbatas, untuk menyadari urgensi berbagai macam kebutuhan yang tak terbatas jumlahnya. Apakah kepentingan-kepentingannya berpusat di sekitar kebutuhan jasmaniahnya sendiri, atau apakah dia sepenuh hati menaruh perhatian pada kesejahteraan setiap manusia yang dia kenal—tujuan-tujuan

yang dapat diperhatikannya akan selalu hanya merupakan bagian sangat kecil dari kebutuhan-kebutuhan semua orang.

Ini adalah fakta fundamental yang mendasari seluruh filsafat individualisme. Filsafat ini tak mengasumsikan, sebagaimana seringkali dituduhkan, bahwa manusia itu egoistik, atau bahwa manusia harus egoistik. Filsafat ini sekadar bertolak dari fakta yang tak terbantahkan bahwa batas-batas kekuasaan imajinasi kita tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam skala nilai-nilai kita, lebih dari satu sektor kebutuhan seluruh masyarakat, dan bahwa karena, sesungguhnya, skala nilai-nilai hanya bisa ada di dalam pikiran individu, maka hanya bisa terdapat skala-skala tak lengkap, skala-skala yang tak pelak lagi berbeda dan seringkali tak konsisten satu sama lain. Dari sini, kalangan individualis menyimpulkan bahwa individu-individu harus diizinkan, dalam batas-batas tertentu, untuk mengikuti nilai-nilai dan pilihan-pilihan mereka sendiri ketimbang nilai dan pilihan orang lain, bahwa di dalam wilayah-wilayah ini, sistem tujuan seorang individu haruslah menjadi sistem tertinggi dan tidak tunduk pada pendiktean orang lain. Pengakuan ini, bahwa seorang individu adalah sang hakim tertinggi atas tujuan-tujuannya sendiri, dan kepercayaan bahwa sejauh mungkin pandangan-pandangannya sendiri harus mengendalikan tindakan-tindakannya, membentuk hakikat posisi individualis.

Pandangan ini tentu saja tidak menyingkirkan pengakuan terhadap tujuan-tujuan sosial, atau terhadap kesesuaian antara tujuan-tujuan individu sehingga orang dianjurkan untuk memadukan tujuan-tujuan yang mereka kejar. Tetapi pandangan ini membatasi aksi-aksi bersama semacam itu dalam kasus-kasus di mana pandangan-pandangan individu bersesuaian; apa yang dinamakan “tujuan-tujuan sosial” hanyalah, bagi pandangan ini, tujuan-tujuan yang identik dari banyak individu—atau tujuan-tujuan yang untuk mencapainya individu-individu mau menyumbangkan sesuatu sebagai balasan atas bantuan yang mereka terima dalam memenuhi semua keinginan mereka sendiri. Dengan demikian, tindakan bersama dibatasi pada

bidang-bidang di mana orang menyepakati tujuan-tujuan bersama mereka. Sangat sering tujuan-tujuan bersama ini bukan merupakan tujuan-tujuan pamungkas bagi individu-individu, melainkan peranti-peranti yang dapat digunakan oleh orang-orang yang berlainan untuk mencapai tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Dalam kenyataannya, orang paling mungkin menyepakati tindakan bersama apabila tujuan bersamanya bukanlah tujuan pamungkas bagi mereka, melainkan sarana yang mampu melayani sejumlah besar tujuan yang beranekaragam.

Pada waktu individu-individu bersatu menjalankan usaha bersama untuk merealisasi tujuan-tujuan bersama mereka, organisasi-organisasi yang mereka bentuk untuk mencapai tujuan itu, misalnya negara, diberikan sistem tujuan-tujuan tersendiri dan sarana-sarana tersendiri. Tetapi organisasi apa pun yang dibentuk dengan cara demikian tetap merupakan satu "orang" di antara orang-orang lain. Dalam hal negara, benarlah bahwa institusi ini jauh lebih berkuasa ketimbang pihak lain mana pun, namun masih tetap memiliki wilayah terbatas dan terpisah, yang hanya di dalamnya saja tujuan-tujuannya menjadi tujuan-tujuan tertinggi. Batas-batas wilayah ini ditentukan oleh ihwal sampai sejauh mana individu-individu menyepakati tujuan-tujuan khususnya; dan kemungkinan bahwa mereka akan menyepakati suatu strategi aksi tertentu pastilah menyusut ketika jangkauan aksi semacam itu meluas. Ada fungsi-fungsi tertentu dari negara yang kalau dijalankan akan menimbulkan kesepakatan hampir total di antara warganegaranya; ada fungsi-fungsi lainnya yang akan mendatangkan kesepakatan di antara mayoritas besar; dan seterusnya sampai kita tiba pada beberapa wilayah di mana, kendatipun masing-masing individu mungkin menginginkan negara bertindak dalam cara-cara tertentu, akan ada banyak pandangan mengenai apa yang harus pemerintah lakukan, hampir sebanyak jumlah orang yang berbeda.

Kita dapat bergantung pada kesepakatan sukarela untuk memandu tindakan negara hanya selama kesepakatan itu dibatasi pada bidang-bidang di mana terdapat kesepakatan. Tetapi negara

pasti akan menindas kebebasan individu tidak hanya ketika negara memiliki kontrol langsung di bidang-bidang di mana tak terdapat kesepakatan semacam itu. Sayangnya kita tak dapat tanpa batas memperluas wilayah-wilayah yang di dalamnya aksi bersama dijalankan tanpa juga menghapuskan kebebasan individu di dalam wilayahnya sendiri. Sekali sektor komunal, yang di dalamnya negara mengontrol semua sarana dan peranti, melampaui proporsi tertentu dari keseluruhan, akibat-akibat tindakannya akan mendominasi keseluruhan sistem. Meskipun negara mengontrol langsung hanya penggunaan sebagian besar sumber-sumber daya yang tersedia, akibat-akibat keputusannya pada bagian-bagian lain sistem ekonomi yang tidak dikontrolnya menjadi sangat besar sehingga secara tak langsung negara mengontrol hampir segala sesuatu.

Ketika, misalnya, seperti benar terjadi di Jerman pada awal 1928, otoritas pusat dan otoritas lokal mengontrol langsung penggunaan lebih dari separuh pendapatan nasional (menurut suatu perkiraan resmi Jerman saat itu, 53 persen), negara mengontrol secara tak langsung hampir keseluruhan kehidupan ekonomi bangsa. Karena itu, nyaris tak ada satu pun tujuan individu yang keberhasilannya tak bergantung pada tindakan negara, dan “skala nilai-nilai sosial” yang memandu tindakan negara harus mencakup hampir keseluruhan tujuan individu.



Tidaklah sulit untuk melihat apa konsekuensi yang timbul ketika demokrasi menjalankan suatu strategi perencanaan yang, ketika mau dilaksanakan, memerlukan lebih banyak kesepakatan ketimbang yang nyatanya ada. Orang dapat bersepakat mengadopsi sistem ekonomi terpimpin karena mereka diyakinkan bahwa sistem ekonomi semacam itu akan menghasilkan kemakmuran yang besar. Dalam diskusi-diskusi yang bermuara pada keputusan, tujuan perencanaan akan dideskripsikan oleh terminologi seperti “kesejahteraan umum”, yang

hanya menyembunyikan ketiadaan kesepakatan real mengenai tujuan-tujuan perencanaan. Kesepakatan sebetulnya hanya akan ada pada mekanisme yang digunakan. Tetapi mekanisme ini dapat digunakan hanya untuk suatu tujuan umum; dan pertanyaan mengenai tujuan yang sepersisnya, yang menjadi arah semua kegiatan, segera akan muncul begitu kekuasaan eksekutif harus menerjemahkan tuntutan perlunya suatu perencanaan tunggal menjadi suatu perencanaan spesifik. Lalu akan tampak bahwa kesepakatan mengenai perlunya perencanaan tidak didukung oleh kesepakatan mengenai tujuan-tujuan yang harus dilayani oleh perencanaan itu.

Akibat dari kenyataan orang bersepakat bahwa harus ada suatu perencanaan terpusat, tanpa mereka bersepakat mengenai tujuan-tujuan, akan seperti keadaan ini: seolah sekelompok orang bertekad melakukan perjalanan tanpa bersepakat ke mana mereka akan pergi, dengan hasil mereka semua bisa jadi akan melakukan perjalanan yang sebetulnya sama sekali tidak diinginkan oleh sebagian besar dari mereka.

Bahwa perencanaan menciptakan situasi yang di dalamnya kita perlu bersepakat mengenai topik-topik dalam jumlah jauh lebih besar ketimbang lazimnya sebelumnya, bahwa dalam suatu sistem yang terencana kita tidak dapat membatasi tindakan kolektif kita hanya pada kegiatan-kegiatan yang dapat kita sepakati, tetapi kita dipaksa untuk menghasilkan kesepakatan mengenai segala sesuatu supaya ada, walaupun hanya satu, tindakan yang dapat dilakukan, adalah salah satu fitur yang memiliki andil terbesar dalam menentukan karakter suatu sistem terencana.

Bisa jadi rakyat memiliki keinginan yang diungkapkan dengan bulat bahwa parlemen harus mempersiapkan perencanaan ekonomi yang luas, namun baik rakyat maupun wakil mereka dengan demikian tidak perlu dapat bersepakat mengenai perencanaan khusus apa pun. Ketidakmampuan lembaga legislatif demokratis untuk melaksanakan apa yang tampak sebagai suatu mandat yang jelas dari rakyat niscaya akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap pranata-pranata demokratis. Parlemen

pun mulai dipandang sebagai “tempat berbicara saja” yang tak efektif, yang tak kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka ketika mereka dipilih. Keyakinan tumbuh bahwa jika perencanaan yang efisien ingin dilakukan, pengarahannya harus “dikeluarkan dari politik” dan ditempatkan di tangan para ahli, pejabat permanen, atau badan-badan otonom yang independen.

Kesulitan ini sudah dikenal kalangan sosialis. Hampir setengah abad sejak pasangan ekonom Webb mulai mengeluhkan “ketidakmampuan DPR yang makin meningkat untuk menangani pekerjaannya.”¹ Lebih belakangan, Prof. Laski menjabarkan argumennya:

Sudah umum disepakati bahwa mesin parlemen yang ada sekarang sangat tidak cocok untuk mengesahkan dengan cepat sejumlah besar undang-undang yang rumit. Bahkan Pemerintah Nasional pada pokoknya telah mengakui hal ini dengan mengimplementasikan langkah ekonomi dan tarif bukan lewat debat yang seksama di DPR, melainkan melalui sistem legislasi yang didelegasikan secara menyeluruh. Saya beranggapan, suatu Pemerintahan Partai Buruh akan didasarkan pada perluasan preseden ini. Pemerintahan ini akan membatasi DPR pada dua fungsi yang dapat dijalankannya dengan akurat: sebagai ventilasi bagi keluhan-keluhan dan sebagai tempat membicarakan prinsip-prinsip umum dari tindakan-tindakannya. RUU-nya akan berbentuk formula umum yang memberikan kekuasaan yang luas kepada departemen-departemen pemerintah yang tepat; dan kekuasaan ini akan dijalankan dengan Surat Keputusan Pemerintah (*Order in Council*) yang dapat, jika diharuskan, disorang di DPR melalui mosi tidak percaya. Kebutuhan dan nilai legislasi yang didelegasikan baru-baru ini telah dengan kuat ditegaskan kembali oleh Komite Donoughmore; dan

1 S. dan B. Webb, *Industrial Democracy*, 1897, hlm. 800, catatan kaki.

perluasannya tak terhindarkan jika kita tidak mau proses sosialisasi dihancurkan oleh metode-metode normal penjejalan yang didukung oleh prosedur keparlemenan yang ada.

Dan untuk memperjelas bahwa suatu pemerintahan sosialis tidak boleh membiarkan dirinya sendiri terlalu banyak dihambat atau dibatasi oleh prosedur demokratis, Prof. Laski pada akhir artikel yang sama mengajukan pertanyaan “apakah di dalam periode transisi menuju Sosialisme, suatu Pemerintahan Partai Buruh dapat mengambil risiko bahwa langkah-langkah kebijakannya akan berakhir sebagai akibat hasil pemilihan umum mendatang”—dan secara signifikan membiarkannya tak berjawab.²



Adalah penting untuk melihat dengan jelas apa penyebab ketidakefektifan parlemen, yang memang benar adanya, dalam hal administrasi teknis urusan-urusan ekonomi suatu bangsa.

-
- 2 H.J. Laski, “Labour and the Constitution”, *The New Statesman and Nation*, No. 81 (New Series), 10 September 1932, hlm. 277. Dalam sebuah buku (*Democracy in Crisis*, 1933, khususnya hlm. 87) yang di dalamnya Prof. Laski belakangan memerinci ide-ide ini, tekadnya bahwa demokrasi parlementer tidak boleh dibiarkan membentuk penghambat bagi pewujudan sosialisme bahkan dengan jauh lebih gamblang diungkapkan: bukan saja suatu pemerintahan sosialis akan “mendapatkan kekuasaan besar dan melakukan legislasi berdasarkan kekuasaan itu melalui ordinansi dan dekret” dan “menangguhkan formula klasik oposisi normal”, melainkan juga “kelanjutan pemerintahan parlementer bergantung pada pemberian jaminan dari Partai Konservatif kepada pemerintahan Partai Buruh bahwa kegiatan pemerintahan Partai Buruh mengadakan transformasi tidak akan terganggu oleh pencabutan apabila partai ini dikalahkan dalam pemungutan suara”!

Karena Prof. Laski mengacu ke otoritas Komite Donoughmore, patut diingat bahwa Prof. Laski adalah anggota komite itu dan mungkin sekali adalah salah seorang penulis laporan.

Kesalahannya tidak terkait baik dengan individu para wakil maupun dengan lembaga-lembaga keparlemenan itu sendiri, melainkan dengan kontradiksi-kontradiksi yang inheren dalam tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Mereka tidak diminta untuk bertindak hanya di bidang-bidang yang dapat mereka sepakati, melainkan juga untuk menghasilkan kesepakatan mengenai segala hal—seluruh arah penggunaan sumber-sumber daya bangsa.

Untuk tugas semacam itu, sistem keputusan mayoritas bagaimana pun juga tidak pas. Mayoritas bisa efektif apabila yang harus dipilih adalah alternatif-alternatif terbatas; tetapi adalah takhayul semata jika orang percaya bahwa pasti ada pandangan mayoritas mengenai segala sesuatu. Tak ada alasan mengapa bisa tercapai mayoritas yang mendukung suatu strategi positif tertentu yang mungkin dilakukan jika jumlah strateginya tidak terbatas. Setiap anggota dewan legislatif mungkin memang akan lebih menyukai adanya rencana khusus tertentu mengenai arah aktivitas ekonomi, ketimbang tak ada rencana; namun mungkin sekali tidak ada satu rencana tertentu apa pun yang lebih disukai oleh suatu mayoritas dibandingkan tanpa rencana sama sekali.

Pun perencanaan yang koheren tidak dapat dihasilkan dengan memecahnya ke dalam bagian-bagian dan dengan melakukan pemungutan suara pada isu-isu khusus. Tidak masuk akal bagi suatu dewan demokratis untuk melakukan voting dan amandemen dengan cara mengoreksi kalimat per kalimat suatu perencanaan ekonomi, ketika dewan ini sedang membahas RUU biasa. Suatu perencanaan ekonomi, jika memang layak dinamakan demikian, harus memiliki konsepsi yang seragam. Bahkan jika parlemen dapat, melalui langkah bertahap, menyepakati suatu skema perencanaan, pada akhirnya pastilah tidak akan memuaskannya seorang pun. Suatu keseluruhan yang rumit, di mana semua bagian masing-masing harus disesuaikan satu dengan yang lain dengan sangat berhati-hati, tak dapat dicapai melalui kompromi di antara pandangan-pandangan yang bertentangan satu sama lain. Menghasilkan perencanaan ekonomi dengan

cara ini bahkan lebih mustahil dibandingkan, misalnya, dengan merancang serangan militer yang sukses melalui prosedur demokratis. Sebagaimana dalam hal strategi, tak bisa tidak tugas ini harus didelegasikan ke para pakar.

Namun perbedaannya adalah bahwa, sementara jenderal yang bertanggungjawab atas serangan bersenjata diberikan satu tujuan tunggal yang menjadi sasaran semua peranti yang ada di bawah kendalinya selama serangan militer berlangsung, tidak ada satu tujuan tunggal semacam itu bagi si perencana ekonomi, dan tak ada keterbatasan yang serupa atas sarana-sarana yang diserahkan ke dalam tanggungjawabnya. Sang jenderal tidak perlu menye-laraskan tujuan-tujuan yang berbeda dan independen satu terhadap yang lain; baginya hanya ada satu tujuan tertinggi. Tetapi tujuan-tujuan rencana ekonomi, atau bagian mana pun dari rencana itu, tak dapat didefinisikan terlepas dari satu rencana tertentu. Hakikat masalah ekonomi adalah bahwa penyusunan rencana ekonomi mencakup pilihan-pilihan dari antara tujuan-tujuan yang bertentangan dan bersaing—kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari orang-orang yang berbeda.

Tetapi ihwal tujuan-tujuan manakah yang memang bertentangan, mana yang harus dikorbankan jika kita ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lain, pendek kata, manakah alternatif-alternatif yang dari antaranya kita harus membuat pilihan, hanya dapat diketahui oleh mereka yang mengetahui semua fakta; dan hanya mereka, yakni para pakar, yang berada pada posisi untuk memutuskan yang mana dari tujuan-tujuan yang berbeda itu yang harus didahulukan. Tak bisa tidak, merekalah yang harus memaksakan urutan preferensi mereka pada komunitas yang menerima rencana itu.

Hal ini tidaklah selalu disadari dengan jelas, dan pendelegasian biasanya dibenarkan oleh sifat teknis tugas yang mau diamanatkan. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa hanya detail teknis saja yang didelegasikan, atau bahkan bahwa ketidakmampuan parlemen untuk memahami detail teknis adalah akar dari kesulitan

yang ada.³ Perubahan-perubahan atau variasi-variasi di dalam struktur hukum sipil tidak kurang teknis dan tak kurang sulit dipertimbangkan dalam segala implikasinya; namun tak seorang pun sampai sejauh ini telah dengan serius menyarankan bahwa urusan penyusunan undang-undang harus didelegasikan kepada suatu dewan pakar. Faktanya adalah bahwa dalam bidang-bidang

-
- 3 Dalam hubungan ini, ada gunanya jika orang dengan singkat mengacu ke dokumen pemerintah yang mendiskusikan masalah-masalah ini pada tahun-tahun belakangan ini. Sudah pada 13 tahun lampau, yakni sebelum negeri ini akhirnya meninggalkan liberalisme ekonomi, proses pendelegasian kekuasaan legislatif telah dijalankan sampai ke titik di mana dirasakan perlu untuk membentuk sebuah komite untuk menyelidiki “proteksi apa yang dibutuhkan atau diinginkan untuk mengamankan supremasi hukum”. Dalam laporannya, Komite Donoughmore (*Report of the [Lord Chancellor’s] Committee on Ministers’ Powers*, Cmd, 4060, 1932) menunjukkan bahwa bahkan pada waktu itu Parlemen sudah mengacu “ke praktik pendelegasian total dan tanpa pandang bulu”, tetapi menilai hal itu (yakni sebelum kita benar-benar berada di tepi jurang totalitarian!) sebagai perkembangan yang niscaya dan relatif tak berbahaya. Dan mungkin benar bahwa pendelegasian itu sendiri tidak lantas membahayakan kebebasan. Poin yang menarik adalah mengapa pendelegasian telah menjadi perlu dalam skala semacam itu. Tempat pertama dari antara berbagai penyebab, yang dibahas dalam laporan itu, diberikan kepada fakta bahwa “Parlemen sekarang ini mengesahkan sangat banyak undang-undang setiap tahun” dan bahwa “banyak detailnya sangat teknis sehingga tak cocok untuk didiskusikan di Parlemen”. Tetapi jika keadaannya hanya demikian, maka tak ada alasan mengapa detailnya tidak dibahas *sebelum* ketimbang sesudah Parlemen mengesahkan suatu undang-undang. Apa yang, dalam banyak kasus, mungkin merupakan alasan yang jauh lebih penting mengapa, “jika Parlemen tak ingin mendelegasikan kekuasaan membuat undang-undang, Parlemen tak akan dapat mengesahkan undang-undang yang jenis dan jumlahnya dibutuhkan opini publik”, dinyatakan dengan terbuka di dalam kalimat pendek bahwa “banyak undang-undang mempengaruhi kehidupan rakyat dengan sangat kuat sehingga elastisitas menjadi penting”! Apa artinya ini jika bukan pemberian kekuasaan yang sewenang-wenang, yang dibatasi bukan oleh prinsip-prinsip yang pasti dan yang, dalam opini Parlemen, tidak dapat dibatasi oleh peraturan-peraturan yang definitif dan jelas?

ini, perundang-undangan tidak melampaui aturan-aturan umum untuk mencapai kesepakatan mayoritas sejati, sementara, dalam hal arah aktivitas ekonomi, kepentingan-kepentingan yang harus diselaraskan sangat beranekaragam sehingga tak ada kesepakatan sejati yang mungkin tercapai di dalam dewan demokratis.

Namun harus diakui bahwa bukanlah pendelegasian kekuasaan membuat undang-undang itu sendiri yang menimbulkan sangat banyak keberatan. Menentang pendelegasian itu sendiri berarti menentang suatu gejala ketimbang menentang penyebabnya, dan dengan demikian akan memperlemah alasannya, karena pendelegasian itu bisa jadi adalah akibat yang timbul karena sebab-sebab lain. Selama kekuasaan yang didelegasikan hanyalah kekuasaan untuk membuat aturan-aturan umum, maka bisa ada sejumlah alasan yang sangat tepat mengapa aturan-aturan semacam itu harus diputuskan oleh otoritas lokal ketimbang oleh otoritas pusat. Hal yang menjadi pokok keberatan adalah bahwa pendelegasian sangat sering dilakukan karena masalah yang sedang ditangani tidak dapat diatur oleh aturan-aturan umum, melainkan hanya bisa dipecahkan melalui pertimbangan yang masak dalam mengambil keputusan atas kasus-kasus khusus. Dalam kasus-kasus ini, pendelegasian berarti bahwa kepada suatu otoritas diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan yang berkekuatan hukum, tapi yang sebetulnya sewenang-wenang (yang lazimnya digambarkan sebagai “mempertimbangkan kasusnya berdasarkan manfaat dan kelayakannya”).

Pendelegasian tugas-tugas teknis khusus kepada badan-badan yang terpisah, walaupun merupakan hal biasa, sejauh ini hanyalah langkah pertama dalam proses yang melaluinya suatu pemerintahan demokratis, yang mulai makin menerapkan perencanaan, melepaskan kekuasaannya. Langkah pendelegasian sesungguhnya tidak dapat menyingkirkan sebab-musabab yang membuat semua pendukung perencanaan komprehensif sangat tidak sabar terhadap ketidakberdayaan demokrasi. Pendelegasian kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada badan-badan terpisah

menciptakan hambatan baru bagi pencapaian perencanaan tunggal yang terkoordinasi. Bahkan sekalipun, lewat langkah ini, suatu demokrasi sukses dalam merencanakan setiap sektor kegiatan ekonomi, demokrasi itu masih harus menghadapi problem mengintegrasikan perencanaan-perencanaan terpisah itu dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Banyak perencanaan terpisah tidak sama dengan satu keseluruhan yang terencana—bahkan, seperti harus pertama-tama diakui para perencana, perencanaan yang terpisah-pisah dapat lebih buruk ketimbang tidak ada perencanaan. Tetapi parlemen demokratis pasti akan lama ragu-ragu untuk melepaskan kewenangannya dalam memutuskan hal-hal yang sungguh-sungguh penting, dan sejauh lembaga ini bersikap seperti itu, tidak mungkin bagi siapa pun yang lain untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif. Namun kesepakatan bahwa perencanaan memang diperlukan, bersama dengan ketidakmampuan lembaga-lembaga demokratis untuk menghasilkan perencanaan, akan menimbulkan tuntutan yang makin kuat agar pemerintah atau seorang individu diberikan kekuasaan untuk bertindak atas dasar tanggungjawabnya sendiri. Ada kepercayaan yang makin meluas bahwa, jika ingin menyelesaikan pekerjaan, otoritas-otoritas yang bertanggung jawab harus dibebaskan dari hambatan-hambatan prosedur demokratis.

Tuntutan agar ada seorang diktator ekonomi adalah suatu tahap khas dalam gerakan menuju perencanaan, sesuatu yang juga terjadi di negeri ini. Kini sudah beberapa tahun sejak salah seorang pakar asing yang paling tajam tentang Inggris, almarhum Elie Halévy, menyatakan bahwa “jika anda membuat foto gabungan dari Lord Eustace Percy, Sir Oswald Mosley, dan Sir Stafford Cripps, maka saya pikir anda akan menemukan fitur umum ini—anda akan menemukan mereka semua sepakat berkata: ‘Kita kini hidup dalam kekacauan ekonomi dan kita tidak dapat keluar darinya kecuali di bawah suatu jenis kepemimpinan diktatorial’.”⁴ Jumlah tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang

4 “Socialism and the Problems of Democratic Parliamentarism”, *Interna-*

berpandangan sama, telah bertambah banyak.

Di Jerman, bahkan sebelum Hitler berkuasa, gerakan ini telah mengalami kemajuan sangat besar. Penting untuk diingat bahwa beberapa saat sebelum 1933, Jerman telah mencapai tahap di mana negeri itu harus diperintah secara diktatorial. Pada waktu itu tak ada orang yang meragukan bahwa untuk sementara demokrasi telah hancur, dan bahwa demokrat sejati seperti Brüning tidak akan lebih mampu memerintah secara demokratis ketimbang Schleicher atau von Papen. Hitler tidak harus menghancurkan demokrasi; dia tinggal mengambil keuntungan dari membusuknya demokrasi dan pada saat yang kritis mendapatkan dukungan dari banyak orang, yang, meskipun sangat tidak menyukai Hitler, merasa dia adalah satu-satunya orang yang cukup kuat untuk membuat segala sesuatu berjalan.



Argumen yang biasanya dipakai para perencana untuk mencoba membuat kita setuju dengan perkembangan ini adalah bahwa selama demokrasi memegang kendali akhir, hal-hal hakiki dari demokrasi tak akan terpengaruh. Demikianlah Karl Mannheim menulis:

Satu-satunya [*sic*] hal yang membedakan masyarakat terencana dari masyarakat abad ke-19 adalah bahwa terdapat makin banyak wilayah kehidupan sosial, dan pada akhirnya setiap dan seluruh wilayah ini ditaklukkan di bawah kontrol negara. Tetapi jika sedikit kontrol negara dapat diimbangi oleh parlemen yang berdaulat, maka banyak kontrol negara juga dapat diimbangi.... Dalam suatu negara demokratis, kekuasaan absolut dapat diberikan sepenuh-penuhnya kepada negara tanpa melepaskan kontrol demokratik.⁵

tional Affairs, vol. xiii, hlm. 501.

5 K. Mannheim, *Man and Society in an Age of Reconstruction*, 1940, hlm. 340.

Kepercayaan ini mengabaikan suatu distingsi yang sangat penting. Parlemen tentu saja dapat mengontrol pelaksanaan tugas-tugas apabila institusi ini yang menentukan arahnya dan terlebih dahulu menyetujui tujuan itu, dan hanya mendelegasikan pelaksanaan rincinya. Situasinya sama sekali lain ketika alasan pendelegasiannya adalah bahwa tidak ada kesepakatan yang nyata mengenai tujuan-tujuan, ketika lembaga yang diberi tanggungjawab menyusun perencanaan harus memilih dari tujuan-tujuan yang saling bertentangan, pertentangan yang bahkan tak disadari oleh parlemen, dan ketika hal yang dapat dilakukan paling banter hanyalah menyajikan kepada parlemen itu sebuah perencanaan yang harus diterima atau ditolak secara keseluruhan.

Bisa dan mungkin akan ada kritik; tetapi karena tak ada mayoritas yang dapat menyetujui perencanaan alternatif, dan bagian-bagian yang dipersoalkan dapat hampir selalu digambarkan sebagai bagian-bagian yang penting dari keseluruhan, maka pendelegasian akan selalu sangat tak efektif. Diskusi di parlemen mungkin dapat dipertahankan sebagai sebuah katup pengaman yang bermanfaat, dan bahkan lebih lagi sebagai medium yang pas yang melaluinya jawaban-jawaban resmi kepada segala keluhan dapat disebarluaskan. Bahkan ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang keterlaluan dan untuk mendesakkan perbaikan atas berbagai kekurangan. Tetapi diskusi parlemen tidak dapat mengatur; paling banter hanya bisa memilih orang-orang yang praktis akan memiliki kekuasaan absolut. Keseluruhan sistem akan condong bergerak ke kediktatoran plebisitarian yang di dalamnya posisi kepala pemerintahan dari waktu ke waktu dipilih kembali lewat pemilihan umum, meskipun dia memiliki segala kuasa untuk memastikan bahwa pemungutan suara akan memberikan hasil yang dikehendakinya.

Adalah harga yang harus dibayar oleh demokrasi bahwa kemungkinan-kemungkinan kontrol yang sadar dibatasi hanya pada bidang-bidang di mana kesepakatan sejati ada, dan bahwa

di beberapa bidang lain segala sesuatu harus diserahkan kepada kemungkinan. Tetapi di dalam masyarakat yang usaha memfungsikannya bergantung pada perencanaan terpusat, kontrol ini tidak dapat dibuat bergantung pada mayoritas yang dapat bersepakat; seringkali harus terjadi bahwa kehendak suatu minoritas kecil dipaksakan pada rakyat, karena minoritas ini menjadi kelompok terbesar yang dapat bersepakat di antara mereka sendiri dalam soal-soal yang sedang dipermasalahkan.

Pemerintahan demokratis telah dengan sukses bekerja ketika, dan sejauh, fungsi-fungsi pemerintahan, menurut suatu kredo yang diterima luas, dibatasi pada bidang-bidang di mana kesepakatan mayoritas dapat dicapai melalui diskusi bebas; dan adalah suatu nilai plus besar kredo liberal karena dapat menyusutkan bidang cakup hal-hal yang membutuhkan satu kesepakatan bulat yang mungkin ada di dalam masyarakat orang-orang merdeka. Kini sering dikatakan bahwa demokrasi tidak akan menenggang “kapitalisme”. Jika “kapitalisme” di sini berarti sistem kompetitif yang didasarkan pada hak untuk memakai kepemilikan pribadi secara bebas, maka jauh lebih penting untuk menyadari bahwa hanya di dalam sistem inilah demokrasi dimungkinkan. Apabila dikuasai oleh kredo kolektivis, demokrasi pasti akan menghancurkan dirinya sendiri.



Bagaimana pun juga, kita tidak ingin memberhalakan demokrasi. Bisa saja benar bahwa generasi kita berbicara dan berpikir terlalu banyak mengenai demokrasi dan terlalu sedikit tentang nilai-nilai yang ditawarkannya. Tidak dapat dikatakan tentang sistem demokrasi, sebagaimana dikatakan Lord Acton dengan tepat tentang kebebasan, bahwa sistem ini “bukanlah peranti untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi, melainkan pada dirinya sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi. Demokrasi dibutuhkan bukan untuk semata membangun administrasi publik yang baik, tetapi juga demi keamanan pengejaran tujuan-

tujuan yang tertinggi dari masyarakat sipil dan dari kehidupan pribadi.” Demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah peranti, sarana utilitarian untuk melindungi dan menjaga kedamaian internal dan kebebasan individu. Karena itu, demokrasi sekali-kali tidaklah sempurna atau pasti selalu benar. Kita juga harus tidak lupa bahwa seringkali ada jauh lebih banyak kebebasan spiritual dan kultural di bawah suatu pemerintahan otokratik ketimbang di bawah beberapa pemerintahan demokratik—dan setidaknya dapat dibayangkan bahwa di bawah suatu mayoritas yang sangat homogen dan doktriner, pemerintahan demokratik bisa sama menindasnya dengan kediktatoran yang terburuk. Namun, poin kita bukanlah bahwa kediktatoran pasti memasung kebebasan, melainkan bahwa perencanaan bermuara pada kediktatoran, karena kediktatoran adalah instrumen paling efektif untuk memaksa dan memberlakukan ideal-ideal, dan karena itu sangat penting jika perencanaan terpusat dalam skala besar ingin dilaksanakan. Benturan antara perencanaan dan demokrasi timbul semata-mata dari fakta bahwa demokrasi adalah penghalang bagi penindasan kebebasan yang diperlukan oleh pengarah aktivitas ekonomi. Tetapi selama demokrasi tidak lagi menjadi jaminan bagi kebebasan individu, demokrasi semacam itu dapat tetap bertahan dalam bentuk tertentu di bawah suatu rezim totaliter. Suatu “kediktatoran proletariat” sejati, bahkan walaupun dalam bentuk demokratis, jika bekerja secara terpusat untuk mengarahkan sistem ekonomi, akan mungkin sekali membinasakan kebebasan pribadi sama menyeluruhnya dengan yang dilakukan otokrasi.

Besarnya perhatian saat ini pada ancaman terhadap demokrasi sebagai nilai utama bukanlah tanpa bahaya. Perhatian semacam ini telah mendorong munculnya kepercayaan yang menyesatkan dan tak berdasar, bahwa, selama sumber pokok kekuasaan adalah kehendak mayoritas, kekuasaan tidak mungkin menjadi sewenang-wenang. Keyakinan salah yang diperoleh banyak orang dari kepercayaan ini adalah penyebab penting munculnya kealpaan umum terhadap bahaya-bahaya yang sedang kita

hadapi. Tidak ada pembenaran bagi kepercayaan bahwa, selama kekuasaan berasal dari prosedur demokratis, kekuasaan tak dapat sewenang-wenang. Kontras dari pernyataan yang sama sekali salah ini adalah: bahwa bukan sumber kekuasaan, melainkan pembatasan kekuasaan, yang mencegahnya dari kesewenang-wenangan. Kontrol demokratis *dapat* mencegah kekuasaan dari kemungkinan menjadi sewenang-wenang; tetapi kontrol ini tidak terjadi dengan sendirinya. Jika demokrasi memutuskan suatu tugas yang perlu melibatkan penggunaan kekuasaan yang tidak dapat dipandu dengan aturan-aturan yang pasti, maka kekuasaan itu pasti akan menjadi sewenang-wenang.

BAB 6

PERENCANAAN
DAN KEDAULATAN HUKUM

Berbagai kajian mutakhir dalam sosiologi hukum sekali lagi menegaskan bahwa prinsip fundamental hukum formal yang menjadi dasar penghakiman semua kasus menurut prinsip-prinsip rasional umum, yang memiliki sedikit mungkin kekecualian serta berdasarkan kategorisasi logis, hanya berlaku pada fase kapitalisme liberal kompetitif.

K. Mannheim

TIDAK ada yang dengan lebih jelas membedakan kondisi-kondisi di negeri merdeka dari kondisi-kondisi di negeri yang berada di bawah pemerintahan sewenang-wenang selain ketaatan di negeri merdeka pada prinsip-prinsip besar yang dikenal sebagai Kedaulatan Hukum (*Rule of Law*). Terlepas dari segala hal teknisnya, istilah ini berarti bahwa pemerintah di dalam semua tindakannya diikat oleh norma hukum fundamental yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebelumnya—yakni perangkat aturan hukum dasariah yang memungkinkan dilakukannya prediksi, dalam tingkat kepastian yang memadai, bagaimana penguasa akan menggunakan kekuasaan koersifnya di dalam keadaan-keadaan tertentu, dan direncanakannya urusan-urusan

individu seseorang berdasarkan pengetahuan itu.¹ Kendatipun ideal ini tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, berhubung para legislator dan juga orang-orang yang menerima kepercayaan untuk menegakkan hukum adalah orang-orang yang bisa salah, poin pentingnya cukup jelas, bahwa keleluasaan yang diberikan kepada lembaga eksekutif yang menjalankan kekuasaan koersif harus dikurangi sebanyak mungkin. Sementara setiap hukum membatasi kebebasan individu hingga batas-batas tertentu dengan mengubah sarana-sarana yang dapat orang gunakan dalam mengejar tujuan-tujuan mereka, di bawah Kedaulatan Hukum pemerintah dijaga untuk tidak melemahkan usaha-usaha individu melalui tindakan *ad hoc*. Di dalam aturan permainan yang dikenal, seorang individu bebas mengejar tujuan-tujuan dan kehendak-kehendak pribadinya, dan memiliki kepastian bahwa kekuasaan pemerintah tidak akan digunakan dengan sengaja untuk menggagalkan usaha-usahanya.

Distingsi yang telah kita tarik sebelumnya, antara penciptaan kerangka hukum yang permanen yang di dalamnya aktivitas produktif dipandu oleh keputusan individu, dan pengarahan aktivitas ekonomi oleh otoritas pusat, dengan demikian sebetulnya adalah kasus khusus dari distingsi yang lebih umum antara Kedaulatan

1 Menurut eksposisi klasik A.V. Dicey dalam *The Law of the Constitution* (edisi ke-8; hlm. 198), kedaulatan hukum “berarti, pertama-tama, supremasi atau kekuasaan mutlak hukum yang normal, yang bertolakbelakang dengan pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang, dan menyingkirkan eksistensi kesewenang-wenangan, atau eksistensi prerogatif, atau bahkan eksistensi otoritas yang luas tak terbatas, di pihak pemerintah”. Namun, terutama sebagai hasil kajian Dicey, terminologi ini di Inggris telah mendapatkan makna teknis yang lebih sempit yang tidak perlu kita perhatikan di sini. Makna yang lebih tua dan lebih luas dari konsep tentang kedaulatan atau kekuasaan hukum, yang di Inggris telah menjadi tradisi mapan yang lebih diterima begitu saja ketimbang didiskusikan, telah paling penuh dijabarkan dalam diskusi-diskusi di awal abad ke-19 di Jerman mengenai kodrat negara hukum, *Rechtsstaat*, justru karena konsep ini mengangkat apa yang di sana merupakan problem-problem baru.

Hukum dan pemerintahan sewenang-wenang. Di bawah yang pertama, pemerintah membatasi dirinya pada penetapan aturan-aturan dasar yang menentukan berbagai syarat penggunaan sumber daya yang tersedia, dan membiarkan individu memutuskan demi tujuan apa sumber daya itu akan digunakan. Di bawah yang kedua, pemerintah mengarahkan pemakaian peranti-peranti produksi untuk tujuan-tujuan khusus. Tipe aturan yang pertama dapat dibuat sebelumnya, dalam bentuk *aturan-aturan formal dasariah* yang tidak bertujuan mengurus keinginan dan kebutuhan orang tertentu. Aturan-aturan itu dimaksudkan semata-mata sebagai instrumen dalam pengejaran berbagai tujuan orang perorangan. Dan berbagai aturan itu dimaksudkan, atau seharusnya dimaksudkan untuk berlaku dalam periode yang sangat panjang sehingga mustahil untuk mengetahui apakah aturan-aturan itu akan lebih membantu orang-orang tertentu daripada orang-orang lain. Aturan-aturan itu hampir dapat digambarkan sebagai sejenis instrumen produksi, yang membantu orang memprediksi perilaku mitra kerja sama mereka, ketimbang sebagai usaha untuk memuaskan kebutuhan tertentu.

Perencanaan ekonomi jenis kolektivis justru sangat berlawanan dengan hal ini. Otoritas perencanaan tak mungkin membatasi dirinya hanya pada penyediaan kesempatan bagi orang yang tak dikenal untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam cara yang mereka sukai. Otoritas ini tak dapat mengikat dirinya sendiri sebelumnya pada aturan-aturan umum dan formal yang mencegah kesewenang-wenangan. Otoritas ini harus memperhitungkan berbagai kebutuhan aktual rakyat persis ketika kebutuhan-kebutuhan itu muncul, lalu memilih dari antara semua kebutuhan menurut pertimbangannya sendiri. Otoritas ini harus terus-menerus memutuskan berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip formal semata, dan dalam membuat keputusan-keputusan itu, otoritas ini harus membuat distingsi mana yang lebih bernilai di antara kebutuhan orang-orang yang berlainan. Ketika pemerintah harus memutuskan

berapa banyak babi yang harus dipelihara atau berapa banyak bus yang harus dijalankan, pertambangan batu bara mana yang harus dioperasikan, atau dengan harga berapa sepatu bot harus dijual, keputusan-keputusan itu tidak dapat disimpulkan dari prinsip-prinsip formal yang mendasar, atau dibuat mapan untuk jangka panjang sejak jauh hari sebelumnya. Semuanya mau tak mau bergantung pada keadaan saat keputusan harus diambil, dan dalam membuat keputusan semacam itu, akan selalu perlu penyesuaian satu sama lain atas berbagai macam kepentingan orang dan berbagai kelompok. Pada akhirnya, pandangan seseoranglah yang akan memutuskan kepentingan siapa yang lebih utama; dan pandangan itu harus menjadi bagian dari hukum negeri, suatu perbedaan kelas baru yang diterapkan kepada rakyat oleh aparat koersif pemerintah.



Distingsi yang baru saja kita pakai antara hukum atau keadilan formal dan aturan-aturan substantif ini sangat penting, dan sekaligus paling sulit digambarkan sepersisnya dalam praktik. Namun prinsip-prinsip umum yang tercakup cukup sederhana. Perbedaan antara kedua jenis aturan itu sama dengan perbedaan antara menetapkan Peraturan Lalulintas, dan memerintahkan orang ke mana dia harus pergi; atau, lebih jelas lagi, antara menyediakan rambu-rambu lalulintas, dan memerintahkan jalan mana yang harus diambil orang. Peraturan formal memberitahu orang dari awal mengenai tindakan apa yang akan diambil negara dalam jenis-jenis situasi tertentu, yang didefinisikan dalam terminologi umum, tanpa mengacu ke tempat dan waktu atau orang tertentu. Peraturan-peraturan ini mengacu pada situasi-situasi tipikal yang siapa pun dapat masuki dan yang di dalamnya keberadaan peraturan semacam itu akan bermanfaat bagi sangat banyak ragam tujuan perorangan. Pengetahuan bahwa di dalam situasi-situasi semacam itu negara akan bertindak menurut suatu cara yang pasti, atau mengharuskan orang untuk berperilaku

menurut suatu cara tertentu, disediakan sebagai sarana orang dalam membuat rencana mereka sendiri. Aturan formal dengan demikian hanyalah instrumen dalam arti bahwa aturan itu diharapkan bermanfaat bagi orang yang masih belum diketahui siapa, untuk tujuan-tujuan yang diputuskan sendiri oleh orang-orang yang akan memakai aturan itu, dan dalam keadaan yang tak dapat diprediksi sebelumnya secara terperinci.

Faktanya, bahwa kita *tidak* mengetahui akibat konkret dari aturan itu, bahwa kita *tidak* mengetahui apa tujuan tertentu yang akan dilayani aturan itu, atau siapa saja yang akan terbantu aturan itu, bahwa aturan itu semata-mata diberikan bentuk, yang paling mungkin secara keseluruhan, untuk menguntungkan semua orang yang terkena dampak aturan itu, adalah kriteria paling penting dari aturan formal dalam arti yang kita gunakan di sini. Aturan itu tidak mencakup pilihan di antara tujuan-tujuan tertentu atau di antara orang-orang tertentu, karena kita tidak mengetahui sebelumnya oleh siapa dan dalam cara apa aturan itu akan digunakan.

Di zaman kita, yang sangat bersemangat melakukan kontrol sadar terhadap segala sesuatu, tampak paradoksal jika orang mengklaim ihwal berikut ini sebagai suatu kebajikan: bahwa di bawah satu sistem kita akan kurang mengetahui akibat tertentu dari tindakan yang pemerintah ambil, padahal di bawah kebanyakan sistem lain kita akan tahu lebih banyak, dan bahwa suatu metode kontrol sosial dianggap unggul justru karena kita tidak bisa tahu mengenai hasil-hasilnya yang persis. Namun, pertimbangan ini sebetulnya adalah *dasar rasionil* prinsip besar liberal yang disebut Kedaulatan Hukum. Dan apa yang tampak sebagai paradoks tadi dengan cepat menghilang kalau kita mengikuti argumennya sedikit lebih jauh.



Argumen ini berlapis dua; yang pertama bersifat ekonomi dan di sini hanya dapat dinyatakan dengan singkat saja.

Negara harus membatasi dirinya pada pembuatan peraturan yang diterapkan pada berbagai jenis situasi umum, dan harus memungkinkan adanya kebebasan individu dalam segala sesuatu yang bergantung pada keadaan ruang dan waktu tersebut, karena hanya individu yang terlibat dalam setiap keadaan dan dapat sepenuhnya mengetahui keadaan itu serta menyesuaikan tindakan mereka dengan keadaan itu. Jika individu ingin dapat memakai pengetahuan mereka dengan efektif dalam menyusun rencana, mereka harus dapat memprediksi tindakan negara yang dapat mempengaruhi rencana itu.

Tetapi jika tindakan negara diharapkan dapat diprediksi, tindakan itu harus ditentukan oleh aturan yang ditetapkan terlepas dari situasi konkret yang tidak dapat diprediksi dan juga tak dapat diperhitungkan sebelumnya: dan pengaruh tertentu dari tindakan semacam itu akan tak terprediksikan. Sebaliknya, jika negara hendak mengarahkan tindakan individu untuk mencapai tujuan tertentu, tindakan negara harus diputuskan berdasarkan situasi sepenuhnya yang muncul pada saat keputusan diambil, dan karenanya tak dapat diprediksikan. Karena itulah ada fakta yang sudah kita kenali bahwa semakin banyak negara “menyusun rencana”, semakin sulit bagi perorangan melakukan perencanaan.

Argumen yang kedua, yang bersifat moral atau politis, bahkan lebih langsung relevan dengan poin yang sedang kita perbincangkan. Jika negara justru ingin memprediksi akibat dari tindakannya, itu berarti negara tidak akan memberikan pilihan apa pun bagi orang-orang yang terpengaruh tindakannya. Apabila negara dapat dengan persis memprediksi berbagai akibat langkah dan strategi alternatifnya pada orang tertentu, negara jugalah yang membuat pilihan-pilihan di antara berbagai tujuan yang berlainan. Jika kita ingin menciptakan kesempatan-kesempatan baru yang terbuka bagi semua orang, agar dapat dimanfaatkan mereka sesuka hati, maka hasil persisnya tak dapat diprediksi.

Aturan umum, yang murni hukum bukan perintah spesifik, karenanya harus dimaksudkan untuk beroperasi di dalam situasi yang tak dapat diprediksi secara terperinci, dan, karenanya,

pengaruhnya pada tujuan tertentu atau orang tertentu tidak dapat diketahui sebelumnya. Hanya dalam arti inilah seorang legislator bisa bersikap tak memihak. Tidak memihak berarti tidak memiliki jawaban apapun terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu—terhadap jenis pertanyaan yang, jika kita harus memutuskannya, kita putuskan dengan melempar koin.

Di dalam suatu dunia di mana segala sesuatu dapat diprediksi dengan tepat, negara hampir-hampir tidak dapat melakukan apa pun tanpa berpihak. Tetapi kalau akibat-akibat kebijakan pemerintah pada orang tertentu diketahui dengan persis, ketika pemerintah memang bertujuan secara langsung menimbulkan akibat tertentu itu, maka pastilah pemerintah mengetahui adanya akibat tersebut, dan karenanya pemerintah tak dapat tidak memihak. Tak terhindarkan lagi, pemerintah jadinya harus memihak, memaksakan penilaiannya pada rakyat dan, bukannya membantu mereka mengembangkan tujuan mereka sendiri, malah memilihkan tujuan bagi mereka.

Begitu akibat tertentu terlihat sebelumnya pada saat undang-undang sedang dibuat, negara tidak lagi hanya menjadi instrumen yang digunakan rakyat tetapi, sebaliknya, menjadi instrumen yang dipakai oleh pemberi hukum untuk memanipulasi rakyat dan untuk tujuan-tujuannya sendiri. Negara tidak lagi menjadi unsur mesin utilitarian yang dimaksudkan untuk membantu orang perorangan dalam pengembangan kepribadian perorangan mereka sepenuhnya, dan berubah menjadi suatu pranata “moral”—di mana “moral” tidak digunakan sebagai lawan dari “tak bermoral” (*immoral*), tetapi berarti pranata yang memaksakan pandangannya mengenai semua persoalan moral pada rakyat, entah pandangan itu bermoral atau sangat tak bermoral. Dalam arti ini, Nazi atau negara kolektivis lain mana pun adalah negara “moral”, sementara negara liberal bukan.

Mungkin akan dikatakan bahwa semua ini tidak menimbulkan masalah serius karena di dalam jenis persoalan yang harus diputuskan si perencana ekonomi, dia tidak perlu dan tidak harus dipandu oleh prasangka pribadinya, melainkan dapat bergantung

pada keyakinan umum mengenai apa yang adil dan pantas. Pendapat ini lazimnya mendapat dukungan dari orang yang memiliki pengalaman menyusun perencanaan di dalam industri tertentu dan yang menemukan bahwa tidak ada kesulitan yang tak dapat diatasi ketika orang harus mengambil keputusan yang akan diterima sebagai keputusan yang adil oleh orang-orang yang berkepentingan langsung. Tentu saja pengalaman ini tidak membuktikan apa pun, sebab seleksi terhadap “kepentingan-kepentingan” yang berkaitan dengan perencanaan itu terbatas hanya pada industri tertentu.

Kalangan yang paling berkepentingan langsung di dalam isu tertentu tidaklah dengan sendirinya merupakan hakim terbaik dalam menilai kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat. Ambil contoh hanya sebuah kasus yang paling khas: ketika modal dan buruh di dalam suatu industri sepakat mengenai kebijakan pembatasan dan dengan demikian mengeksploitasi konsumen, biasanya tak ada kesulitan mengenai pembagian keuntungan, yang bisa diatur secara proporsional menurut pendapatan terdahulu, atau menurut suatu prinsip yang serupa. Kerugian yang dibagi di antara ribuan atau jutaan orang lain lazimnya entah diabaikan begitu saja atau dipertimbangkan dengan sangat tak memadai.

Jika kita ingin menguji kegunaan prinsip “keadilan” (*fairness*) dalam memutuskan jenis isu-isu yang muncul dalam perencanaan ekonomi, kita harus menerapkannya pada persoalan di mana keuntungan dan kerugian terlihat sama jelasnya. Dalam kasus semacam itu, langsung terlihat bahwa tidak ada prinsip umum seperti keadilan yang dapat menyediakan jawaban. Ketika kita harus memilih antara upah yang lebih tinggi bagi para perawat atau dokter dan pelayanan yang lebih luas bagi orang sakit, antara lebih banyak susu bagi anak-anak dan upah yang lebih baik bagi para petani, atau antara pekerjaan bagi para pengangguran dan upah yang lebih baik bagi orang yang telah bekerja, maka hanya suatu sistem nilai yang lengkap, yang di dalamnya setiap kebutuhan dari setiap orang atau sekelompok orang diberikan nomor peringkat yang pasti, yang bisa menyediakan jawaban.

Dalam kenyataannya, ketika perencanaan makin meluas, makin penting pula mengesahkan pembuatan dan pelaksanaan hukum dengan mengacu kepada apa yang “adil” atau “pantas”; ini berarti bahwa kita makin perlu menyerahkan keputusan atas suatu kasus konkret kepada pertimbangan hakim atau otoritas yang mengurusnya. Orang dapat menulis sejarah tentang kemunduran Kedaulatan Hukum, atau lenyapnya negara hukum, *Rechtsstaat*, dengan menggambarkan dimasukkannya secara bertahap formula-formula yang samar ini ke dalam perundang-undangan dan yurisdiksi; dan dengan melukiskan kesewenang-wenangan dan ketidakpastian yang makin meningkat di dalam, berikut pelecehan yang ditimbulkannya terhadap, hukum dan sistem pengadilan, yang dalam situasi-situasi ini tidak bisa tidak hanya menjadi instrumen kebijakan. Penting untuk ditegaskan sekali lagi dalam hubungan ini bahwa proses kemunduran Kedaulatan Hukum ini berlangsung dengan kuat di Jerman dalam kurun sebelum Hitler berkuasa, dan bahwa kebijakan menuju perencanaan totalitarian telah berlangsung lama, yang kemudian disempurnakan oleh Hitler.

Tak ada keraguan bahwa perencanaan niscaya menimbulkan diskriminasi yang disengaja di antara berbagai kebutuhan tertentu orang-orang yang berlainan, dan mengakibatkan seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu sementara seorang lain harus dilarang melakukannya. Perencanaan harus menetapkan, melalui aturan hukum, seberapa kaya seorang tertentu harus dibuat, dan apa yang boleh dipunyai dan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Sebetulnya ini berarti kembali ke kedaulatan status, kemunduran dari “gerakan masyarakat progresif” yang, dalam ungkapan terkenal Sir Henry Maine, “hingga kini telah menjadi gerakan dari status ke kontrak”.

Bahkan, mungkin sekali Kedaulatan Hukumlah, lebih daripada kedaulatan kontrak, yang harus dipandang sebagai lawan sejati dari kedaulatan status. Adalah Kedaulatan Hukum, dalam arti kedaulatan hukum formal, dan ketiadaan privilese hukum bagi orang tertentu yang diberikan oleh otoritas, yang melindungi

kesetaraan semua orang di hadapan hukum, yang merupakan lawan dari pemerintahan yang sewenang-wenang.



Akibat yang pasti timbul dari hal ini, yang tampaknya saja paradoksal, adalah bahwa kesetaraan formal di hadapan hukum itu sebenarnya berkonflik, dan sebetulnya tak sejalan, dengan apa pun aktivitas pemerintah yang dengan sengaja bertujuan menciptakan kesetaraan material atau kesetaraan substantif bagi orang-orang yang berbeda-beda, dan bahwa kebijakan apa pun yang bertujuan menciptakan ideal keadilan distributif yang substantif pasti akan bermuara pada penghancuran Kedaulatan Hukum.

Untuk mendatangkan akibat yang sama bagi orang yang berlainan, orang perlu diperlakukan berbeda. Memberikan kesempatan objektif yang sama kepada orang yang berbeda berarti tidak memberi mereka peluang subjektif yang sama.

Tak dapat disangkal bahwa Kedaulatan Hukum menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi—yang dapat diklaim untuk hal ini hanyalah bahwa ketidaksetaraan ini tidak dirancang untuk mempengaruhi orang tertentu dalam cara tertentu. Sangat signifikan dan merupakan ciri khas bahwa kalangan sosialis (dan para pendukung Nazi) selalu mengajukan protes terhadap keadilan formal “semata”, bahwa mereka selalu berkeberatan terhadap hukum yang tak memiliki pandangan mengenai sampai sejauh mana orang tertentu harus makmur,² dan bahwa mereka selalu menuntut “sosialisasi hukum” (yakni, menjadikan hukum bersifat sosialis), menyerang independensi hakim-hakim, dan sambil

2 Jadi tidak sepenuhnya salah ketika teoretikus hukum Nasional-Sosialisme, Carl Schmitt, mempertentangkan *Rechtsstaat* liberal (yakni Kedaulatan Hukum) dengan ideal nasional-sosialis *gerechte Staat* (“negara berdasarkan keadilan”)—hanya karena jenis keadilan yang bertentangan dengan keadilan formal dengan sendirinya menyiratkan diskriminasi di antara individu-individu.

memberikan dukungan mereka kepada semua gerakan seperti *Freirechtsschule* (“mazhab hukum bebas”) yang merongrong Kedaulatan Hukum.

Bahkan dapat dikatakan bahwa supaya Kedaulatan Hukum dapat efektif, harus ada peraturan hukum formal yang selalu diterapkan tanpa kekecualian, lebih daripada apa isi peraturan itu. Seringkali isi peraturan malah tidak terlalu penting, asalkan peraturan yang sama diberlakukan secara umum. Kembali ke contoh yang disebutkan lebih awal: tidak jadi soal apakah kita semua berkendara di sebelah kiri atau di sebelah kanan jalan, selama kita semua melakukan hal yang sama. Hal yang penting adalah bahwa aturannya memungkinkan kita memprediksi perilaku orang lain dengan tepat, dan ini mengharuskan peraturan itu diterapkan pada semua kasus—bahkan jika dalam keadaan tertentu kita merasakannya tidak adil.

Konflik antara keadilan formal dan kesetaraan formal di hadapan hukum pada satu pihak, dan usaha-usaha untuk mewujudkan beraneka ragam ideal keadilan dan kesetaraan substantif pada pihak lain, juga menjadi penyebab terjadinya kerancuan yang meluas mengenai konsep “privilese” dan penyalahgunaannya. Sebut saja contoh yang paling penting mengenai penyalahgunaan ini: pengaplikasian istilah privilese pada kepemilikan itu sendiri. Tentu adalah privilese jika, misalnya, sebagaimana kadang-kadang terjadi di masa lampau, kepemilikan tanah secara khusus diperuntukkan bagi anggota keluarga bangsawan. Dan adalah privilese jika, seperti masih ditemukan dalam zaman kita, hak untuk memproduksi atau menjual barang tertentu dikhususkan hanya untuk orang tertentu yang ditunjuk oleh pihak penguasa. Tetapi menyebut kepemilikan pribadi pada dirinya sendiri sebagai privilese, barang atau harta benda yang dapat diperoleh semua orang di bawah aturan yang sama, karena hanya beberapa orang saja yang berhasil mendapatkannya, justru menghilangkan makna kata privilese.

Bahwa akibat-akibat tertentu tidak dapat diprediksi, yang merupakan ciri khas hukum formal dalam sistem liberal, juga

penting karena keadaan ini membantu kita membereskan kerancuan lain mengenai sifat sistem ini: kepercayaan bahwa ciri khas sistem ini adalah pasifnya negara. Pertanyaan apakah negara harus atau tidak boleh “bertindak” atau “ikut campur” adalah pertanyaan yang sama sekali salah, dan istilah *laissez-faire* adalah deskripsi yang sangat tak jelas dan menyesatkan tentang prinsip-prinsip yang menjadi landasan kebijakan liberal. Tentu saja setiap negara harus bertindak, dan setiap tindakan negara tentu saja berarti mencampuri hal-hal tertentu. Tetapi bukan itu poinnya. Pertanyaan yang penting adalah apakah si individu dapat meramalkan tindakan negara dan memanfaatkan pengetahuan itu sebagai informasi dalam menyusun rencananya sendiri, yang berarti bahwa negara tidak dapat mengontrol bagaimana peranti ciptaannya digunakan, dan si individu mengetahui dengan persis seberapa jauh dia akan diproteksi dari campur tangan orang lain, atau apakah negara ada dalam posisi untuk menggagalkan usaha-usaha individu. Negara yang mengontrol anak timbangan dan alat ukur (atau mencegah penipuan dan pemalsuan dengan cara lain apa pun) tentu saja sedang bertindak, sedangkan negara yang memperbolehkan penggunaan kekerasan, misalnya, oleh pemogok yang menghadang buruh lain yang mau bekerja, adalah negara yang tidak aktif.

Namun, dalam kasus pertamalah negara sejalan dengan prinsip liberal, dan dalam kasus kedua, tidak sejalan. Demikian juga halnya berkaitan dengan kebanyakan peraturan umum dan permanen yang diberlakukan negara sehubungan dengan produksi, seperti regulasi mengenai bangunan atau undang-undang mengenai pabrik: regulasi dan undang-undang itu bisa bijaksana atau tidak bijaksana dalam kasus tertentu, tetapi semuanya tidak berkonflik dengan prinsip liberal sejauh dimaksudkan untuk berlaku permanen dan tidak digunakan untuk menguntungkan atau merugikan orang tertentu. Benar bahwa dalam contoh-contoh yang diajukan ini juga akan ada, selain akibat jangka panjang yang tak dapat diprediksi, akibat jangka pendek pada orang tertentu yang dapat dengan jelas diketahui. Tetapi dengan

hukum jenis ini, akibat jangka pendek pada umumnya bukanlah (atau setidaknya harus bukanlah) pertimbangan utamanya. Apabila akibat yang langsung dan dapat diprediksi ini dianggap lebih penting dibandingkan dengan akibat jangka panjangnya, kita mendekati garis perbatasan di mana distingsinya, walaupun pada prinsipnya jelas, menjadi tidak jelas dalam praktiknya.



Kedaulatan Hukum dengan sadar berevolusi hanya selama zaman liberal dan merupakan salah satu prestasi terbesarnya, bukan hanya sebagai pelindung dan pengaman tetapi juga sebagai perwujudan legal dari kebebasan. Sebagaimana Immanuel Kant merumuskannya (dan Voltaire mengungkapkannya sebelum Kant dalam terminologi yang sangat mirip): “Manusia merdeka jika dia tidak perlu menaati siapa pun selain hukum.”

Tetapi sebagai ideal yang samar, Kedaulatan Hukum telah ada setidaknya sejak zaman Romawi, dan selama beberapa abad terakhir ideal ini tidak pernah terancam seserius yang sedang terjadi sekarang ini. Ide bahwa tidak ada batas bagi kekuasaan legislator antara lain adalah hasil dari kedaulatan rakyat dan pemerintahan demokratis. Ide ini telah diperkuat oleh kepercayaan bahwa selama semua tindakan negara diotorisasi dengan benar oleh perundang-undangan, Kedaulatan Hukum akan terpelihara. Tetapi ini kekeliruan total dalam memahami makna Kedaulatan Hukum. Kedaulatan Hukum hampir tidak berkaitan dengan pertanyaan apakah semua tindakan negara bersifat legal dalam pengertian yuridis. Semua tindakan negara mungkin saja bersifat legal namun tidak sejalan dengan Kedaulatan Hukum. Fakta bahwa seseorang memiliki otoritas legal penuh untuk melakukan tindakan yang dia lakukan tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah hukum memberinya kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang, atau apakah hukum mengatur dengan jelas bagaimana dia harus bertindak. Bisa saja Hitler mendapatkan kekuasaannya yang tanpa batas itu dengan cara

yang betul-betul konstitusional dan karena itu apa pun yang dia lakukan bersifat legal dalam pengertian yuridis. Tetapi siapa yang akan menyatakan bahwa karena itu Kedaulatan Hukum masih berlaku di Jerman?

Karena itu, mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat terencana Kedaulatan Hukum tidak mengikat, tidak sama dengan mengatakan bahwa tindakan pemerintah tidak legal atau bahwa masyarakat semacam itu tak mengenal hukum. Artinya hanyalah bahwa pemakaian kekuasaan koersif pemerintah tidak lagi dibatasi dan ditentukan oleh peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hukum dapat, dan, untuk memungkinkan terjadinya pengarahan terpusat terhadap aktivitas ekonomi, harus, melegalisasi apa yang sebenarnya merupakan tindakan sewenang-wenang. Jika hukum mengatakan bahwa Dewan atau Otoritas semacam itu dapat melakukan apa yang disenanginya, maka apa pun yang dilakukan Dewan atau Otoritas itu bersifat legal—tetapi tindakannya tentu saja tidak tunduk pada Kedaulatan Hukum. Dengan memberikan kekuasaan tanpa batas kepada pemerintah, peraturan yang paling sewenang-wenang dapat dibuat legal: dan dengan cara itulah demokrasi dapat menegakkan despotisme paling total yang dapat dibayangkan.³

3 Dengan demikian konfliknya *bukanlah*, sebagaimana telah seringkali salah dipahami dalam diskusi-diskusi di abad ke-19, konflik antara kebebasan dan hukum. Seperti telah John Locke jelaskan, tidak mungkin ada kebebasan tanpa hukum. Konfliknya adalah antara jenis-jenis hukum yang berlainan, hukum yang sangat berbeda sehingga hampir-hampir tidak bisa disebut dengan nama yang sama: satu adalah hukum dari Kedaulatan Hukum, prinsip-prinsip umum formal yang ditetapkan sebelumnya, “aturan-aturan permainan” yang memampukan para individu memprediksi bagaimana aparatus koersif negara akan digunakan, atau apa yang dia dan sesama warganegara akan diizinkan untuk lakukan, atau dibuat melakukan, dalam situasi-situasi yang disebutkan. Hukum jenis lainnya dengan demikian memberikan kepada otoritas kekuasaan untuk melakukan apa yang dipikirkannya pas untuk dilakukan. Dengan demikian, Kedaulatan Hukum jelas tidak dapat dipelihara dan dipertahankan dalam suatu demokrasi yang

Tetapi jika hukum dimaksudkan untuk memungkinkan penguasa memandu kehidupan ekonomi, hukum harus memberikan kepada mereka kekuasaan untuk membuat dan memberlakukan keputusan mereka dalam keadaan yang tak dapat diperkirakan sebelumnya, dan yang pada prinsipnya tak dapat dirumuskan dalam bentuk generik. Akibatnya adalah bahwa ketika perencanaan makin meluas, pendelegasian kekuasaan legislatif ke badan dan otoritas yang beraneka ragam pun makin menjadi-jadi. Dalam kasus yang, berkat almarhum Lord Hewart, telah menjadi perhatian umum baru-baru ini, Mr. Justice Darling berkata menjelang perang yang lalu, “bahwa Parlemen tahun lalu telah mengesahkan bahwa Dewan Pertanian, yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, tidak boleh lebih bisa dijangkakan daripada Parlemen sendiri”. Ucapannya itu sesungguhnya adalah sesuatu yang langka. Sejak saat itu, pernyataan seperti itu hampir setiap hari terjadi. Dengan konstan kekuasaan yang paling luas diberikan kepada otoritas-otoritas baru yang, tanpa diikat oleh aturan yang pasti, memiliki kebebasan yang hampir tanpa batas dalam meregulasi berbagai kegiatan rakyat.

Kedaulatan Hukum dengan demikian menyiratkan adanya pembatasan pada bidang cakup perundang-undangan: Kedaulatan Hukum membatasi perundang-undangan hanya pada jenis peraturan umum yang dikenal sebagai hukum formal, dan menyingkirkan undang-undang yang entah diarahkan langsung kepada orang tertentu, atau yang diarahkan langsung kepada usaha memungkinkan siapa pun menggunakan kekuasaan koersif negara untuk menghasilkan diskriminasi semacam itu. Ini berarti, bukan bahwa segala sesuatu diregulasi oleh hukum, melainkan, sebaliknya, bahwa kekuasaan koersif negara boleh digunakan hanya dalam kasus-kasus yang telah didefinisikan sebelumnya oleh hukum dan dengan cara begitu rupa sehingga dapat diprediksikan bagaimana kekuasaan itu akan digunakan.

mengambil keputusan untuk menyelesaikan setiap konflik kepentingan bukan menurut aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya melainkan “berdasarkan nilai kepatutannya.”

Pemberlakuan undang-undang tertentu dengan demikian bisa saja melanggar Kedaulatan Hukum. Siapa pun yang mau menyangkal hal ini harus berkeras menyatakan bahwa ihwal apakah Kedaulatan Hukum sekarang ini berlaku di Jerman, Italia, atau Rusia, bergantung pada apakah para diktator itu telah mendapatkan kekuasaan absolut mereka melalui cara konstitusional.⁴

Apakah, seperti di beberapa negeri, aplikasi utama Kedaulatan Hukum diperinci dalam suatu Pernyataan Hak-Hak (*Bill of Rights*)

4 Sebuah ilustrasi lain mengenai pelanggaran Kedaulatan Hukum oleh legislasi adalah kasus *bill of attainder* (keputusan yang diambil oleh parlemen untuk menyatakan orang bersalah dan kemudian menjatuhkan hukuman kepadanya tanpa melalui proses pengadilan yudisial), yang dikenal dalam sejarah negara ini. Bentuk yang diambil Kedaulatan Hukum dalam hukum pidana biasanya diungkapkan dalam label Latin *nulla poena sine lege*— “tidak ada penghukuman tanpa hukum yang dengan jelas mengaturnya”. Hakikat pengaturan ini adalah bahwa hukum harus telah ada sebagai sebuah peraturan umum sebelum suatu kasus individu muncul yang terhadapnya hukum ini dikenakan. Tak seorang pun akan menyatakan bahwa, ketika, dalam kasus yang terkenal pada masa pemerintahan Henry VIII, Parlemen memutuskan, berkaitan dengan jurumasak Uskup Rochester, “bahwa Richard Rose tersebut akan dihukum mati dengan direbus tanpa didampingi imamnya”, tindakan itu dilakukan di bawah Kedaulatan Hukum.

Tetapi walaupun Kedaulatan Hukum telah menjadi bagian penting dari prosedur pidana di dalam semua negara liberal, prinsip legal ini tidak dapat dipertahankan di dalam rezim-rezim yang totalitarian. Sebagaimana E. B. Ashton telah dengan baik mengungkapkannya, di sana prinsip liberal ini telah digantikan dengan prinsip *nullum crimen sine poena*— “tidak boleh ada ‘tindak pidana’ yang tidak dihukum”, entah hukum dengan tersurat menyediakan hukumannya atau tidak. “Hak-hak negara tak berakhir dengan menghukum para pelanggar hukum. Komunitas berhak melakukan apa pun yang perlu untuk melindungi kepentingannya—dari hak ini, memberlakukan hukum sebagaimana adanya hanyalah salah satu persyaratan elementer” (E. B. Ashton, *The Fascist, His State and Mind*, 1937, hlm. 119). Apa yang termasuk pelanggaran “kepentingan komunitas” tentu saja diputuskan oleh penguasa.

atau UUD, atau apakah prinsip itu hanyalah tradisi yang sudah sangat mapan, tidak terlalu penting. Tetapi langsung akan terlihat bahwa apa pun bentuknya, pembatasan apa pun yang diakui atas kekuasaan legislasi menyiratkan pengakuan terhadap hak individu yang tak dapat dicabut, hak-hak manusia yang tak dapat dilanggar. Menyedihkan, tetapi merupakan ciri khas kerancuan yang ke dalamnya banyak cendekiawan kita telah dibawa masuk oleh ide-ide yang bertentangan yang mereka percayai, bahwa seorang pendukung terkemuka perencanaan terpusat yang paling komprehensif, seperti Mr. H. G. Wells, pada waktu yang sama juga menulis pembelaan yang gigih atas Hak-Hak Manusia (*The Rights of Man*). Hak-hak perorangan yang dibela Mr. Wells pasti akan menghalangi perencanaan yang diinginkannya. Sampai batas tertentu, dia tampaknya menyadari dilema ini, karena itulah kita menemukan butir-butir “Deklarasi Hak-hak Manusia” yang diusulkannya sangat dipagari oleh persyaratan-persyaratan sehingga segala signifikansinya hilang. Walaupun, misalnya, Deklarasinya menyatakan bahwa setiap orang “memiliki hak untuk membeli dan menjual tanpa pembatasan diskriminatif apa pun atas barang apa pun yang sah untuk dibeli dan dijual”, yang memang mengagumkan, dia melanjutkan, sehingga seluruh pernyataannya kehilangan makna, dengan menambahkan bahwa ini hanya berlaku bagi kegiatan membeli dan menjual “dalam jumlah tertentu dan dengan persyaratan tertentu yang sejalan dengan kesejahteraan umum”. Tetapi karena tentu saja semua pembatasan yang pernah diberlakukan pada kegiatan membeli dan menjual selalu dikatakan perlu demi mengejar “kesejahteraan umum”, maka sebetulnya tak ada pembatasan yang bisa dicegah klausul ini dengan efektif, dan tak ada hak individu yang dilindungi olehnya.

Atau, mencontohkan klausul dasar lainnya, Deklarasi itu menyatakan bahwa setiap orang “dapat terlibat dalam pekerjaan apa pun yang sah” dan bahwa “dia berhak atas pekerjaan yang dibayar dan bebas memilih aneka ragam pekerjaan yang terbuka bagi dirinya”. Namun tidak dinyatakan siapa yang

harus memutuskan apakah suatu pekerjaan tertentu “terbuka” bagi seorang tertentu, dan provisi tambahan bahwa “dia dapat mengusulkan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan membuat klaimnya dipertimbangkan, diterima, atau ditolak secara terbuka” menunjukkan bahwa Mr. Wells sedang memikirkan otoritas yang dapat memutuskan apakah seseorang “berhak” atas posisi tertentu—yang tentu saja berarti hal sebaliknya dari pemilihan pekerjaan dengan bebas. Dan bagaimana bisa di dalam dunia yang direncanakan “kebebasan berpergian dan bermigrasi” dijamin sementara bukan hanya sarana komunikasi dan mata uang dikontrol, tetapi lokasi industri juga direncanakan, atau bagaimana bisa kebebasan pers dilindungi sementara persediaan dan pasokan kertas dan semua jalur distribusi dikontrol oleh otoritas perencana, adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak banyak dijawab oleh Mr. Wells dan perencana lain mana pun.

Dalam hal ini, jauh lebih konsisten para pembaharu yang makin banyak jumlahnya yang, sejak permulaan gerakan sosialis, telah menyerang ide “metafisis” mengenai hak-hak individu dan menekankan bahwa di dalam dunia yang ditata secara rasional tidak akan ada hak-hak individu tetapi hanya kewajiban-kewajiban individu. Sesungguhnya ini telah menjadi sikap mental yang makin umum di kalangan yang disebut kaum progresif, dan tidak banyak hal yang lebih mudah dipakai untuk menuduh seseorang sebagai reaksioner daripada bahwa dia memprotes suatu peraturan berdasarkan alasan bahwa peraturan itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak individu. Bahkan majalah liberal seperti *The Economist* beberapa tahun lalu menyampaikan kepada kita contoh negeri Prancis, yang telah belajar bahwa

pemerintahan demokratis, tidak kurang dari kediktatoran, harus selalu [*sic*] memiliki kekuasaan tanpa batas secara potensial, *in posse*, tanpa mengorbankan karakter demokratis dan representatif mereka. Tidak ada wilayah hak-hak individu yang tidak mungkin tidak tersentuh pemerintah di dalam urusan-urusan administratif apa pun kondisinya. Tak

ada batas bagi kekuasaan untuk memerintah yang dapat dan harus diambil oleh pemerintah yang telah dipilih dengan bebas oleh rakyat dan dapat sepenuhnya dan dengan terbuka dikritik oleh oposisi.

Hal ini mungkin tak terhindari di dalam situasi perang ketika tentu saja kritik yang bebas dan terbuka pun harus dibatasi. Tetapi kata “selalu” di dalam pernyataan yang dikutip di atas tidak menyiratkan bahwa *The Economist* memandangnya sebagai keharusan dalam masa perang yang patut disesalkan. Namun, sebagai pranata permanen, pandangan ini jelas tidak sejalan dengan pemeliharaan Kedaulatan Hukum, dan ini bermuara langsung pada negara totalitarian. Akan tetapi, inilah pandangan yang harus dipegang semua orang yang ingin pemerintah mengendalikan kehidupan ekonomi.

Ihwal bagaimana bahkan sebuah pengakuan formal atas hak-hak individu, atau atas hak-hak kesetaraan golongan minoritas, kehilangan semua signifikansinya di dalam negara yang berupaya menjalankan kontrol menyeluruh atas kehidupan ekonomi, telah cukup didemonstrasikan oleh pengalaman beraneka ragam negeri-negeri Eropa Tengah. Telah diperlihatkan di sana bahwa adalah mungkin mempraktikkan kebijakan diskriminasi yang kejam terhadap kelompok-kelompok minoritas nasional melalui penggunaan instrumen kebijakan ekonomi yang sah, tanpa pernah melanggar kata-kata tertulis dalam hukum perlindungan legal hak-hak minoritas. Penindasan melalui peranti kebijakan ekonomi ini sangat difasilitasi oleh fakta bahwa industri tertentu atau kegiatan ekonomi tertentu sebagian besar berada di tangan suatu minoritas nasional sehingga banyak tindakan yang tampaknya ditujukan kepada suatu industri atau kelas sosial sebetulnya diarahkan kepada suatu minoritas nasional. Tetapi kemungkinan yang hampir tak terbatas bagi kebijakan diskriminasi dan penindasan, yang dimungkinkan oleh prinsip-prinsip yang tampaknya jinak seperti “kontrol pemerintah atas perkembangan industri” telah secara luas diperlihatkan kepada

semua orang yang ingin melihat bagaimana konsekuensi politis dari perencanaan muncul dalam praktik.



BAB 7

KONTROL EKONOMI DAN TOTALITARIANISME

*Kontrol atas produksi kekayaan adalah kontrol
atas kehidupan manusia itu sendiri.*

Hilaire Belloc

KEBANYAKAN perencana yang telah memikirkan secara mendalam berbagai aspek praktis tugas mereka tidak ragu sedikit pun bahwa ekonomi dipimpin harus dijalankan secara kurang lebih diktatorial. Bahwa sistem yang secara rumit menyalinghubungkan berbagai aktivitas, jika ingin sepenuh kesadaran diarahkan, haruslah diarahkan oleh sekelompok ahli yang bekerja sebagai satu kesatuan, dan bahwa tanggungjawab dan kekuasaan tertinggi harus dipegang oleh seorang panglima, yang tindakannya tidak boleh dibatasi oleh prosedur demokratis, adalah akibat yang teramat jelas dari ide-ide yang mendasari perencanaan terpusat sehingga cukup diterima secara umum. Penghiburan yang ditawarkan dari sang perencana kita adalah bahwa pengaruh otoritarian ini akan berlaku “hanya” untuk perkara ekonomi. Salah seorang perencana Amerika yang paling terkemuka, Mr. Stuart Chase, meyakinkan kita bahwa, misalnya, di dalam masyarakat terencana “demokrasi politik dapat tetap ada jika demokrasi itu hanya mengurus segala sesuatu kecuali ekonomi”. Bujukan semacam ini lazimnya disertai dengan

saran bahwa dengan melepaskan kebebasan di dalam apa yang merupakan, atau harus merupakan, aspek kurang penting kehidupan kita, kita akan mendapatkan kebebasan yang lebih besar di dalam pencapaian nilai-nilai yang lebih tinggi. Atas dasar ini, orang yang membenci ide kediktatoran politik seringkali berkeras mendambakan seorang diktator dalam ekonomi.

Berbagai argumen yang digunakan menarik naluri kita yang paling baik dan seringkali menawan para pemikir yang terbaik. Jika perencanaan betul-betul membebaskan kita dari urusan yang kurang penting dan dengan demikian memudahkan kita hidup sederhana dan bijaksana, siapakah yang berani meremehkan cita-cita semacam itu? Jika kegiatan ekonomi kita sungguh hanya berkaitan dengan sisi inferior atau bahkan sisi kehidupan yang lebih rendah, tentu saja kita harus berusaha dengan segala sarana untuk membebaskan diri kita sendiri dari perhatian yang berlebihan pada tujuan material, dan, dengan melepaskan tujuan ini untuk diperhatikan hanya oleh satu bagian dari mesin utilitarian, membebaskan pikiran kita untuk hanya tertuju pada hal-hal yang lebih bijaksana dari kehidupan.

Sayangnya, kepastian yang orang simpulkan dari kepercayaan ini, bahwa kekuasaan yang dijalankan atas kehidupan ekonomi adalah kekuasaan atas perkara yang hanya memiliki nilai kepentingan sekunder, dan yang membuat mereka memandang enteng ancaman terhadap kebebasan mengejar kepentingan ekonomi kita, sama sekali tidak berdasar. Ini terutama karena kepercayaan yang salah bahwa ada tujuan yang murni hanya ekonomi, yang terpisah dari tujuan-tujuan lain kehidupan. Sesungguhnya, selain kasus patologis seseorang yang kikir, tidak ada hal semacam itu. Tujuan-tujuan pamungkas segala kegiatan makhluk berakal budi tidak pernah bersifat ekonomi. Untuk dikatakan setegas-tegasnya, tidak ada “motif ekonomi”, melainkan hanya ada faktor ekonomi yang mengondisikan usaha keras kita dalam mencapai tujuan-tujuan lain. Apa yang dalam ungkapan biasa secara keliru disebut “motif ekonomi” semata-mata berarti keinginan untuk mendapatkan kesempatan luas, keinginan untuk memperoleh

kekuasaan yang kita perlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang tidak disebutkan.¹ Kita berjuang untuk mendapatkan uang karena uang memberi kita pilihan terluas dalam menikmati hasil usaha kita. Karena di dalam masyarakat modern keterbatasan penghasilan uang kita, yang diakibatkan kemiskinan relatif yang menekan kita, membuat kita merasakan sempitnya ruang gerak, banyak orang jadi membenci uang sebagai simbol keterbatasan itu. Tetapi ini adalah kesalahan memandang medium sebagai penyebab, medium yang melaluinya suatu kekuatan dapat dirasakan. Jauh lebih benar jika kita mengatakan bahwa uang adalah suatu instrumen terbesar kebebasan yang pernah ditemukan manusia. Dalam masyarakat kita sekarang, uanglah yang membuka kisaran pilihan yang menakjubkan bagi orang miskin, kisaran yang lebih besar ketimbang yang pada beberapa generasi lampau hanya terbuka bagi orang kaya. Kita akan memahami lebih baik pentingnya uang jika kita mempertimbangkan apa sebenarnya arti penggantian secara menyeluruh “motif finansial” dengan “insentif-insentif non-ekonomi”, sebagaimana yang secara khusus banyak disarankan kalangan sosialis. Jika semua upah, alih-alih diberikan dalam bentuk uang, diberikan dalam bentuk status publik yang tinggi atau privilese, posisi memiliki kekuasaan atas orang lain, atau memiliki rumah yang lebih baik atau makanan yang lebih baik, kesempatan berpergian atau kesempatan pendidikan, maka hal ini akan berarti semata-mata bahwa si penerima upah itu tidak lagi diizinkan memilih, dan bahwa, siapa pun yang menetapkan upah itu, menentukan bukan hanya besar upah melainkan juga wujud upah yang dinikmati.



Sekali kita menyadari bahwa tidak ada motif ekonomi yang berdiri sendiri dan bahwa keuntungan atau kerugian ekonomi

1 Bandingkan L. Robbins, *The Economic Causes of War*, 1939, Lampiran.

semata-mata adalah keuntungan atau kerugian, sejauh masih dalam kendali kita untuk memutuskan yang mana dari keperluan atau keinginan kita yang terpengaruh, juga lebih mudah bagi kita untuk melihat inti kebenaran yang penting di dalam kepercayaan umum bahwa urusan ekonomi hanya berdampak pada tujuan-tujuan yang kurang penting dari kehidupan, dan untuk memahami sikap yang mencemooh pertimbangan ekonomi “semata”. Dalam arti tertentu, hal ini sangat dapat dibenarkan dalam ekonomi pasar—tapi hanya dalam ekonomi bebas demikian semata. Selama kita dapat dengan bebas memakai penghasilan dan semua milik kita, kerugian ekonomi akan selalu merenggut dari kita hanya apa yang kita pandang sebagai keinginan yang paling kurang penting yang dapat kita penuhi. Kerugian yang “semata-mata” ekonomi dengan demikian adalah kerugian yang dampaknya masih dapat diatur hanya menimpa kebutuhan yang kurang penting, sementara kalau kita mengatakan bahwa nilai kerugian kita jauh lebih besar daripada nilai ekonominya, atau bahwa kerugian ini bahkan tidak dapat diestimasi dalam ukuran ekonomi, berarti bahwa kita harus menanggung kerugian ketika kerugian itu terjadi. Demikian juga halnya dengan keuntungan ekonomi. Perubahan ekonomi, dengan kata lain, lazimnya hanya mempengaruhi sebagian kecil kebutuhan kita. Ada banyak hal yang lebih penting ketimbang hal apa pun yang mungkin dipengaruhi oleh keuntungan atau kerugian ekonomi, yang bagi kita berada jauh di atas kesenangan hidup dan bahkan di atas banyak keperluan kehidupan yang dipengaruhi oleh jatuh bangunnya ekonomi. Dibandingkan dengan semua itu, pertanyaan apakah kita secara ekonomi agak lebih buruk atau lebih baik, tampaknya tidak begitu penting. Ini membuat banyak orang percaya bahwa apa pun yang, seperti perencanaan ekonomi, mempengaruhi hanya kepentingan ekonomi kita, tak boleh dengan serius mengganggu nilai-nilai kehidupan yang lebih mendasar.

Namun ini adalah kesimpulan yang salah. Nilai ekonomi kurang penting bagi kita ketimbang banyak hal lain justru karena

di dalam urusan ekonomi kita bebas memutuskan apa yang bagi kita lebih penting atau apa yang bagi kita kurang penting; atau, bisa kita katakan, karena di dalam masyarakat masa kini *kitalah* yang harus memecahkan problem ekonomi kehidupan kita. Jika tujuan ekonomi kita dikontrol, berarti kita akan selalu dikontrol dalam segala hal kecuali kita mendeklarasikan tujuan spesifik kita. Atau, karena ketika kita mengumumkan tujuan spesifik kita, kita harus mendapatkan persetujuan, kita sebetulnya dikontrol dalam segala hal.

Pertanyaan yang dimunculkan oleh perencanaan ekonomi dengan demikian tidak hanya apakah kita akan dapat memenuhi apa yang kita pandang sebagai kebutuhan kita yang lebih penting atau yang kurang penting dalam cara yang lebih kita sukai, tetapi juga apakah kita yang akan memutuskan apa yang lebih penting atau apa yang kurang penting untuk kita, atau apakah hal ini akan diputuskan oleh si perencana. Perencanaan ekonomi tidak akan hanya berpengaruh pada kebutuhan marginal kita yang kita pikirkan ketika kita mencemoohkan perihal kepentingan ekonomi semata. Sebetulnya, hal ini berarti bahwa kita sebagai individu tidak lagi diizinkan untuk memutuskan apa saja yang kita anggap kebutuhan marginal.

Otoritas yang mengarahkan semua kegiatan ekonomi akan mengontrol bukan hanya bagian dari kehidupan kita yang berkaitan dengan hal-hal inferior; otoritas itu akan mengontrol alokasi semua peranti terbatas untuk semua tujuan kita. Dan siapa pun yang mengontrol semua aktivitas ekonomi, dia juga mengontrol semua sarana yang kita pakai untuk mencapai semua tujuan kita, dan karena itu dialah yang akan memutuskan mana yang harus dipenuhi dan mana yang tidak. Inilah sebetulnya hakikat masalahnya. Kontrol ekonomi bukan semata-mata kontrol atas sektor kehidupan manusia yang dapat dipisahkan dari sektor-sektor lain; ini adalah kontrol atas semua sarana yang kita pakai untuk mencapai semua tujuan kita. Dan siapa pun yang memiliki kontrol tunggal atas semua sarana, harus juga menentukan tujuan-tujuan apa yang mau dicapai, nilai-nilai

mana yang diperingkat lebih tinggi dan mana yang lebih rendah; pendek kata, apa yang harus orang percayai dan perjuangkan. Perencanaan terpusat berarti bahwa masalah ekonomi harus dipecahkan oleh komunitas ketimbang oleh si individu; tetapi hal ini juga mencakup ihwal bahwa komunitaslah, atau wakil-wakilnya, yang akan memutuskan kepentingan relatif dari berbagai kebutuhan yang berbeda-beda.

Apa yang disebut sebagai kebebasan ekonomi yang dijanjikan para perencana kepada kita justru berarti bahwa kita akan dibebaskan dari keharusan memecahkan masalah ekonomi kita sendiri dan bahwa pilihan-pilihan yang pahit yang seringkali juga tercakup di dalamnya akan diputuskan oleh mereka untuk kita. Karena, di dalam peradaban modern, untuk hampir segala sesuatu kita bergantung pada sarana yang disediakan sesama kita, perencanaan ekonomi akan mencakup pengarahan terhadap hampir seluruh kehidupan kita. Hampir tak ada aspek kehidupan kita, dari kebutuhan pokok sampai hubungan kita dengan famili dan teman-teman kita, dari jenis pekerjaan kita sampai ke penggunaan waktu senggang kita, yang tidak terkena “kontrol sadar” dari si perencana.²

-
- 2 Jangkauan kontrol atas semua kehidupan yang dilakukan oleh kontrol ekonomi paling jelas diilustrasikan dalam sistem devisa. Tak ada sesuatu pun yang pada awalnya tampak tidak lebih mempengaruhi kehidupan pribadi ketimbang kontrol negara atas transaksi dalam devisa, dan kebanyakan orang akan memandang masuknya kontrol negara ini dengan acuh tak acuh. Namun pengalaman kebanyakan negeri di daratan Eropa telah mengajar orang-orang yang mau berpikir mendalam untuk memandang langkah ini sebagai perkembangan yang sangat menentukan dalam menuju totalitarianisme dan penindasan kebebasan individu. Ini sebetulnya adalah penyerahan total individu kepada tirani negara, penindasan final atas semua sarana untuk lolos—bukan hanya bagi orang kaya, tetapi bagi setiap orang. Ketika seseorang tak lagi bebas berpergian, tak lagi bebas membeli buku atau jurnal asing, begitu semua sarana untuk berhubungan dengan orang asing dapat dibatasi hanya pada orang-orang yang disetujui oleh opini resmi atau hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dipandang memerlukannya, maka kontrol opini efektif ini jauh lebih besar

Kekuasaan si perencana atas kehidupan pribadi kita akan kurang lengkap jika dia memilih tidak memakai kekuasaannya melalui kontrol langsung atas konsumsi kita. Meskipun suatu masyarakat terencana mungkin sekali dalam batas-batas tertentu menggunakan cara peransuman atau cara yang serupa, kekuasaan si perencana atas kehidupan pribadi kita tidak bergantung pada hal itu, dan akan tetap efektif walaupun konsumen secara nominal bebas menggunakan penghasilannya sendiri sebagaimana disukainya. Sumber kekuasaan atas semua konsumsi, yang di dalam masyarakat terencana dimiliki otoritas penguasa adalah kontrol mereka atas produksi.

Kebebasan kita untuk memilih, di dalam masyarakat yang kompetitif, bergantung pada fakta bahwa, jika seseorang menolak memenuhi keinginan kita, kita dapat berpaling ke orang lain. Tetapi jika kita menghadapi pelaku monopoli, nasib kita berada dalam genggamannya. Dan otoritas yang memandu keseluruhan sistem ekonomi adalah pelaku monopoli yang paling berkuasa yang dapat dibayangkan. Walaupun kita mungkin sekali tak perlu takut bahwa otoritas semacam itu akan mengeksploitasi kekuasaannya dengan cara seperti yang dilakukan pemonopoli swasta, sementara tujuannya patut dianggap bukan untuk melakukan pemerasan demi keuntungan finansial maksimal, otoritas ini tetap saja akan memiliki kekuasaan total untuk memutuskan apa yang akan diberikan kepada kita dan berdasarkan persyaratan apa. Otoritas ini tidak hanya memutuskan komoditas dan pelayanan apa yang akan disediakan, dan dalam jumlah berapa; otoritas ini dapat pula mengarahkan distribusi komoditas ke daerah-daerah dan kelompok-kelompok, dan dapat, jika diinginkannya, mendiskriminasi orang sesuka hatinya. Jika kita ingat mengapa perencanaan didukung oleh kebanyakan orang, dapatkah diragukan bahwa kekuasaan ini akan digunakan untuk mencapai tujuan yang disetujui otoritas penguasa dan untuk

ketimbang yang pernah dilakukan oleh pemerintah absolutis mana pun pada abad ke-17 dan ke-18.

mencegah pengejaran tujuan yang tidak disetujuinya?

Kekuasaan yang dilimpahkan lewat kontrol atas produksi dan atas harga, hampir tak terbatas. Dalam masyarakat kompetitif, harga yang harus kita bayar untuk sesuatu, tingkat harga yang membedakan nilai satu barang dengan barang lain, bergantung pada kuantitas barang-barang lain, yang darinya, dengan mengambil satu, kita membuat anggota-anggota lain dalam masyarakat tidak bisa lagi mengambilnya. Harga ini tidak ditentukan oleh kemauan sadar siapa pun. Dan jika suatu cara mencapai tujuan kita terlalu mahal bagi kita, kita bebas mencoba cara lain. Hambatan di jalan kita muncul bukan karena seseorang tidak menyetujui tujuan kita, melainkan karena fakta bahwa cara dan sarana yang sama juga diinginkan di tempat lain. Di dalam ekonomi terpimpin, di mana sang penguasa mengawasi tujuan-tujuan yang dikejar, pastilah penguasa itu akan menggunakan kekuasaannya untuk membantu beberapa tujuan dan mencegah pencapaian tujuan lain. Bukan pandangan kita sendiri, melainkan pandangan orang lain, tentang apa yang harus kita sukai atau tak sukai, yang akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Dan karena si penguasa memiliki kekuasaan untuk menghambat usaha apa pun yang mau menolak bimbingannya, maka dia akan mengontrol apa yang kita konsumsi dengan hampir sama efektifnya jika dia secara langsung memberitahu kita bagaimana kita harus memakai penghasilan kita.



Namun, bukan hanya dalam kapasitas kita sebagai konsumen, dan bahkan bukan terutama dalam kapasitas itu, kehendak penguasa akan membentuk dan “memandu” kehidupan sehari-hari kita. Sang penguasa akan melakukan hal itu terutama pada kita sebagai produsen. Dua aspek kehidupan kita ini tidak dapat dipisahkan; dan karena bagi kebanyakan kita waktu yang kita gunakan dalam pekerjaan kita adalah bagian besar dari seluruh kehidupan kita, dan karena pekerjaan kita biasanya

juga menentukan di mana tempat dan dengan siapa kita tinggal, kebebasan dalam memilih pekerjaan mungkin sekali lebih penting bagi kebahagiaan kita daripada kebebasan memakai penghasilan kita selama waktu senggang.

Memang benar bahwa di dunia paling ideal pun kebebasan ini akan sangat terbatas. Sedikit saja orang yang pernah mempunyai berlimpah pilihan pekerjaan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita punya pilihan, bahwa kita tak mutlak terikat pada suatu pekerjaan tertentu yang telah dipikirkan bagi kita, atau yang mungkin telah kita pilih di masa lampau, dan bahwa jika suatu posisi pekerjaan menjadi sangat membosankan, atau jika hati kita telah terpicut oleh pekerjaan lain, hampir selalu ada jalan bagi orang yang mampu, meskipun pasti ada ongkos yang dibayar demi tujuannya itu. Sungguh perasaan yang tak tertahankan jika kita tahu tidak ada apa pun yang bisa kita lakukan untuk mengubah seluruh upaya kita; dan bahkan seandainya pun kita tidak pernah punya kekuatan mental untuk berkorban semestinya, pengetahuan bahwa kita dapat luput jika kita berupaya cukup keras membuat posisi yang tak tertahankan itu menjadi tertahankan.

Ini bukan untuk menyatakan bahwa semua ini sudahlah yang terbaik bagi dunia kita saat ini, atau di zaman lalu kita yang paling liberal, dan bahwa tidak banyak lagi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki peluang pilihan yang terbuka bagi rakyat. Dalam hal ini, sebagaimana juga dalam hal-hal lain, negara dapat berbuat banyak dalam membantu penyebaran pengetahuan dan informasi dan dalam membantu mobilitas. Tetapi poinnya adalah bahwa jenis tindakan negara, yang sungguh-sungguh akan meningkatkan peluang, adalah tindakan yang justru bertentangan dengan “perencanaan” yang sekarang ini umumnya didukung dan dipraktikkan. Adalah benar bahwa kebanyakan perencana menjanjikan bahwa, dalam dunia baru yang direncanakan itu, pilihan bebas atas pekerjaan akan dipertahankan dengan seksama atau bahkan ditingkatkan. Tetapi dalam hal ini mereka menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin

mereka penuh. Jika mereka ingin merencanakan, mereka harus mengontrol masuknya orang ke bidang-bidang usaha dan pekerjaan yang berbeda-beda, atau mengontrol tingkat upah, atau keduanya. Dalam hampir semua kasus perencanaan yang dikenal, menegakkan kontrol dan pembatasan semacam itu adalah salah satu tindakan yang pertama-tama dilakukan. Jika kontrol semacam itu dipraktikkan dan dijalankan secara umum oleh otoritas perencana tunggal, maka tidak sulit dibayangkan apa jadinya “pilihan bebas atas pekerjaan” yang dijanjikan itu. “Kebebasan memilih” akan menjadi sesuatu yang murni fiktif, suatu janji semata untuk tidak mempraktikkan diskriminasi di mana padahal pada hakikatnya diskriminasi pasti dilakukan, dan di mana yang bisa orang harapkan hanyalah bahwa pemilihan akan dilakukan berdasarkan apa yang dipercaya pihak otoritas sebagai alasan-alasan objektif.

Sedikit berbeda halnya jika otoritas perencana membatasi kegiatannya pada upaya mengutak-atik persyaratan pekerjaan dan berupaya meregulasi jumlah upah berdasarkan persyaratan itu. Dengan menetapkan jumlah upah, maka otoritas ini akan bisa menghalangi sekelompok orang masuk ke jenis usaha tertentu, tidak kalah efektifnya dengan secara tegas melarang mereka. Seorang perempuan yang kurang menarik yang berkeras ingin menjadi pramuniaga, seorang pria yang sakit-sakitan yang telah memutuskan untuk bekerja di bidang di mana kelemahan tubuhnya merupakan sebuah kekurangan besar, serta orang yang pada umumnya tampak kurang mampu atau kurang cocok untuk pekerjaan tertentu, tidaklah dengan sendirinya tersingkir dalam masyarakat kompetitif. Jika mereka menilai tinggi posisi yang mereka cari, mereka akan seringkali dapat memulai pekerjaan mereka dengan melakukan pengorbanan finansial, dan belakangan kemudian mereka akan berhasil berkat mutu pekerjaan mereka, yang mula-mula tidak begitu kelihatan jelas. Tetapi kalau penguasa menetapkan jumlah upah untuk semua kategori pekerjaan dan penyelesaian semua calon pegawai dilakukannya melalui tes objektif, maka kekuatan tekad mereka untuk bekerja

tidak akan bernilai banyak. Seorang pencari pekerjaan yang kualifikasinya tidak sesuai dengan tipe standar, atau yang wataknya tidak lazim, tidak akan lagi dapat membuat kesepakatan khusus dengan si pemberi kerja yang memiliki kebutuhan khusus yang sesuai dengan karakter si pencari kerja: orang yang lebih menyukai jam kerja yang tak teratur atau bahkan yang lebih menyukai kehidupan gampangan dan tak merepotkan, yang sudah puas dengan penghasilan yang kecil dan mungkin tak pasti, ketimbang jam kerja dan penghasilan rutin yang teratur, tidak akan lagi memiliki pilihan. Kondisinya, tanpa kecuali, akan seperti kondisi yang sampai derajat tertentu pasti terdapat dalam suatu organisasi besar—atau malah lebih buruk lagi, karena tidak akan ada kemungkinan untuk lepas dari kondisi itu. Kita tidak akan bisa lagi bebas bersikap rasional atau efisien hanya ketika dan di mana kita berpikir hal itu patut kita lakukan. Kita semua akan harus taat kepada standar yang ditetapkan otoritas perencana dengan kaku untuk menyederhanakan tugasnya. Agar tugasnya yang sangat besar itu dapat dikelola dan dikendalikan, otoritas itu akan harus mengurangi diversitas kemampuan manusia dan berbagai kecenderungannya sampai tinggal sedikit kategori yang terdiri dari unit-unit yang dapat dengan mudah saling dipertukarkan, dan sama sekali tidak boleh memperhatikan perbedaan kecil antar individu. Meskipun tujuan yang dinyatakan dari kegiatan perencanaan adalah agar manusia tidak lagi menjadi sekadar sarana, namun faktanya—karena mustahil memperhitungkan semua kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing orang di dalam perencanaan—orang perorangan akan, lebih daripada sebelumnya, menjadi sekadar sarana, yang akan digunakan oleh otoritas demi abstraksi seperti “kesejahteraan sosial” atau “kebaikan masyarakat.”



Bahwa di dalam masyarakat kompetitif kebanyakan barang dapat dimiliki dengan membelinya pada harga tertentu—

kendatipun seringkali kita harus membayar dengan harga yang terlalu tinggi—adalah fakta yang teramat penting. Namun, pilihan alternatifnya bukanlah kebebasan sepenuhnya untuk memilih, melainkan perintah dan pelarangan yang harus ditaati dan, sebagai usaha terakhir, kemurahan hati pihak yang kuat.

Yang penting dari kerancuan yang sedang melanda semua pokok diskusi ini adalah kritik terhadap kenyataan bahwa di dalam masyarakat kompetitif hampir segala sesuatu dapat dibeli pada harga tertentu. Jika orang yang mengajukan protes, bahwa nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi janganlah dimasukkan ke dalam “mata rantai uang tunai”, menuntut bahwa kita tidak boleh dibiarkan mengorbankan kebutuhan kita yang lebih rendah demi menjaga nilai-nilai yang lebih tinggi, dan bahwa pilihan-pilihan terhadap berbagai nilai itu harus dilakukan orang lain untuk kita, maka protes ini harus dipandang sebagai sesuatu yang agak aneh dan hampir-hampir membuktikan tidak adanya penghargaan tinggi terhadap harkat dan martabat individu. Bahwa kehidupan dan kesehatan, keindahan dan kebajikan, kehormatan dan kedamaian pikiran, seringkali dapat dipelihara hanya dengan mengeluarkan ongkos material yang besar, dan bahwa seseorang harus membuat keputusan memilih, adalah hal-hal yang tak dapat disangkal, sama seperti kita semua kadang kala tidak siap untuk memberikan pengorbanan material yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai yang lebih tinggi dari segala bahaya. Ambillah sebuah contoh saja: kita pasti dapat mengurangi korban kecelakaan kendaraan bermotor sampai ke nol jika kita mau menanggung biayanya—seandainya tak ada jalan lain apa pun—dengan melenyapkan semua kendaraan bermotor. Dan sama juga halnya untuk ribuan contoh lain di mana kita secara terus-menerus mempertaruhkan kehidupan dan kesehatan kita, dan juga semua nilai yang baik dari semangat kita, diri kita sendiri dan diri sesama kita, untuk meningkatkan apa yang pada waktu yang sama kita remehkan sebagai kesenangan material kita. Ihwalnya tidak bisa lain, sebab semua tujuan kita bersaing memperebutkan sumber daya yang sama; dan kita tidak bisa lain

pasti akan berjuang keras demi nilai-nilai absolut ini jika nilai-nilai ini terancam.

Bahwa orang ingin dibebaskan dari pilihan pahit yang ditimpakan pada mereka oleh fakta-fakta keras tidaklah mengherankan. Tetapi sedikit saja orang yang ingin dibebaskan menurut cara yang dipikirkan oleh orang lain untuk mereka. Orang hanya ingin bahwa pilihan semacam itu tidak perlu sama sekali. Dan mereka sebenarnya sangat ingin percaya bahwa pilihan itu sesungguhnya tidak diperlukan, bahwa pilihan itu hanya diwajibkan atas mereka oleh sistem ekonomi tertentu yang kita jalani. Apa yang mereka benci sebetulnya adalah fakta adanya suatu problem ekonomi.

Di tengah angan-angan mereka akan tidak adanya lagi problem ekonomi, orang termakan percakapan tak bertanggungjawab tentang “potensi keberlimpahan”, yang, seandainya ini suatu kenyataan, memang akan berarti bahwa tidak ada lagi problem ekonomi yang membuat orang harus memilih. Tetapi meskipun jerat ini telah dimanfaatkan propaganda sosialis, dalam bermacam-macam nama, sepanjang keberadaan sosialisme, ini tetap saja sama sekali tak benar, sama tidak benarnya seperti ketika pertama kali dipakai lebih dari 100 tahun lampau. Dalam seluruh kurun waktu itu, tak satu pun orang yang menggunakan jerat ini telah menghasilkan perencanaan yang dapat dijalankan dengan efektif mengenai bagaimana produksi dapat ditingkatkan untuk menghilangkan, bahkan di Eropa Barat saja, apa yang kita pandang sebagai kemiskinan—apalagi kemiskinan dunia secara keseluruhan. Pembaca dapat mencamkan bahwa siapa pun yang berbicara tentang potensi keberlimpahan, orang ini entah tidak jujur atau tidak memahami apa yang sedang dia bicarakan.³

3 Untuk menjustifikasi kata-kata yang keras ini, kesimpulan berikut dapat dikutip, kesimpulan yang ditarik oleh Mr. Colin Clark, salah seorang ahli statistik ekonomi muda usia yang paling terkenal, dan yang tak diragukan memiliki pandangan progresif dan ilmiah yang akurat, di dalam bukunya *Conditions of Economic Progress* (1940, hlm. 3-4): “frasa yang sering diulang-ulang mengenai kemiskinan di tengah keberlimpahan, dan problem produksi yang pasti akan teratasi jika kita

Namun harapan yang sangat salah inilah yang membawa kita ke jalan menuju perencanaan.

Sementara gerakan populer masih mendapatkan keuntungan dari kepercayaan yang salah ini, klaim bahwa ekonomi terencana akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar ketimbang sistem kompetitif sedang secara berangsur-angsur cepat ditinggalkan oleh kebanyakan orang yang mempelajari masalah ini. Bahkan cukup banyak ekonom yang memegang pandangan sosialis, yang telah dengan serius mengkaji masalah perencanaan terpusat, kini sudah puas bisa berharap bahwa efisiensi masyarakat terencana akan menyamai efisiensi sistem kompetitif; mereka mendukung perencanaan tidak lagi karena produktivitasnya yang superior melainkan karena perencanaan akan memungkinkan kita untuk menjamin distribusi kekayaan yang lebih adil dan lebih merata. Sesungguhnya ini adalah satu-satunya argumen bagi perencanaan yang dapat dengan serius dipertimbangkan. Tak dapat dibantah bahwa jika kita ingin menjamin distribusi kekayaan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, jika kita ingin dengan sadar memutuskan siapa harus memiliki apa, kita harus merencanakan semua sistem ekonomi. Tetapi pertanyaan tetap ada, apakah biaya yang harus kita bayar bagi perwujudan

memahami problem distribusi, ternyata merupakan salah satu klise modern yang paling tidak benar.... Kurangnya penggunaan kapasitas produksi adalah masalah yang cukup penting hanya di Amerika Serikat, meskipun dalam kurun tertentu juga pernah menjadi masalah penting di Britania Raya, Jerman, dan Prancis, tetapi untuk kebanyakan tempat di dunia, keadaan ini sepenuhnya sekunder dibandingkan fakta yang lebih penting bahwa, dengan sumber-sumber produktif yang digunakan sepenuhnya, mereka hanya dapat memproduksi sangat sedikit. Zaman keberlimpahan masih lama datangnya.... Jika pengangguran yang dapat dicegah dieliminasi di seluruh siklus perdagangan, hal ini akan berarti kemajuan besar dalam standar kehidupan populasi Amerika Serikat, tetapi dilihat dari sudut pandang dunia secara keseluruhan, hal ini hanya akan berkontribusi kecil bagi problem yang jauh lebih besar dalam meningkatkan penghasilan real bagian terbesar penduduk dunia ke standar yang beradab.”

ideal keadilan seseorang tidak akan lebih mengecewakan dan lebih menindas ketimbang yang pernah disebabkan oleh permainan bebas dari berbagai kekuatan ekonomi yang sering disalahgunakan itu.



Kita pasti menipu diri sendiri jika di tengah kekhawatiran semacam ini kita lalu menghibur diri dengan pikiran bahwa pengadopsian perencanaan terpusat berarti suatu gerak kembali semata, setelah periode singkat ekonomi bebas, ke ikatan dan regulasi yang telah mengatur aktivitas ekonomi sepanjang masa, dan bahwa, karena itu, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi semestinya tidak lebih besar ketimbang yang pernah terjadi sebelum masa *laissez-faire*. Ini adalah suatu ilusi yang berbahaya. Bahkan selama kurun sejarah Eropa ketika sedang terjadi regimentasi kehidupan ekonomi secara ekstrim, yang terjadi tidaklah lebih daripada sekadar penciptaan kerangka hukum umum dan semi-permanen yang di dalamnya individu tetap punya wilayah bebas yang luas. Peranti kontrol yang tersedia pada masa itu tak cukup untuk menjalankan lebih daripada sekadar pengarahan yang sangat umum. Dan bahkan di tempat di mana kontrol berjalan paling menyeluruh, kontrol itu hanya mencakup berbagai aktivitas seseorang yang terlibat dalam pembagian kerja masyarakat. Sejauh dalam wilayah di mana dia hidup dengan mengandalkan hasil kerjanya sendiri, dia bebas bertindak sesuai pilihannya sendiri.

Situasi sekarang sudah lain sama sekali. Selama masa liberal, penggolongan-penggolongan pekerjaan yang makin lama makin banyak telah menciptakan situasi di mana hampir setiap aktivitas kita merupakan bagian dari proses sosial. Ini adalah perkembangan yang tidak dapat kita balik arahnya sebab hanya dengan keadaan inilah kita dapat mempertahankan penduduk yang sudah bertambah besar pada standar kehidupan masa kini. Namun, sebagai akibatnya, perencanaan terpusat yang

menggantikan kompetisi akan membutuhkan pengarah terpusat atas jauh lebih banyak bagian kehidupan kita ketimbang yang pernah dicoba sebelumnya. Pengarahan terpusat ini tidak berhenti pada apa yang kita anggap sebagai aktivitas ekonomi kita, karena kini kita, dalam hampir setiap bagian kehidupan kita, bergantung pada aktivitas ekonomi orang lain.⁴ Semangat untuk “memenuhi secara kolektif kebutuhan kita”, yang dengannya kalangan sosialis kita telah dengan sangat baiknya mempersiapkan jalan bagi totalitarianisme, dan yang menghendaki kita menikmati kesenangan kita dan juga kebutuhan kita pada waktu yang ditentukan dan dalam bentuk yang diresepkan, tentu saja sebagian dimaksudkan sebagai sarana pendidikan politik. Tetapi ini juga merupakan akibat tekanan politik yang timbul dari perencanaan, yang pada dasarnya merampas hak kita untuk memilih, dengan maksud memberikan kepada kita apa pun yang paling cocok dengan perencanaan terpusat dan menurut saat yang ditentukan oleh perencanaan itu.

Seringkali dikatakan bahwa kebebasan politik tak bermakna tanpa kebebasan ekonomi. Hal ini memang betul, namun dalam arti yang hampir berlawanan dengan ungkapan yang dipakai oleh para perencana kita. Kebebasan ekonomi, yang merupakan prasyarat bagi seluruh kebebasan lain, tidak dapat merupakan kebebasan dari kewajiban mengurus ekonomi, yang kalangan sosialis janjikan kepada kita, dan yang dapat diperoleh hanya dengan sekaligus melepaskan seorang individu dari keharusan dan kemampuan untuk memilih. Kebebasan ini mustilah kebebasan kita untuk melakukan aktivitas ekonomi kita yang,

4 Bukan kebetulan bahwa di negeri totalitarian, entah itu Rusia atau Jerman atau Italia, persoalan bagaimana mengorganisasi waktu senggang menjadi masalah perencanaan. Orang Jerman untuk masalah ini bahkan telah menciptakan sebuah kata majemuk yang mengejutkan dan memuat kontradiksi internal *Freizeitgestaltung* (harfiah: “penentuan penggunaan waktu senggang”), seolah-olah masih merupakan “waktu senggang” jika waktu itu harus digunakan dalam cara yang ditetapkan pihak penguasa.

dengan hak memilih, sekaligus juga mengandung risiko dan tanggungjawab yang melekat pada hak tersebut.



BAB 8

OLEH SIAPA, PADA SIAPA?

*Kesempatan terbaik yang pernah diberikan
kepada dunia telah dicampakkan
karena semangat yang bergelora untuk
mencapai kesetaraan telah membuat harapan
meraih kebebasan sia-sia.*

Lord Acton

ADALAH signifikan bahwa salah satu keberatan yang paling umum terhadap kompetisi adalah bahwa kompetisi itu “buta”. Bukannya tidak relevan jika kita ingat bahwa bagi orang kuno kebutaan adalah ciri dewi keadilan. Meskipun tidak banyak lagi kesamaan lain antara kompetisi dan keadilan, keduanya sama-sama dihargai karena tidak pilih kasih terhadap orang. Ihwal bahwa adalah mustahil untuk meramalkan siapa yang akan diuntungkan atau kepada siapa bencana akan menimpa, bahwa hadiah dan hukuman tidak dibagi-bagikan berdasarkan pandangan seorang tertentu tentang jasa baik atau jasa buruk orang lain, melainkan bergantung pada kemampuan dan keberuntungan mereka, adalah sama pentingnya dengan ihwal bahwa dalam menyusun peraturan hukum kita tidak boleh bisa memprediksi mana orang tertentu yang akan diuntungkan dan yang akan dirugikan ketika peraturan itu diterapkan. Dan hal ini jelas benar karena di dalam kompetisi, kebetulan dan nasib baik seringkali sama pentingnya dengan keahlian dan kebijaksanaan dalam menentukan nasib orang-orang yang berbeda.

Pilihan yang terbuka bagi kita bukanlah antara sistem yang di dalamnya setiap orang akan mendapatkan apa yang patut dia dapatkan menurut standar universal dan absolut mengenai hak, dan sistem lain yang di dalamnya perolehan orang perorangan ditentukan antara lain oleh kebetulan atau oleh kesempatan yang baik atau kesempatan yang buruk; melainkan antara sistem di mana kehendak sedikit orang menentukan siapa yang harus mendapatkan apa, dan sistem lain yang bergantung, setidaknya sebagian, pada kemampuan dan usaha orang yang berkepentingan dan, sebagian lagi, pada situasi yang tak dapat diprediksi sebelumnya. Ini tidaklah kurang relevan karena di dalam sistem usaha bebas, kesempatan atau peluang yang ada tidaklah sama, sebab sistem semacam itu harus didasarkan pada kepemilikan pribadi dan (meskipun mungkin tidak dengan keharusan yang sama) pada warisan, dengan perbedaan-perbedaan dalam kesempatan yang diciptakan hal-hal ini. Sesungguhnya ada alasan kuat untuk mengurangi ketidakadilan dalam kesempatan yang diakibatkan oleh perbedaan bawaan sejak lahir, dan karena hal ini bisa dilakukan tanpa menghancurkan sifat netral dari proses yang melaluinya setiap orang harus mengambil kesempatannya sendiri, dan tak ada pandangan orang, mengenai apa yang benar dan apa yang dibutuhkan, menganulir pandangan orang lain.

Fakta bahwa kesempatan yang terbuka bagi orang miskin di dalam masyarakat kompetitif jauh lebih terbatas ketimbang kesempatan bagi orang kaya, tidaklah membuat fakta berikut ini kurang benar, bahwa di dalam masyarakat semacam itu, orang miskin jauh lebih bebas ketimbang seseorang yang memiliki kesenangan material jauh lebih besar di dalam masyarakat jenis lain. Meskipun, di dalam kompetisi, probabilitas seseorang yang mulai dengan kemiskinan akan memperoleh kekayaan besar jauh lebih kecil ketimbang seseorang yang telah mewarisi kepemilikan, tapi kemungkinan menjadi kaya itu tetap terbuka bagi orang miskin, bahkan, sistem kompetitif adalah satu-satunya sistem di mana kesempatan menjadi kaya bergantung hanya pada dirinya sendiri dan bukan pada kemurahan hati penguasa, dan di mana

tidak seorang pun dapat mencegah orang lain untuk mencoba mendapatkan kekayaan. Justru karena kita telah lupa apa artinya kehilangan kebebasan, maka kita seringkali gagal melihat fakta yang sudah sangat jelas bahwa dalam arti yang sangat real seorang pekerja yang tak memiliki keahlian dan dibayar murah di negeri ini memiliki lebih banyak kebebasan untuk membentuk kehidupannya ketimbang banyak pengusaha kecil di Jerman atau seorang insinyur atau manajer yang dibayar jauh lebih baik di Rusia. Entah mengenai hal mengubah pekerjaannya atau tempat tinggalnya, atau mengenai hal menganut pandangan tertentu atau mengenai hal menghabiskan waktu senggangnya dengan cara tertentu, meskipun kadang-kadang biaya yang harus dia bayar dalam mengikuti kecenderungan-kecenderungannya bisa tinggi, dan bagi banyak orang tampak sangat tinggi, sudah pasti bahwa tidak ada hambatan mutlak baginya, tak ada bahaya terhadap keamanan tubuh dan kebebasan, yang mengungkungnya, melalui pemakaian kekuasaan secara paksa, pada tugas dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh seorang yang berjabatan lebih tinggi dari dirinya.

Bahwa ideal keadilan yang dipegang kebanyakan kaum sosialis akan terwujud jika penghasilan dari kepemilikan pribadi dihapuskan dan perbedaan antara penghasilan-penghasilan yang didapat orang yang berlainan tetap dipertahankan seperti apa adanya sekarang, adalah benar.¹ Apa yang dilupakan orang-

1 Mungkin kita terbiasa melebih-lebihkan kisaran di mana ketimpangan pendapatan telah terutama disebabkan oleh pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan, dan karenanya juga kisaran di mana ketimpangan besar ini bisa dihilangkan melalui penghapusan pendapatan yang bersumber dari kepemilikan. Sedikit informasi yang kita punyai mengenai distribusi pendapatan di Rusia Soviet tidak menunjukkan bahwa ketimpangan di sana jauh lebih kecil ketimbang di dalam masyarakat kapitalis. Max Eastman (*The End of Socialism in Russia*, 1937, hlm. 30-34) memberikan sejumlah informasi dari sumber-sumber resmi Rusia yang menunjukkan bahwa perbedaan antara upah tertinggi dan upah terendah yang dibayar di Rusia sama peringkat skalanya (kira-kira 50 berbanding 1) dengan keadaan di Amerika Serikat; dan Leon

orang ini adalah bahwa, dengan mentransfer semua kepemilikan atas sarana produksi ke tangan negara, mereka menempatkan negara dalam posisi yang melaluinya tindakannya mau tidak mau menentukan semua pendapatan lain. Kekuasaan yang diberikan dengan cara ini kepada negara, dan tuntutan bahwa negara harus menggunakannya untuk “merencanakan”, berarti tak bisa lain selain bahwa negara harus menggunakannya dalam kesadaran penuh atas semua akibatnya.

Salahlah mempercayai bahwa kekuasaan yang diberikan kepada negara dengan cara itu hanya sekadar ditransfer kepadanya dari orang lain. Ini adalah kekuasaan yang baru diciptakan dan yang tidak dimiliki siapa pun di dalam masyarakat kompetitif. Selama kepemilikan terbagi-bagi di antara banyak pemilik, tak seorang pun dari mereka, yang bertindak sendiri-sendiri itu, memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan pendapatan dan posisi orang tertentu—tak seorang pun terikat padanya kecuali oleh fakta bahwa dia dapat menawarkan kondisi-kondisi yang lebih baik ketimbang orang lain.

Apa yang telah dilupakan generasi kita adalah bahwa sistem kepemilikan pribadi adalah penjamin kebebasan yang paling penting, bukan hanya bagi orang yang memiliki hak milik, tetapi tak kurang bagi orang yang tidak memilikinya. Hanyalah karena kontrol atas peranti-peranti produksi terbagi-bagi di antara banyak orang yang bertindak sendiri-sendiri, maka akibatnya tak seorang pun memiliki kekuasaan penuh atas diri kita, dan kita sebagai individu dapat memutuskan apa yang akan kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Jika semua sarana produksi dipusatkan pada satu tangan tunggal, entah tangan ini dianggap sebagai tangan “masyarakat” sebagai suatu keseluruhan, atau sebagai

Trotsky, menurut artikel yang dikutip James Burnham (*The Managerial Revolution*, 1941, hlm. 43), mengestimasi pada 1939 bahwa “11 atau 12 persen penduduk lapisan atas Soviet kini menerima kurang lebih 50 persen pendapatan nasional. Diferensiasi ini lebih tajam daripada di Amerika Serikat, di mana 10 persen penduduk kalangan atas menerima kurang lebih 35 persen pendapatan nasional.”

tangan seorang diktator, siapa pun juga yang melakukan kontrol ini memiliki kekuasaan penuh atas diri kita. Siapakah yang dapat dengan serius meragukan bahwa seorang anggota minoritas rasial atau religius kecil akan lebih bebas jika tidak memiliki hak milik pribadi selama sesama anggota komunitasnya memiliki hak milik dan karenanya dapat mempekerjakannya, ketimbang jika kepemilikan pribadi ditiadakan dan dia menjadi pemilik saham nominal di dalam hak milik komunal? Atau bahwa kekuasaan yang dimiliki seorang kaya raya, yang mungkin saja tetangga saya atau majikan saya, atas diri saya, sangat jauh kurang ketimbang kekuasaan yang dimiliki pejabat, yang memiliki kekuasaan koersif negara, dan yang pada kebijaksanaannya bergantung ihwal apakah dan bagaimanakah saya harus diizinkan hidup atau bekerja? Dan siapakah yang akan menyangkal bahwa dunia yang di dalamnya orang kaya memiliki kekuasaan masih lebih baik ketimbang dunia yang di dalamnya hanya orang yang sudah memiliki kekuasaan dapat memperoleh kekayaan?

Adalah sangat menyedihkan, sekaligus memberi harapan, ketika mendapati bahwa seorang komunis tua yang terpandang seperti Mr. Max Eastmen menemukan kebenaran ini:

Tampak jelas bagi saya kini [dia menulis dalam sebuah artikel mutakhir]—meskipun harus dikatakan bahwa saya lambat sampai pada kesimpulan ini—bahwa pranata kepemilikan pribadi adalah salah satu hal utama yang telah memberikan kepada manusia sejumlah terbatas kebebasan dan kesetaraan yang Marx harapkan akan tersedia tanpa batas dengan meniadakan pranata ini. Cukup mengherankan bahwa Marx adalah orang pertama yang melihat hal ini. Jika kita menengok ke belakang, dialah yang menginformasikan kepada kita bahwa evolusi kapitalisme swasta dengan pasar bebasnya merupakan prakondisi bagi evolusi semua kebebasan demokratik kita. Tak pernah terpikir olehnya, jika kita melihat ke depan, bahwa jika halnya demikian, maka kebebasan-kebebasan lain itu mungkin akan hilang apabila

pasar bebas dihapuskan.²

Dalam menjawab kekhawatiran semacam itu, kadangkala dikatakan bahwa tak ada alasan mengapa si perencana harus menentukan pendapatan orang perorang. Kesulitan sosial dan politis, yang tercakup dalam keputusan mengenai andil orang yang berlainan di dalam pendapatan nasional, sangatlah jelas sehingga si perencana yang paling mendarah-daging pun dapat saja ragu-ragu sebelum dia memberikan tugas ini kepada otoritas apa pun. Mungkin sekali setiap orang yang menyadari betapa rumit hal ini akan lebih suka membatasi perencanaan hanya pada produksi, menggunakan perencanaan hanya untuk mengamankan “pengorganisasian industri yang rasional”, dengan menyerahkan distribusi pendapatan sebisa mungkin kepada kekuatan-kekuatan netral. Meskipun mustahil mengarahkan industri tanpa kekuasaan tertentu untuk mengatur distribusi, dan meskipun tak ada perencana yang mau distribusi sepenuhnya diserahkan kepada kekuatan pasar, mereka semua mungkin sekali akan lebih suka membatasi diri hanya pada kegiatan pemantauan bahwa distribusi ini berlangsung sejalan dengan aturan umum tertentu mengenai keadilan dan kesetaraan, bahwa ketimpangan yang ekstrim dihindari, dan bahwa hubungan antara besarnya upah kelas-kelas mayoritas berlangsung adil, tanpa memikul tanggungjawab untuk menentukan posisi orang tertentu di dalam kelas mereka, atau untuk menetapkan peringkat dan diferensiasi di antara kelompok-kelompok kecil dan individu-individu.

Telah kita lihat bahwa interdependensi yang erat antarsemua fenomena ekonomi menyulitkan usaha menghentikan perencanaan persis di mana kita inginkan, dan bahwa, ketika jalannya pasar bebas terganggu sampai melewati tingkat tertentu, si perencana akan terpaksa memperluas kontrolnya sampai mencakup segala sesuatu. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi ini, yang menjelaskan mengapa kontrol yang disengaja mustahil

2 Max Eastman dalam *The Reader's Digest*, Juli 1941, hlm. 39.

diakhiri persis di mana kita inginkan, dengan kuat didukung oleh kecenderungan sosial atau politik tertentu yang makin terasa kekuatannya ketika perencanaan merambah lebih luas.

Ketika makin menjadi benar, dan diakui secara umum, bahwa posisi individu ditentukan bukan oleh kekuatan-kekuatan netral, bukan sebagai hasil usaha kompetitif dari banyak orang, melainkan oleh keputusan yang dengan sadar diambil otoritas, maka sikap orang terhadap posisi mereka dalam tatanan sosial mau tak mau berubah. Akan selalu ada ketimpangan yang tampak tak adil bagi orang yang mengalaminya, kekecewaan yang tampak tak patut, dan hantaman nasib buruk yang tak layak dialami oleh orang yang tertimpa. Tetapi ketika hal-hal itu terjadi di dalam masyarakat yang dengan sadar diarahkan, cara orang bereaksi akan sangat berbeda apabila status mereka bukan diakibatkan pilihan sadar siapa pun. Ketimpangan tak diragukan akan lebih rela ditanggung, dan tidak terlalu mempengaruhi martabat orang, jika ditentukan oleh kekuatan netral, ketimbang ketika ini terjadi karena sudah dirancang demikian. Dalam masyarakat kompetitif, orang tidak terhina, martabatnya tidak terpukul, jika kepadanya diberitahukan bahwa perusahaan tidak lagi memerlukan jasanya, atau bahwa perusahaan itu tidak dapat menawarkan kepadanya pekerjaan yang lebih baik. Adalah benar bahwa dalam periode pengangguran massal yang berkepanjangan, dampaknya pada banyak orang dapat sangat serupa. Tetapi ada metode lain yang lebih baik untuk mencegah momok ini ketimbang pengarahannya terpusat. Tetapi, pengangguran atau kehilangan penghasilan yang akan selalu mempengaruhi sejumlah orang di dalam masyarakat apa pun, akan bersifat kurang memalukan jika terjadi sebagai akibat nasib buruk dan bukan dengan sengaja dibebankan oleh otoritas. Bagaimana pun pahitnya pengalaman itu, akan jauh lebih buruk keadaannya di dalam masyarakat terencana. Di situ yang harus diputuskan bukan apakah seseorang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, melainkan apakah dia berguna untuk sesuatu, dan seberapa bermanfaatnya dia. Posisinya dalam kehidupan harus ditentukan baginya oleh orang lain.

Sementara orang akan pasrah kepada penderitaan yang dapat menimpa siapa pun, mereka tidak akan dengan mudah menyerah kepada penderitaan yang merupakan akibat dari keputusan penguasa. Bisa saja buruk jika orang hanya menjadi komponen di dalam mesin netral; tetapi adalah jauh lebih buruk jika kita tidak dapat lagi melepaskan diri dari keadaan itu, jika kita terikat pada tempat kita dan pada atasan kita yang telah dipilhkan untuk kita. Ketidakpuasan setiap orang terhadap nasibnya sendiri akan tak pelak lagi berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa nasibnya itu adalah akibat dari keputusan manusia yang disengaja.

Sekali pemerintah mulai menjalankan perencanaan demi keadilan, pemerintah ini tidak dapat menolak tanggung jawab atas nasib atau kedudukan setiap orang. Dalam masyarakat terencana, kita semua akan tahu bahwa kita lebih berhasil atau gagal dibandingkan orang lain bukan karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh siapa pun, dan yang tidak mungkin dilihat sebelumnya dengan pasti, melainkan karena penguasa menghendakinya demikian. Dan semua upaya kita yang bertujuan memperbaiki posisi kita akan harus diarahkan bukan untuk memperbaiki sebelumnya atau untuk mempersiapkan, sebaik yang dapat kita lakukan, keadaan yang tidak dapat kita kendalikan, melainkan untuk menarik hati otoritas yang memiliki semua kekuasaan. Mimpi buruk para pemikir politik Inggris abad ke-19 adalah: negara yang di dalamnya “tidak akan ada jalan atau kesempatan untuk menjadi kaya dan mendapatkan kehormatan kecuali melalui pemerintah”³ akan terwujud total sampai ke tingkat yang tak pernah mereka bayangkan—kendatipun cukup dikenal di beberapa negeri yang sejak masa itu telah masuk ke dalam totalitarianisme.



3 Kata-kata asli Disraeli muda.

Begitu negara mengambil tugas merencanakan seluruh kehidupan ekonomi, maka masalah mengenai posisi yang patut bagi setiap orang dan kelompok yang berlainan mau tak mau akan menjadi problem politik yang serius. Ketika kekuasaan koersif negara akan sendirian memutuskan siapa yang harus memiliki apa, satu-satunya kekuasaan yang layak dimiliki akan berupa andil di dalam penerapan kekuasaan yang mengarahkan ini. Tidak akan ada masalah sosial atau masalah ekonomi yang bukan masalah politik dalam pengertian bahwa pemecahan atas masalah itu akan bergantung hanya pada siapa yang menggunakan kekuasaan koersif, dan pada pandangan siapa yang akan unggul dalam segala hal.

Saya kira adalah Lenin sendiri yang memperkenalkan kepada Rusia ungkapan yang terkenal “Oleh siapa, pada siapa?”—selama tahun-tahun awal pemerintahan Soviet frasa ini adalah sebuah pemeo yang dimunculkan rakyat untuk meringkas masalah umum masyarakat sosialis.⁴ Siapa merencanakan pada siapa, siapa mengendalikan dan menguasai siapa, siapa yang menentukan tempat orang lain dalam kehidupan, dan siapa yang hak-haknya ditentukan oleh orang lain? Hal-hal ini tak terhindarkan lagi menjadi isu-isu sentral yang harus diputuskan hanya oleh kekuasaan tertinggi.

Lebih belakangan, seorang ilmuwan politik Amerika telah memperluas frasa Lenin ini dan menegaskan bahwa masalah semua pemerintah adalah “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana” Dalam batas tertentu, hal ini bukan tidak benar. Bahwa semua pemerintah mempengaruhi posisi relatif orang-orang yang berlainan dan bahwa di dalam sistem apa pun hampir tak ada aspek kehidupan kita yang tidak dapat dipengaruhi tindakan pemerintah, tentu saja benar. Sejauh pemerintah melakukan sesuatu apa pun, tindakannya akan senantiasa mendatangkan sejumlah dampak pada ihwal “siapa mendapatkan

4 Bdk. M. Muggerridge, *Winter in Moscow*, 1934; A. Feiler, *The Experiment of Bolshevism*, 1930.

apa, kapan, dan bagaimana”.

Namun ada dua distingsi mendasar yang harus dibuat. Pertama, tindakan-tindakan tertentu dapat diambil tanpa perlu ada pengetahuan mengenai bagaimana tindakan-tindakan itu akan berdampak pada individu-individu tertentu, dan tanpa perlu bertujuan untuk menghasilkan dampak-dampak tertentu semacam itu. Poin ini telah kita diskusikan. Kedua, jangkauan aktivitas pemerintahlah yang menentukan apakah segala sesuatu yang didapatkan siapa pun dan kapan pun bergantung pada pemerintah, atau apakah pengaruh pemerintah dibatasi hanya pada ihwal apakah beberapa orang akan mendapatkan sesuatu dengan cara tertentu pada waktu tertentu. Di sinilah terletak perbedaan menyeluruh antara sistem bebas dan sistem totalitarian.

Kontras antara sistem liberal dan sistem yang terencana sepenuhnya biasanya diilustrasikan dengan protes umum kalangan Nazi dan sosialis terhadap “pemisahan artifisial antara ekonomi dan politik”, dan tuntutan mereka yang juga sama umumnya bagi dominasi politik atas ekonomi. Frasa ini mungkin dimaksudkan untuk berarti bukan hanya bahwa kekuatan ekonomi kini diizinkan beroperasi untuk mencapai tujuan yang tidak termasuk bagian kebijakan pemerintah, melainkan juga bahwa kekuatan ekonomi dapat dipakai terlepas dari pengarahannya pemerintah dan untuk mencapai tujuan yang mungkin tidak disetujui pemerintah. Tetapi alternatifnya bukan cuma bahwa akan hanya ada satu kekuasaan, melainkan juga bahwa kekuasaan tunggal ini, yakni kelompok yang memerintah, harus memiliki kontrol atas semua tujuan manusia, dan khususnya bahwa kekuasaan tunggal ini harus memiliki kekuasaan penuh atas posisi setiap individu dalam masyarakat.



Bahwa pemerintah yang mengarahkan aktivitas ekonomi akan harus menggunakan kekuasaannya untuk merealisasikan

ideal seseorang mengenai keadilan distributif, adalah sesuatu yang sudah pasti. Tetapi bagaimana pemerintah dapat dan akan menggunakan kekuasaannya itu? Dengan prinsip apa pemerintah akan atau harus dipandu? Apakah ada jawaban definitif terhadap pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengenai kelayakan dan manfaat relatif yang akan muncul dan yang harus dipecahkan dengan seksama? Apakah ada skala nilai-nilai yang diharapkan dapat disetujui oleh orang bernalar, yang akan menjustifikasi tatanan masyarakat hierarkis yang baru, dan yang bisa memenuhi tuntutan bagi keadilan?

Hanya ada satu prinsip umum, satu aturan sederhana yang sesungguhnya akan menyediakan jawaban definitif bagi semua pertanyaan itu: kesetaraan, kesetaraan yang absolut dan lengkap semua individu dalam semua aspek yang tunduk pada kontrol manusia. Jika ini dipandang secara umum sebagai sesuatu yang diinginkan (terlepas sama sekali dari pertanyaan apakah ini akan dapat dipraktikkan, yakni, apakah ini akan menyediakan insentif yang memadai), maka ini akan memberikan, kepada ide samar mengenai keadilan distributif, suatu arti yang jelas, dan akan memberi si perencana panduan yang pasti. Tetapi tidak ada yang lebih keliru daripada anggapan bahwa orang pada umumnya memandang kesetaraan mekanis jenis ini sebagai sesuatu yang diinginkan. Tidak ada gerakan sosialis, yang bertujuan mencapai kesetaraan penuh, pernah mendapatkan dukungan luas. Apa yang sosialisme janjikan bukanlah kesetaraan mutlak, melainkan distribusi yang lebih adil dan lebih setara. Bukan kesetaraan dalam pengertian absolut, melainkan “kesetaraan yang lebih besar”, adalah satu-satunya sasaran yang dengan serius ingin dicapai.

Meskipun kedua ideal ini terdengar sangat serupa, keduanya amat sangat berbeda sejauh menyangkut persoalan kita. Sementara kesetaraan atau kesamaan mutlak akan dengan jelas menentukan tugas si perencana, keinginan mendapatkan “kesetaraan yang lebih besar” hanyalah suatu pernyataan negatif, tidak lebih dari sekadar ekspresi ketidaksukaan atas keadaan pada masa kini; dan

selama kita tidak siap untuk mengatakan bahwa yang diinginkan adalah gerakan ke arah kesetaraan menyeluruh, ideal ini hampir tidak menyelesaikan masalah apa pun yang harus si perencana putuskan.

Ini bukanlah perkecokan mengenai kata-kata belaka. Kita di sini menghadapi isu krusial yang condong disembunyikan oleh keserupaan istilah-istilah yang digunakan. Sementara kesepakatan mengenai kesetaraan menyeluruh akan menjawab semua masalah kepatutan jasa dan manfaat individu yang harus dijawab si perencana, formula dari pendekatan terhadap kesetaraan yang lebih besar sesungguhnya tidak menjawab satu pun pertanyaan. Isinya hampir-hampir tidak lebih pasti ketimbang frasa “kebaikan bersama” atau “kesejahteraan sosial”. Ini tidak membebaskan kita dari keharusan memutuskan kasus per kasus apa saja jasa dan manfaat individu atau kelompok tertentu, dan tidak membantu kita dalam proses pengambilan keputusan itu. Semua yang dikatakannya kepada kita sebetulnya adalah bahwa kita perlu merampas dari orang kaya sebanyak mungkin. Tetapi ketika tiba pada soal distribusi hasil jarahan itu, masalahnya sama saja seolah-olah formula “kesetaraan yang lebih besar” tidak pernah ada.



Kebanyakan orang merasa sulit mengakui bahwa kita tidak memiliki standar moral yang akan memungkinkan kita membereskan masalah-masalah ini—jika tidak dengan sempurna, setidaknya sampai mendatangkan kepuasan umum yang lebih besar ketimbang yang diberikan sistem kompetitif. Bukankah kita semua memiliki ide tentang apa yang dimaksudkan dengan “harga yang adil” atau “upah yang memadai”? Tidak dapatkah kita bergantung pada perasaan kuat orang mengenai keadilan? Dan kalau pun kita sekarang ini tidak sepatutnya mengenai apa yang adil atau apa yang pantas dalam kasus tertentu, tidakkah ide-ide yang populer segera akan berkonsolidasi membentuk

standar yang lebih pasti jika orang diberikan kesempatan untuk melihat ideal-ideal mereka terwujud?

Sayang hampir tidak ada landasan untuk harapan semacam itu. Standar yang kita punyai diperoleh dari rezim kompetitif yang telah kita kenal, dan pasti akan segera lenyap setelah kompetisi menghilang. Apa yang kita maksudkan dengan harga yang adil, atau gaji yang memadai, adalah harga atau gaji yang lazim, imbalan yang berdasarkan pengalaman masa lampau telah membuat orang mengharapkannya, atau harga atau gaji yang akan ada jika tidak ada eksploitasi monopolistik. Kekecualian penting satu-satunya terhadap hal ini biasanya adalah klaim para pekerja terhadap “hasil penuh pekerjaan mereka”, yang menjadi asal-muasal kebanyakan doktrin sosialis. Tetapi tidak banyak lagi orang sosialis masa kini yang percaya bahwa di dalam masyarakat sosialis hasil masing-masing industri akan sepenuhnya dibagi bersama oleh para pekerja industri itu; sebab hal ini akan berarti bahwa para pekerja dalam industri yang menggunakan jumlah modal yang besar akan memiliki penghasilan yang jauh lebih besar ketimbang penghasilan pekerja di dalam industri yang menggunakan modal kecil, hal yang akan dipandang kebanyakan sosialis sebagai sesuatu yang sangat tidak adil. Dan kini umumnya disepakati bahwa klaim yang satu ini didasarkan pada penafsiran yang salah atas fakta-fakta. Tetapi ketika klaim seorang individu pekerja terhadap keseluruhan hasil milik-“nya” tidak diperbolehkan, dan keseluruhan keuntungan atau imbal hasil dari modal harus dibagi rata di antara semua pekerja, maka masalah bagaimana membaginya menimbulkan isu hakiki yang sama.

Apa yang dimaksud dengan “harga yang adil” dari komoditas tertentu atau pembagian upah yang “pantas” bagi jasa tertentu, mungkin dapat ditentukan secara objektif jika jumlah yang diperlukan ditetapkan dengan pasti secara independen. Jika keduanya ditentukan tanpa memperhitungkan biaya, si perencana dapat mencoba menemukan berapa harga atau upah yang diperlukan untuk menghasilkan pasokan ini. Tetapi si perencana

harus juga memutuskan berapa banyak masing-masing jenis barang harus diproduksi, dan dengan melakukan ini dia menetapkan harga yang adil itu berapa besarnya atau gaji yang pantas yang harus dibayar itu berapa tingginya. Jika si perencana memutuskan bahwa diperlukan lebih sedikit arsitek atau pembuat arloji dan bahwa kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh orang-orang yang mau bekerja dengan menerima pembayaran upah yang lebih rendah, maka upah yang “pantas” akan lebih rendah. Dalam memutuskan kepentingan relatif dari tujuan-tujuan yang berlainan, si perencana juga memutuskan kepentingan relatif dari kelompok-kelompok dan orang-orang yang berlainan. Karena dia tidak diharapkan memperlakukan orang semata-mata sebagai peranti, dia harus memperhitungkan semua akibat ini dan dengan sadar menyelaraskan kepentingan dari tujuan-tujuan yang berbeda dengan memperhadapkan semua itu pada akibat-akibat keputusannya. Hal ini berarti, sesungguhnya, bahwa dia harus menjalankan kontrol langsung atas kondisi-kondisi orang-orang yang berlainan itu.

Hal ini berlaku baik bagi posisi relatif orang perorangan maupun bagi kelompok-kelompok profesi yang berlainan. Pada umumnya kita terlalu condong berpikir bahwa penghasilan di dalam suatu pekerjaan atau profesi kurang lebih seragam. Tetapi perbedaan antar penghasilan, bukan hanya perbedaan penghasilan dokter atau arsitek, penulis atau bintang film, petinju atau joki yang paling berhasil dibandingkan yang paling kurang berhasil, melainkan juga penghasilan tukang ledeng atau petani sayuran, pemilik toko kecil atau penjahit yang paling berhasil dibandingkan yang paling kurang berhasil, ternyata sama besarnya dengan perbedaan penghasilan di antara kelas-kelas yang mempunyai kepemilikan dan yang tidak mempunyai. Jelaslah, meskipun akan ada usaha standardisasi dengan menciptakan kategori-kategori, keharusan memberlakukan diskriminasi di antara individu-individu akan tetap sama, entah ini dilakukan dengan menetapkan penghasilan individual mereka ataupun dengan mengalokasikan mereka di kategori tertentu.

Kita tak perlu lagi berbicara tentang kemungkinan orang di dalam masyarakat bebas menundukkan diri pada kontrol semacam itu—atau tentang kenyataan bahwa mereka tetap bebas jika mereka menundukkan diri. Sehubungan dengan seluruh persoalan ini, apa yang John Stuart Mill tulis hampir 100 tahun lalu tetap sama benarnya sekarang ini:

Suatu peraturan yang pasti, seperti peraturan tentang kesetaraan, dapat ditaati, dan demikian pula suatu kebetulan, atau keharusan eksternal, dapat dipasrahi; tetapi ihwal bahwa segelintir orang berhak menimbang setiap orang pada neraca, dan memberikan lebih kepada satu orang dan memberikan kurang kepada yang lain dengan sesuka hati dan menurut pertimbangan mereka, tak akan diterima kecuali orang-orang yang menimbang itu dipercaya melebihi manusia biasa, dan memiliki kekuasaan teror adikodrati.⁵



Kesulitan-kesulitan itu tak dengan sendirinya akan berujung pada benturan terbuka sejauh sosialisme semata-mata adalah aspirasi kelompok terbatas dan cukup homogen. Mereka muncul ke permukaan hanya ketika kebijakan sosialis benar-benar dicoba dengan dukungan banyak kelompok yang berlainan yang bersama-sama membentuk kelompok mayoritas. Jika ini terjadi, maka segera akan timbul persoalan penting dan mendesak tentang perangkat ideal yang mana yang harus diterapkan kepada semua orang, dengan cara membuat seluruh sumber daya negeri melayani perangkat itu. Justru karena perencanaan yang sukses memerlukan penciptaan pandangan bersama mengenai nilai-nilai yang hakiki, maka pembatasan terhadap kebebasan kita sehubungan dengan hal-hal material akan secara langsung menyentuh kebebasan spiritual kita.

5 J. S. Mill, *Principles of Political Economy*. Jilid I, Bab II, alinea 4.

Kaum sosialis, seperti orangtua terpelajar yang telah melahirkan keturunan yang tak beradab, secara tradisional berharap dapat mengatasi persoalan ini melalui pendidikan. Tetapi, dalam hal ini, apa yang dimaksudkan dengan pendidikan? Sesungguhnya kita telah belajar bahwa pengetahuan tidak dapat menciptakan nilai-nilai etis yang baru, bahwa pembelajaran sejauh apa pun tidak akan membuat orang memegang pandangan yang sama mengenai isu-isu moral yang dibangun oleh penataan sadar atas semua hubungan sosial. Bukanlah keyakinan rasional, melainkan penerimaan terhadap kredolah yang diperlukan untuk menjustifikasi perencanaan tertentu. Dan, sesungguhnya, kaum sosialis di mana pun adalah orang pertama yang akan mengakui bahwa tugas yang telah mereka sendiri gariskan memerlukan penerimaan umum terhadap suatu *Weltanschauung*, suatu perangkat nilai-nilai yang pasti. Di dalam usaha untuk menghasilkan gerakan massal yang didukung oleh satu pandangan dunia semacam itulah, kalangan sosialis telah pertama-tama menciptakan sebagian besar instrumen indoktrinasi yang telah digunakan dengan efektif oleh kalangan Nazi dan fasis.

Di Jerman dan Italia, kaum Nazi dan fasis sesungguhnya tidak perlu melakukan banyak invensi. Pemanfaatan terhadap gerakan-gerakan politik baru yang telah merembesi segala bidang kehidupan di kedua negeri itu telah diperkenalkan oleh kalangan sosialis. Ide tentang partai politik yang memayungi semua kegiatan individu dari tempat lahir sampai liang lahat, yang mengklaim memandu pandangannya atas segala sesuatu, dan yang senang membuat semua persoalan sebagai persoalan *Weltanschauung* partai, telah pertama-tama dijemlakan ke dalam praktik oleh kalangan sosialis. Seorang penulis sosialis Austria, ketika berbicara mengenai gerakan sosialis di negerinya, melaporkan dengan bangga bahwa adalah “fitur istimewa gerakan ini yang telah menciptakan organisasi-organisasi khusus bagi

setiap bidang kegiatan buruh dan karyawan.”⁶ Tetapi meskipun kalangan sosialis Austria mungkin telah bergerak lebih jauh dalam hal ini ketimbang yang lain-lain, situasinya tidak sangat berbeda di tempat lain. Bukan fasis melainkan sosialislah yang telah mulai mengumpulkan anak-anak usia sangat muda ke dalam organisasi-organisasi politik untuk memastikan bahwa mereka akan tumbuh sebagai proletar yang baik. Bukan fasis melainkan sosialislah yang pertama berpikir untuk mengorganisasi olah raga dan permainan, sepak bola dan pendakian gunung, ke dalam klub-klub partai di mana para anggota tidak akan disusupi pandangan lain. Kalangan sosialislah yang pertama menekankan bahwa anggota partai harus membedakan diri mereka dari orang lain melalui cara mengucapkan salam dan bentuk sapaan terhadap satu sama lain. Merekalah yang melalui organisasi “sel” dan sarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan permanen atas kehidupan privat telah menciptakan prototipe partai totalitarian. *Balila* dan *Hitlerjugend*, *Dopolavoro* dan *Kraft durch Freude*, seragam politik dan formasi partai ala militer, semuanya tidak lebih dari imitasi terhadap pranata sosialis yang sudah ada terdahulu.⁷



Selama gerakan sosialis di suatu negeri terikat erat dengan kepentingan kelompok tertentu, yang biasanya adalah pekerja berkecakupan tinggi, maka problem menciptakan suatu pandangan umum mengenai status yang diinginkan dari beraneka ragam anggota masyarakat relatif sederhana pemecahannya. Gerakan ini memberikan perhatian langsung kepada status satu kelompok tertentu dan tujuannya adalah mengangkat status tersebut di atas kelompok-kelompok lain. Namun sifat

6 G. Wieser, *Ein Staat stirbt, Oesterreich 1934-1938*, Paris, 1938, hlm. 41.

7 “Klub-klub buku” politik dalam negeri ini menyediakan kesejajaran yang penting.

masalahnya berubah ketika gerakan ini mengalami kemajuan tahap demi tahap menuju sosialisme dan mulai makin tampak jelas bagi siapa pun bahwa penghasilannya dan posisi umumnya ditetapkan oleh aparat koersif negara, bahwa dia dapat mempertahankan atau meningkatkan posisinya hanya sebagai anggota kelompok terorganisasi yang mampu mempengaruhi atau mengontrol mesin negara demi melayani kepentingannya. Dalam pertarungan tarik-menarik antara beraneka ragam kelompok penekan yang bermunculan pada tahap ini, tidak dengan sendirinya bahwa kepentingan kelompok termiskin dan yang jumlahnya terbanyak pasti menang. Juga tidak dengan sendirinya pasti merupakan keuntungan bagi partai-partai sosialis yang lebih tua, yang menyatakan mewakili kepentingan kelompok tertentu, bahwa partai-partai itu telah tampil sebagai yang pertama di bidang ini, dan telah mendesain seluruh ideologi mereka untuk menarik hati para buruh kasar di dalam berbagai industri. Justru keberhasilan mereka, dan tekad mereka untuk menerima kredo secara keseluruhan, itulah yang pasti akan menciptakan gerakan tandingan yang kuat—bukan oleh para kapitalis, tetapi oleh kelas-kelas yang sangat besar dan sama-sama tak memiliki kepemilikan, yang menyadari bahwa status relatif mereka terancam oleh kemajuan kalangan elite buruh industri.

Teori sosialis dan taktik sosialis, bahkan di tempat mereka tidak dikuasai oleh dogma Marxis, di mana-mana didasarkan pada ide mengenai masyarakat yang dibagi ke dalam dua kelas yang memiliki kepentingan yang sama namun saling bertentangan: kapitalis dan buruh industri. Sosialisme bergantung pada lenyapnya dengan cepat kelas menengah lama dan sama sekali mengabaikan kemunculan kelas menengah baru, para jurutulis dan juruketik yang jumlahnya tak terhitung, para pekerja administrasi dan guru sekolah, pedagang dan para pejabat kecil, dan sejumlah pekerja profesional dari peringkat yang lebih rendah. Selama beberapa waktu, kelas-kelas ini seringkali menyediakan banyak pemimpin bagi gerakan buruh. Namun, ketika makin jelas bahwa posisi kelas-kelas tersebut makin melemah jika dibandingkan

dengan posisi buruh industri, ideal yang memandu kalangan buruh akan kehilangan banyak daya tariknya bagi kelas-kelas lain. Walaupun mereka semua adalah sosialis dalam arti bahwa mereka tidak menyukai sistem kapitalis dan ingin agar kekayaan dibagi dengan sengaja menurut ide-ide keadilan mereka, ide-ide ini terbukti sangat berbeda dari ide-ide yang mewujud di dalam praktik partai-partai sosialis yang lebih tua.

Sarana-sarana yang telah dipakai partai-partai sosialis lama dengan sukses untuk mendapatkan dukungan dari satu kelompok pekerja—yakni peningkatan posisi ekonomi relatif mereka—tak dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan dari semua kalangan. Tak terhindarkan lagi pasti akan muncul gerakan sosialis tandingan yang menarik dukungan dari orang yang posisi relatifnya sedang bertambah buruk. Ada kebenaran besar di dalam pernyataan yang sering terdengar bahwa fasisme dan Nasional-Sosialisme adalah semacam sosialisme kelas menengah—cuma saja, di Italia dan Jerman para pendukung gerakan baru ini secara ekonomis sudah hampir-hampir bukan kelas menengah lagi. Ini sekarang sudah lebih menjadi perlawanan kelas baru yang miskin dan tak memiliki privilese terhadap aristokrat buruh yang telah diciptakan gerakan buruh industrial. Hampir tak ada keraguan bahwa tidak ada satu faktor ekonomi yang telah memberikan andil lebih banyak untuk membantu gerakan ini ketimbang kedengkian dari kalangan profesional yang tidak berhasil, para insinyur atau pengacara yang terdidik di universitas, dan iri hati dari “proletar kerah putih” pada umumnya, terhadap masinis atau petugas percetakan dan anggota-anggota lain dari serikat buruh yang terkuat yang mendapatkan penghasilan berlipat-lipat dari penghasilan mereka. Juga tidak banyak kesangsian bahwa dilihat dari penghasilan uang, rata-rata anggota rendah gerakan Nazi dalam tahun-tahun awalnya lebih miskin ketimbang rata-rata penghasilan anggota serikat buruh atau anggota partai sosialis yang lebih tua—suatu situasi yang makin mencolok dari fakta bahwa anggota-anggota biasa gerakan Nazi ini biasanya dahulu lebih kaya dan seringkali masih berdiam di lingkungan yang

diwarisi dari masa lalu itu. Ungkapan “kelas berjuang *à rebours* (= salah arah)”, yang umum di Italia ketika fasisme sedang bangkit, sesungguhnya mengacu ke aspek sangat penting dari gerakan ini. Konflik antara fasisme atau Nasional-Sosialisme dan partai-partai sosialis yang lebih tua sesungguhnya harus terutama dipandang sebagai suatu jenis konflik yang mau tak mau akan muncul di antara faksi-faksi sosialis yang bertanding satu sama lain. Tak ada perbedaan di antara mereka mengenai persoalan bahwa negaralah yang berhak menentukan di mana setiap orang harus diberi tempat yang cocok di dalam masyarakat. Tetapi ada, sebagaimana akan selalu ada, perbedaan yang paling dalam ketika orang harus menetapkan apa tempat yang paling cocok bagi kelas dan kelompok yang berlainan di dalam masyarakat.



Para pemimpin sosialis lama, yang selalu memandang partai-partai mereka sebagai ujung tombak alamiah dari gerakan umum di masa depan menuju sosialisme, merasa sangat sulit memahami bahwa semakin maju pemakaian metode sosialis, semakin banyak kebencian kelas-kelas miskin yang besar yang terarah kepada mereka. Tetapi sementara partai-partai sosialis lama, atau para buruh terorganisasi di dalam industri-industri tertentu, biasanya tidak menemukan kesulitan besar untuk bersepakat melakukan tindakan bersama dengan para majikan di dalam industri-industri mereka, kelas-kelas yang sangat besar tidak diikutsertakan. Bagi mereka, dan bukan tanpa alasan, bagian-bagian yang lebih makmur dari gerakan kelas buruh tampak termasuk ke dalam kelas yang mengeksploitasi ketimbang kelas yang dieksploitasi.⁸

8 Kini sudah 12 tahun sejak salah seorang intelektual sosialis terkemuka Eropa, Hendrick de Man (yang setelah itu berkembang dengan konsisten dan menerima Nazi), mengobservasi bahwa “untuk pertama kalinya sejak permulaan sosialisme, kebencian anti-kapitalis kini berubah menyerang gerakan sosialisme” (*Sozialismus und National-Fasismus*, Potsdam, 1931, hlm. 6).

Kebencian kelas menengah bawah, yang daripadanya fasisme dan Nasional-Sosialisme merekrut sangat banyak pendukung, makin diperdalam oleh fakta bahwa pendidikan dan pelatihan mereka biasanya membuat mereka bercita-cita mendapatkan posisi sebagai pemimpin, dan bahwa mereka memandang diri mereka sendiri berhak menjadi anggota kelas pemimpin. Sementara generasi yang lebih muda, yang karena didorong oleh kebencian terhadap usaha-usaha mendapatkan keuntungan, kebencian yang dipupuk oleh ajaran sosialis, menolak posisi independen yang mengandung risiko, dan mengejar, dalam jumlah yang terus makin bertambah, posisi bergaji tetap yang menjanjikan keamanan, mereka menuntut posisi yang dapat menghasilkan bagi mereka pendapatan dan kekuasaan yang, dalam opini mereka, berhak mereka dapatkan karena pelatihan yang sudah mereka jalani. Walaupun mereka percaya pada masyarakat yang terorganisasi, mereka mengharapkan posisi yang sangat berbeda dari posisi yang tampaknya ditawarkan kepada mereka oleh masyarakat yang diatur oleh kaum buruh itu. Mereka cukup siap untuk mengambil alih metode-metode dari sosialisme yang lebih tua tetapi bermaksud memakainya untuk kepentingan kelas yang berbeda. Gerakan ini berhasil menarik banyak orang yang, walaupun setuju perlunya negara mengontrol semua aktivitas ekonomi, tidak setuju dengan tujuan-tujuan yang diupayakan oleh para pemimpin buruh industrial dengan kekuatan politik mereka.

Gerakan sosialis baru bermula dengan beberapa keuntungan taktis. Sosialisme buruh telah tumbuh di dalam dunia yang demokratis dan liberal, mengadaptasi taktik-taktik mereka dengan dunia ini dan mengambil alih banyak ideal liberalisme. Para pendukungnya masih percaya bahwa penciptaan sosialisme pada dirinya sendiri akan memecahkan semua persoalan. Fasisme dan Nasional-Sosialisme, sebaliknya, tumbuh dari pengalaman mengenai masyarakat yang semakin diregulasi, pengalaman yang menimbulkan kesadaran bahwa sosialisme demokratis dan internasional bertujuan mencapai ideal-ideal yang saling

bertentangan. Taktik mereka dikembangkan di dalam dunia yang telah dikuasai kebijakan sosialis dan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Mereka tidak memiliki ilusi mengenai kemungkinan adanya jalan keluar demokratis atas masalah-masalah ini, yang memerlukan lebih banyak kesepakatan di antara orang-orang ketimbang yang secara rasional dapat diharapkan. Mereka tidak memiliki ilusi mengenai kapasitas akal budi untuk memecahkan semua persoalan mengenai kepentingan relatif dari semua keinginan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berlainan, yang mau tidak mau dimunculkan oleh perencanaan, atau mengenai formula kesetaraan yang dapat menyediakan jawaban. Mereka tahu bahwa kelompok terkuat yang dapat mempersatukan cukup pendukung untuk membela tatanan masyarakat baru yang hierarkis, dan yang dengan terang-terangan menjanjikan privilese-privilese kepada kelas-kelas yang mereka inginkan mendapat dukungan, mungkin sekali akan mendapatkan dukungan dari semua kalangan yang telah dikecewakan berhubung mereka dijanjikan akan menerima kesetaraan tetapi akhirnya menemukan fakta bahwa mereka hanyalah memajukan kepentingan kelas tertentu saja. Mereka sukses terutama karena mereka menawarkan teori, atau pandangan dunia, *Weltanschauung*, yang tampaknya menjustifikasi privilese yang mereka janjikan kepada para pendukung mereka.

BAB 9

KETAHANAN DAN KEBEBASAN

Masyarakat secara keseluruhan akan menjadi satu kantor dan satu pabrik yang memberlakukan kesetaraan pekerjaan dan kesetaraan gaji.

V. I. Lenin, 1917

Di dalam negeri di mana majikan satu-satunya adalah Negara, oposisi berarti kematian lewat kelaparan pelan-pelan. Prinsip lama: jika seseorang tidak mau bekerja, tidak makan, telah diganti oleh prinsip baru: jika seseorang tidak mau taat, dia tidak makan.

L. Trotsky, 1937

SEPERTI halnya “kebebasan ekonomi” yang palsu itu, dan dengan lebih banyak keadilan, ketahanan atau keterjaminan ekonomi seringkali digambarkan sebagai syarat yang mutlak ada bagi kebebasan sejati. Dalam pengertian tertentu, hal ini benar dan penting. Kemandirian pikiran atau keteguhan watak langka ditemukan di antara orang-orang yang tidak yakin bahwa mereka akan berhasil lewat usaha sendiri. Namun ide tentang ketahanan ekonomi tidak kurang samar dan ambigu dari kebanyakan istilah lain dalam bidang ini; dan karena itu, dukungan umum pada tuntutan akan ketahanan ekonomi bisa berbahaya bagi kebebasan. Sesungguhnya, ketika ketahanan

dipahami dalam arti yang sangat absolut, maka perjuangan umum untuk mendapatkannya, alih-alih meningkatkan peluang bagi kebebasan, malah menjadi ancaman terbesar bagi kebebasan.

Akan baik jika sejak awal dua jenis ketahanan dibedakan: ketahanan terbatas, yang dapat dicapai semua orang, dan yang karenanya bukan privilese tetapi objek keinginan yang sah; dan ketahanan absolut, yang di dalam masyarakat merdeka tidak dapat diperoleh semua orang dan yang tidak boleh diberikan sebagai privilese—kecuali dalam sedikit kasus khusus seperti yang diberikan kepada para hakim, di mana kemandirian menyeluruh sangat penting. Kedua jenis ketahanan ini adalah, pertama, ketahanan terhadap kemelaratan jasmaniah yang parah, kepastian akan adanya ketersediaan sandang pangan minimum yang disepakati bagi semua orang; dan kedua, ketahanan berupa terjaminnya standar kehidupan yang disepakati, atau ketahanan posisi relatif yang dinikmati seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan orang lain; atau, ringkasnya, terjaminnya penghasilan minimum dan penghasilan tertentu yang dipandang layak diperoleh seseorang. Segera akan kita lihat bahwa distingsi ini sejalan terutama dengan distingsi antara ketahanan yang dapat disediakan bagi semua orang di luar, dan yang melengkapi, sistem pasar, dan ketahanan yang dapat disediakan hanya bagi sebagian orang dan hanya melalui pengontrolan atau penghapusan pasar.

Tidak ada alasan mengapa di dalam masyarakat yang telah mencapai tingkat umum kekayaan yang telah diperoleh masyarakat kita, jenis ketahanan yang pertama tidak boleh dijamin tersedia bagi semua orang tanpa membahayakan kebebasan umum. Ada persoalan sulit menyangkut standar persis yang harus dipakai untuk jaminan itu; khususnya ada persoalan penting apakah orang yang bergantung pada komunitas harus selamanya menikmati semua kebebasan yang sama seperti orang lain.¹ Penanganan yang gegabah atas persoalan ini dapat

1 Juga ada problem serius dalam hubungan internasional yang muncul, seandainya hanya kewarganegaraan dalam suatu negeri semata memberikan seseorang hak atas standar penghidupan yang lebih tinggi

menimbulkan suatu masalah politik yang serius dan bahkan mungkin berbahaya; tetapi tidak bisa diragukan bahwa sandang, pangan, dan papan dalam ukuran minimum, yang cukup untuk memelihara kesehatan dan kemampuan bekerja, dapat dijamin tersedia bagi setiap orang. Sesungguhnya, bagi sebagian besar penduduk negeri ini, ketahanan jenis ini telah lama tercapai.

Juga tidak ada alasan apa pun mengapa negara tidak boleh membantu individu dalam menghadapi bahaya umum kehidupan yang hanya bisa ditanggulangi segelintir individu saja. Apabila, seperti dalam kasus menderita sakit atau mengalami kecelakaan, keinginan untuk menghindari bencana semacam itu dan usaha untuk mengatasinya tidak diperlemah oleh adanya bantuan, apabila, pendek kata, kita berhubungan dengan risiko yang sepenuhnya dapat diasuransikan, ada alasan kuat bahwa negara harus menolong pengorganisasian sistem asuransi sosial yang komprehensif. Ada banyak perincian, di mana orang yang ingin memelihara sistem kompetitif dan orang yang ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lain yang dianggap lebih unggul, akan tidak sepakat mengenai detail proposal semacam itu; dan adalah mungkin atas nama asuransi sosial diperkenalkan berbagai langkah yang cenderung melemahkan efektivitas kompetisi. Tetapi pada prinsipnya tidak ada hal yang tidak sejalan antara negara yang menyediakan ketahanan yang lebih besar dengan cara ini dan pemeliharaan kebebasan individu. Meningkatnya ketahanan melalui negara yang memberikan bantuan kepada para korban “ulah Tuhan” seperti gempa bumi dan banjir, juga masuk ke dalam kategori yang sama. Apabila tindakan komunal dapat mengurangi bencana yang terhadapnya seseorang entah tak dapat menjaga dirinya sendiri atau tak dapat mengatasi akibatnya, tindakan komunal semacam itu harus diambil tanpa keraguan sedikit pun.

Akhirnya, memerangi fluktuasi umum aktivitas ekonomi, dan

dibandingkan di tempat-tempat lain, dan yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

gelombang berulang pengangguran skala luas yang menyertainya, adalah problem yang luar biasa penting. Tentu saja ini salah satu problem terberat dan paling mendesak di zaman kita sekarang ini. Tetapi, kendatipun solusinya akan memerlukan banyak perencanaan dalam pengertian yang baik, problem ini tidak, atau setidaknya tidak perlu, menuntut adanya jenis khusus perencanaan yang, menurut para pendukungnya, harus menggantikan pasar. Banyak ekonom tentu saja berharap bahwa solusi pamungkasnya dapat ditemukan dalam lapangan kebijakan moneter, yang tidak akan melibatkan hal apa pun yang tak sejalan bahkan dengan liberalisme abad ke-19. Benar ada orang lain yang percaya bahwa sukses nyata dapat diharapkan hanya dari penentuan waktu yang dilakukan dengan cerdas kapan usaha publik dijalankan dalam skala besar. Ini dapat bermuara pada banyaknya pembatasan yang lebih serius di wilayah kompetitif, dan dalam bereksperimen ke arah ini kita akan harus dengan hati-hati memantau langkah kita jika kita tidak mau membuat semua kegiatan ekonomi makin lama makin bergantung pada arah dan volume belanja pemerintah. Tetapi hal ini bukanlah satu-satunya, dan juga, dalam opini saya, bukan langkah yang paling memberi asa dalam menghadapi ancaman terberat pada ketahanan ekonomi. Bagaimana pun juga, usaha-usaha yang paling diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap semua fluktuasi ini tidak bermuara pada suatu jenis perencanaan yang merupakan ancaman besar terhadap kebebasan kita.



Perencanaan untuk ketahanan yang menimbulkan dampak yang makin lama makin berbahaya semacam itu terhadap kebebasan adalah perencanaan untuk ketahanan jenis lain. Ini adalah perencanaan yang dirancang untuk memproteksi individu atau kelompok dari pengurangan pendapatan mereka yang meskipun sama sekali tidak patut namun di dalam masyarakat kompetitif terjadi setiap hari, dan terhadap kerugian yang mendatang

kesukaran yang sangat berat, yang tidak memiliki justifikasi moral, namun tak dapat dipisahkan dari sistem kompetitif. Tuntutan akan ketahanan ini dengan demikian adalah bentuk lain dari tuntutan akan upah yang adil, upah yang proporsional dengan jasa subjektif setiap orang, dan bukan dengan hasil objektif usaha seseorang. Ketahanan atau keadilan jenis ini tampaknya tidak selaras dengan kebebasan untuk memilih pekerjaan seseorang.

Dalam sistem apa pun, di mana penyebaran manusia di antara berbagai keahlian dan pekerjaan bergantung pada pilihan mereka sendiri, adalah perlu bahwa penentuan besarnya upah sejalan dengan kegunaan mereka bagi anggota lain masyarakat, bahkan sekalipun cara ini tidak berhubungan sama sekali dengan nilai subjektif seorang pekerja. Meskipun hasil yang diperoleh akan seringkali sebanding dengan usaha dan kehendak si pekerja, ini tidak bisa selalu benar di dalam setiap bentuk masyarakat. Hal ini khususnya akan tidak benar di dalam banyak kasus di mana kegunaan keahlian atau ketrampilan khusus diubah oleh keadaan yang tidak terduga sebelumnya. Kita semua tahu nasib buruk orang yang sangat terlatih yang keahliannya, yang diperoleh lewat proses pembelajaran yang berat, tiba-tiba saja kehilangan nilainya karena suatu invensi yang sangat menguntungkan bagian lain masyarakat. Sejarah 100 tahun terakhir penuh dengan contoh seperti itu, yang beberapa di antaranya berdampak pada ratusan ribu orang sekaligus.

Bahwa ada orang yang harus menderita pengurangan pendapatan dalam jumlah besar dan kekecewaan pahit karena semua harapannya tak terpenuhi bukan karena kesalahannya sendiri, dan ini semua terjadi kendatipun dia telah bekerja keras dan memiliki keahlian yang istimewa, tak diragukan lagi menohok rasa keadilan kita. Tuntutan orang yang menderita dalam situasi seperti ini, yang meminta negara turun tangan demi mereka untuk melindungi harapan mereka yang sah, pastilah mendapat dukungan dan simpati umum. Persetujuan publik atas berbagai tuntutan ini telah berpengaruh sehingga banyak pemerintahan di mana-mana telah mengambil tindakan, bukan semata-mata untuk

memproteksi rakyat yang sangat terancam oleh penderitaan dan kemelaratan, melainkan juga untuk memastikan bahwa mereka akan terus menerima penghasilan mereka sebelumnya, dan untuk mengayomi mereka dari perubahan pasar yang tak terduga.²

Tetapi kepastian akan penghasilan yang disepakati tidak mungkin diberikan kepada semua orang jika kebebasan dalam pemilihan pekerjaan seseorang diperbolehkan. Dan jika kepastian ini diberikan kepada sejumlah orang, maka ini menjadi privilese dengan mengorbankan orang lain yang ketahanannya oleh karena itu harus dengan sendirinya berkurang. Bahwa ketahanan suatu penghasilan tetap dapat diberikan kepada semua orang hanya melalui penghilangan semua kebebasan dalam memilih pekerjaan seseorang dapat dengan mudah dibuktikan. Namun, meskipun jaminan umum bagi harapan yang absah semacam itu sering dipandang sebagai ideal yang harus dicapai, jaminan itu bukanlah sesuatu yang dengan serius diusahakan. Apa yang tetap dilakukan adalah memberi ketahanan jenis ini sedikit demi sedikit, kepada kelompok ini atau kelompok itu, dengan hasil bahwa, bagi orang yang belum memperolehnya, rasa tidak aman semakin meningkat. Tidak heran bahwa sebagai akibatnya nilai yang dilekatkan pada privilese ketahanan terus bertambah, tuntutan atasnya menjadi makin mendesak, sampai akhirnya tidak ada biaya yang tampak terlalu tinggi, bahkan kebebasan pun siap dikorbankan.



Jika orang yang kegunaannya berkurang akibat situasi yang tidak dapat mereka duga sebelumnya dan yang juga tidak dapat mereka kontrol harus diproteksi dari kerugian yang tidak patut, dan jika orang yang kegunaannya telah meningkat, dengan cara

2 Saran-saran yang sangat menarik, mengenai bagaimana penderitaan ini dapat dikurangi di dalam masyarakat liberal, baru-baru ini telah diajukan oleh Prof. W. H. Hutt di dalam buku, yang akan sangat bermanfaat jika dikaji dengan seksama (*Plan for Reconstruction*, 1943).

yang sama, tidak diperbolehkan mendapatkan manfaat yang tidak sepatutnya, maka remunerasi akan kehilangan seluruh hubungannya dengan manfaat yang sebenarnya. Hal ini akan bergantung pada pandangan yang dipegang otoritas mengenai apa yang seharusnya dilakukan seseorang, apa yang seharusnya dia perhitungkan, dan seberapa baik atau buruk maksud-maksudnya. Keputusan semacam itu mau tidak mau pastilah sebagian besar bersifat sewenang-wenang. Penerapan prinsip ini mau tak mau akan mendatangkan akibat bahwa orang yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima besar upah yang berbeda. Perbedaan dalam besarnya upah tidak lagi memberikan dorongan yang cukup kepada orang untuk membuat perubahan yang dibutuhkan masyarakat, dan bahkan tidak akan mungkin bagi individu yang terkena dampaknya untuk menilai apakah suatu perubahan tertentu akan memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan persoalan yang ditimbulkannya.

Tetapi jika perubahan dalam penyebaran orang di antara pekerjaan-pekerjaan yang berlainan, yang terus-menerus diperlukan dalam setiap masyarakat mana pun, tidak dapat lagi dihasilkan melalui “imbalan” dan “sanksi” finansial (yang tidak mesti berhubungan dengan nilai subjektif), maka perubahan ini harus dihasilkan oleh pemerintah langsung. Ketika penghasilan seseorang dijamin, dia tidak dapat diizinkan bertahan dalam pekerjaannya hanya karena dia menyukainya, dan juga tidak diperbolehkan memilih pekerjaan lain yang suka dia lakukan. Karena keuntungan yang dibuatnya atau kerugian yang dideritanya tidak bergantung pada ihwal apakah dia aktif atau berdiam diri saja, maka pilihan harus dibuat baginya oleh orang yang mengontrol distribusi penghasilan yang tersedia.

Problem mengenai insentif yang memadai yang muncul di sini umumnya didiskusikan seolah-olah ini terutama adalah problem kesediaan orang untuk melakukan yang terbaik. Tetapi ini, meskipun penting, bukanlah keseluruhan aspek problemnya, bahkan bukan segi yang terpenting. Persoalannya bukanlah semata-mata bahwa jika kita menginginkan orang memberi yang

terbaik, kita harus membuat hal ini berharga bagi mereka. Hal yang lebih penting adalah bahwa jika kita ingin memberi mereka pilihan, jika mereka dapat menilai apa yang harus mereka lakukan, mereka harus diberikan standar logis yang dengannya orang dapat menilai kepentingan sosial dari pekerjaan-pekerjaan yang berlainan. Bahkan dengan kemauan yang paling baik sedunia, tidak akan mungkin bagi siapa pun untuk dengan masuk akal memilih di antara beraneka ragam pilihan jika berbagai keuntungan yang ditawarkan pilihan-pilihan itu kepadanya tak berhubungan dengan kegunaan berbagai pilihan itu bagi masyarakat. Untuk mengetahui apakah, sebagai akibat suatu perubahan, seseorang harus meninggalkan pekerjaan dan lingkungan yang dia sukai, dan menggantinya dengan yang lain, nilai pekerjaan yang telah berubah dalam hubungannya dengan masyarakat ini haruslah diungkapkan dalam besarnya upah yang diberikan.

Tentu saja masalah ini menjadi semakin penting karena di dunia nyata, manusia sebetulnya tidak mungkin memberikan hal yang terbaik untuk jangka panjang kecuali kepentingan mereka sendiri terlibat langsung. Setidaknya bagi banyak orang, tekanan eksternal diperlukan jika mereka diharuskan memberi yang terbaik. Problem insentif dalam pengertian ini sangat nyata, baik di dalam lingkungan pekerjaan biasa maupun di lingkungan kegiatan manajerial. Penerapan teknik rekayasa (*engineering*) pada seluruh bangsa—dan inilah yang dimaksudkan dengan perencanaan—“menimbulkan masalah disiplin yang sukar diatasi”, sebagaimana telah dengan bagus dideskripsikan oleh seorang perencana Amerika yang berpengalaman luas dalam perencanaan pemerintah, yang telah dengan jelas melihat masalahnya.

Supaya dapat melaksanakan pekerjaan rekayasa, [dia menjelaskan], harus ada wilayah aktivitas ekonomi tak terencana yang relatif luas yang melingkungi pekerjaan. Harus ada tempat yang darinya para pekerja dapat ditarik, dan ketika

seorang pekerja dipecat dia harus lenyap dari pekerjaan dan dari daftar gaji. Jika sumber cadangan pekerja bebas semacam itu tidak ada, maka disiplin tidak dapat dipertahankan tanpa penghukuman badan, seperti halnya dengan buruh budak.³

Dalam wilayah pekerjaan eksekutif, problem menjatuhkan hukuman bagi orang yang lalai muncul dalam bentuk lain yang tidak kurang serius. Telah dikatakan dengan baik bahwa jika pilihan terakhir bagi ekonomi kompetitif adalah seorang jurusita, maka hukuman terberat dalam ekonomi terencana adalah seorang algojo.⁴ Kekuasaan yang harus diberikan kepada sang manajer pabrik akan lebih besar lagi. Tetapi seperti halnya dalam kasus sang pekerja, posisi dan penghasilan sang manajer di dalam sistem terencana tidak dapat dibuat bergantung semata-mata pada keberhasilan atau kegagalan pekerjaan yang ada di bawah pengawasannya. Karena baik risiko maupun keuntungan bukan hasil perbuatannya, maka yang harus memutuskan apakah dia gagal atau berhasil bukan pertimbangan yang telah dia ambil, melainkan apakah dia telah mengerjakan apa yang harus dia kerjakan sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu kesalahan yang “seharusnya” dia elakkan bukan sekadar urusannya sendiri, melainkan tindak kriminal terhadap komunitas dan harus dianggap demikian. Walaupun selama dia tetap berada di jalan yang aman dalam melakukan kewajiban yang dapat ditentukan dengan objektif, dia dapat saja lebih terjamin dalam menerima penghasilannya ketimbang usahawan kapitalis, namun bahaya yang mengancamnya jika dia mengalami kegagalan real lebih buruk daripada kebangkrutan. Dia mungkin lebih aman secara ekonomi sejauh dia memuaskan atasannya; tetapi keamanan ini diperolehnya dengan risiko kehilangan kebebasan dan kehidupannya.

3 D. C. Coyle, “The Twilight of National Planning”, *Harper’s Magazine*, Oktober 1953, hlm. 558.

4 W. Roepke, *Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart*, Zurich, 1942, hlm. 172.

Konflik yang harus kita hadapi sesungguhnya cukup mendasar, yakni konflik antara dua jenis organisasi sosial yang tak dapat diselaraskan. Jika dilihat dari wujudnya yang paling khas, keduanya sering dideskripsikan sebagai tipe masyarakat komersial dan tipe masyarakat militer. Mungkin istilah-istilahnya tak terlalu bagus, karena membawa perhatian orang ke hal-hal yang tak penting dan mempersulit kita melihat bahwa kita di sini sedang berhadapan dengan suatu alternatif nyata dan bahwa tidak ada kemungkinan ketiga. Entah pilihan sekaligus risiko terletak pada seorang individu atau si individu dibebaskan dari keduanya. Dalam banyak hal, organisasi militer sebetulnya mewakili pendekatan yang paling mirip dengan organisasi tipe kedua yang sudah kita kenal, di mana pekerjaan dan pekerja keduanya ditentukan oleh otoritas dan di mana, ketika sarana yang tersedia sedikit, setiap orang sama-sama menerima sumber daya komunal yang sedikit pula. Ini adalah satu-satunya sistem yang di dalamnya setiap individu dapat diberikan ketahanan ekonomi yang penuh, dan melalui perluasan ketahanan ini ke seluruh masyarakat, ketahanan ini dapat diperoleh seluruh anggotanya. Namun ketahanan ini tak dapat dipisahkan dari pembatasan terhadap kebebasan dan tatanan hierarkis kehidupan militer—ini adalah ketahanan barak militer.

Tentu saja mungkin untuk mengorganisasikan berbagai bagian dalam masyarakat merdeka berdasarkan prinsip ini dan tak ada alasan mengapa bentuk kehidupan ini, yang membatasi kebebasan individu, tidak boleh terbuka bagi orang yang lebih menyukainya. Bahkan semacam jasa buruh sukarela yang mengikuti model militer mungkin saja merupakan bentuk terbaik bagi negara dalam menyediakan jaminan atas kesempatan kerja dan penghasilan minimum bagi semua orang. Bahwa proposal semacam ini di masa lalu telah terbukti kurang diterima, penyebabnya adalah fakta bahwa orang yang ingin menyerahkan kebebasan mereka demi ketahanan juga selalu menuntut bahwa jika mereka melepas kebebasan penuh mereka, kebebasan ini juga harus diambil dari orang yang tak mau melepasnya. Sukar

menemukan justifikasi bagi klaim ini.

Namun, organisasi tipe militer sebagaimana kita kenal memberi kita hanya gambaran yang sangat tidak memadai mengenai ihwal bagaimana rupa masyarakat jadinya jika organisasi jenis ini diberlakukan pada seluruh masyarakat. Selama hanya sebagian dari masyarakat ditata menurut cara militer, ketidakbebasan anggota-anggota organisasi militer itu diperlemah oleh fakta bahwa masih ada wilayah bebas yang dapat mereka masuki jika pembatasan itu menjadi sangat mengganggu. Jika kita mau membentuk gambar mengenai apa jadinya rupa masyarakat jika masyarakat ini, menurut ideal yang telah menawan banyak kaum sosialis, ditata sebagai sebuah pabrik besar tertentu, maka kita harus melihat ke Sparta kuno, atau ke Jerman masa kini, yang setelah bergerak selama dua atau tiga generasi ke arah ini, sekarang ini telah hampir mencapainya.



Di dalam masyarakat yang sudah terbiasa dengan kebebasan, hampir tidak mungkin bahwa banyak orang akan mau dengan sengaja membeli ketahanan dengan harga sebesar itu. Tetapi kebijakan yang kini diikuti di mana-mana, yang mendistribusikan privilese ketahanan, sekali ke kelompok ini, lain kali ke kelompok itu, kini dengan cepat menciptakan kondisi-kondisi yang di dalamnya perjuangan untuk mendapatkan ketahanan cenderung menjadi lebih kuat ketimbang cinta pada kebebasan. Alasan munculnya keadaan ini adalah bahwa dengan setiap pemberian ketahanan lengkap kepada satu kelompok, ketiadaan ketahanan pada bagian lain masyarakat mau tak mau meningkat. Jika anda menjaminkan kepada beberapa orang satu bagian tertentu dari kue yang besarnya berubah-ubah, maka bagian yang tersisa bagi orang-orang lain mau tak mau akan berfluktuasi secara proporsional lebih besar daripada fluktuasi ukuran kue secara keseluruhan. Dan unsur pokok ketahanan ekonomi yang ditawarkan sistem kompetitif, yakni kesempatan yang sangat

bervariasi, akan makin berkurang.

Di dalam sistem pasar, ketahanan dapat diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu hanya melalui sejenis perencanaan yang dikenal sebagai restriksionisme (yang bagaimana pun juga mencakup hampir semua perencanaan yang secara nyata dipraktikkan!). “Kontrol”, yakni, pembatasan produk yang dihasilkan sehingga harga akan menjamin keuntungan yang “memadai”, adalah satu-satunya cara agar produsen di dalam ekonomi pasar dapat dijamin memperoleh penghasilan tertentu. Tetapi hal ini mau tak mau menimbulkan reduksi kesempatan yang terbuka bagi orang lain. Jika si produsen, entah dia seorang wiraswasta atau pun buruh, harus diproteksi dari orang luar yang menjual dengan harga lebih murah, berarti orang lain yang miskin tidak diikutsertakan dalam mengecap kemakmuran yang relatif lebih besar yang dihasilkan oleh industri yang dikontrol. Setiap pembatasan pada kebebasan memasuki perdagangan mengurangi ketahanan semua orang lain yang berada di luarnya. Dan ketika jumlah orang yang penghasilannya diamankan dengan cara ini meningkat, kesempatan alternatif yang terbuka bagi siapa pun yang menderita kehilangan penghasilan akan terbatas; dan bagi orang yang secara negatif terpengaruh oleh setiap perubahan, kesempatan untuk menghindari pengurangan fatal penghasilan mereka dengan demikian juga diperkecil. Dan, sebagaimana telah semakin nyata benar, jika di dalam jenis usaha yang kondisinya membaik, anggotanya diperbolehkan menyingkirkan orang lain demi mengamankan bagi diri mereka sendiri seluruh keuntungan dalam bentuk gaji atau laba yang lebih tinggi, maka orang yang terlibat dalam jenis usaha di mana permintaan telah jatuh tidak memiliki tempat tujuan lain lagi, dan setiap perubahan menjadi penyebab pengangguran yang luas. Kecil keraguan bahwa terutama adalah konsekuensi dari perjuangan untuk mendapatkan ketahanan melalui sarana ini di dalam dekade-dekade terakhir, pengangguran dan dengan demikian kerentanan di dalam bagian-bagian besar populasi telah meningkat sangat tajam.

Di negeri ini pembatasan seperti itu, khususnya yang berdampak pada lapisan tengah masyarakat, telah menghadirkan berbagai dimensi penting hanya pada masa relatif baru-baru ini, dan kita sejauh ini hampir-hampir tidak menyadari seluruh konsekuensinya. Di dalam masyarakat yang telah bertumbuh dengan kaku semacam itu, keadaan tanpa harapan sama sekali dari posisi orang-orang yang dibiarkan berada di luar wilayah pekerjaan yang dilindungi, dan besarnya kesenjangan yang memisahkan mereka dari orang-orang beruntung yang memiliki pekerjaan, yang menerima proteksi terhadap kompetisi sehingga tidak perlu bagi mereka untuk mengalah sedikit pun supaya memberi ruang bagi orang-orang luar, hanya dapat diapresiasi oleh orang yang telah mengalaminya. Ini bukanlah masalah orang yang beruntung mau menyerahkan kedudukan mereka, tetapi semata-mata bahwa mereka harus ikut juga mengalami ketidakberuntungan umum melalui pengurangan penghasilan mereka, atau bahkan lebih sering hanya melalui pengorbanan prospek mereka untuk mengalami keadaan yang lebih baik. Tetapi hal ini tidak dapat terjadi karena mereka memiliki proteksi atas “standar kehidupan” mereka, atas “harga yang pantas”, atau atas “penghasilan profesional” yang mereka pandang sebagai hak-hak mereka, dan yang atas semua proteksi ini mereka menerima dukungan negara. Sebagai akibatnya, alih-alih harga, upah, dan penghasilan individu, kini pekerjaan dan produksilah yang mengalami fluktuasi kuat. Tidak pernah ada eksploitasi yang lebih buruk dan lebih kejam terhadap satu kelas oleh kelas lain ketimbang eksploitasi atas anggota yang lebih lemah atau yang kurang beruntung dari suatu kelompok produsen oleh kelompok-kelompok lain yang telah mapan yang dimungkinkan oleh “regulasi” terhadap kompetisi. Tidak banyak slogan yang telah menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada ideal tentang “stabilisasi” harga (atau gaji) tertentu yang, sementara mengamankan penghasilan seseorang, membuat posisi orang lain makin tak stabil dan makin terancam.

Dengan demikian, semakin kita berupaya menyediakan keta-

hanan sepenuhnya dengan mencampuri sistem pasar, semakin besar kerentanan jadinya; dan, yang lebih buruk, semakin besar jadinya kontras antara ketahanan orang yang memperolehnya sebagai privilese dan kerentanan yang makin bertambah dari orang miskin yang tak memiliki hak istimewa apa pun. Dan semakin ketahanan menjadi privilese, dan semakin besar bahayanya bagi orang yang tersingkir darinya, akan semakin tinggi pula harga ketahanan itu di mata banyak orang. Ketika jumlah orang yang memiliki privilese meningkat, dan perbedaan antara ketahanan mereka dan kerentanan orang lain bertambah, perangkat nilai-nilai sosial yang seluruhnya baru tahap demi tahap muncul. Bukan lagi kebebasan, melainkan ketahanan yang memberi orang peringkat dan status; yang membuat seorang pria muda lebih diinginkan sebagai calon pengantin adalah haknya atas pensiun, lebih daripada keyakinan pada kemampuannya menghasilkan produk. Sementara itu, pada sisi lain, kerentanan menjadi suatu keadaan paria yang menakutkan, tempat berdiam seumur hidup bagi mereka yang semasa mudanya telah ditolak untuk memasuki tempat dan posisi terlindung sebagai seorang yang bergaji.



Upaya umum untuk mendapatkan ketahanan melalui langkah-langkah restriktif, yang ditentang atau didukung negara, lambat laun telah menghasilkan transformasi masyarakat—suatu transformasi yang, seperti juga dalam banyak hal lain, dipimpin oleh Jerman, dan diikuti oleh negeri-negeri lain. Perkembangan ini dipercepat oleh suatu akibat lain dari ajaran sosialis, yakni peremehan yang disengaja atas semua kegiatan yang melibatkan risiko ekonomi dan cercaan moral yang ditujukan kepada laba yang membuat banyak orang mau mengambil risiko itu tetapi yang dapat dimenangkan hanya oleh segelintir orang. Kita tak dapat menyalahkan kaum muda kita ketika mereka lebih memilih ketahanan dan posisi sebagai orang upahan, ketimbang memikul

risiko menjadi wiraswasta setelah mereka mendengar sejak kecil bahwa pekerjaan bergaji itu lebih tinggi nilainya, lebih agung dan lebih tidak egois. Generasi yang lebih muda masa kini tumbuh dewasa di dalam dunia yang di dalamnya, lewat sekolah dan pers, semangat kewirausahaan komersial digambarkan sebagai semangat yang buruk dan usaha mendapatkan laba sebagai usaha tidak bermoral, di mana mempekerjakan 100 orang digambarkan sebagai eksploitasi, tetapi memerintah 100 orang dianggap terhormat. Orang yang lebih tua mungkin memandang apa yang baru dikatakan ini sebagai pembesar-besaran keadaan sebenarnya pada masa kini; tetapi pengalaman sehari-hari sebagai seorang dosen di universitas tidak menyisakan banyak keraguan bahwa, sebagai akibat propaganda antikapitalis, nilai-nilai telah berubah jauh sebelum terjadi perubahan di dalam pranata-pranata negeri ini. Masalahnya adalah apakah dengan mengubah pranata-pranata kita untuk memenuhi tuntutan-tuntutan baru ini, kita bukan tanpa sadar sedang menghancurkan nilai-nilai yang masih kita anggap lebih tinggi.

Perubahan di dalam struktur masyarakat, yang terjadi akibat kemenangan ideal ketahanan atas ideal kemerdekaan, tidak dapat lebih baik diilustrasikan ketimbang dengan membuat perbandingan dengan apa yang 10 atau 20 tahun lalu masih dapat dipandang sebagai masyarakat tipe Inggris dan Jerman. Betapa pun besar pengaruh militer di negeri Jerman, adalah suatu kesalahan berat jika orang menghubungkan apa yang orang Inggris pandang sebagai watak “militer” masyarakat Jerman dengan pengaruh itu. Perbedaannya jauh lebih dalam ketimbang yang dapat dijelaskan dengan alasan itu, dan sifat-sifat istimewa masyarakat Jerman yang ada di dalam lingkungan yang tidak secara nyata dipengaruhi militer tidak kurang daripada di dalam lingkungan yang dengan kuat dipengaruhi militer. Bukanlah bahwa di hampir segala masa, bagian lebih besar orang Jerman diorganisasi demi perang ketimbang di negeri-negeri lain, melainkan bahwa organisasi tipe yang sama digunakan demi sangat banyak tujuan lain, sehingga memberi masyarakat Jerman

ciri istimewanya itu. Yang terjadi adalah bahwa, dibandingkan dengan negeri lain mana pun, bagian lebih besar kehidupan sipil Jerman dengan sengaja diorganisasi dari jenjang atas ke bawah, sehingga bagian sangat besar rakyatnya tidak memandang diri mereka sebagai otonom tetapi sebagai fungsionaris atau pejabat yang ditunjuk, sehingga memberi karakter yang khas kepada struktur sosial mereka. Sebagaimana dengan bangga diklaim orang Jerman sendiri, Jerman telah lama menjadi *Beamtenstaat*, negara para pegawai negeri. Di negara semacam ini, bukan hanya di dalam Kepegawaian Negeri, melainkan di hampir seluruh bidang kehidupan, penghasilan dan status diberikan dan dijamin oleh suatu otoritas.

Walaupun diragukan apakah semangat kebebasan di mana pun dapat sepenuhnya dihilangkan melalui penggunaan kekuasaan, tidaklah pasti bahwa ada bangsa yang akan berhasil bertahan menghadapi proses yang melaluinya semangat kebebasan ini dengan perlahan dicekik di Jerman. Karena distingsi dan peringkat bisa dicapai boleh dikata hanya dengan menjadi pegawai negeri yang digaji, karena melaksanakan kewajiban yang ditentukan dipandang lebih terpuji daripada memilih sendiri bidang kegunaan diri sendiri, karena semua aktivitas yang tidak termasuk di dalam hierarki resmi atau yang tidak mendatangkan penghasilan tetap dipandang inferior dan bahkan agak memalukan, maka tidak bisa diharapkan bahwa banyak orang akan bertahan dalam waktu lama untuk lebih menyukai kebebasan ketimbang ketahanan. Dan karena alternatif terhadap ketahanan dalam posisi ketergantungan adalah posisi yang paling rawan, yang di dalamnya berhasil atau gagal orang tetap dipandang hina, hanya segelintir orang yang akan melawan godaan untuk mendapatkan ketahanan dengan mengorbankan kebebasan. Ketika segala sesuatu telah bergerak terlalu jauh, maka sesungguhnya kebebasan menjadi cemoohan, sebab kebebasan dalam situasi ini dapat diperoleh hanya dengan mengorbankan hampir segala hal yang baik di bumi ini. Dalam keadaan ini, tidaklah mengherankan bahwa semakin banyak

orang merasakan bahwa, tanpa ketahanan ekonomi, kebebasan “tidak cukup berharga untuk dimiliki”, dan bahwa mereka mau mengorbankan kebebasan mereka demi ketahanan. Tetapi sungguh merasahkan mendapati Prof. Harold Laski di negeri ini menggunakan argumen yang persis sama itu, yang mungkin telah paling berhasil, ketimbang argumen lain mana pun, membujuk rakyat Jerman mengorbankan kebebasan mereka.⁵

Sama sekali tidak ada persoalan bahwa ketahanan dari kemelaratan yang parah, dan pengurangan sebab-musabab yang bisa terelakkan dari usaha-usaha yang tersasar dan kekecewaan yang ditimbulkannya, harus menjadi salah satu tujuan penting kebijakan. Tetapi agar upaya itu sukses dan tidak menghancurkan kebebasan individu, ketahanan harus disediakan di luar pasar, dan kompetisi dibiarkan berfungsi tanpa terhalang. Ketahanan sampai tahap tertentu adalah penting jika kebebasan harus dipertahankan dan dipelihara, karena kebanyakan orang bersedia memikul risiko yang tak pelak lagi ditimbulkan oleh kebebasan hanya selama risiko itu tidak terlampau besar. Tetapi walaupun ini adalah kebenaran yang harus selalu kita ingat, tidak ada sesuatu pun yang lebih fatal ketimbang tren masa kini di antara para pemimpin intelektual yang memuji-muji ketahanan dengan mengorbankan kebebasan. Adalah penting bahwa kita dengan jujur belajar kembali untuk menghadapi fakta bahwa kebebasan hanya dapat dipunyai dengan membayar ongkos, dan bahwa sebagai individu harus siap membuat pengorbanan material yang serius untuk mempertahankan kebebasan kita. Jika kita ingin mempertahankan ini, kita harus mendapatkan kembali keyakinan yang di atasnya kedaulatan kebebasan di negeri-negeri Anglo-Saxon ditumpukan, dan yang Benjamin Franklin

5 H. J. Laski, *Liberty in the Modern State* (edisi Pelican 1937, hlm. 51): “Orang-orang yang mengetahui kehidupan normal orang miskin, yang merasa sedang diburu oleh bencana yang akan segera menimpa, yang mencari dengan tak sabar keindahan yang terus-menerus tak didapatnya, akan sangat menyadari bahwa, tanpa ketahanan ekonomi, kebebasan tidak cukup berharga untuk dimiliki.”

ekspresikan di dalam frasa yang dapat dikenakan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bangsa: “Orang-orang yang mau melepaskan kebebasan esensial untuk membeli sedikit ketahanan sementara, tidak patut memperoleh entah kebebasan atau pun ketahanan.”



BAB 10

MENGAPA ORANG TERBURUK MENCAPAI POSISI PUNCAK

*Semua kekuasaan itu korup,
apalagi kekuasaan absolut.*
Lord Acton

KINI kita harus menelaah kepercayaan yang membuat banyak orang merasa lega terhadap keniscayaan datangnya totalitarianisme, dan yang sangat memperlemah perlawanan banyak orang yang menolak totalitarianisme itu dengan segala daya mereka seandainya saja mereka betul-betul memahaminya. Ini adalah kepercayaan bahwa berbagai ciri paling buruk dari berbagai rezim totalitarian muncul karena “kebetulan” sejarah, bahwa rezim-rezim itu didirikan oleh sekelompok orang yang berprinsip buruk dan para penjahat. Sudah pasti, demikian pendapat orang, jika di Jerman penciptaan rezim totalitarian membawa orang-orang seperti Streicher dan Killinger, Ley dan Heine, Himmler dan Heydrich, ke tampuk kekuasaan, maka itulah bukti kebrutalan karakter Jerman; bukan bahwa sistem totalitarianisme pasti berkonsekuensi memunculkan orang-orang semacam itu. Mengapa musti tidak mungkin bahwa sistem sejenis ini, jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang penting, dijalankan oleh orang-orang yang tulus berjuang demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan?

Kita tidak boleh menipu diri sendiri dengan mempercayai bahwa semua orang baik pastilah demokratis atau pasti akan mau berandil di dalam pemerintahan. Tak diragukan, banyak orang akan lebih suka mempercayakannya pada seseorang yang mereka pikir lebih kompeten. Meskipun ini mungkin tidak bijaksana, tidak ada yang buruk atau memalukan dalam sikap menyetujui suatu kediktatoran yang dijalankan untuk hal-hal yang baik. Totalitarianisme, sudah kita dengar argumennya, adalah sistem kekuasaan yang kuat, baik untuk tujuan kebaikan maupun tujuan kejahatan, dan tujuan yang akan dicapai sistem itu bergantung seluruhnya pada para diktatornya. Dan orang yang berpikir bahwa bukanlah sistemnya yang perlu kita takuti, melainkan bahaya bahwa sistem itu akan dijalankan oleh orang-orang yang jahat, bahkan dapat tergoda untuk mencegah bahaya ini dengan berusaha agar sistem itu didirikan sebelum terlambat oleh orang-orang baik.

Tak ada keraguan bahwa suatu sistem “fasis” Inggris akan jauh berbeda dari model-model fasisme Jerman atau Italia; sudah tentu, jika transisi bisa dilewati tanpa kekerasan, kita dapat berharap mendapatkan tipe pemimpin yang lebih baik. Dan seandainya saya harus hidup di bawah sistem fasis, saya tak ragu bahwa saya ingin hidup di bawah sistem fasis yang dijalankan oleh seorang Inggris ketimbang siapa pun yang lain. Namun semua ini tidak berarti bahwa, jika dinilai berdasarkan standar kita sekarang, suatu sistem fasis Britania pada akhirnya akan terbukti sangat berbeda atau lebih bisa terperi ketimbang berbagai prototipenya. Ada berbagai alasan kuat untuk percaya bahwa apa yang bagi kita tampak sebagai ciri-ciri terburuk sistem-sistem totalitarian yang ada bukanlah produk sampingan yang kebetulan, melainkan fenomena yang cepat atau lambat pasti akan dihasilkan oleh totalitarianisme. Sama seperti negarawan demokratis yang mulai merencanakan kehidupan ekonomi akan segera diperhadapkan pada pilihan apakah dia akan menggunakan kekuasaan diktatorial atau meninggalkan rencananya, demikian juga seorang diktator totalitarian akan segera harus memilih apakah akan mengabaikan

moral umum atau mengalami kegagalan. Untuk alasan inilah orang-orang yang bejat dan ganas akan lebih mungkin sukses di dalam masyarakat yang cenderung bergerak ke totalitarisme. Siapa yang tidak melihat hal ini masih belum memahami lebarnya kesenjangan yang memisahkan totalitarisme dari rezim liberal, perbedaan mutlak antara keseluruhan atmosfer moral di bawah kolektivisme dan peradaban Barat yang pada dasarnya individualis.

“Landasan moral kolektivisme” tentu saja telah banyak diperdebatkan di masa lampau; tetapi yang menjadi perhatian kita di sini bukanlah landasan moralnya, melainkan akibat-akibat moralnya. Diskusi-diskusi yang biasa, mengenai berbagai aspek etis kolektivisme, mengacu ke pertanyaan apakah kolektivisme diharuskan oleh keyakinan moral yang ada; atau keyakinan moral apa yang diperlukan bagi kolektivisme untuk memberikan hasil-hasil yang diharapkan. Namun pertanyaan kita adalah pandangan moral apa yang akan dihasilkan oleh suatu pengorganisasian masyarakat yang kolektivis, atau pandangan apa yang paling mungkin akan mengaturnya. Interaksi antara nilai moral dan pranata mungkin akan mendatangkan akibat bahwa etika yang dihasilkan kolektivisme akan sama sekali beda dari ideal-ideal moral yang berujung pada tuntutan adanya kolektivisme. Sementara kita condong berpikir bahwa, berhubung keinginan akan sistem kolektivis muncul dari motif-motif moral yang tinggi, maka sistem semacam itu pastilah akan menghasilkan landasan bagi kebijakan tertinggi, namun sebetulnya tak ada alasan mengapa sembarang sistem pasti akan mempertegas sikap dan perilaku yang melayani tujuan yang untuknya sistem itu dirancang. Pandangan moral yang berlaku sebagian akan bergantung pada berbagai kualitas watak yang akan menuntun individu-individu kepada keberhasilan di dalam sistem kolektivis atau sistem totalitarian, dan sebagian lagi pada berbagai persyaratan untuk menjalankan mesin totalitarian.

Kita di sini harus kembali sejenak ke posisi yang ada sebelum penindasan terhadap lembaga-lembaga demokratis dan penciptaan suatu rezim totalitarian. Dalam tahap ini, unsur utama adalah tuntutan umum atas tindakan pemerintah yang cepat dan tegas, ketidakpuasan terhadap langkah prosedur demokratis yang lamban dan tertatih-tatih, yang membuat masyarakat menginginkan tindakan dilakukan hanya demi kepentingan tindakan itu sendiri. Maka orang atau partai yang tampak kuat dan cukup memiliki tekad “untuk membuat segala sesuatu terlaksana”, adalah pihak yang berdaya tarik terbesar. “Kuat” di sini berarti bukan cuma mayoritas dalam jumlah—justru ketidakefektifan kelompok-kelompok mayoritas dalam parlemenlah yang menimbulkan ketidakpuasan orang. Apa yang mereka cari adalah seseorang yang mendapatkan dukungan sangat solid sehingga membangkitkan kepercayaan bahwa dia dapat melaksanakan apa pun yang dia inginkan. Di sinilah partai tipe baru itu, yang ditata menurut model militer, masuk.

Di negeri-negeri Eropa Tengah, partai-partai sosialis telah membiasakan massa dengan berbagai organisasi yang bersifat semimiliteristik, yang dirancang untuk menyerap sebanyak mungkin kehidupan pribadi anggota-anggotanya. Hal yang masih diperlukan, untuk membuat satu kelompok mendapatkan kekuasaan berlimpah, adalah melanjutkan prinsip yang sama sedikit lebih jauh, yakni, mencari kekuatan bukan melalui perolehan suara yang terjamin dalam jumlah besar pada pemilihan-pemilihan umum yang kadang-kadang dilakukan, melainkan di dalam dukungan mutlak dan tanpa ragu dari suatu badan yang lebih kecil tapi lebih terorganisasi. Peluang memaksakan rezim totalitarian pada seluruh rakyat bergantung pada si pemimpin yang pertama-tama harus mengumpulkan sekelompok orang di sekelilingnya yang bersedia dengan suka rela takluk pada disiplin totalitarian yang kemudian akan mereka paksakan pada masyarakat selebihnya dengan memakai kekuasaan.

Kendatipun partai-partai sosialis memiliki kekuatan untuk mendapatkan apa pun jika mereka memutuskan untuk memakai

kekuasaan pemaksa, mereka nyatanya tidak mau melakukan hal itu. Tanpa sadar, mereka telah menetapkan bagi diri mereka sendiri suatu tugas yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang kejam, yang siap mengabaikan hambatan yang timbul dari berbagai nilai moral yang diterima.

Bahwa sosialisme dapat dipraktikkan hanya melalui metode yang tidak disetujui kebanyakan kalangan sosialis adalah, tentu saja, suatu pelajaran yang telah dipelajari oleh banyak pembaru sosial di masa lampau. Partai-partai sosialis lama terhalang oleh ideal-ideal demokratis mereka; mereka tidak memiliki kekejaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah mereka pilih. Adalah sesuatu yang khas bahwa baik di Jerman maupun di Italia, keberhasilan fasisme didahului oleh penolakan partai-partai sosialis untuk mengambil-alih tanggung jawab pemerintahan. Mereka enggan dengan sepenuh hati memanfaatkan berbagai metode yang penggunaannya telah mereka buka jalannya. Mereka masih mengharapkan mujizat bahwa suatu mayoritas akan menyepakati rencana tertentu dalam mengorganisasikan masyarakat secara keseluruhan. Orang lain telah memetik pelajaran bahwa di dalam masyarakat terencana, persoalannya bukan lagi tentang apa yang disepakati mayoritas orang, melainkan tentang kelompok mana yang merupakan kelompok tunggal terbesar yang semua anggotanya cukup sepakat untuk memungkinkan ditetapkannya arah yang sama dalam segala urusan; atau, jika tidak ada kelompok yang cukup besar untuk memberlakukan pandangan-pandangannya, bagaimana kelompok semacam itu dapat diciptakan dan siapa yang akan berhasil menciptakannya.

Ada tiga alasan utama mengapa kelompok kuat beranggota banyak semacam itu, yang memegang pandangan yang cukup homogen, kurang mungkin dibentuk oleh elemen terbaik masyarakat mana pun, melainkan lebih mungkin dibentuk oleh elemen terburuknya. Diukur dengan standar kita, prinsip-prinsip yang dijadikan landasan untuk memilih kelompok semacam itu akan hampir seluruhnya negatif.

Dalam kasus pertama, mungkin sekali benar bahwa pada umumnya semakin tinggi pendidikan dan kecerdasan individu-individu, semakin berbeda pandangan-pandangan dan cita rasa mereka, dan semakin kurang mungkin bagi mereka untuk menyepakati hierarki nilai-nilai tertentu. Salah satu akibat keadaan ini adalah bahwa jika kita ingin menemukan tingkat keseragaman dan keserupaan pandangan yang tinggi, kita harus turun ke wilayah nilai-nilai moral dan standar intelektual yang lebih rendah, di mana naluri dan cita rasa yang lebih primitif dan lebih “umum” mendominasi. Ini tidak berarti bahwa mayoritas penduduk memiliki standar moral yang rendah; ini hanya berarti bahwa kelompok terbesar rakyat yang nilai-nilainya sangat serupa adalah orang-orang yang memegang standar rendah. Ini dapat dikatakan adalah ciri umum yang paling kurang penting yang mempersatukan bagian terbesar rakyat. Jika kelompok beranggota banyak dibutuhkan, yang cukup kuat untuk memaksakan pandangan mereka pada nilai-nilai kehidupan masyarakat selebihnya, kelompok ini tak akan mungkin terbentuk dari orang-orang yang memiliki cita rasa yang sangat berbeda dan yang sangat berkembang, melainkan akan terbentuk dari “massa”, dalam pengertian yang merendahkan, orang-orang yang paling tidak orisinal dan tak mandiri, yang akan dapat menggunakan kekuatan jumlah mereka yang banyak untuk menyokong ideal-ideal tertentu mereka.

Namun, jika seorang yang berpotensi menjadi diktator harus bergantung sepenuhnya pada orang-orang yang memiliki naluri primitif dan sederhana yang sangat serupa, maka jumlah mereka saja tidak akan cukup untuk mewujudkan usaha-usaha mereka. Dia harus meningkatkan jumlah mereka dengan mengonversi lebih banyak orang ke kredo sederhana yang sama.

Di sinilah masuk prinsip kedua yang negatif, yakni prinsip seleksi: dia akan berhasil mendapatkan dukungan semua orang yang jinak, penurut, dan dungu, yang tidak memiliki keyakinan sendiri yang kuat, tetapi bersedia menerima sistem nilai yang sudah jadi, jika perangkat nilai-nilai ini digenderangkan ke dalam

telinga mereka dengan cukup keras dan sering. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ide-ide yang samar dan terbentuk tidak sempurna, yang dengan mudah diombang-ambingkan, dan yang memiliki gelora dan emosi yang mudah dirangsang, yang karenanya akan menambah jumlah anggota partai totalitarian.

Dalam hubungan dengan usaha cermat pemimpin diktatorial yang cerdas untuk mempersatukan sejumlah pendukung yang homogen dan terikat erat, masuklah elemen seleksi ketiga yang negatif dan mungkin yang paling penting. Tampaknya hampir merupakan hukum kodrat manusia bahwa adalah lebih mudah bagi orang untuk bersepakat dalam program negatif, dalam kebencian terhadap musuh, dan dalam kedengkian terhadap orang kaya, ketimbang dalam tugas positif apa pun. Kontras antara “kami” dan “mereka”, pertarungan bersama melawan orang-orang yang berada di luar kelompok sendiri, tampak merupakan elemen penting di dalam setiap credo apa pun yang dengan kuat merajut suatu kelompok untuk melakukan aksi bersama. Cara ini karenanya selalu digunakan oleh orang-orang yang mencari, bukan hanya dukungan terhadap suatu kebijakan, melainkan juga kesetiaan dan komitmen tanpa ragu dari massa yang besar jumlahnya. Dari sudut pandang mereka, cara ini memiliki keuntungan yang lebih besar karena dengannya mereka mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk bertindak, ketimbang melalui hampir semua program positif apa pun. Bagi mereka, adanya musuh, entah musuh internal seperti orang “Yahudi” atau “Kulak”, ataupun musuh eksternal, tampaknya adalah persyaratan mutlak yang harus ada di dalam perangkat persenjataan dan amunisi seorang pemimpin totalitarian.

Bahwa di Jerman orang Yahudilah yang menjadi musuh sampai tempat mereka diambil oleh kalangan “plutokrasi” (kelas penguasa kaya), merupakan akibat dari kebencian antikapitalis yang menjadi landasan seluruh gerakan, sama seperti pemilihan “Kulak” sebagai sasaran di Rusia. Di Jerman dan di Austria orang Yahudi dipandang sebagai wakil kapitalisme karena adanya kebencian tradisional dari sebagian besar penduduk terhadap

usaha komersial telah membuat usaha komersial itu lebih siap dimasuki oleh kelompok yang praktis tersingkir dari pekerjaan-pekerjaan yang dihargai lebih tinggi. Ini adalah kisah lama tentang ras asing yang diizinkan masuk hanya ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang kurang dihargai, yang kemudian malah lebih dibenci lagi karena mereka menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu dengan sukses. Fakta bahwa di Jerman antisemitisme dan antikapitalisme muncul dari akar yang sama adalah fakta yang sangat penting dalam usaha memahami apa yang telah terjadi di sana; tetapi hal ini jarang dipahami para pengamat asing.



Menganggap tendensi universal kebijakan kolektivis sebagai tendensi nasionalistik yang seluruhnya timbul karena keperluan untuk memenangkan dukungan penuh sama artinya dengan mengabaikan faktor lain yang tidak kurang pentingnya. Bahkan dapat dipertanyakan apakah setiap orang dapat dengan realistis membayangkan suatu program kolektivis selain program yang dibuat untuk melayani kepentingan kelompok terbatas, apakah kolektivisme dapat ada dalam sembarang bentuk selain sebagai sejenis partikularisme, entah itu nasionalisme, rasialisme, atau kelas-isme. Kepercayaan dalam masyarakat terhadap tujuan dan kepentingan bersama tampaknya mengandaikan adanya derajat keserupaan pandangan dan pemikiran yang lebih besar daripada yang benar-benar ada di antara manusia sebagai insan semata. Jika anggota-anggota lain dari kelompok seseorang tidak dapat semuanya dikenali secara pribadi, maka mereka setidaknya harus dari tipe yang sama dengan tipe orang lain yang ada di sekitar kita, dan harus berpikir dan berbicara dalam cara yang sama dan mengenai hal-hal yang sejenis, supaya kita dapat menganggap diri kita sekelompok dengan mereka. Kolektivisme dalam skala dunia tampaknya tak terbayangkan, kecuali untuk melayani segelintir elite penguasa. Kolektivisme jenis ini pasti akan menimbulkan bukan saja masalah teknis, melainkan juga

terutama masalah moral yang tidak sedia dihadapi oleh seorang pun dari kalangan sosialis kita. Jika kaum proletar Inggris diberi hak mendapatkan bagian penghasilan yang sama seperti yang kini dihasilkan sumber daya kapital Inggris, dan mendapatkan bagian dalam pengontrolan penggunaan sumber daya ini, karena keduanya dihasilkan dari eksploitasi, maka, berdasarkan prinsip yang sama, semua orang India perlu diberi hak yang sama bukan hanya untuk menerima penghasilan ini, melainkan juga hak untuk menggunakan bagian proporsional dari kapital Inggris. Tetapi orang sosialis mana yang dengan serius memikirkan pembagian yang setara dari sumber kapital yang ada di antara penduduk dunia? Mereka semua memandang kapital sebagai sesuatu yang dimiliki bukan oleh umat manusia sedunia, melainkan oleh suatu bangsa—meskipun bahkan di dalam suatu bangsa hanya segelintir orang akan berani mendukung pandangan bahwa wilayah yang lebih kaya harus dipaksa menyerahkan sebagian sumber kapital “mereka” untuk membantu wilayah yang lebih miskin. Apa yang kaum sosialis nyatakan sebagai kewajiban terhadap sesama warga negara dari negara-negara yang ada, tak siap mereka berikan kepada orang-orang asing. Dilihat dari sudut pandang kolektivis yang konsisten, tuntutan bangsa-bangsa “miskin” agar dunia ini dibagi secara baru dapat sepenuhnya dibenarkan—meskipun, jika dengan konsisten diberlakukan, bangsa-bangsa yang menuntut hal ini dengan paling lantang akan, sebagai akibatnya, mengalami kerugian hampir sama banyak dengan kerugian bangsa-bangsa kaya. Karena itu, mereka dengan hati-hati tidak mendasarkan tuntutan mereka pada prinsip-prinsip kesetaraan melainkan pada kapasitas keunggulan mereka yang semu dalam mengorganisasi bangsa-bangsa lain.

Salah satu kontradiksi mendasar dalam filsafat kolektivis adalah bahwa, sementara filsafat ini mendasarkan diri pada moral humanistik yang telah dikembangkan oleh individualisme, filsafat ini hanya dapat dipraktikkan di dalam kelompok yang relatif kecil. Bahwa sosialisme selama bersifat teoretis adalah internasionalis, dan begitu dipraktikkan, entah di Rusia atau di Jerman, langsung

menjadi nasionalis yang penuh kekerasan, adalah salah satu alasan mengapa “sosialisme liberal”, sebagaimana dibayangkan kebanyakan orang di Barat, tetap bersifat teoretis murni, sementara praktik sosialisme di mana-mana bersifat totalitarian.¹ Kolektivisme tidak memiliki ruang bagi humanitarianisme yang luas sebagaimana liberalisme, melainkan hanya bagi partikularisme sempit dari paham-paham totalitarian.

Jika “komunitas” atau negara lebih utama daripada individu, jika komunitas memiliki tujuan-tujuannya sendiri yang terlepas, dan lebih unggul, dari tujuan-tujuan individu, maka hanya individu-individu yang bekerja demi tujuan-tujuan yang sama dapat dipandang sebagai anggota komunitas. Suatu konsekuensi tak terelakkan dari pandangan ini adalah bahwa seseorang dihormati hanya sebagai anggota kelompok, maksudnya, hanya jika dan sejauh dia bekerja demi tujuan-tujuan bersama yang diakui, dan bahwa dia mendapatkan keseluruhan martabatnya hanya dari keanggotaannya ini dan bukan hanya dari fakta bahwa dia pada hakikatnya seorang manusia. Sesungguhnya, konsep-konsep kemanusiaan itu sendiri, dan karenanya konsep-konsep semua bentuk internasionalisme, seluruhnya adalah produk pandangan individualis tentang manusia, dan tak bisa ada tempat bagi konsep-konsep ini di dalam sistem pemikiran kolektivistis.² Terlepas dari fakta dasar bahwa komunitas kolektivisme dapat berkembang hanya sejauh kesatuan maksud dan tujuan para individu ada atau dapat diciptakan, beberapa faktor penyumbang

1 Bdk. diskusi yang kini bermanfaat di dalam F. Borkenau, *Socialism, National or International?*, 1942.

2 Adalah sepenuhnya dalam semangat kolektivisme ketika Nietzsche membuat tokohnya Zarathustra berkata:

“Seribu tujuan telah ada hingga kini, sebab seribu orang telah ada. Tetapi kuk bagi seribu leher itu masih tiada, dan satu tujuan masih tiada. Kemanusiaan masih belum memiliki tujuan.

“Tetapi katakanlah kepadaku, wahai, saudara-saudaraku: Jika kemanusiaan masih belum punya tujuan, bukankah kemanusiaan itu sendiri tidak ada?”

memperkuat tendensi kolektivisme untuk menjadi partikularis dan eksklusif. Dari antaranya, salah satu faktor terpenting adalah bahwa keinginan individu untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok sangat sering merupakan akibat dari perasaan inferior, dan bahwa dengan demikian keinginannya hanya akan dapat dipuaskan jika keanggotaan dalam kelompok memberi posisi unggul di atas orang luar. Kadang kala, rupanya, fakta bahwa naluri kekerasan ini, yang si individu tahu harus dia kendalikan di dalam kelompoknya, tetapi dapat dibiarkan bebas merajalela di dalam aksi kolektif terhadap orang luar, justru menjadi dorongan lebih jauh untuk memadukan kepribadiannya dengan kepribadian kelompok. Ada kebenaran mendalam di dalam judul buku R. Niebuhr, *Moral Man and Immoral Society*—betapapun sedikit yang dapat kita setuju di dalam kesimpulan yang ditariknyanya dari tesisnya. Sebagaimana dikatakannya di dalam tulisannya yang lain, sesungguhnya ada “kecenderungan yang meningkat di antara manusia modern untuk membayangkan diri mereka bermoral karena mereka telah mendelegasikan tindakan buruk mereka ke kelompok-kelompok yang makin lama makin besar.”³ Bertindak demi suatu kelompok rupanya membebaskan orang dari banyak kendala moral yang mengontrol perilaku mereka sebagai individu dalam kelompok.

Sikap yang jelas antagonistik yang kebanyakan perencana ambil terhadap internasionalisme lebih jauh dijelaskan oleh fakta bahwa, dalam dunia yang ada sekarang, semua kontak dengan pihak luar yang dilakukan suatu kelompok adalah kendala bagi usaha mereka merencanakan dengan efektif suatu lingkungan yang di dalamnya mereka dapat mencoba menjalankan rencana itu. Karena itu bukanlah kebetulan bahwa, sebagaimana telah ditemukan penyunting salah satu kajian kolektif yang paling komprehensif mengenai perencanaan dengan perasaan kecewa,

3 Dikutip dari sebuah artikel Dr. Niebuhr oleh E. H. Carr, *The Twenty Years' Crisis*, 1941, hlm. 203.

“sebagian besar ‘perencana’ adalah nasionalis militan”.⁴

Kecenderungan nasionalis dan imperialis dari para perencana sosialis, yang jauh lebih umum ketimbang yang umumnya diakui, tidak selalu tampak jelas sebagaimana, misalnya, dalam kasus pasangan ekonom Webb dan beberapa orang dari kalangan Fabian awal. Dalam diri mereka ini, antusiasme bagi perencanaan secara khas dikombinasikan dengan pemujaan terhadap unit-unit politik yang besar dan berkuasa serta dengan peremehan terhadap negara kecil. Sejarawan Elie Halévy, ketika berbicara mengenai pasangan Webb pada waktu dia pertama kali mengenal mereka 40 tahun lalu, mencatat bahwa

Sosialisme mereka sangat antiliberal. Mereka tidak membenci kaum Tory, malah dengan luar biasa bersikap lunak kepada mereka, tetapi mereka tidak punya ampun terhadap Liberalisme Gladstonian. Pada waktu itu Perang Boer sedang berlangsung, dan baik kalangan liberal yang lebih maju maupun kalangan yang sedang mulai membentuk Partai Buruh dengan lapang dada berpihak pada Boer dalam melawan Imperialisme Britania, atas nama kebebasan dan kemanusiaan. Tetapi kedua Webb dan sahabat mereka, Bernard Shaw, lain sendiri. Mereka terang-terangan bersikap imperialistik. Kemerdekaan bangsa-bangsa kecil mungkin berarti bagi seorang individualis liberal. Tetapi tidak berarti apa-apa bagi kolektivis seperti mereka. Saya masih dapat mendengar Sidney Webb menjelaskan kepada saya bahwa masa depan adalah kepunyaan bangsa-bangsa administratif besar, di mana pejabat memerintah dan polisi menjaga ketertiban.

Dan di sebuah bukunya yang lain Halévy mengutip Bernard Shaw yang bersikukuh, kira-kira pada waktu yang sama, bahwa

4 Findlay MacKenzie (ed.), *Planned Society, Yesterday, Today, Tomorrow: A Symposium*, 1937, hlm. xx.

“dunia sudah seharusnya adalah milik negara-negara besar dan kuat; dan negara-negara kecil harus takluk dan masuk ke dalam wilayah mereka atau dihancurkan dan dibinasakan.”⁵

Saya telah mengutip bagian-bagian ini panjang lebar, yang tak perlu mengejutkan orang, di dalam deskripsi mengenai para nenek moyang Jerman dari Nasional-Sosialisme, karena bagian-bagian ini menyediakan contoh yang sangat khas mengenai glorifikasi kekuasaan yang dengan mudah membawa orang dari sosialisme ke nasionalisme dan yang secara mendalam mempengaruhi pandangan etis semua kaum kolektivis. Sejauh menyangkut hak-hak bangsa kecil, Marx dan Engels tidak lebih baik ketimbang kebanyakan kaum kolektivis lain yang konsisten, dan pandangan yang kadang kala mereka ungkapkan mengenai orang Ceko atau Polandia menyerupai pandangan kalangan Nasional Sosialis masa kini.⁶



Sementara bagi para filsuf sosial individualis besar abad ke-19, bagi seorang Lord Acton atau Jacob Buckhardt, sampai ke kaum sosialis masa kini seperti Bertrand Russell, yang telah mewarisi tradisi liberal, kekuasaan itu sendiri selalu dipandang sebagai mahajahat, bagi kaum kolektivis garis keras, kekuasaan, sebaliknya, adalah tujuan pada dirinya sendiri. Sebagaimana telah dideskripsikan dengan sangat bagus oleh Russell, perkaranya bukan hanya bahwa keinginan untuk mengorganisasi kehidupan sosial, berdasarkan perencanaan yang seragam itu sendiri, muncul terutama dari keinginan mendapatkan kekuasaan.⁷ Bahkan lebih lagi, perkaranya adalah bahwa keinginan itu lahir

5 E. Halévy, *L'Ere des Tyrannies*, Paris, 1938, hlm. 217, dan *History of the English People*, Epilog, jilid I, hlm. 105-106.

6 Bdk. K. Marx, *Revolution and Counter-revolution*, dan surat Engels kepada Marx, 23 Mei 1851.

7 Bertrand Russell, *The Scientific Outlook*, 1931, hlm. 211.

dari fakta bahwa untuk mencapai tujuan mereka, kaum kolektivistis harus menciptakan kekuasaan—kekuasaan atas manusia yang dipakai oleh manusia lain—dalam skala yang besarnya belum pernah dikenal sebelumnya, dan bahwa sukses mereka akan bergantung pada ihwal berapa besar kekuasaan semacam itu yang dapat mereka raih.

Ini tetap benar kendatipun banyak orang sosialis liberal dalam usaha-usaha mereka dipandu oleh suatu ilusi yang menyedihkan bahwa dengan mencabut kekuasaan dari individu pribadi yang memilikinya di dalam sistem individualis, dan dengan mentransfer kekuasaan ini ke masyarakat, mereka dengan demikian dapat memadamkan kekuasaan. Apa yang diabaikan orang yang berargumentasi seperti itu adalah fakta bahwa dengan memusatkan kekuasaan supaya dapat digunakan untuk melayani rencana tunggal, kekuasaan bukan hanya ditransfer tetapi juga diperkuat tanpa batas; bahwa dengan menyatukan kekuasaan yang sebelumnya dipakai secara mandiri oleh orang banyak ke dalam tangan hanya satu badan tertentu, maka jumlah kekuasaan yang diciptakan menjadi jauh lebih besar dan tanpa batas ketimbang yang pernah ada sebelumnya, dengan akibat kekuasaan ini jauh lebih menjangkau segala sesuatu sehingga boleh dikata sudah menjadi kekuasaan jenis yang berbeda. Sama sekali keliru kalau kadang-kadang diargumentasikan bahwa kekuasaan besar yang dijalankan oleh suatu Badan Perencana Pusat akan “tidak lebih besar ketimbang kekuasaan yang secara kolektif dijalankan oleh dewan direktur swasta.”⁸ Dalam masyarakat kompetitif, tak ada orang yang memiliki bahkan secuil pun dari kekuasaan yang dimiliki badan perencana sosialis; dan jika tidak ada orang yang dapat dengan sadar menggunakan kekuasaan ini, maka hanyalah penyalahgunaan kata-kata kalau orang mengatakan bahwa kekuasaan ini ada pada semua kapitalis sekaligus.⁹ Hanyalah

8 B. E. Lippincott, dalam Pendahuluan buku O. Lange dan F. M. Taylor, *On the Economic Theory of Socialism*, Minneapolis, 1938, hlm. 33.

9 Kita tidak boleh membiarkan diri ditipu oleh fakta bahwa kata kekuasaan, selain makna yang dipakai sehubungan dengan manusia, juga dipakai

permainan kata-kata jika orang berkata mengenai “kekuasaan yang dijalankan secara kolektif oleh dewan-dewan direktur swasta” selama mereka tidak bergabung untuk menjalankan aksi bersama—yang tentu saja akan berarti berakhirnya kompetisi dan penciptaan suatu sistem ekonomi terencana. Memecah atau mendesentralisasi kekuasaan haruslah berarti mengurangi jumlah kekuasaan absolut, dan sistem kompetitif adalah satu-satunya sistem yang dirancang untuk meminimalkan, melalui desentralisasi, kekuasaan yang dijalankan oleh manusia atas manusia.

Telah kita lihat sebelumnya bagaimana pemisahan tujuan ekonomi dari tujuan politik merupakan jaminan penting bagi kebebasan individu dan bagaimana pemisahan ini karenanya diserang oleh semua kaum kolektivistis. Kini kita harus menambahkan bahwa “penggantian kekuasaan ekonomi dengan kekuasaan politik” yang sekarang ini sangat sering dituntut, dengan sendirinya berarti penggantian kekuasaan yang selalu terbatas dengan kekuasaan yang cengkeramannya serba tidak bisa dihindari. Apa yang disebut kekuasaan ekonomi, walaupun dapat menjadi instrumen koersif, di tangan individu-individu privat tidak pernah menjadi kekuasaan yang eksklusif atau lengkap, tidak pernah berupa kekuasaan atas keseluruhan kehidupan seseorang. Tetapi ketika kekuasaan ekonomi ini dipusatkan sebagai instrumen kekuasaan politik, maka keadaan ini menciptakan ketergantungan parah yang hampir-hampir tak dapat dibedakan dari perbudakan.



dalam makna netral (atau antropomorfis) bagi suatu penyebab yang menentukan. Tentu akan selalu ada sesuatu yang menentukan segala hal yang terjadi, dan dalam arti ini jumlah kekuasaan yang ada harus selalu sama. Tetapi hal ini tidak benar bagi kekuasaan yang dengan sadar dipakai manusia.

Dari dua fitur penting semua sistem kolektivis, yakni kebutuhan akan suatu sistem tujuan-tujuan kelompok yang diterima umum, dan keinginan menggebu-gebu untuk mendapatkan kekuasaan maksimum bagi kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan itu, tumbuhlah sistem nilai moral yang jelas dan pasti, yang pada poin-poin tertentu sejalan dengan, dan pada poin-poin lainnya berkontras tajam dengan, sistem nilai-nilai moral kita—tetapi berbeda darinya dalam satu poin yang membuat kita ragu apakah kita masih dapat menyebutnya moral: sistem moral kolektivis ini tidak memberikan kebebasan kepada hati nurani individu untuk menerapkan aturan-aturannya sendiri dan bahkan tidak mengakui aturan umum apa pun yang seharusnya atau yang boleh diikuti oleh individu dalam segala keadaan. Hal ini membuat moral kaum kolektivis sangat berbeda dari apa yang telah kita ketahui sebagai moral sehingga kita merasa sulit menemukan prinsip apa pun di dalamnya, yang bagaimana pun juga dimilikinya.

Perbedaan prinsip ini sangat mirip dengan perbedaan yang telah kita tinjau dalam hubungan dengan Kedaulatan Hukum. Seperti hukum formal, norma etika individualis, betapapun tidak persis dalam banyak segi, bersifat umum dan absolut. Norma-norma ini meresepkan atau melarang suatu tipe umum tindakan, lepas dari ihwal apakah dalam suatu situasi tertentu maksud dan tujuan pamungkasnya baik atau buruk. Menipu atau mencuri, menyiksa atau mengkhianati kepercayaan orang, dipandang buruk, lepas dari ihwal apakah dalam situasi tertentu ada bahaya yang muncul atau tidak muncul darinya. Walaupun di dalam situasi tertentu tak ada orang yang mengalami kerugian, atau ada tujuan mulia yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tindakan tertentu, pokoknya tindakan itu buruk. Meskipun kita kadang-kadang terpaksa memilih di antara hal-hal yang jahat, hal-hal itu tetap jahat. Prinsip bahwa tujuan menghalalkan cara, dalam etika individualis dipandang sebagai penyangkalan atas semua kaidah moral. Dalam etika kolektivis, prinsip ini justru mau tidak mau menjadi norma tertinggi. Benar-benar tak ada sesuatu pun yang

tidak siap dilakukan oleh seorang kolektivis yang konsisten jika tindakan itu dilakukan demi “kebaikan seluruh masyarakat”, sebab “kebaikan seluruh masyarakat” baginya adalah kriteria satu-satunya untuk menentukan apa yang harus dilakukan. *Raison d'état*, “kepentingan negara”, yang di dalamnya etika kolektivis telah menemukan formulasinya yang paling eksplisit, tidak mengenal batas lain selain yang ditetapkan oleh kecocokan pragmatis—yakni kecocokan tindakan tertentu dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan apa yang diafirmasi oleh *raison d'état* sehubungan dengan relasi di antara negara-negara juga berlaku bagi relasi-relasi di antara individu-individu di dalam suatu negara kolektivis. Tidak ada apa pun yang tidak boleh dilakukan warga negaranya, tidak ada tindakan yang boleh dicegah hati nuraninya untuk dilakukan, jika tindakan itu diperlukan bagi tujuan yang telah ditetapkan komunitasnya atau yang telah diperintahkan atasannya.



Tidak adanya aturan formal yang absolut di dalam etika kolektivis tentu saja tidak berarti bahwa tidak ada kebiasaan individu yang bermanfaat yang didorong atau kebiasaan lain yang dinafikan oleh suatu komunitas kolektivis. Malah sebaliknya; komunitas kolektivis akan memberikan perhatian yang jauh lebih besar pada kebiasaan kehidupan individu ketimbang komunitas individualis. Untuk menjadi anggota yang berguna dalam masyarakat kolektivis, orang memerlukan sifat-sifat yang sangat jelas yang harus diperkuat melalui praktik terus-menerus. Alasan mengapa kita menyebut sifat-sifat ini sebagai “kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat” dan tidak mendeskripsikannya sebagai kebajikan-kebajikan moral adalah bahwa seorang individu tidak pernah diperbolehkan menempatkan aturan-aturan ini di atas perintah-perintah langsung, atau membiarkannya menjadi penghalang bagi pencapaian tujuan tertentu dari komunitasnya. Aturan-aturan itu, dalam kenyataan, hanya berguna untuk

mengisi celah-celah yang mungkin tak terisi oleh perintah-perintah langsung atau oleh penetapan tujuan-tujuan tertentu; tetapi aturan-aturan itu tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk berkonflik dengan kemauan pihak penguasa.

Perbedaan antara kebajikan yang akan terus dihargai di bawah sistem kolektivis dan yang akan lenyap, bisa diilustrasikan dengan baik melalui perbandingan atas berbagai kebajikan yang bahkan oleh musuh-musuh bebuyutan mereka pun diakui dimiliki orang Jerman, atau “orang Prusia pada umumnya”, dengan kebajikan-kebajikan yang umumnya dipandang tidak mereka miliki dan yang oleh orang Inggris, dengan cukup tepat, biasa dibanggakan sebagai kebajikan-kebajikan terunggul yang mereka miliki. Sedikit saja orang yang akan menyangkal bahwa orang Jerman secara keseluruhan adalah pekerja keras dan sangat berdisiplin, seksama, dan energetik sampai terasa tidak kenal ampun, selalu mau melakukan segala sesuatu dengan setepat-tepatnya, dan berkonsentrasi penuh dalam tugas apa pun yang mereka jalankan, bahwa mereka sangat peka terhadap ketertiban, kewajiban, dan ketaatan keras pada otoritas, dan bahwa mereka sering memperlihatkan kesiapan besar untuk membuat pengorbanan pribadi dan keberanian besar untuk menghadapi bahaya jasmaniah. Semua sifat ini membuat orang Jerman suatu instrumen yang efisien dalam menjalankan tugas yang diberikan, dan mereka karenanya telah dengan seksama dipupuk di dalam negara Prusia lama dan Reich (= Imperium) baru yang didominasi Prusia. Apa yang kerap dipandang tidak dimiliki “orang Jerman pada umumnya” adalah kebajikan-kebajikan individualis seperti toleransi dan respek terhadap individu lain dan pendapat mereka, kemandirian pikiran, ketulusan karakter, dan kesiapan membela keyakinan sendiri di hadapan seorang atasan, suatu sikap yang oleh orang Jerman sendiri, biasanya sadar bahwa mereka tidak memilikinya, dinamakan *Zivilcourage* (keberanian sipil), kepedulian pada orang yang lemah dan rapuh, cemooh dan ketidaksukaan yang wajar terhadap kekuasaan, sikap yang hanya bisa tercipta oleh tradisi lama kemerdekaan pribadi. Mereka juga

tampaknya kekurangan sifat-sifat yang sederhana namun sangat penting yang memudahkan hubungan antarmanusia dalam masyarakat merdeka: kebaikan hati dan rasa humor, kerendahan hati, dan respek terhadap privasi serta kepercayaan kepada maksud baik sesama.

Setelah apa yang kita katakan di atas, tidaklah mengherankan bahwa kebajikan-kebajikan individualis ini sekaligus adalah kebajikan-kebajikan yang sangat sosial, yang memperlancar kontak sosial dan yang membuat kontrol dari atas kurang diperlukan dan juga lebih sulit dilakukan. Semuanya adalah kebajikan yang tumbuh subur di mana pun masyarakat tipe individualis atau komersial berjaya dan yang tidak ditemukan ketika masyarakat tipe kolektivistik atau militeristik mendominasi—suatu perbedaan yang kini, atau dulu, dapat dilihat di antara beraneka ragam wilayah Jerman, seperti halnya kini terlihat jelas pandangan mana yang mengemuka di Jerman dan mana yang merupakan ciri-ciri masyarakat Barat. Sampai belakangan ini, paling tidak, di bagian-bagian Jerman yang telah terpapar paling lama pada kekuatan-kekuatan perniagaan yang memperadabkan, di kota-kota perniagaan lama di selatan dan di barat dan di kota-kota Hanse, konsep moral yang umum di tempat-tempat ini mungkin sekali jauh lebih serupa dengan konsep-konsep orang Barat pada umumnya ketimbang dengan konsep-konsep yang kini telah menjadi dominan di seluruh Jerman.

Akan tetapi, akan sangat tidak adil jika kita memandang masyarakat luas dalam bangsa totalitarian tidak memiliki komitmen moral karena mereka memberikan dukungan luas pada sistem yang bagi kita tampak sebagai penyangkalan terhadap sebagian besar nilai-nilai moral. Bagi bagian terbesar mereka, hal sebaliknya mungkin sekali benar: kedalaman emosi moral di belakang suatu gerakan seperti Nasional-Sosialisme atau komunisme mungkin sekali dapat disandingkan hanya dengan emosi moral gerakan-gerakan keagamaan besar dalam sejarah. Sekali anda mengakui bahwa individu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan suatu entitas yang lebih tinggi yang dinamakan

masyarakat atau bangsa, maka kebanyakan fitur rezim totalitarian yang menakutkan kita mau tak mau akan menyusul. Dilihat dari sudut pandang kolektivis, intoleransi dan penindasan yang brutal atas pembangkang, pengabaian total terhadap kehidupan dan kebahagiaan individu, adalah konsekuensi penting dan niscaya dari premis dasar ini, dan kaum kolektivis dapat mengakui ini sekaligus mengklaim bahwa sistem mereka lebih unggul daripada sistem yang di dalamnya kepentingan individu yang “egois” dibiarkan menghalangi pewujudan penuh tujuan-tujuan yang dikejar komunitas. Ketika para filsuf Jerman terus-menerus menggambarkan perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan personal sebagai sesuatu yang pada dirinya sendiri tidak bermoral, dan yang patut dipuji hanya pemenuhan kewajiban yang dibebankan, mereka sungguh-sungguh tulus, betapapun sulit hal ini dipahami oleh orang yang dibesarkan dalam tradisi yang berbeda.

Di mana ada satu tujuan umum yang mengatasi semua tujuan lain, maka tidak ada ruang bagi moral atau norma umum mana pun. Sampai batas tertentu, kita sendiri mengalami ini pada masa perang. Tetapi bahkan perang dan bahaya terbesar pun di negeri ini telah bermuara hanya pada suatu pendekatan yang sangat moderat terhadap totalitarianisme, sangat sedikit terjadi penyingkiran terhadap nilai-nilai lain demi melayani satu tujuan tertentu itu. Tetapi di mana ada sedikit tujuan tertentu mendominasi keseluruhan masyarakat, maka tak pelak lagi kadang-kadang kekejaman menjadi suatu keharusan, dan tindakan-tindakan yang menjijikkan bagi perasaan kita, seperti penembakan sandera atau pembunuhan orang tua atau orang sakit, harus dipandang sebagai masalah praktis semata. Demikian juga, pemindahan paksa dan transportasi ratusan ribu orang hanya dianggap instrumen kebijakan yang disetujui oleh hampir setiap orang kecuali para korban, atau saran-saran seperti “merekruit kaum perempuan untuk tujuan pembiakan” dapat dengan serius dipertimbangkan. Dalam pandangan kolektivis, selalu ada tujuan lebih besar yang dilayani perbudakan-perbudakan

ini dan yang, bagi mereka, membenarkannya karena pengejaran tujuan umum masyarakat tidak mengenal batas hak individu atau nilai individu apa pun.

Tetapi walaupun bagi sebagian besar warga suatu negara totalitarian tindakan-tindakan ini seringkali merupakan bakti tanpa pamrih kepada suatu ideal, betapa pun menjijikkan bagi kita, yang membuat mereka menyetujui dan bahkan melakukan perbuatan semacam itu, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang menjadi pemandu kebijakan. Untuk menjadi seorang pembantu yang berguna dalam menjalankan negara totalitarian, tidaklah cukup bahwa seseorang harus bersedia menerima justifikasi yang hanya bagus di mulut atas perbuatan yang jahat, tetapi dia sendiri harus siap dengan sengaja melanggar setiap kaidah moral yang pernah dia ketahui, jika tindakan itu tampak diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuknya. Karena sang pemimpin tertinggi sajalah yang menetapkan tujuan-tujuan, instrumen-instrumennya harus tidak memiliki keyakinan moral sendiri. Mereka harus, di atas segala-galanya, tunduk tanpa syarat kepada diri sang pemimpin; sedangkan hal terpenting kedua adalah bahwa mereka harus sama sekali tidak punya prinsip moral apa pun dan benar-benar mampu melakukan apa saja. Mereka harus tidak mempunyai ideal-ideal mereka sendiri yang ingin mereka wujudkan, juga tak memiliki ide tentang hal yang benar atau hal yang salah, yang dapat menghalangi maksud dan kehendak sang pemimpin. Dengan demikian, tidak banyak unsur di dalam posisi kekuasaan yang menarik bagi orang yang memegang kepercayaan moral seperti yang telah memandu bangsa-bangsa Eropa pada masa lampau; hanya ada sedikit hal yang dapat menjadi kompensasi bagi banyak tugas khusus yang menjijikkan, dan hanya ada sedikit kesempatan untuk memuaskan keinginan yang lebih idealistik, untuk menjadi kompensasi dari risiko yang tak dapat disangkal, yakni pengorbanan sebagian besar kesenangan kehidupan privat dan pengorbanan kemandirian personal yang dituntut jabatan-jabatan yang memiliki tanggungjawab besar. Satu-satunya cita

rasa yang terpuaskan adalah cita rasa bagi kekuasaan pada dirinya sendiri, kegembiraan karena ditaati orang dan karena menjadi bagian dari mesin yang berfungsi baik dan yang sangat berkuasa, yang terhadapnya segala sesuatu yang lain harus menyerah.

Namun, walaupun tidak banyak hal yang mungkin bisa membujuk orang yang baik menurut standar kita untuk bercita-cita menduduki posisi-posisi terkemuka di dalam mesin totalitarian, dan ada banyak hal yang membuat mereka enggan, akan ada kesempatan-kesempatan khusus bagi orang-orang yang kejam dan tak bermoral. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, yang keburukannya pada dirinya sendiri tak akan diragukan oleh siapa pun, tetapi yang harus dikerjakan untuk tujuan yang lebih tinggi, dan yang harus dijalankan dengan keahlian dan efisiensi yang sama seperti pekerjaan lain apa pun. Dan karena akan ada kebutuhan untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk pada dirinya sendiri, dan yang enggan dikerjakan oleh orang-orang yang masih dipengaruhi nilai-nilai moral tradisional, kesediaan untuk melakukan hal-hal yang buruk lantas menjadi jalan bagi kenaikan jabatan dan kekuasaan. Terdapat banyak posisi di dalam masyarakat totalitarian yang mengharuskan orang mempraktikkan kekejaman dan intimidasi, penipuan yang lihai dan kegiatan mata-mata. Baik Gestapo, maupun manajemen suatu kamp konsentrasi, baik Kementerian Propaganda maupun SA dan SS (atau posisi yang sama di Italia dan Rusia) bukanlah tempat yang cocok untuk menuangkan perasaan kemanusiaan. Namun justru melalui posisi seperti itulah terbuka jalan menuju ke posisi-posisi tertinggi di dalam negara totalitarian. Sesungguhnya sangatlah benar ketika seorang ekonom Amerika yang terkenal menyimpulkan dari suatu daftar pendek mengenai kewajiban para penguasa suatu negara kolektivis bahwa

Mereka harus melakukan hal-hal ini entah mereka mau atau tidak: dan kemungkinan bahwa orang yang berkuasa merupakan individu-individu yang tidak suka memiliki dan

memakai kekuasaan sama besarnya dengan kemungkinan seseorang yang sangat lembut dan baik hati mendapatkan pekerjaan sebagai tukang cambuk di dalam suatu perkebunan yang mempekerjakan budak.¹⁰

Namun kita tidak dapat membicarakan pokok ini secara mendalam di sini. Problem penyeleksian para pemimpin terjalin erat dengan problem luas penyeleksian yang dilakukan berdasarkan opini-opini yang dipegang, atau, lebih tepat, berdasarkan kesiapan seseorang untuk bersikap sejalan dengan seperangkat doktrin yang terus berubah-ubah. Dan hal ini membawa kita ke salah satu fitur moral paling karakteristik dari totalitarianisme, yakni, hubungannya dengan, dan akibatnya pada, semua kebajikan yang masuk ke dalam kategori umum kebenaran (*truthfulness*). Ini adalah pokok bahasan yang sangat besar sehingga memerlukan bab tersendiri.



10 Prof. F. H. Knight dalam *The Journal of Political Economy*, Desember 1938, hlm. 869.

BAB 11

BERAKHIRNYA KEBENARAN

*Adalah signifikan bahwa nasionalisasi
pemikiran telah berlangsung di segala tempat
seiring dengan nasionalisasi industri.*

E. H. Carr

CARA paling efektif untuk membuat setiap orang melayani satu sistem tujuan tertentu yang menjadi arah perencanaan sosial adalah dengan membuat setiap orang percaya pada tujuan-tujuan itu. Untuk membuat sistem totalitarian berfungsi dengan efisien, tidaklah cukup bahwa setiap orang dipaksa bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama. Adalah penting bahwa setiap orang memandang tujuan-tujuan itu sebagai tujuan-tujuan mereka sendiri. Meskipun berbagai kepercayaan itu harus dipisahkan bagi rakyat dan dibebankan pada mereka, kepercayaan-kepercayaan itu harus menjadi kepercayaan-kepercayaan mereka, menjadi kredo yang diterima umum, yang membuat para individu sejauh mungkin bertindak spontan dalam cara-cara yang si perencana kehendaki. Jika penindasan di negeri-negeri totalitarian pada umumnya tidak seakut yang dibayangkan kebanyakan orang di negeri-negeri liberal, hal ini dikarenakan pemerintahan totalitarian sangat sukses dalam membuat rakyat berpikir seperti yang mereka inginkan.

Tentu saja hal ini dihasilkan oleh berbagai macam bentuk propaganda. Teknik propaganda itu kini sudah dikenal luas

sehingga kita tidak perlu lagi membahasnya panjang lebar. Satu-satunya poin yang perlu ditekankan adalah bahwa propaganda itu sendiri, atau teknik-teknik yang digunakan, bukanlah sesuatu yang khas hanya dipakai dalam totalitarianisme, dan bahwa yang mengubah sifat dan efeknya secara menyeluruh di dalam suatu negara totalitarian adalah bahwa semua propaganda melayani tujuan yang sama, bahwa semua instrumen propaganda dikordinasikan untuk mempengaruhi individu-individu menuju arah yang sama dan untuk menghasilkan *Gleichschaltung*—standardisasi semua lembaga politik, ekonomi, dan sosial—dalam semua pikiran orang. Alhasil, efek propaganda di negeri-negeri totalitarian berbeda bukan hanya dalam ukurannya, tetapi juga dalam jenisnya, dari efek propaganda yang dibuat untuk tujuan-tujuan berbeda oleh badan-badan yang mandiri dan bersaing satu sama lain. Jika semua sumber informasi mutakhir dengan efektif berada di bawah satu kontrol tunggal, maka masalahnya bukan lagi semata-mata mempersuasi orang mengenai hal ini atau hal itu. Juru propaganda yang ahli lantas memiliki kekuasaan membentuk pikiran mereka ke arah apa pun yang dipilihnya dan bahkan orang yang paling cerdas dan mandiri pun tidak dapat luput sama sekali dari pengaruh itu jika mereka lama terisolasi dari semua sumber informasi lain.

Sementara di negara-negara totalitarian status propaganda ini memberinya kekuasaan yang unik atas pikiran rakyat, efek-efek moralnya yang khusus timbul bukan dari tekniknya sendiri melainkan dari sasaran dan bidang cakup propaganda totalitarian. Jika indoktrinasi terhadap rakyat dapat dibatasi hanya pada seluruh sistem nilai yang menjadi arah dan tujuan kegiatan sosial, propaganda hanya akan merupakan manifestasi khusus dari fitur-fitur khusus moralitas kolektivistis yang telah kita tinjau. Jika tujuannya hanya untuk mengajar orang mengenai sistem moral tertentu yang komprehensif, maka masalahnya hanyalah apakah sistem moral ini baik atau buruk. Telah kita lihat bahwa sistem moral suatu masyarakat totalitarian tidak mungkin menarik hati kita, bahwa bahkan perjuangan untuk mencapai

kesetaraan melalui sarana ekonomi terpimpin pun hanya akan menghasilkan ketidaksetaraan yang secara resmi dipaksakan (ini adalah penetapan otoriter atas status individu masing-masing di dalam tatanan hierarkis yang baru); bahwa kebanyakan elemen humanistik dari nilai-nilai moral kita, yakni penghormatan pada kehidupan manusia, pada orang yang lemah dan pada setiap individu umumnya, akan lenyap. Betapapun ini bisa memuaskan kebanyakan orang, dan meskipun ini mencakup juga suatu perubahan standar moral, ini tidaklah sepenuhnya berarti anti-moral. Beberapa fitur dari sistem semacam ini bahkan dapat menarik hati moralis yang paling keras yang bercorak konservatif dan tampak bagi mereka lebih baik dibandingkan standar yang lebih lunak dari masyarakat liberal.

Berbagai konsekuensi moral dari propaganda totalitarian yang kini harus kita ulas, bagaimana pun juga, adalah dari jenis yang jauh lebih mendalam. Konsekuensi-konsekuensi ini merusak semua nilai moral karena merongrong salah satu fondasi semua moralitas, yakni rasa kebenaran dan penghormatan terhadap kebenaran. Dilihat dari sifat tugasnya, propaganda totalitarian tak dapat membatasi diri hanya pada nilai-nilai, pada pertanyaan-pertanyaan mengenai opini dan keyakinan moral yang di dalamnya seorang individu selalu akan sejalan kurang lebih dengan pandangan-pandangan yang mengendalikan komunitasnya, tetapi harus menjangkau juga pertanyaan-pertanyaan tentang fakta di mana kecerdasan manusia juga terlibat dengan cara yang berbeda. Halnya demikian karena, pertama, untuk dapat mempengaruhi orang supaya mau menerima nilai-nilai yang resmi, nilai-nilai itu harus dijustifikasi, atau terlihat berhubungan dengan nilai-nilai yang telah dipegang orang, yang biasanya akan mencakup juga pernyataan-pernyataan mengenai hubungan sebab-akibat antara sarana dan tujuan. Dan, kedua, karena distingsi antara tujuan dan sarana, antara tujuan yang dikejar dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapainya, dalam kenyataan tidak pernah sangat jelas dan pasti, seperti cenderung ditunjukkan oleh diskusi umum apa pun mengenai problem ini;

dan karena, sebagai akibatnya, orang harus dibuat menyepakati bukan saja tujuan pamungkas tertentu tetapi juga pandangan mengenai fakta dan kemungkinan yang menjadi landasan semua tindakan tertentu.



Telah kita lihat bahwa kesepakatan mengenai sistem etis yang lengkap, yakni sistem nilai-nilai yang serba komprehensif yang tersirat di dalam perencanaan ekonomi, tidak ada di dalam masyarakat merdeka, tetapi harus diciptakan. Tetapi kita tidak boleh berasumsi bahwa si perencana akan mendekati tujuannya dengan menyadari keperluan itu, atau bahwa, walaupun dia menyadarinya, akan bisa menciptakan sistem moral yang komprehensif semacam itu sebelumnya. Dia hanya akan menemukan konflik-konflik di antara berbagai kebutuhan yang berbeda sementara dia melangkah maju, dan harus mengambil keputusan ketika kebutuhan itu muncul. Sistem nilai yang memandu keputusan tidak ada dalam bentuk abstrak, *in abstracto*, sebelum keputusan harus dibuat; melainkan harus diciptakan melalui keputusan-keputusan tertentu. Juga telah kita lihat bagaimana ketidakmampuan itu, untuk memisahkan problem umum nilai-nilai dari keputusan-keputusan tertentu, membuat tidak mungkin bahwa suatu lembaga demokratis, yang belum bisa memutuskan rincian teknis sebuah rencana, harus menentukan nilai-nilai yang memandunya.

Dan sementara otoritas perencana secara konstan harus memutuskan isu-isu menurut pantas tidaknya sesuatu tanpa adanya norma-norma moral yang pasti, dia harus menjustifikasi keputusannya itu di mata rakyat—atau, setidaknya, otoritas itu dalam batas tertentu harus membuat rakyat percaya bahwa keputusannya benar. Meskipun orang yang bertanggungjawab untuk suatu keputusan dapat saja dipandu tidak lebih daripada prasangka, tetap saja suatu prinsip pemandu harus diumumkan kepada rakyat jika komunitas diharapkan tidak hanya dengan

pasif tunduk tetapi dengan aktif mendukung keputusan itu. Kebutuhan untuk merasionalisasi apa yang disukai dan apa yang tidak disukai yang, karena tidak ada hal lain apa pun yang bisa menggantikannya, harus menjadi pandu bagi si perencana dalam banyak keputusannya, dan keharusan untuk mengumumkan alasannya dalam bentuk yang menarik bagi sebanyak mungkin orang, akan memaksanya mengembangkan teori-teori, yakni, berbagai pernyataan mengenai hubungan yang ada di antara fakta-fakta, yang lalu menjadi bagian integral doktrin utama yang mendominasi segala sesuatu. Proses menciptakan “mitos” ini, untuk menjustifikasi tindakannya, tidak perlu terjadi dengan sadar.

Pemimpin totalitarian mungkin hanya dibimbing oleh ketidaksukaan naluriah terhadap hal-hal yang dilihatnya dan oleh keinginan untuk menciptakan tatanan hierarkis baru yang lebih sejalan dengan konsepsinya mengenai kepatutan. Si pemimpin ini mungkin hanya tahu bahwa dia tidak menyukai orang Yahudi yang tampak sangat sukses di dalam suatu tatanan yang tidak memberikannya tempat yang memuaskan, dan bahwa dia menyukai dan mengagumi orang berambut pirang yang tinggi, tokoh “bangsawan” dalam novel-novel yang dibaca pada masa mudanya. Begitulah, dia akan dengan cepat menganut teori-teori yang tampak menyediakan justifikasi rasional terhadap berbagai prasangkanya yang juga telah dianut banyak rekannya. Dengan demikian, teori pseudo-saintifik menjadi bagian dari kredo resmi yang kurang lebih mengarahkan setiap tindakan orang. Atau ketidaksukaan yang meluas terhadap peradaban industrial dan kerinduan romantik terhadap kehidupan perdesaan, bersama dengan ide (yang mungkin sekali keliru) mengenai nilai istimewa orang desa sebagai prajurit, menjadi basis untuk mitos lain: *Blut und Boden* (darah dan tanah), menyatakan bukan hanya nilai-nilai pamungkas, tetapi juga serangkaian besar kepercayaan mengenai sebab dan akibat yang ketika telah menjadi ideal-ideal pemandu seluruh aktivitas seluruh komunitas, tidak boleh lagi diragukan.

Kebutuhan akan doktrin-doktrin resmi seperti itu sebagai instrumen untuk mengarahkan dan menggalang upaya-upaya rakyat telah diperkirakan dengan jelas oleh berbagai teoretikus sistem totalitarian. “Kebohongan mulia” dari Plato dan “mitos” dari Sorel punya fungsi yang sama dengan doktrin radikal Nazi atau teori negara korporatif Mussolini. Semua doktrin itu mau tak mau didasarkan pada pandangan-pandangan partikular mengenai fakta-fakta yang kemudian dijabarkan ke dalam teori-teori ilmiah untuk membenarkan suatu pandangan yang sudah ada sebelumnya.



Cara paling efektif untuk membuat orang menerima validitas nilai-nilai yang harus mereka layani adalah dengan mempersuasi mereka bahwa nilai-nilai itu sebetulnya sama dengan nilai-nilai yang sudah selalu dipegang oleh mereka, atau setidaknya oleh orang-orang terbaik dari antara mereka, tetapi yang belum dipahami atau dikenali dengan benar sebelumnya. Rakyat harus diarahkan untuk memindahkan kesetiaan mereka dari berhala kuno ke berhala baru dengan memakai dalih bahwa berhala baru itu adalah berhala yang telah selalu dikenali naluri mereka yang sehat, namun yang sebelumnya hanya terlihat samar-samar oleh mereka. Dan teknik paling efisien untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memakai kata-kata lama tetapi yang maknanya telah diubah. Tidak banyak ciri rezim totalitarian yang sangat membingungkan para pengamat dangkal namun sekaligus merupakan ciri khas seluruh iklim intelektual totalitarian, seperti penyesatan bahasa secara total, pengubahan makna kata-kata yang dipakai untuk mengungkapkan ideal-ideal rezim-rezim baru itu.

Dalam hal ini, kata yang paling menderita tentu saja adalah kata kebebasan. Kebebasan adalah kata yang digunakan dengan bebas di negara-negara totalitarian seperti halnya di negara-negara lain. Bahkan hampir dapat dikatakan—dan ini harus ber-

fungsi sebagai peringatan bagi kita untuk berwaspada terhadap semua penggoda yang menjanjikan kita kebebasan baru untuk menggantikan kebebasan lama, *New Liberties for Old*¹—bahwa di mana pun kebebasan sebagaimana yang kita pahami telah dihancurkan, penghancuran itu hampir selalu dilakukan atas nama suatu kebebasan baru yang dijanjikan kepada rakyat. Bahkan di antara kita terdapat “para perencana kebebasan” yang menjanjikan kita “kebebasan kolektif bagi kelompok”, yang sifatnya dapat disimpulkan dari fakta bahwa pendukungnya merasa perlu untuk meyakinkan kita bahwa “dengan sendirinya tibanya era kebebasan yang direncanakan tidak berarti bahwa segala [*sic*] bentuk kebebasan sebelumnya harus disingkirkan.” Dr. Karl Mannheim, yang dari karyanya² kalimat-kalimat ini dikutip, setidaknya memperingatkan kita bahwa “suatu konsepsi kebebasan yang modelnya diperoleh dari zaman sebelumnya adalah penghalang bagi pemahaman yang benar mengenai persoalan sebenarnya.” Tetapi kata kebebasan digunakannya dengan menyesatkan, sama menyesatkannya dengan yang dikatakan para politikus totalitarian. Seperti kebebasan dalam pikiran para politikus itu, “kebebasan kolektif” yang ditawarkan Karl Mannheim kepada kita bukanlah kebebasan para anggota masyarakat, tetapi kebebasan tak terbatas si perencana untuk melakukan apa pun yang disukainya pada masyarakat.³ Ini adalah perancuan ekstrim antara kebebasan dengan kekuasaan.

Dalam kasus khusus ini, penyelewengan makna kata tentu

1 Ini adalah judul sebuah karya mutakhir seorang sejarawan Amerika, C. L. Becker.

2 *Man and Society in an Age of Reconstruction*, hlm. 377.

3 Mr. Peter Drucker (*The End of Economic Man*, hlm. 74) dengan tepat mengamati bahwa “semakin sedikit kebebasan, semakin banyak percakapan mengenai ‘kebebasan baru’. Namun kebebasan baru ini hanyalah sebuah kata yang menyembunyikan kontradiksi sebenarnya atas segala hal yang oleh orang Eropa dipahami sebagai kebebasan.... Kebebasan baru yang dikhotbahkan di Eropa, bagaimana pun juga, adalah hak mayoritas yang melawan hak individu.”

saja telah dengan baik dipersiapkan oleh sedaftar panjang filsuf Jerman, dan juga oleh banyak teoretikus sosialis. Tetapi kebebasan atau kemerdekaan sekali-kali bukanlah kata satu-satunya yang maknanya telah diubah sehingga berarti sebaliknya, untuk membuat kata-kata itu berfungsi sebagai instrumen propaganda totalitarian. Telah kita lihat bagaimana hal yang sama terjadi pada kata keadilan dan hukum, hak dan kesetaraan. Daftarnya dapat diperpanjang sampai mencakup hampir semua terminologi moral dan politik yang digunakan secara umum.

Jika seseorang tidak mengalami sendiri proses ini, sulit baginya untuk memahami luasnya perubahan makna kata-kata itu, kerancuan yang ditimbulkannya, dan halangan yang diciptakannya terhadap diskusi rasional apa pun. Untuk bisa memahaminya, orang harus melihat apa yang terjadi jika dari dua orang bersaudara salah satunya memeluk kepercayaan baru, lalu tak lama kemudian dia mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda, yang membuat komunikasi sejati apa pun tidak mungkin lagi berlangsung. Dan kerancuan ini bertambah buruk karena perubahan makna kata-kata itu, yang menggambarkan ideal-ideal politik, bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan proses yang terus berjalan, suatu teknik yang digunakan dengan disadari atau dengan tak disadari untuk mengarahkan rakyat. Tahap demi tahap, ketika prosesnya berlanjut, seluruh bahasa menjadi rusak, kata-kata menjadi cangkang-cangkang kosong yang sudah kehilangan maknanya yang pasti, sehingga dapat mengungkapkan satu hal dan juga hal lain yang bertentangan, dan digunakan semata-mata demi asosiasi-asosiasi emosional yang masih melekat pada kata-kata itu.



Tidaklah sulit merampas pemikiran bebas dari mayoritas besar. Tetapi minoritas yang mempertahankan kecenderungan mengkritik juga harus dibungkam. Kita telah melihat mengapa koersi tidak dapat dibatasi hanya pada penerimaan sistem moral

yang melandasi perencanaan, yang menjadi panduan arah bagi semua aktivitas sosial. Karena banyak bagian dari sistem moral itu tak akan pernah dinyatakan dengan tersurat, dan karena banyak bagian dari skala nilai-nilai pemandu hanya akan ada secara tersirat di dalam perencanaan, maka perencanaan itu sendiri, sampai bagian sekecil-kecilnya, dan sebetulnya setiap tindakan pemerintah, harus menjadi tak dapat disentuh dan tak bisa dikritik. Jika rakyat harus tanpa keraguan mendukung kegiatan bersama, mereka harus diyakinkan bahwa bukan hanya tujuan yang dikejar, melainkan juga sarana yang dipilih, semuanya sudah benar. Kredo resmi yang dengan paksa harus ditaati oleh rakyat karenanya akan mencakup semua pandangan mengenai fakta-fakta yang menjadi landasan perencanaan. Kritik dari masyarakat atau bahkan ungkapan keraguan harus ditekan karena dua hal ini condong memperlemah dukungan umum. Sebagaimana dilaporkan pasangan ekonom Webb mengenai posisi dalam setiap usaha apa pun di Rusia: "Sementara pekerjaan sedang berjalan, ungkapan keraguan apa pun dari publik, atau pun rasa khawatir bahwa perencanaan tidak akan sukses, adalah tindakan ketidaktaatan dan bahkan pengkhianatan dikarenakan efek yang mungkin ditimbulkannya pada kehendak dan pada usaha-usaha para personel lain."⁴ Ketika keraguan atau perasaan khawatir yang diungkapkan itu berkaitan bukan dengan keberhasilan suatu usaha tertentu melainkan dengan keseluruhan perencanaan sosial, hal ini bahkan akan terlebih lagi dianggap sabotase.

Fakta dan teori dengan demikian harus menjadi objek doktrin resmi, sama seperti pandangan-pandangan mengenai nilai-nilai. Dan seluruh aparat yang bekerja untuk menyebarkan pengetahuan, sekolah dan pers, radio dan film, akan digunakan hanya untuk menyebarkan pandangan-pandangan itu yang, benar atau pun salah, akan memperkuat kepercayaan pada ketepatan dan kebenaran dari keputusan-keputusan yang diambil

4 S. and B. Webb, *Soviet Communism*, hlm. 1038.

pemerintah; dan semua informasi yang dapat menimbulkan keraguan atau kesangsian akan dihambat. Dampak yang mungkin timbul pada ketaatan rakyat terhadap sistem negara menjadi satu-satunya kriteria untuk memutuskan apakah suatu keping informasi tertentu boleh diterbitkan atau harus diberangus. Situasi di dalam negara totalitarian secara permanen dan di dalam segala bidang adalah sama dengan situasi di tempat-tempat lain di dalam beberapa bidang ketika sedang terjadi perang. Segala hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadap hikmat pemerintah atau menciptakan ketidakpuasan akan dijauhkan dari rakyat. Hal apa pun yang dapat dijadikan landasan untuk membuat perbandingan yang negatif dengan kondisi-kondisi di tempat-tempat lain, pengetahuan mengenai alternatif-alternatif yang mungkin terhadap langkah yang sudah diambil, informasi yang dapat menyiratkan bahwa pemerintah telah gagal untuk memenuhi janji-janjinya atau gagal memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan, akan disensor. Karena itu, tidak ada bidang apa pun di mana kontrol sistematis atas informasi tidak akan dilakukan dan keseragaman pandangan tidak dipaksakan.

Hal ini bahkan diterapkan pada bidang-bidang yang tampak paling jauh dari kepentingan politis apa pun, dan teristimewa pada semua sains, bahkan sains yang paling abstrak. Bahwa dalam semua disiplin ilmu yang berkaitan langsung dengan urusan-urusan insani dan karenanya paling langsung mempengaruhi pandangan-pandangan politis, seperti sejarah, hukum, atau ekonomi, pencarian kebenaran yang netral tidak dapat diizinkan di dalam sistem totalitarian, dan membenaran atas pandangan-pandangan resmi menjadi satu-satunya objek, dapat dengan mudah dilihat dan telah dengan menyeluruh dikonfirmasi oleh pengalaman. Disiplin-disiplin ilmu ini di dalam semua negeri totalitarian sesungguhnya telah menjadi pabrik-pabrik paling subur dalam memproduksi mitos-mitos resmi yang digunakan para penguasa untuk memandu pikiran dan kehendak rakyat mereka. Tidaklah mengejutkan bahwa dalam bidang-bidang keilmuan ini bahkan dalih bahwa mereka mencari kebenaran

pun ditinggalkan, dan para penguasa memutuskan doktrin-doktrin mana yang harus diajarkan dan dipublikasi.

Namun, kontrol totalitarian atas semua opini masuk juga ke bidang-bidang ilmu yang pada pandangan pertama tampak tidak memiliki signifikansi politis. Kadangkala sulit untuk menjelaskan mengapa doktrin-doktrin tertentu harus dengan resmi diharamkan atau mengapa doktrin-doktrin lain harus didukung dan disebarluaskan, dan mengherankan juga bahwa ketidaksukaan dan kesukaan ini kelihatannya agak serupa di dalam sistem-sistem totalitarian yang berbeda. Khususnya, sistem-sistem ini semuanya tampak sama-sama memiliki antipati yang kuat terhadap semua bentuk pemikiran yang lebih abstrak, antipati yang juga ditunjukkan teristimewa oleh banyak kaum kolektivis di antara para saintis kita. Entah teori relativitas digambarkan sebagai “serangan bangsa Yahudi terhadap fondasi fisika Kristen dan fisika Nordik”, atau pun ditolak karena “berkonflik dengan materialisme dialektis dan dogma Marxis”, intinya sama saja. Juga tidak banyak bedanya apakah teoreme-teorem tertentu dari statistika matematis diserang karena dianggap “merupakan bagian dari perjuangan kelas pada tapal batas ideologis dan suatu produk peran historis matematika sebagai hamba borjuis”, ataukah disiplin itu dikutuk karena dipandang “tidak menjamin akan melayani kepentingan rakyat.” Matematika murni pun tampaknya menjadi korban, dan bahkan memegang pandangan tertentu mengenai sifat kontinuitas dapat dikaitkan dengan “prasangka borjuis”. Menurut pasangan ekonom Webb, *Journal for Marxist-Leninist Natural Sciences* memiliki slogan berikut: “Kami mendukung Partai dalam Matematika. Kami mendukung kemurnian teori Marxis-Leninis dalam ilmu bedah.” Situasinya tampak serupa sekali di Jerman. *Journal of the National-Socialist Association of Mathematicians* penuh dengan “partai dalam matematika”, dan salah seorang fisikawan Jerman penerima Nobel yang terkenal, Lenard, telah mengihktisarkan karya seluruh hidupnya di bawah judul *Fisika Jerman dalam Empat Jilid!*

Adalah sepenuhnya sejalan dengan seluruh semangat totalitarianisme bahwa ideologi ini mengkritik semua aktivitas insani apa pun yang dilakukan demi aktivitas itu sendiri dan tanpa tujuan tersembunyi. Sains demi sains, seni demi seni, keduanya sama-sama dibenci Nazi, cendekiawan sosialis kita, dan komunis. *Setiap* aktivitas harus mendapatkan justifikasinya dari suatu tujuan sosial yang disadari. Tidak boleh ada aktivitas yang spontan dan tak terpandu, karena aktivitas semacam itu dapat menimbulkan hasil-hasil yang tidak terduga sebelumnya dan yang tidak cocok dengan perencanaan. Aktivitas semacam itu dapat menimbulkan sesuatu yang baru, yang tak pernah diimpikan di dalam filsafat si perencana. Prinsip ini bahkan diterapkan juga pada permainan dan kegiatan hiburan. Saya persilakan pembaca menebak sendiri apakah di Jerman atau di Rusia para pemain catur dengan resmi dinasihati bahwa “kita harus sekali dan untuk selamanya tidak lagi memandang catur sebagai permainan yang netral. Kita harus sekali dan untuk selamanya mengutuk formula ‘catur demi catur saja’ seperti juga formula ‘seni demi seni saja’”.

Kendatipun beberapa keganjilan ini tampak tak waras, kita bagaimana pun juga harus waspada untuk tidak mengabaikan semuanya itu dan memandangnya sebagai akibat-akibat samping yang kebetulan saja, yang tidak berhubungan dengan sifat penting suatu sistem terencana atau sistem totalitarian. Sesungguhnya semuanya itu bukan kebetulan. Semuanya itu adalah akibat langsung dari keinginan yang sama untuk melihat segala sesuatu diarahkan oleh suatu “konsepsi tunggal mengenai segala sesuatu”, akibat dari kebutuhan untuk mendukung, apa pun biayanya, pandangan-pandangan yang untuk melayaninya rakyat diminta untuk membuat pengorbanan yang terus-menerus, akibat dari ide umum bahwa pengetahuan dan kepercayaan rakyat adalah instrumen yang harus digunakan untuk mencapai satu tujuan tunggal. Sekali sains harus melayani bukan kebenaran melainkan kepentingan suatu kelas, suatu komunitas, atau suatu negara, maka tugas satu-satunya argumen dan diskusi adalah untuk membenarkan dan bahkan menyebarkan lebih jauh keper-

cayaan-kepercayaan yang menjadi arah gerak seluruh kehidupan komunitas. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Menteri Kehakiman Nazi, pertanyaan yang harus diajukan setiap teori ilmiah baru pada dirinya sendiri adalah: “Apakah saya melayani Nasional-Sosialisme demi kemaslahatan terbesar semua orang?”

Kata kebenaran sendiri tidak lagi memiliki makna lamanya. Kata ini tidak lagi menggambarkan sesuatu yang harus dicari dan ditemukan, dengan kesadaran nurani individu sebagai hakim satu-satunya untuk menentukan apakah, dalam suatu hal tertentu apa pun, bukti yang ada (atau ketulusan orang-orang yang memberitakan kebenaran ini) menjamin suatu kepercayaan; kebenaran telah menjadi sesuatu yang harus ditetapkan oleh pihak penguasa, sesuatu yang harus dipercaya demi kepentingan kesatuan usaha yang terorganisasi, dan yang mungkin harus diubah kalau persyaratan-persyaratan bagi usaha terorganisasi ini memerlukannya.

Iklim intelektual umum yang ditimbulkan situasi ini; semangat sinisisme total mengenai makna kebenaran yang dilahirkannya; bahkan hilangnya kemampuan merasakan makna kebenaran itu sendiri; lenyapnya semangat pencarian mandiri dan kepercayaan pada kekuatan keyakinan rasional; cara-cara yang dengannya perbedaan opini di dalam setiap cabang pengetahuan menjadi isu-isu politik yang harus diputuskan oleh otoritas; semua ini adalah hal-hal yang harus dialami sendiri—tidak ada gambaran singkat yang bisa menyampaikan seberapa parah keadaan ini. Mungkin fakta yang paling meresahkan adalah bahwa peremehan terhadap kebebasan intelektual bukanlah sesuatu yang muncul hanya ketika sistem totalitarian telah mapan, tetapi sesuatu yang dapat ditemukan di mana-mana di kalangan cendekiawan yang telah memeluk iman kolektivistis dan yang disanjung sebagai pemimpin intelektual bahkan di negeri-negeri yang masih berada di bawah rezim liberal. Tidak hanya penindasan terburuk pun disokong, jika itu dilakukan demi kepentingan sosialisme, dan tidak saja penciptaan suatu sistem totalitarian dengan terbuka didukung oleh orang yang berdalih sedang berbicara atas nama ilmuwan

di negeri-negeri liberal, bahkan intoleransi juga dengan terbuka dipuji. Bukankah baru-baru ini kita telah melihat seorang penulis ilmiah Britania bahkan membela Inkuisisi karena menurutnya Inkuisisi “bermanfaat bagi sains ketika Inkuisisi melindungi kelas yang sedang bangkit”⁵ Tentu saja pandangan ini praktis tidak dapat dibedakan dari pandangan-pandangan yang telah menyebabkan Nazi menindas ilmuwan, membakar buku-buku sains, dan membinasakan dengan sistematis kalangan cerdik pandai dari rakyat yang tunduk.



Keinginan untuk memaksa rakyat menerima suatu kredo yang dipandang berharga bagi mereka, tentu saja, bukanlah hal yang baru atau hanya terjadi di zaman kita. Namun argumen yang dipakai banyak cendekiawan kita untuk mencoba menjustifikasi usaha semacam itu adalah argumen yang baru. Maka dikatakan, tidak ada kebebasan sejati di dalam masyarakat kita, karena opini dan cita rasa massa dibentuk oleh proganda, oleh iklan, oleh teladan kelas-kelas atas, dan oleh faktor-faktor lingkungan lain yang mau tidak mau menggiring pemikiran orang ke dalam alur yang sudah terbiasa. Dari sini disimpulkan bahwa jika ideal-ideal dan cita rasa mayoritas besar rakyat selalu dibentuk oleh situasi-situasi yang dapat kita kontrol, maka kita harus menggunakan kekuasaan pengontrol ini dengan sengaja untuk mengarahkan pemikiran orang ke tujuan tertentu yang kita anggap patut diinginkan.

Mungkin benar bahwa mayoritas besar masyarakat jarang mampu berpikir mandiri, bahwa dalam kebanyakan soal mereka menerima saja pandangan-pandangan yang mereka temukan sudah siap pakai, dan bahwa mereka akan juga sama puas jika mereka dilahirkan atau dipersuasi ke dalam seperangkat kepercayaan ini atau itu. Dalam masyarakat apa pun, kebebasan

5 J. G. Crowther, *The Social Relation of Science*, 1941, hlm. 333.

pemikiran mungkin sekali akan memiliki signifikansi langsung hanya bagi suatu minoritas kecil. Tapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang pasti berkompeten, atau harus memiliki kekuasaan, untuk menyeleksi siapa saja yang berhak menikmati kebebasan itu. Tentu saja hal ini tidak menjustifikasi asumsi kelompok orang mana pun untuk mengklaim hak untuk menentukan apa yang harus orang pikirkan atau yakini. Adalah kerancuan total pemikiran kalau orang mengatakan bahwa, karena di bawah sistem apa pun mayoritas rakyat mengikuti kepemimpinan seseorang, tidak ada masalah jika setiap orang diharuskan mengikuti kepemimpinan yang sama. Meremehkan nilai kebebasan intelektual, karena nilai ini tak akan pernah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berpikir mandiri, berarti kegagalan total memahami alasan-alasan yang memberikan nilai tinggi kepada kebebasan intelektual. Apa yang esensial untuk membuat kebebasan berfungsi sebagai penggerak utama kemajuan intelektual bukanlah bahwa setiap orang mampu berpikir atau menulis apa pun, melainkan bahwa setiap prinsip atau ide apa pun dapat diperdebatkan oleh siapa pun. Selama oposisi tidak ditindas, maka akan senantiasa ada orang yang mempertanyakan ide-ide yang mengendalikan orang-orang sezamannya, dan menguji apakah ide-ide baru adalah propaganda atau argumen.

Interaksi antarindividu, yang memiliki pengetahuan dan pandangan berbeda, itulah yang membentuk kehidupan pemikiran. Pertumbuhan nalar adalah proses sosial yang didasarkan pada keberadaan perbedaan semacam itu. Sudah hakikatnya bahwa pertumbuhan ini akan mendatangkan akibat-akibat yang tidak dapat diprediksi, bahwa kita tidak dapat mengetahui pandangan-pandangan mana yang akan membantu pertumbuhannya dan mana yang akan menghambat; pendek kata, pertumbuhan ini tidak dapat dikendalikan oleh pandangan apa pun yang kini kita miliki tanpa pada waktu yang sama membatasinya. “Merencanakan” atau “mengorganisasi” pertumbuhan pemikiran, atau, sebetulnya, kemajuan pada

umumnya, adalah kontradiksi terminologi. Ide bahwa pikiran manusia harus “dengan sadar” mengontrol perkembangannya sendiri mencampur-adukkan nalar individual, satu-satunya hal yang dapat “mengontrol dengan sadar” apa pun, dengan proses interpersonal yang menjadi penyebab pertumbuhan nalar itu. Dengan mencoba mengontrolnya, kita hanyalah membatasi perkembangannya dan cepat atau lambat pasti akan menimbulkan stagnasi pemikiran dan kemunduran penalaran.

Tragedi pemikiran kolektivis adalah bahwa walaupun pemikiran ini bertolak dari usaha menomorsatukan nalar, pemikiran jenis ini berakhir dengan membinasakan nalar karena salah memahami proses yang padanya pertumbuhan nalar bergantung. Bahkan dapat dikatakan bahwa adalah paradoks, dari semua doktrin kolektivis dan tuntutanannya bagi kontrol “sadar” atau perencanaan “sadar”, bahwa doktrin dan tuntutan mereka itu mau tak mau akan bermuara pada tuntutan bahwa pikiran seseoranglah yang akan memegang kekuasaan tertinggi—sementara hanya pendekatan individualis terhadap fenomena sosiallah yang membuat kita mengakui adanya kekuatan-kekuatan super-individual yang memandu pertumbuhan nalar. Individualisme dengan demikian adalah suatu sikap kerendahan hati di hadapan proses sosial ini dan sikap toleran terhadap opini-opini lain, dan merupakan sesuatu yang persis bertolak belakang dengan kecongkakan intelektual yang menjadi akar tumbuhnya tuntutan akan suatu pengarahan komprehensif proses sosial.

BAB 12

AKAR-AKAR SOSIALIS NAZISME

*Semua kekuatan antiliberal sedang bersatu
melawan segala sesuatu yang liberal.*

A. Moeller van den Bruck

ADALAH kesalahan umum memandang Nasional-Sosialisme hanya sebagai suatu perlawanan terhadap akal budi, gerakan tidak rasional tanpa latar belakang intelektual. Jika halnya demikian, gerakan ini pasti jauh tak seberbahaya sekarang. Tetapi ini adalah penilaian yang salah sama sekali atau menyesatkan. Doktrin-doktrin Nasional-Sosialisme adalah kulminasi suatu evolusi panjang pemikiran, proses yang di dalamnya para pemikir yang berpengaruh besar sampai jauh melampaui batas-batas negeri Jerman telah ambil bagian. Apa pun pikiran orang mengenai premis-premis yang menjadi titik tolak mereka, tak dapat disangkal bahwa orang-orang yang telah menghasilkan doktrin-doktrin baru itu adalah penulis-penulis berpengaruh yang telah menancapkan ide-ide mereka pada seluruh pemikiran Eropa. Sistem mereka dibangun dengan konsistensi yang dingin. Sekali orang menerima premis-premis yang menjadi titik tolak mereka, maka orang ini tidak akan bisa luput dari logikanya. Sesungguhnya ini adalah kolektivisme yang telah dilepaskan dari semua jejak tradisi individualis yang dapat menghambat realisasinya.

Meskipun dalam perkembangan ini para pemikir Jerman berperan sebagai pemimpin, mereka sekali-kali tidaklah

sendirian. Thomas Carlyle dan Houston Stewart Chamberlain, Auguste Comte dan Georges Sorel, tidak kalah dari orang Jerman mana pun, adalah bagian dari perkembangan yang terus berlanjut ini. Perkembangan dalam jalur pemikiran ini di Jerman telah dengan baik ditelusuri baru-baru ini oleh Mr. R. D. Butler dalam kajiannya yang berjudul *The Roots of National Socialism*. Tapi meskipun kenyataan bahwa di sana jenis pemikiran ini telah ada dalam satu bentuk yang tak berubah dan terus bertahan selama 150 tahun, seperti nyata dari kajian itu, terasa agak menakutkan, orang dapat terlalu mudah membesar-besarkan kepentingan ide-ide ini di Jerman sebelum 1914. Ide-ide ini hanyalah satu jenis pemikiran di antara rakyat di sana yang pada waktu itu mungkin memegang pandangan-pandangan yang lebih beranekaragam ketimbang di tempat lain mana pun. Secara keseluruhan, ide-ide ini didukung oleh minoritas kecil dan dipandang remeh oleh mayoritas orang Jerman, sebagaimana juga terjadi di negeri-negeri lain.

Maka, apakah yang menjadi penyebab sampai pandangan ini, yang semula dipegang oleh suatu minoritas reaksioner, akhirnya mendapat dukungan mayoritas besar orang Jerman dan bahkan hampir semua kaum mudanya? Bukan semata-mata kekalahan, penderitaan, dan gelombang nasionalisme yang membawa pandangan ini ke keberhasilan. Bukan pula reaksi kapitalis terhadap kemajuan sosialisme, sebagaimana sangat banyak orang ingin percayai. Justru sebaliknya, dukungan yang menyebabkan ide-ide ini sampai mendapatkan kekuasaan berasal persisnya dari kamp sosialis. Pastinya bukan lewat kalangan borjuis kapitalis, melainkan justru karena borjuis kapitalis tidak ada, ide-ide ini terbantu untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan.

Doktrin-doktrin yang telah memandu elemen-elemen penguasa di Jerman selama generasi yang telah lewat tidak dipertentangkan dengan sosialisme dalam Marxisme, melainkan dengan elemen-elemen liberal yang terkandung di dalamnya, yakni internasionalisme dan demokrasinya. Dan sementara sudah menjadi semakin jelas bahwa justru elemen-elemen inilah

yang menjadi penghalang bagi pewujudan sosialisme, kaum sosialis sayap kiri makin mendekati kalangan sayap kanan. Adalah penyatuan kekuatan-kekuatan antikapitalis sayap kanan dan sayap kiri, dan penggabungan sosialisme radikal dan sosialisme konservatif, yang mengusir dari Jerman segala sesuatu yang liberal.

Hubungan antara sosialisme dan nasionalisme di Jerman sudah dekat sejak awal. Adalah signifikan bahwa leluhur-leluhur terpenting Nasional-Sosialisme, yakni Fichte, Rodbertus, dan Lassall, pada waktu yang sama juga diakui sebagai bapak-bapak sosialisme. Sementara sosialisme teoretis dalam bentuk Marxisnya mengarahkan gerakan buruh Jerman, elemen nasionalis dan otoritariannya untuk jangka waktu tertentu mundur ke belakang. Tetapi tidak lama.¹ Sejak 1914, guru demi guru muncul dari kubu sosialisme Marxis, yang memimpin bukan orang-orang konservatif dan reaksioner, melainkan buruh pekerja keras dan kaum muda idealis, ke dalam kubu nasional-sosialis. Hanya setelah itu gelombang pasang sosialisme nasionalis makin bertambah penting dan dengan cepat tumbuh ke dalam doktrin Hitlerian. Histeria perang 1914, yang, semata-mata karena Jerman kalah, tak pernah surut sepenuhnya, adalah permulaan perkembangan modern yang menghasilkan Nasional-Sosialisme, dan terutama karena bantuan kalangan sosialis lamalah Nasional-Sosialisme bangkit selama kurun ini.



Mungkin juru bicara pertama dan, dalam cara-cara tertentu, paling khas dari perkembangan ini adalah almarhum Prof. Werner Sombart, yang karyanya yang terkenal buruk, *Händler und Helden* (Pedagang dan Pahlawan), terbit pada 1915. Sombart

1 Dan hanya sebagian. Dalam 1892 salah seorang pemimpin partai sosial-demokrat, August Bebel, dapat memberitahu Bismarck bahwa “Kanselier Imperial boleh yakin bahwa Demokrasi Sosial Jerman adalah sejenis sekolah persiapan bagi militerisme”!

mulai sebagai seorang sosialis Marxis, dan sampai 1909 dapat dengan bangga menegaskan bahwa dia telah membaktikan bagian terbesar kehidupannya untuk berjuang bagi ide-ide Karl Marx. Dia telah berbuat tidak kalah banyak daripada siapa pun untuk menyebarkan ide-ide sosialis dan aneka ragam corak kebencian antikapitalis di seluruh Jerman; dan jika pemikiran Jerman akhirnya dimasuki elemen-elemen Marxis dengan cara-cara yang tak pernah terjadi di negeri lain sampai revolusi Rusia, hal ini dalam skala luas disebabkan oleh Sombart. Dia pernah dianggap juru bicara terkemuka kaum cendekiawan sosialis yang teraniaya, dan yang karena pandangannya yang radikal tidak dapat memperoleh jabatan profesor universitas. Dan setelah perang terakhir pun, pengaruh karyanya, di dalam maupun di luar Jerman, sebagai seorang sejarawan, yang masih tetap memakai pendekatan Marxis setelah dia tidak lagi menjadi seorang Marxis dalam politik, sangat luas dan khususnya sangat kentara di dalam karya-karya banyak perencana Inggris dan Amerika.

Dalam bukunya yang terbit semasa perang, sang sosialis lama ini menyambut “Perang Jerman” sebagai konflik yang tak terhindarkan antara peradaban komersial Inggris dan kebudayaan heroik Jerman. Cercaannya terhadap pandangan “komersial” orang Inggris, yang telah kehilangan semua naluri perang mereka, tanpa batas. Dalam pandangannya, tak ada sesuatu pun yang lebih hina daripada perjuangan keras universal untuk mengejar kebahagiaan individu; dan apa yang digambarkannya sebagai pepatah terkenal mengenai moralitas Inggris, yakni bersikaplah adil “supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu di negeri ini”, baginya adalah “pepatah paling buruk yang telah pernah disuarakan oleh pikiran komersial”. “Ide Jerman tentang negara”, seperti yang dirumuskan oleh Fichte, Lassale, dan Rodbertus, adalah bahwa negara tidak dibangun dan tidak dibentuk oleh individu-individu, dan juga bukan oleh gabungan individu, dan tujuannya juga bukan untuk melayani kepentingan individu mana pun. Melainkan negara adalah *Volksgemeinschaft*, komunitas rakyat nasional, yang di dalamnya para individu tidak memiliki

hak-hak apa pun tetapi hanya kewajiban-kewajiban. Klaim-klaim seorang individu selalu dianggap hasil semangat komersial. “Ide-ide 1789”—libertas, ekualitas, fraternitas—dipandang sebagai ide-ide khas komersial yang tidak mempunyai tujuan lain selain untuk menjamin dan mengamankan keuntungan-keuntungan tertentu para individu.

Sebelum 1914, semua ideal Jerman yang sejati mengenai kehidupan heroik berada dalam bahaya maut di hadapan ideal-ideal komersial Inggris, kenyamanan Inggris, dan olahraga Inggris yang terus berkembang. Bangsa Inggris bukan hanya membuat diri mereka sendiri menjadi sama sekali tercemar, sementara setiap serikat pekerja tenggelam ke dalam “rawa paya kenyamanan”, tetapi juga telah mulai menginfeksi semua bangsa lain. Hanya perang yang telah menolong orang Jerman untuk ingat bahwa mereka sesungguhnya adalah bangsa perang, bangsa yang semua aktivitasnya dan khususnya semua aktivitas ekonominya disubordinasikan pada tujuan-tujuan militer. Sombart tahu bahwa orang Jerman dicerca oleh bangsa lain karena mereka memandang perang sebagai sesuatu yang suci—tetapi Sombart membanggakannya. Memandang perang sebagai sesuatu yang tidak berperikemanusiaan dan tak masuk akal adalah produk pandangan komersial. Ada kehidupan yang lebih tinggi ketimbang kehidupan individual, yakni kehidupan bangsa dan kehidupan negara; dan adalah tujuan seorang individu untuk mengorbankan dirinya bagi kehidupan yang lebih tinggi. Bagi Sombart, perang adalah pemenuhan akhir yang sempurna dari pandangan heroik mengenai kehidupan, dan perang melawan Inggris adalah perang melawan ideal yang bertolakbelakang, yakni ideal komersial mengenai kebebasan individu dan kenyamanan Inggris, yang dalam pandangannya menemukan wujudnya yang paling hina dalam bentuk silet cukur yang ditemukan dalam parit-parit perlindungan Inggris.

Jika tulisan Sombart yang menggebu-gebu pada waktu itu terasa berlebihan bahkan bagi kebanyakan orang Jerman, seorang mahaguru Jerman lain pada hakikatnya tiba pada ide-ide

yang sama dalam bentuk yang lebih moderat dan lebih ilmiah, yang karenanya bahkan lebih efektif. Prof. Johann Plenge, tidak kalah dari Sombart, adalah pakar besar tentang Marx. Bukunya mengenai *Marx und Hegel* menandai permulaan kebangkitan kembali kajian-kajian modern atas Hegel di antara para pakar Marxis, dan tak ada keraguan tentang fitrah sosialis murni dari keyakinan-keyakinan yang menjadi titik tolak kajiannya. Di antara banyak publikasinya selama perang, satu yang terpenting adalah buku kecil yang pada waktu itu banyak didiskusikan, yang memakai judul yang signifikan: *1789 and 1914. The Symbolic Years in the History of the Political Mind*. Buku ini membahas konflik antara “Ide-ide 1789”, ideal kebebasan, dan “Ide-ide 1914”, ideal organisasi. Seperti juga bagi semua sosialis yang mendapatkan sosialisme mereka dari penerapan kasar ideal-ideal saintifik pada masalah-masalah masyarakat, baginya organisasi adalah hakikat sosialisme. Seperti dengan tepat dia tekankan, organisasi adalah akar gerakan sosialis pada awalnya di Prancis pada awal abad ke-19. Marx dan Marxisme telah mengkhianati ide dasar sosialisme ini karena menganut secara fanatis tetapi utopis ide abstrak mengenai kebebasan. Hanya sekarang ide tentang organisasi kembali unggul, di tempat-tempat lain, sebagaimana dipersaksikan oleh karya Mr. H. G. Wells (yang karyanya *Future in America* telah dengan mendalam mempengaruhi Prof. Plenge, dan yang olehnya digambarkan sebagai salah satu tokoh terkemuka sosialisme modern), tetapi teristimewa di Jerman, di mana ide tentang organisasi dipahami paling baik dan diwujudkan dengan paling penuh. Perang antara Inggris dan Jerman dengan demikian sebenarnya adalah konflik antara dua prinsip yang bertentangan. “Perang Dunia Ekonomi” adalah kurun ketiga terbesar perjuangan spiritual dalam sejarah modern. Perang ini sama pentingnya dengan Reformasi dan revolusi kebebasan kelas menengah. Ini adalah perjuangan untuk mencapai kemenangan bagi kekuatan-kekuatan baru yang lahir dari kehidupan ekonomi yang sudah maju pada abad ke-19: sosialisme dan organisasi.

Karena di dalam wilayah ide-ide, Jerman adalah eksponen yang paling teryakinkan dari semua mimpi sosialis; dan di dalam wilayah realitas, Jerman adalah arsitek paling kuat dan berpengaruh dari sistem ekonomi yang paling terorganisasi.— Abad ke-20 adalah milik kita. Bagaimana pun akhir perang ini, kita adalah bangsa yang ideal. Ide-ide kita akan menentukan tujuan-tujuan kehidupan umat manusia.—Sejarah dunia pada masa kini mengalami suatu penglihatan besar bahwa bersama kita suatu ideal besar yang baru mengenai kehidupan masuk ke dalam kemenangan terakhirnya, sementara pada saat yang sama di Inggris salah satu prinsip dunia historis akhirnya tumbang.

Perang ekonomi yang diciptakan di Jerman pada 1914

adalah perwujudan pertama suatu masyarakat sosialis dan semangatnya adalah wujud semangat sosialis pertama yang muncul dalam kenyataan, dan bukan hanya dalam kehendak. Kebutuhan-kebutuhan perang telah memapankan ide sosialis di dalam kehidupan ekonomi Jerman, dan dengan demikian pertahanan bangsa kita menghasilkan bagi umat manusia ide 1914, ide organisasi Jerman, komunitas rakyat (*Volksgemeinschaft*) sosialisme nasional.... Tanpa betul-betul kita perhatikan, seluruh kehidupan politik kita di dalam negara dan industri telah tumbuh ke tahap yang lebih tinggi. Negara dan kehidupan ekonomi membentuk satu kesatuan baru.... Rasa tanggungjawab ekonomi yang mencirikan pekerjaan pegawai negeri merembesi semua aktivitas privat.... Konstitusi korporatif kehidupan ekonomi Jerman baru [yang Prof. Plenge akui masih belum matang atau lengkap] adalah bentuk tertinggi kehidupan negara yang pernah dikenal di bumi ini.

Semula Prof. Plenge masih berharap dapat mempertemukan ideal tentang kebebasan dan ideal tentang organisasi, meskipun

sebagian besar melalui penaklukan setiap individu kepada bangsa secara keseluruhan, yang dilakukan dengan sepenuhnya dan dengan sukarela. Tetapi jejak-jejak ide-ide liberal ini segera menghilang dari tulisan-tulisannya. Pada tahun 1918 telah terjadi penyatuan sempurna di dalam pikirannya antara sosialisme dan politik kekuasaan yang keras. Tak lama sebelum perang berakhir, dia menasihati sesama warganegara di dalam jurnal sosialis *Die Glocke* dengan cara berikut:

Seharusnya sudah lama orang mengenali fakta bahwa sosialisme haruslah kebijakan kekuasaan, karena sosialisme harus berbentuk organisasi. Sosialisme harus memenangi kekuasaan, dan tak boleh dengan membuta menghancurkan kekuasaan. Dan pertanyaan yang paling kritis dan paling penting bagi sosialisme pada masa perang antarbangsa haruslah ini: Siapakah bangsa paling terpanggil untuk meraih kekuasaan, karena bangsa ini adalah sang pemimpin teladan di dalam organisasi bangsa-bangsa?

Dan dia memprediksi semua ide yang akhirnya akan menjustifikasi Orde Baru Hitler:

Hanya dari sudut pandang sosialisme, yang adalah organisasi, bukankah hak absolut bangsa-bangsa untuk menentukan diri sendiri adalah hak anarki ekonomi individualistik? Apakah kita mau memberikan penentuan nasib sendiri secara total kepada individu dalam kehidupan ekonomi? Sosialisme yang konsisten dapat memberikan kepada orang suatu hak untuk membentuk perusahaan hanya jika sejalan dengan distribusi kekuatan-kekuatan nyata yang telah ditentukan oleh sejarah.

Ideal-ideal yang Plenge ungkapkan dengan sangat jelas menjadi populer teristimewa di antara, dan mungkin bahkan berasal dari, kalangan-kalangan tertentu para saintis dan perencana Jerman

yang, persis seperti kini dengan lantang dituntut oleh para sejawat mereka di Inggris, dengan gaduh menuntut organisasi semua bidang kehidupan direncanakan secara terpusat. Salah seorang yang terkemuka dari antara mereka adalah ahli kimia terkenal Wilhelm Oostwald, yang salah satu pernyataannya mengenai poin ini telah menjadi terkenal. Dilaporkan bahwa dia telah menyatakan dengan terbuka bahwa:

 Jerman ingin mengorganisasi Eropa yang hingga kini masih tak memiliki organisasi. Akan saya jelaskan kepada anda sekarang rahasia besar Jerman: Kami, atau mungkin ras Jerman, telah menemukan signifikansi organisasi. Sementara bangsa-bangsa lain masih hidup di bawah rezim individualisme, kami telah mendapatkan rezim organisasi.

Ide-ide yang sangat serupa dengan ide-ide ini ada juga di dalam kantor-kantor diktator bahan baku Jerman, Walter Rathenau, yang masih belum mendapatkan tempat penting yang selayaknya di dalam sejarah yang lebih lengkap mengenai pertumbuhan ide-ide Nazi, meskipun dia akan gemeteran seandainya dia menyadari konsekuensi-konsekuensi ekonomi totalitariannya. Melalui tulisan-tulisannya, dia mungkin sekali, lebih daripada siapa pun, telah menentukan pandangan-pandangan ekonomi generasi yang tumbuh dewasa di Jerman selama dan segera setelah perang yang lalu berakhir; dan beberapa kolaborator terdekatnya belakangan membentuk tulang punggung personel administrasi Rencana Lima Tahun Goering. Yang sangat serupa adalah juga banyak ajaran seorang mantan Marxis lain, Friedrich Naumann, yang bukunya, *Mitteleuropa*, mungkin beredar paling luas dibandingkan buku masa perang mana pun di Jerman.² Tetapi yang mengembangkan ide-ide ini paling penuh dan yang

2 Suatu ikhtisar yang baik atas pandangan Naumann, yang mencirikan kombinasi Jerman atas sosialisme dan imperialisme sebagaimana pandangan yang kita kutip dalam teks, ditemukan dalam R. D. Butler, *The Roots of National Socialism*, 1941, hlm. 203-209.

menyebarkannya ke tempat-tempat yang jauh dan luas adalah seorang politikus sosialis yang aktif, anggota sayap kiri partai sosial-demokrat di Reichstag. Paul Lensch di dalam buku-buku terdahulunya telah mendeskripsikan perang sebagai “terbirit-biritnya kalangan borjuis Inggris di hadapan sosialisme yang berkembang maju”, dan menjelaskan betapa berbedanya ideal kebebasan sosialis jika dibandingkan dengan konsepsi Inggris tentang kebebasan. Tetapi hanya di dalam buku masa perangnya yang ketiga dan yang paling berhasil, yang berjudul *Three Years of World Revolution*,³ ide-ide khasnya, yang dipengaruhi Plenge, mencapai perkembangannya yang penuh. Lensch mendasarkan argumennya pada uraian sejarah yang menarik dan dalam banyak segi akurat mengenai bagaimana pangadopsian proteksi oleh Bismarck telah memungkinkan terjadinya di Jerman suatu perkembangan menuju konsentrasi dan kartelisasi industrial yang, dilihat dari sudut pandangnya yang Marxis, menampilkan keadaan pembangunan industrial yang lebih tinggi.

Akibat keputusan Bismarck pada 1879 adalah bahwa Jerman mengambil peran revolusioner; maksudnya, peran suatu negara yang posisinya dalam hubungan dengan bagian lain dunia adalah sebagai wakil dari sistem ekonomi yang lebih tinggi dan lebih maju. Setelah menyadari hal ini, kita harus membayangkan bahwa *dalam Revolusi Dunia masa kini Jerman mewakili sisi revolusioner dan musuh terbesarnya, Inggris, mewakili sisi kontra-revolusioner*. Fakta ini membuktikan betapa kecilnya konstitusi suatu negara, entah konstitusinya liberal dan republikan atau monarkis dan otokratis, memberikan dampak pada pertanyaan apakah, dilihat dari perspektif perkembangan sejarah, negara itu harus dipandang sebagai negara liberal atau tidak. Atau, untuk lebih gamblang, konsepsi-konsepsi kita mengenai

3 Paul Lensch, *Three Years of World Revolution*. Pengantar oleh J. E. M., London, 1918. Terjemahan Inggris buku ini disediakan, masih selama perang terakhir, oleh seseorang yang berpandangan jauh.

liberalisme, demokrasi, dan seterusnya, berasal dari ide-ide individualisme Inggris, di mana menurut ide ini suatu negara dengan pemerintahan yang lemah adalah negara liberal, dan setiap pembatasan pada kebebasan individu dipandang sebagai produk otokrasi dan militerisme.

Di Jerman, yang “oleh sejarah ditetapkan sebagai wakil” dari bentuk kehidupan ekonomi yang lebih tinggi,

perjuangan demi sosialisme telah dengan luar biasa disimplifikasi, sebab semua persyaratan sosialisme telah mapan di sana. Dan karenanya partai sosialis mana pun harus memastikan bahwa Jerman berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, dan dengan demikian dapat memenuhi misi historisnya untuk merevolusi dunia. Karena itu perang Entente [Inggris bersama Prancis] melawan Jerman menyerupai usaha kalangan borjuis bawahan dari zaman pra-kapitalis untuk mencegah kemunduran kelas mereka sendiri.

Pengorganisasian kapital [Lensch melanjutkan] yang tanpa disadari telah dimulai sebelum perang, dan yang selama perang berlangsung telah diteruskan dengan sadar, akan dengan sistematis dilanjutkan setelah perang. Bukan melalui keinginan apa pun untuk mencapai pengorganisasian jenis apa pun, juga bukan karena sosialisme telah diakui sebagai prinsip pembangunan sosial yang lebih tinggi. Kelas-kelas yang pada masa kini merupakan pelopor yang bermanfaat bagi sosialisme adalah, dalam teori, lawan-lawannya yang diakui, atau, paling tidak, adalah lawannya sampai belum lama berselang. Sosialisme kini sedang datang, dan dalam kenyataannya sampai batas tertentu telah tiba, sebab kita tidak dapat lagi hidup tanpanya.

Satu-satunya yang masih melawan kecenderungan ini adalah kalangan liberal.

Kalangan liberal ini, yang tanpa disadari berargumentasi dengan memakai standar-standar Inggris, meliputi seluruh kelas borjuis Jerman yang terdidik. Ide-ide politis mereka tentang “kebebasan” dan “hak kewargaan”, tentang konstitusionalisme dan parlementarianisme, diturunkan dari konsepsi individualistik dunia, di mana liberalisme Inggris adalah wujud klasiknya, dan yang diadopsi oleh para juru bicara kalangan borjuis Jerman pada 1850-an, 1860-an, dan 1870-an. Tetapi ini adalah standar-standar lama yang sedang guncang menuju kehancurannya, sama seperti liberalisme Inggris tradisional telah dihancurkan oleh perang ini. Apa yang kini harus dilakukan adalah membuang ide-ide politik yang diwariskan ini dan membantu pertumbuhan konsepsi baru mengenai negara dan masyarakat. Dalam wilayah ini juga sosialisme harus menjadi oposisi yang sadar dan ulet terhadap individualisme. Dalam hubungan ini, adalah fakta yang mengagetkan bahwa, dalam apa yang disebut Jerman “reaksioner”, kelas-kelas buruh telah mendapatkan bagi diri mereka sendiri posisi yang jauh lebih kokoh dan lebih kuat dalam kehidupan negara ketimbang yang terjadi di Inggris atau di Prancis.

Lensch melanjutkan poin ini dengan suatu pertimbangan yang sekali lagi berisi banyak kebenaran dan patut direnungkan:

Karena kaum demokrat sosial, melalui pertolongan hak memilih [universal] ini, menguasai setiap posisi yang dapat mereka peroleh di dalam Reichstag, Parlemen Negara, dan dewan-dewan kotapraja, pengadilan masalah perburuhan, dana untuk orang sakit, dan seterusnya, mereka masuk sangat dalam ke dalam organisme negara; tetapi harga yang harus mereka bayar untuk ini adalah bahwa negara, pada gilirannya, menjalankan pengaruh kuat pada kelas-kelas pekerja. Sebagai hasil kegiatan buruh sosialistik yang tak kenal lelah selama 50 tahun, maka sesungguhnya negara tidak lagi sama dengan

keadaannya pada tahun 1867, ketika hak memilih universal pertama kali dijalankan; akan tetapi, demokrasi sosial kini juga tidak lagi sama dengan keadaannya pada masa itu. *Negara telah menjalani proses sosialisasi, dan demokrasi sosial telah mengalami proses nasionalisasi.*



Plenge dan Lensch pada gilirannya telah menyediakan ide-ide utama bagi para pemimpin langsung Nasional-Sosialisme, khususnya Oswald Spengler dan A. Moeller van den Bruck, untuk menyebut hanya dua nama yang paling terkenal.⁴ Pendapat-pendapat bisa berbeda mengenai sejauh mana Oswald Spengler dapat dianggap sosialis. Tetapi kini posisinya sudah jelas karena dalam artikelnya mengenai *Prussianism and Socialism*, yang terbit 1920, dia hanya mengungkapkan ide-ide yang dengan luas dipegang kaum sosialis Jerman. Sedikit gambaran mengenai argumennya akan cukup. “Semangat Prusia Lama dan keyakinan sosialis, yang kini saling membenci dengan kebencian dua bersaudara, sebetulnya satu dan sama.” Wakil-wakil peradaban Barat di Jerman, yakni kalangan liberal Jerman, adalah “pasukan Inggris yang tak kasat mata yang setelah pertempuran Jena ditinggalkan Napoleon di tanah Jerman.” Bagi Spengler, orang seperti Hardenberg dan Humboldt dan semua pembaru liberal lain adalah “Inggris”. Tetapi semangat “Inggris” ini akan dipadamkan oleh revolusi Jerman yang telah dimulai pada 1914.

4 Hal yang sama berlaku juga bagi banyak pemuka intelektual lain dari generasi yang telah menghasilkan Nazisme, seperti Othmar Spann, Hans Freyer, Carls Schmitt, dan Ernst Jünger. Mengenai ini, bandingkan kajian menarik Aurel Kolnai, *The War against the West*, 1938, yang bagaimana pun juga memiliki kekurangan, karena penulisnya membatasi diri pada kurun pascaperang ketika ideal-ideal ini telah diambil alih oleh kaum nasionalis, sehingga mengabaikan para pencipta sosialis ideal-ideal ini.

Tiga bangsa terakhir Dunia Barat bertujuan untuk mencapai tiga bentuk eksistensi, yang digambarkan dengan motto kondang: Libertas, Ekualitas, Fraternitas. Ketiganya muncul dalam bentuk-bentuk politik parlementarianisme liberal, demokrasi sosial, dan sosialisme otoritarian⁵.... Insting Jerman, atau lebih tepat insting Prusia, adalah: kekuasaan dimiliki bangsa secara keseluruhan.... Setiap orang diberikan tempatnya sendiri. Satu orang memberi perintah atau taat perintah. Sejak abad ke-18, ini adalah sosialisme otoritarian, yang pada hakikatnya tidak liberal dan anti-demokratis, sejauh yang dimaksudkan adalah liberalisme Inggris dan demokrasi Prancis.... Di Jerman ada banyak kontras yang dibenci dan dipandang buruk, tetapi liberalisme dilecehkan hanya di negeri Jerman.

Struktur bangsa Inggris didasarkan pada perbedaan antara kaya dan miskin, struktur bangsa Prusia didasarkan pada perbedaan antara memberi perintah dan taat perintah. Makna perbedaan kelas dengan demikian berbeda secara fundamental di kedua negeri itu.

Setelah menunjukkan perbedaan esensial antara sistem kompetitif Inggris dan sistem Prusia mengenai “administrasi ekonomi”, dan setelah memperlihatkan (dengan sadar mengikuti Lensch) bagaimana sejak Bismarck organisasi atas aktivitas ekonomi yang dibangun dengan sengaja telah makin lama makin mengambil bentuk yang lebih sosialis, Spengler melanjutkan:

Di Prusia berdirilah sebuah negara sejati dalam pengertian

5 Formula Spenglerian ini bergaung di dalam pernyataan yang sering dikutip yang diucapkan Carl Schmitt, pakar hukum konstitusional Nazi terkemuka. Menurutnya, evolusi pemerintahan berlangsung “dalam tiga tahap dialektik: dari negara *absolut* abad ke-17 dan ke-18, melalui negara *netral* abad liberal ke-19, sampai ke negara *totalitarian* yang di dalamnya negara dan masyarakat menjadi identik” (C. Schmitt, *Der Hütter der Verfassung*, Tübingen, 1931, hlm. 79).

yang paling ambisius dari kata ini. Tegasnya, tidak ada individu-individu privat. Setiap orang yang hidup di dalam sistem yang bekerja dengan tingkat keakuratan jam mekanik adalah, dengan cara tertentu, sebuah tautan di dalamnya. Operasionalisasi bisnis publik dengan demikian tidak dapat diserahkan kepada individu-individu privat, sebagaimana diasumsikan oleh parlementarianisme. Jalannya bisnis publik ini ada di dalam tangan seorang *Amt*, seorang pejabat, dan politikus yang bertanggungjawab adalah seorang pegawai negeri, seorang pelayan bagi bangsa secara keseluruhan.

“Ide Prusia” mengharuskan setiap orang menjadi petugas negara, dan semua upah dan gaji ditetapkan negara. Pengelolaan semua kepemilikan, khususnya, menjadi suatu fungsi yang dibayar. Negara masa depan akan berupa *Beamtenstaat*, negara pegawai negeri. Tetapi

pertanyaan yang menentukan mengenai bukan hanya Jerman, tetapi juga dunia, yang harus dijawab oleh Jerman *demi* kepentingan dunia, adalah: Apakah pada masa depan perdagangan mengatur negara, ataukah negara mengatur perdagangan? Di hadapan pertanyaan ini, Prusianisme dan Sosialisme adalah sama.... Prusianisme dan sosialisme memengaruhi Inggris di tengah-tengah kita.

Hanya perlu selangkah dari sini bagi sang santo pelindung Nasional-Sosialisme, Moeller van den Bruck, untuk memproklamasikan Perang Dunia sebagai perang antara liberalisme dan sosialisme: “Kita telah kalah dalam perang melawan Barat. Sosialisme telah kalah dalam perang melawan Liberalisme.”⁶

6 Moeller van den Bruck, *Sozialismus und Aussenpolitik*, 1933, hlm. 87, 90, dan 100. Artikel-artikel yang dicetak ulang di sini, khususnya artikel tentang “Lenin and Keynes” yang mendiskusikan dengan terperinci pendapat yang dibahas dalam teks, pertama kali dipublikasi antara 1919 dan 1923.

Seperti halnya Spengler, liberalisme dengan demikian adalah musuh besar. Moeller van den Bruck mengagumi fakta bahwa

tidak ada kaum liberal di Jerman masa kini; yang ada adalah kaum revolusioner muda, yang ada adalah kaum konservatif muda. Tetapi siapa yang akan menjadi liberal?... Liberalisme adalah filsafat kehidupan yang kini sudah ditinggalkan kaum muda dengan perasaan muak, dengan kegeraman, dengan penghinaan yang tajam, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih asing, lebih menjijikkan, lebih dilawan, ketimbang filsafat liberalisme ini. Kaum muda Jerman masa kini mengenali liberal *sebagai musuh besar*.

Reich Ketiga Moeller van den Bruck dimaksudkan untuk memberi Jerman suatu sosialisme yang telah diadaptasikan pada kodrat mereka dan tidak dinodai oleh ide-ide liberal Barat. Maka hal itu pun terjadilah.

Para penulis ini sama sekali bukan fenomena yang terisolasi. Sudah sejak 1922, seorang pengamat yang tidak berpihak dapat berbicara mengenai “fenomena yang spesifik dan, sekilas, mengejutkan” yang pada waktu itu dapat diobservasi di Jerman:

Pertarungan melawan orde kapitalis, menurut pandangan ini, adalah kelanjutan perang melawan Entente [Inggris dan Prancis] dengan memakai persenjataan semangat dan organisasi ekonomi, strategi yang bermuara pada sosialisme praktis, kembalinya bangsa Jerman ke tradisi teragung dan terbaik mereka.⁷

7 K. Pribram, “Deutscher Nationalismus und Deutscher Sozialismus”, dalam *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 49, 1922, hlm. 298-299. Penulisnya menyebut, sebagai contoh lebih lanjut, filsuf Max Scheler yang mengkhotbahkan “misi dunia sosialis Jerman”, dan penganut Marxisme K. Korach yang menulis mengenai semangat *Volksgemeinschaft* baru, yang mempertahankan pandangan yang sama.

Pertarungan melawan liberalisme dalam semua wujudnya, liberalisme yang telah mengalahkan Jerman, adalah ide umum yang telah mempersatukan kalangan sosialis dan kalangan konservatif dalam satu medan tarung bersama. Semula pertarungan ini berlangsung terutama di dalam Gerakan Kaum Muda Jerman, yang hampir seluruhnya adalah sosialis dalam pandangan dan motivasi, di mana ide-ide ini paling diterima dan penggabungan sosialisme dan nasionalisme mencapai puncaknya. Pada akhir 1920-an dan sampai Hitler tampil ke tampuk kekuasaan, sekelompok orang muda yang berhimpun di sekitar jurnal *Die Tat* dan dipimpin oleh Ferdinand Fried menjadi eksponen utama tradisi ini di dalam lingkungan kaum cendekiawan. Buku Fried yang berjudul *Ende des Kapitalismus* mungkin merupakan produk yang paling khas dari kelompok *Edelnazis* ini, sebagaimana mereka dikenal di Jerman. Buku ini luar biasa menggelisahkan karena keserupaannya dengan sangat banyak literatur yang kita lihat di Inggris sekarang ini, di mana kita dapat melihat hal yang sama, yakni menyatunya sosialis kiri dan sosialis kanan, dan penghinaan yang hampir sama terhadap semua yang bersifat liberal dalam pengertian yang lama. “Sosialisme Konservatif” (dan, dalam kelompok-kelompok lain, “Sosialisme Religius”) adalah slogan yang di bawahnya sejumlah besar penulis menyiapkan situasi dan kondisi bagi keberhasilan “Nasional-Sosialisme”. “Sosialisme Konservatif” merupakan tren dominan di negeri ini sekarang. Bukankah perang melawan kekuatan-kekuatan Barat “dengan persenjataan semangat dan organisasi ekonomi” hampir berhasil sebelum perang yang sesungguhnya dimulai?

BAB 13

TOTALITARIAN DI TENGAH KITA

Ketika penguasa menampilkan diri tersamar sebagai organisasi, maka sang penguasa ini mengembangkan guna-guna yang cukup mempesona untuk mengonversi komunitas-komunitas orang bebas menjadi negara-negara totalitarian.

The Times

MUNGKIN sekali benar bahwa besarnya kebiadaban yang dilakukan pemerintah-pemerintah totalitarian itu sendiri, bukannya meningkatkan rasa takut bahwa suatu hari sistem semacam itu dapat muncul di negeri ini, malah telah memperkuat keyakinan bahwa hal itu tidak akan terjadi di sini. Kalau kita melihat ke Jerman Nazi, kesenjangan yang memisahkan kita tampak sangat besar sehingga tidak sesuatu pun yang terjadi di sana dapat memiliki relevansi bagi perkembangan apa pun yang mungkin terjadi di negeri ini. Dan fakta bahwa perbedaan itu dengan konstan menjadi semakin besar kelihatannya membuktikan kesalahan pernyataan bahwa kita mungkin sedang bergerak ke arah yang serupa. Tapi jangan kita lupa bahwa 15 tahun lalu kemungkinan hal semacam itu berlangsung di Jerman tampak juga sangat fantastik, bukan hanya bagi sembilan persepuluh orang Jerman sendiri, melainkan bahkan bagi sebagian besar pengamat asing yang paling memusuhi

sekalipun (betapapun mereka kini dapat berpura-pura sudah mengetahuinya sebelumnya).

Namun sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya di halaman-halaman buku ini, bukanlah Jerman masa kini, melainkan Jerman 20 atau 30 tahun lalu yang makin terlihat serupa dengan kondisi-kondisi sekarang di negeri ini. Ada banyak fitur yang pada waktu itu dipandang sebagai “khas Jerman” tetapi kini juga sama-sama terlihat di negeri ini, dan banyak gejala menunjukkan bahwa negeri ini sedang berkembang lebih jauh ke arah yang sama. Telah kita sebutkan keserupaan yang paling signifikan dan makin meningkat di antara berbagai pandangan ekonomi sayap kanan dan sayap kiri serta oposisi bersama mereka terhadap liberalisme yang lazimnya merupakan basis umum kebanyakan politik Inggris. Kita memiliki otoritas Mr. Harold Nicolson bagi pernyataan bahwa selama pemerintahan konservatif terakhir, di antara para anggota parlemen dari partai konservatif, “orang yang paling berbakat... semuanya pada dasarnya adalah sosialis”¹, dan tidak ada keraguan bahwa, seperti pada masa kaum Fabian, banyak kalangan sosialis memiliki simpati yang lebih besar kepada kalangan konservatif ketimbang kepada kalangan liberal. Ada banyak fitur lain yang erat terkait dengan ini. Pemujaan yang makin meningkat terhadap negara, kekaguman pada kekuasaan, dan kekaguman pada ukuran besar demi ukuran besar, antusiasme bagi “organisasi” segala sesuatu (yang kini kita sebut perencanaan), dan “ketidakmampuan untuk membiarkan apa pun bertumbuh dengan sederhana secara organik” yang bahkan H. v. Treitschke kecam di dalam diri orang-orang Jerman 60 tahun lalu, semuanya boleh dikata tidak kurang di negeri ini sekarang ketimbang di Jerman dulu.

Ihwal seberapa jauh dalam 20 tahun terakhir Inggris telah menempuh jalan Jerman telah digambarkan dengan luar biasa jelas kepada kita jika kita sekarang ini membaca beberapa diskusi yang lebih serius mengenai perbedaan antara pandangan

1 *The Spectator*, 12 April, 1940, hlm. 523.

Britania dan Jerman mengenai isu-isu moral dan politik yang muncul di negeri ini selama perang terakhir. Mungkin benar jika dikatakan bahwa pada waktu itu masyarakat Britania pada umumnya menghargai dengan lebih tulus perbedaan-perbedaan ini ketimbang sekarang. Tetapi sementara rakyat negeri ini pada waktu itu membanggakan tradisi khas mereka, tidak banyak pandangan politik yang pada waktu itu dianggap pandangan khas Inggris kini tidak dianggap memalukan oleh mayoritas orang di negeri ini, kalau bukannya malah ditolak mentah-mentah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semakin seorang penulis menampakkan ciri khas Inggris dalam masalah-masalah sosial atau politik di mata dunia waktu itu, maka semakin dia dilupakan pada masa kini di negerinya sendiri. Orang-orang seperti Lord Morley atau Henry Sidgwick, Lord Acton atau A. V. Dicey, yang saat itu dikagumi di dunia pada umumnya sebagai teladan-teladan terkemuka dalam kebijaksanaan politik Inggris liberal, oleh generasi masa kini dipandang sebagai Victorian yang sudah usang. Mungkin tak ada sesuatu pun yang menunjukkan perubahan ini secara lebih jelas ketimbang keadaan yang menimpa orang-orang yang dulu terkenal itu. Sementara Bismarck sendiri diperlakukan dengan simpatetik dalam literatur Inggris masa kini, nama Gladstone jarang disebut oleh generasi yang lebih muda tanpa suatu ejekan atas moralitas Victorian dan utopianismenya yang naif.

Saya berharap dapat dengan memadai dalam sedikit alinea mengungkapkan kesan yang mengganggu yang didapat dari penelitian atas sedikit karya orang Inggris mengenai ide-ide yang mendominasi Jerman dalam perang terakhir, di mana hampir setiap kata dapat diterapkan pada berbagai pandangan yang paling terang-benderang di dalam literatur Inggris masa kini. Saya hanya akan mengutip satu bagian pendek dari buku Lord Keynes, yang menggambarkan pada 1915 “mimpi buruk” yang didapatinya dijabarkan dalam buku khas Jerman dari kurun itu: dia mendeskripsikan bagaimana menurut seorang penulis Jerman

bahkan dalam masa damai kehidupan industrial harus tetap dimobilisasi. Inilah apa yang dimaksudkannya ketika dia berbicara mengenai “militarisasi kehidupan industrial kita” [ini adalah judul buku yang sedang ditinjau]. Individualisme harus mutlak berakhir. Sebuah sistem regulasi harus dibangun, yang bertujuan bukan untuk mengejar kebahagiaan lebih besar bagi setiap individu (Prof. Jaffé tidak malu mengatakan ini secara terang-terangan), melainkan untuk memperkuat kesatuan terorganisasi negara demi tujuan mendapatkan efisiensi sebesar-besarnya (*Leitungsfähigkeit*), yang pengaruhnya pada kemaslahatan individu hanya terjadi secara tidak langsung. Doktrin yang mengerikan ini dimuliakan di dalam semacam idealisme. Bangsa akan tumbuh menjadi suatu “kesatuan tertutup” dan akan menjadi, dalam kenyataannya, apa yang telah Plato deklarasikan sebagai sesuatu yang harus terjadi: “Der Mensch im Grossen”, “Manusia dalam Keagungan”. Secara khusus, perdamaian yang akan datang akan memperkuat ide tentang tindakan negara di dalam industri.... Investasi asing, emigrasi, kebijakan industrial yang dalam tahun-tahun belakangan ini telah menganggap seluruh dunia sebagai pasar, adalah hal-hal yang sangat berbahaya. Tata industri lama, yang kini sedang sekarat, didasarkan pada laba; dan Jerman baru dari kekuatan abad ke-20 yang tak mempertimbangkan laba akan mengakhiri sistem kapitalisme, yang telah datang dari Inggris 100 tahun lalu.²

Kecuali bahwa belum ada seorang penulis Inggris pun yang sampai sejauh ini, sepanjang yang saya tahu, berani dengan terbuka meremehkan kebahagiaan individu, adakah suatu alinea di dalam kutipan ini yang tidak tercermin di dalam banyak literatur kontemporer?

Dan sudah pasti bukan hanya ide-ide yang di Jerman dan di

2 *Economic Journal*, 1915, hlm. 450.

tempat-tempat lain telah membuka jalan bagi totalitarisme, melainkan juga banyak prinsip totalitarisme itu sendiri telah makin menawan di banyak negeri lain. Meskipun hanya segelintir orang, jika memang ada, dalam negeri ini yang mungkin mau saja menelan totalitarisme mentah-mentah, hanya sedikit fitur tertentu yang belum dianjurkan orang ini atau itu untuk kita tiru. Sesungguhnya, hampir tidak ada satu halaman pun dari buku Hitler yang belum direkomendasikan seseorang di negeri ini kepada kita untuk kita ambil dan gunakan demi tujuan-tujuan kita sendiri. Hal ini berlaku khususnya bagi banyak orang yang jelas merupakan musuh-musuh besar Hitler karena satu fitur khusus di dalam sistemnya. Tidak boleh kita lupakan bahwa anti-semitisme Hitler telah membuat banyak orang terusir dari negerinya, atau menjadi musuh-musuhnya, orang-orang yang dalam segala segi adalah totalitarian mapan tipe Jerman.³

Tidak ada deskripsi dalam terminologi-terminologi umum yang dapat memberikan ide yang memadai mengenai kesurupan banyak literatur politik Inggris masa kini dengan karya-karya yang menghancurkan kepercayaan pada peradaban Barat di Jerman dan yang menciptakan suatu alam pikiran yang

3 Teristimewa ketika kita mempertimbangkan proporsi mantan sosialis yang telah menjadi pendukung Nazi, maka adalah penting untuk ingat bahwa signifikansi sebenarnya dari rasio ini akan terlihat hanya jika kita membandingkannya, bukan dengan keseluruhan jumlah mantan sosialis, melainkan dengan jumlah orang yang perpindahannya ke kubu Nazi bagaimana pun juga tidak akan bisa dicegah oleh silsilah mereka. Sebetulnya, salah satu ciri yang mengagetkan dari emigrasi politik ke luar Jerman adalah jumlah kaum pengungsi yang relatif kecil dari sayap kiri yang bukan “orang Yahudi” dalam pengertian Jerman atas sebutan ini. Bukankah sering kita mendengar puji-pujian terhadap sistem Jerman yang dibuka dengan pernyataan berikut ini: “Herr Hitler bukanlah ideal saya; sama sekali bukan. Ada banyak alasan pribadi yang penting dan mendesak mengapa Herr Hitler bukan ideal saya, tetapi....” Dalam sebuah konferensi yang baru-baru ini diadakan, pernyataan ini diucapkan mendahului pemaparan mengenai “fitur-fitur teknik totalitarian yang patut dipikirkan dalam memobilisasi ekonomi”.

membuat Nazisme berhasil. Keserupaan ini bahkan lebih berupa sikap pikiran dalam mendekati persoalan-persoalan yang ada, ketimbang argumen-argumen tertentu yang digunakan—suatu sikap kesediaan yang serupa untuk menghancurkan semua ikatan budaya dengan masa lampau dan untuk mempertaruhkan segala sesuatu pada kesuksesan suatu eksperimen tertentu. Seperti halnya di Jerman, kebanyakan karya yang mempersiapkan jalan menuju sistem totalitarian di negeri ini adalah produk kaum idealis yang tulus dan seringkali merupakan orang-orang yang memiliki keistimewaan intelektual besar. Jadi, meskipun tidak menyenangkan jika kita menunjuk orang-orang tertentu sebagai contoh sementara pandangan-pandangan serupa yang didukung ratusan orang lain, saya tak melihat cara lain untuk menunjukkan dengan efektif sudah berapa jauh perkembangan ini sesungguhnya merasuk di negeri ini. Saya akan dengan sengaja memilih sebagai contoh para penulis yang keikhlasan dan kenetralannya tidak perlu dicurigai. Tetapi meskipun saya berharap untuk menunjukkan dengan cara ini bagaimana pandangan-pandangan yang menjadi sumber kelahiran totalitarianisme itu kini sedang dengan cepat menyebar di sini, saya tidak akan terlalu berhasil mengungkapkan dengan sukses kemiripan yang juga penting dalam segi emosional. Suatu penyelidikan yang ekstensif terhadap semua perubahan kecil dalam pemikiran dan bahasa diperlukan untuk mengeksplisitkan apa yang mudah dikenali orang sebagai gejala-gejala perkembangan yang sudah pernah diketahui. Lewat perjumpaan dengan tipe orang yang berbicara mengenai keharusan mempertentangkan ide-ide “besar” dengan ide-ide “kecil” dan mengenai penggantian pemikiran lama yang “statis” atau “parsial” dengan pemikiran baru yang “dinamis” atau “global”, orang dapat belajar mengenali bahwa apa yang pada awalnya tampak sebagai omong kosong adalah suatu tanda dari sikap intelektual yang sama, yang manifestasinya hanya dapat kita sendiri perhatikan di sini.

Contoh-contoh pertama saya adalah dua karya yang ditulis oleh seorang pakar yang berbakat, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menarik banyak perhatian. Mungkin tidak banyak contoh lain dalam literatur Inggris kontemporer di mana pengaruh ide-ide spesifik Jerman, yang akan kita perhatikan, sangat kentara seperti di dalam buku-buku Prof. E. H. Carr yang berjudul *Twenty Years' Crisis* dan *Conditions of Peace*.

Dalam yang pertama dari kedua buku itu, Prof. Carr dengan jujur mengakui bahwa dirinya sendiri adalah pendukung “‘mazhab historis’ kaum realis [yang] berasal dari Jerman dan [yang] perkembangannya dapat dijejaki lewat nama-nama besar Hegel dan Marx”. Dia menjelaskan bahwa seorang realis adalah seorang “yang menjadikan moralitas sebagai suatu fungsi politik” dan yang “secara logis tidak menerima standar nilai apa pun kecuali standar fakta”. “Realisme” ini dikontraskan, dengan cara Jerman sejati, dengan pemikiran “utopian” yang berasal dari abad ke-18 “yang pada dasarnya individualis dalam hal bahwa pemikiran ini menjadikan kesadaran nurani manusia sebagai suatu pengadilan banding terakhir”. Tetapi moralitas lama dengan “prinsip-prinsipnya yang umum dan abstrak” harus lenyap karena “kaum empirisis memperlakukan setiap kasus konkret berdasarkan nilai-nilai kasus itu sendiri”. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun yang penting kecuali kegunaan pragmatis, dan kita bahkan diyakinkan bahwa “norma *pacta sunt servanda*⁴ bukanlah prinsip moral”. Prof. Carr tampaknya tidak terganggu bahwa, tanpa prinsip-prinsip umum yang abstrak, kelayakan seseorang mendapatkan haknya akan menjadi semata-mata opini sesuka hati, dan bahwa perjanjian-perjanjian internasional, jika tidak mengikat secara moral, tak memiliki makna apa pun.

Bahkan, menurut Prof. Carr, meskipun dia tidak mengatakannya dengan terang-terangan, tampaknya Inggris telah terjun ke dalam perang terakhir pada pihak yang salah. Siapa pun yang

4 Artinya “Kesepakatan harus ditaati” (*penerjemah*).

kini membaca kembali pernyataan tujuan perang Britania 25 tahun lalu dan membandingkannya dengan pandangan Prof. Carr sekarang akan langsung melihat bahwa apa yang pada waktu itu dipercaya sebagai pandangan Jerman kini kelihatan sebagai pandangan Prof. Carr sendiri yang barangkali akan berargumentasi bahwa pandangan berbeda yang waktu itu dinyatakan di negeri ini semata-mata hanyalah produk kemunafikan Britania. Betapa sedikitnya perbedaan yang dapat dilihat antara ideal-ideal yang dipegang di negeri ini dan ideal-ideal yang dipraktikkan sekarang di Jerman, dengan sangat baik digambarkan oleh pernyataannya bahwa

adalah benar bahwa ketika seorang Nasional-Sosialis yang terkenal menegaskan bahwa “segala sesuatu yang menguntungkan rakyat Jerman adalah benar, segala sesuatu yang membahayakan mereka adalah salah”, orang ini hanyalah mengetengahkan pengidentifikasian yang sama antara kepentingan nasional dan hak-hak universal yang telah dimantapkan bagi negeri-negeri berbahasa Inggris oleh [Presiden] Wilson, Prof. Toynbee, Lord Cecil, dan banyak orang lain.

Karena buku-buku Prof. Carr didedikasikan pada masalah-masalah internasional, maka terutama di bidang inilah tendensinya yang khas menjadi nyata. Tetapi dari penglihatan sekilas yang orang dapatkan mengenai karakteristik masyarakat masa depan yang dia bayangkan, masyarakat masa depan itu tampak juga sebagai masyarakat yang sangat bermodel totalitarian. Kadang kala orang bahkan bertanya-tanya apakah kemiripan itu suatu kebetulan saja atautkah sesuatu yang disengaja. Apakah, misalnya, Prof. Carr menyadari, ketika dia menyatakan bahwa “kita tidak dapat lagi menemukan banyak makna di dalam distingsi yang umum dikenal pada pemikiran abad ke-19 antara ‘masyarakat’ dan ‘negara’”, bahwa itulah persisnya doktrin Prof. Carl Schmitt, seorang teoretikus totalitarianisme Nazi terkemuka, dan, dalam kenyataannya, merupakan hakikat dari

definisi totalitarianisme yang telah diberikan penulis itu kepada terminologi itu, yang telah dia sendiri perkenalkan? Atau bahwa pandangan bahwa “produksi opini secara massal adalah akibat langsung dari produksi massal barang-barang” dan bahwa, dengan demikian, “prasangka yang masih muncul dalam pikiran banyak orang ketika mendengar kata propaganda sekarang ini sangat sejajar dengan prasangka terhadap kontrol atas industri dan perdagangan”, memang adalah apologi bagi pengontrolan ketat terhadap opini seperti yang dipraktikkan Nazi?

Dalam bukunya yang lebih mutakhir, *Conditions of Peace*, Prof. Carr menjawab dengan positif pertanyaan yang mengakhiri bab sebelum ini:

Para pemenang kehilangan perdamaian, dan Rusia Soviet dan Jerman memenangnya, karena Rusia terus mengkhobahkan, dan sebagian menerapkan, ideal-ideal, yang dulu valid tetapi yang sekarang ini menimbulkan persoalan, mengenai hak-hak bangsa-bangsa dan kapitalisme *laissez-faire*, sedangkan Jerman, yang dengan disadari atau tak disadari terbawa maju di atas arus gelombang pasang abad ke-20, sedang berjuang untuk membangun dunia dalam unit-unit yang lebih besar di bawah perencanaan dan kendali terpusat.

Prof. Carr mengambil-alih sepenuhnya pekik perang Jerman mendukung revolusi sosialis Timur melawan Barat liberal yang di dalamnya Jerman menjadi sang pemimpin:

revolusi yang telah dimulai dalam perang terakhir, yang merupakan kekuatan pendorong bagi setiap gerakan politik yang signifikan dalam 20 tahun terakhir...suatu revolusi melawan ide-ide dominan abad ke-19: demokrasi liberal, penentuan nasib sendiri nasional, dan ekonomi *laissez-faire*.

Sebagaimana dia katakan sendiri dengan tepat, “hampir tak

terhindarkan bahwa tantangan terhadap kepercayaan-kepercayaan abad ke-19 yang tak pernah benar-benar dianut Jerman justru menemukan salah satu pendukung terkuatnya di Jerman.” Dengan semua kepercayaan fatalistik yang dipegang oleh setiap sejarawan gadungan sejak Hegel dan Marx, perkembangan ini digambarkan sebagai sesuatu yang niscaya: “Kita mengetahui arah ke mana dunia sedang bergerak, dan kita harus tunduk terhadapnya atau binasa.”

Keyakinan bahwa tren ini tak terelakkan didasarkan terutama pada ide-ide ekonomi yang sudah diketahui keliru—asumsi bahwa monopoli pasti tumbuh secara umum sebagai akibat perkembangan teknologi, sinyalemen “keberlimpahan potensial”, dan semua semboyan populer lain yang muncul dalam karya-karya jenis ini. Prof. Carr bukanlah ekonom dan argumentasi ekonominya secara umum keliru. Tetapi bukan hal itu, dan juga bukan kepercayaannya yang juga dipegangnya, bahwa pentingnya faktor ekonomi dalam kehidupan sosial sedang dengan cepat merosot, yang tidak memungkinkan dirinya mendasarkan semua ramalannya mengenai berbagai perkembangan yang tak terelakkan pada argumen-argumen ekonomi, atau untuk mengajukan, sebagai tuntutan-tuntutan utamanya bagi masa depan, “suatu penafsiran kembali, dalam terminologi ekonomi, ideal-ideal demokratis mengenai ‘ekualitas’ dan ‘libertas’”!

Pelecehan yang dilakukan Prof. Carr terhadap semua ide ekonom liberal (yang dengan bersikukuh dia sebut sebagai ide-ide abad ke-19, meskipun dia mengetahui bahwa Jerman “tak pernah benar-benar menganutnya” dan telah dalam abad ke-19 mempraktikkan kebanyakan prinsip yang sekarang ini dia dukung), sama dalamnya dengan yang dilakukan oleh setiap penulis Jerman mana pun yang telah dikutip dalam bab terdahulu. Dia bahkan mengambil alih tesis Jerman, yang berasal dari Friedrich List, bahwa perdagangan bebas adalah kebijakan yang dipaksakan semata-mata oleh, dan hanya cocok bagi, kepentingan-kepentingan khusus Inggris dalam abad ke-19. Namun, kini “kebijakan kemandirian ekonomi yang disengaja

sampai tingkat tertentu adalah kondisi yang diperlukan dalam menata kehidupan sosial.” “Kembali ke perdagangan dunia yang lebih tergeneralisasi dan lebih menyebar...dengan ‘penyingkiran rintangan perdagangan’ atau dengan penghidupan kembali prinsip-prinsip *laissez-faire* abad ke-19” adalah “mustahil”. Masa depan adalah kepunyaan *Grossraumwirtschaft*, ekonomi yang lebih besar, tipe Jerman: “Hasil yang kita inginkan dapat dicapai hanya melalui reorganisasi yang disengaja atas kehidupan Eropa sebagaimana telah Hitler jalankan”!

Setelah semua ini dikemukakan, orang hampir tidak terkejut lagi ketika menemukan bagian khusus yang diberi judul “Fungsi-Fungsi Moral Peperangan”, yang di dalamnya Prof. Carr dengan nada menghina mengasihani “orang yang bermaksud baik (khususnya di negeri-negeri berbahasa Inggris), yang, terserap dalam tradisi abad ke-19, berkeras memandang perang sebagai sesuatu yang tak rasional dan tak bertujuan”, dan bersukacita di dalam “signifikansi makna dan tujuan” yang diciptakan perang, “instrumen solidaritas sosial yang paling kuat”. Semua ini sudah sering dikemukakan—tetapi bukan di dalam karya-karya pakar Inggrislah orang berharap menemukan pandangan ini.



Mungkin kita belum memberikan perhatian cukup kepada satu fitur perkembangan intelektual di Jerman selama 100 tahun belakangan ini, yang kini dalam bentuk yang hampir identik sedang muncul di negeri ini: para ilmuwan berkampanye untuk pengorganisasian masyarakat secara “saintifik”. Ideal tentang masyarakat yang diorganisasikan “secara menyeluruh” dari atas telah diperluas di Jerman oleh pengaruh yang sangat unik yang diperkenankan dilakukan oleh para spesialis sains dan teknologi atas pembentukan opini-opini sosial dan politis. Sedikit saja orang yang masih ingat bahwa dalam sejarah modern Jerman para mahaguru politik telah memainkan peran yang dapat disejajarkan

dengan peran para ahli hukum politik di Prancis.⁵ Pengaruh para politikus ilmuwan ini dalam tahun-tahun belakangan ini sering tidak berada di pihak kebebasan: “Intoleransi akal budi” yang sangat sering kentara dalam diri para spesialis sains, ketidaksabaran terhadap cara-cara kaum awam, yang menjadi ciri khas para ahli, dan penghinaan terhadap segala sesuatu yang tidak diorganisasikan dengan sadar oleh pikiran-pikiran yang lebih unggul menurut suatu cetak biru saintifik, adalah fenomena yang umum dikenal di dalam kehidupan masyarakat Jerman bergenerasi-generasi lamanya sebelum menjadi penting di negeri ini. Dan mungkin tak ada negeri lain yang menyediakan gambaran yang lebih baik mengenai akibat-akibat yang menimpa suatu bangsa, yang ditimbulkan oleh pergeseran yang umum dan menyeluruh dalam bagian terbesar sistem pendidikannya, dari “ilmu-ilmu humaniora” ke “ilmu-ilmu empiris”, ketimbang Jerman dalam kurun antara 1840 dan 1940.⁶

Pada akhirnya, dengan sedikit kekecualian, cara para pakar dan para ilmuwan Jerman menempatkan diri mereka dengan penuh bakti sebagai pelayan-pelayan para penguasa baru itu adalah salah satu pemandangan yang paling memalukan dan paling menyedihkan di dalam seluruh sejarah kebangkitan Nasional-Sosialisme.⁷ Telah diketahui betul bahwa para saintis dan para

5 Bdk. Franz Schnabel, *Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert*, vol. 11, 1933, hlm. 204.

6 Saya percaya adalah si penulis *Leviathan* yang pertama kali menyatakan bahwa pengajaran karya-karya klasik harus dihambat, sebab karya-karya itu memasukkan semangat kebebasan yang berbahaya!

7 Penghambaan kaum ilmuwan terhadap penguasa politik telah berlangsung dini di Jerman, bersamaan dengan perkembangan besar sains yang diorganisasi negara yang kini menjadi subjek yang sangat dipuji-puji di negeri ini. Salah seorang saintis Jerman yang paling mashyur, pakar fisiologi Emil du Bois-Reymond, tidak merasa malu, ketika dia memproklamasikan di dalam sebuah orasi yang disampaikan pada tahun 1870 dalam kapasitas gandanya sebagai Rektor Universitas Berlin dan Presiden Akademi Sains Prusia, bahwa “Kita, Universitas Berlin, yang berlokasi berseberangan dengan istana Raja, berkat tindakan

perencana khususnya, yang dengan lantang mengklaim diri sebagai pemimpin bangsa yang sedang berderap menuju ke dunia yang baru dan lebih baik, dengan lebih suka hati menaklukkan diri mereka kepada tirani baru itu ketimbang hampir semua kelas lain mana pun.⁸

Peran yang dimainkan kalangan cendekiawan di dalam transformasi masyarakat menjadi totalitarian telah diprediksi secara profetis di negeri lain oleh Julien Benda, yang karyanya *Trahison des Clercs* mendapatkan signifikansi baru ketika dibaca kembali sekarang, 15 tahun setelah ditulis. Khususnya satu bagian dalam karya itu patut direnungi dengan baik dan tetap diingat ketika kita mau mempertimbangkan contoh-contoh tertentu mengenai masuknya kalangan ilmuwan Britania ke dunia politik. Dalam

yayanan kita, adalah para pelindung intelektual Dinasti Hohenzollern.” (*A Speech on the German War*, London, 1870, hlm. 31. Luar biasa bahwa du Bois-Reymond merasa perlu menerbitkan orasi ini dalam edisi bahasa Inggris.)

- 8 Cukuplah mengutip satu saksi asing: Mr. R. A. Brady, dalam kajiannya tentang *The Spirit and Structure of German Fascism*, mengakhiri uraiannya mengenai perkembangan di dalam dunia akademik Jerman dengan pernyataan bahwa “ilmuwan *per se*, karena itu, mungkin, adalah kalangan yang paling mudah digunakan dan ‘dikoordinasikan’ dari semua orang yang secara khusus telah dilatih di dalam masyarakat modern. Sesungguhnya kaum Nazi memecat banyak mahaguru universitas, dan mengeluarkan banyak saintis dari laboratorium-laboratorium riset. Tetapi para mahaguru itu terutama adalah mahaguru ilmu-ilmu sosial yang memiliki kesadaran yang lebih umum mengenai, dan kritik yang lebih gigih terhadap, program-program Nazi, dan bukan mahaguru ilmu-ilmu alam di mana pemikiran diasumsikan dilakukan dengan paling seksama. Orang-orang yang dikeluarkan dari laboratorium-laboratorium riset terutama adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak sesuai dengan generalisasi di atas, yakni dikarenakan mereka menerima, dengan sama tak kritisnya, kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan pandangan-pandangan Nazi. Karena itu, kalangan Nazi dapat ‘mengkoordinasi’ para pakar dan ilmuwan dengan relatif mudah, dan dengan demikian propaganda terperinci mereka seolah-olah didukung kekuatan sejumlah besar opini dan kalangan terpelajar Jerman.”

bagian yang dikutipkan ini Mr. Benda berbicara mengenai

takhayul bahwa sains berkompeten di dalam semua bidang, termasuk bidang moralitas; suatu takhayul yang, saya ulangi, merupakan prestasi abad ke-19. Masih belum diketahui apakah orang-orang yang mengelu-elukan doktrin ini memang mempercayainya atau apakah mereka cuma ingin memberikan kepada gelora hati mereka suatu prestise saintifik, padahal mereka tahu betul bahwa gelora hati mereka itu tidak lain dari perasaan saja. Harus dicatat bahwa dogma bahwa sejarah taat pada hukum-hukum saintifik dikhotbahkan khususnya oleh para pendukung kekuasaan sewenang-wenang. Hal ini sangat alamiah, karena mengeliminasi dua realitas yang paling mereka benci, yakni, kebebasan manusia dan tindakan historis seorang individu.

Kita telah memiliki kesempatan menyebut satu produk Inggris jenis ini, suatu karya yang di dalamnya, dengan latar belakang Marxis, semua hal yang eksentrik dan khas dari kalangan intelektual totalitarian, kebencian terhadap hampir segala sesuatu yang membuat unggul peradaban Eropa sejak Renaisans, digabungkan dengan persetujuan terhadap metode Inkuisisi. Kita tidak ingin meninjau kasus yang sangat ekstrim semacam itu di sini, dan akan mengambil sebuah karya yang lebih representatif dan yang telah mendapatkan publisitas yang luas. Sebuah buku kecil Dr. C. H. Waddington yang memakai judul khas *The Scientific Attitude* adalah contoh yang sama bagusnya dengan buku lain mana pun yang termasuk ke dalam kelas literatur yang dengan aktif disponsori oleh mingguan *Nature* yang berpengaruh dan yang menggabungkan klaim-klaim pemberian kekuasaan politik yang lebih besar kepada para ilmuwan dengan dukungan yang fanatik terhadap “perencanaan” yang menyeluruh. Meskipun tidak selantang Mr. Crowther dalam melecehkan kebebasan, Dr. Waddington tidak lebih menyenangkan. Dia berbeda dari hampir semua penulis yang sejenis dalam hal bahwa dia

dengan jelas melihat dan bahkan memberikan tekanan bahwa berbagai kecenderungan yang dia gambarkan dan dia dukung akan menuju ke sistem totalitarian. Namun hal ini tampak bagi dia lebih disukai ketimbang apa yang dia gambarkan sebagai “peradaban kandang-monyet masa kini yang buas”.

Klaim Dr. Waddington bahwa kalangan ilmuwan memenuhi syarat untuk mengelola suatu masyarakat totalitarian didasarkan terutama pada tesisnya bahwa “sains dapat menjatuhkan penilaian etis terhadap perilaku manusia”, suatu klaim yang, dengan penjabaran panjang lebar oleh Dr. Waddington, telah dipublikasi dengan luas oleh *Nature*. Tentu saja ini adalah tesis yang telah lama dikenal oleh para politikus ilmuwan Jerman dan yang telah dengan tepat disorot oleh J. Benda. Untuk ilustrasi mengenai apa artinya ini, kita tak perlu keluar dari buku Waddington. Kebebasan, dia menjelaskan, “adalah konsep yang sangat menyusahkan untuk didiskusikan si saintis, sebagian karena dia tidak yakin bahwa, setelah segalanya dipertimbangkan, hal semacam itu memang ada”. Namun kepada kita dikatakan bahwa “sains mengakui” adanya kebebasan jenis-jenis tertentu, tetapi “kebebasan untuk menjadi aneh dan menjadi tidak sama dengan sesama bukanlah...suatu nilai saintifik.” Rupanya “ilmu-ilmu humaniora pelacur”, yang dimaki-maki Dr. Waddington, telah sangat menyesatkan kita dengan mengajarkan kita toleransi!

Bahwa ketika sampai ke persoalan-persoalan sosial dan ekonomi buku mengenai “sikap saintifik” ini sama sekali tidak saintifik adalah hal biasa pada literatur jenis ini. Sekali lagi kita menemukan semua klise yang sudah umum dikenal dan generalisasi tanpa dasar mengenai “keberlimpahan potensial” dan tendensi yang tak dihindarkan menuju monopoli, meskipun “otoritas-otoritas terbaik” yang dikutip untuk mendukung pendapat-pendapat ini terbukti, ketika sudah diteliti, sebagai artikel-artikel yang kebanyakan bersifat politis, yang posisi ilmiahnya patut dipertanyakan, sementara kajian-kajian serius atas persoalan yang sama diabaikan begitu saja.

Sebagaimana di dalam semua karya tipe ini, keyakinan Dr.

Waddington sebagian besar ditentukan oleh kepercayaannya pada “kecenderungan-kecenderungan historis yang niscaya” yang dalam anggapannya telah sains temukan dan yang dia tarik dari “filsafat saintifik yang mendalam” Marxisme, yang gagasan-gagasan mendasarnya “hampir sama, jika bukan persis sama, dengan gagasan-gagasan yang melandasi pendekatan saintifik terhadap alam”, dan yang “kompetensinya untuk menjatuhkan penilaian” meyakinkan Dr. Waddington merupakan kemajuan atas segala hal yang telah berlangsung sebelumnya. Demikianlah, meskipun dia menemukan bahwa “sulit disangkal bahwa Inggris masa kini adalah negeri yang lebih buruk untuk ditinggali ketimbang kondisinya dulu” di tahun 1913, Dr. Waddington mengharapakan timbulnya sistem ekonomi yang “akan disentralisasi dan bersifat totalitarian dalam arti bahwa semua aspek perkembangan ekonomi wilayah-wilayah besar dengan sadar direncanakan sebagai suatu keseluruhan yang terpadu”. Dan bagi optimismenya yang simplistik bahwa di dalam sistem totalitarian ini kebebasan pikiran akan terpelihara, “sikap saintifik”-nya tidak punya dasar yang lebih baik ketimbang keyakinan bahwa “pastilah ada bukti yang sangat berharga mengenai persoalan-persoalan yang untuk memahaminya orang tidak perlu menjadi seorang ahli”, seperti, misalnya, apakah dimungkinkan “untuk menggabungkan totalitarianisme dengan kebebasan berpikir”.



Suatu survei yang lebih menyeluruh mengenai tendensi beranekaragam menuju totalitarianisme dalam negeri ini harus memberikan perhatian luas terhadap bermacam-macam upaya untuk menciptakan sejenis sosialisme kelas-menengah yang, pasti tanpa diketahui oleh para pengarangnya, memperlihatkan kemiripan yang mengkhawatirkan dengan perkembangan serupa di Jerman pra-Hitler.⁹ Jika kita di sini prihatin terhadap gerakan-

9 Sebuah elemen lain yang setelah perang ini paling mungkin memperkuat

gerakan politik itu sendiri, kita harus meninjau organisasi-organisasi yang baru semacam itu, seperti gerakan “Berbaris Maju” atau gerakan “Kekayaan Umum” dari Sir Richard Acland, penulis *Unser Kampf*, atau aktivitas-aktivitas “Komite 1941” Mr. J. B. Priestly, yang pernah diasosiasikan dengan gerakan yang disebut lebih dulu. Tetapi, kendatipun akan tidak bijaksana jika orang mengabaikan signifikansi khas fenomena seperti ini, fenomena ini sejauh ini hampir-hampir tidak dapat diperhitungkan sebagai kekuatan politis yang penting. Lepas dari pengaruh intelektual yang kita telah gambarkan melalui dua contoh di atas, momentum gerakan menuju totalitarisme datang terutama dari dua kepentingan khusus, yakni kapital yang terorganisasi dan buruh yang terorganisasi. Mungkin bahaya terbesar adalah fakta bahwa kebijakan-kebijakan kedua kelompok yang paling kuat ini menunjuk ke arah yang sama.

Kedua kelompok ini melakukan hal ini melalui dukungan bersama, dan seringkali terkonsentrasi, terhadap organisasi industri yang monopolistik; dan tendensi inilah yang merupakan bahaya langsung yang besar. Walaupun tidak ada alasan untuk percaya bahwa gerakan ini tak terhindarkan, tidak ada keraguan bahwa jika kita terus berada di jalan yang sedang kita jalani ini, kita akan dibawa ke totalitarisme.

Tentu saja gerakan ini direncanakan dengan penuh perhitungan terutama oleh para pengorganisasi monopoli-monopoli

tendensi-tendensi ke arah ini akan berupa orang-orang yang selama perang telah merasakan nikmatnya kekuasaan kontrol koersif dan akan merasa sulit menyelaraskan diri mereka dengan peran-peran yang lebih bersahaja yang terpaksa akan mereka mainkan. Meskipun sesudah perang terakhir orang-orang jenis ini tidak sebanyak yang mungkin akan ada di masa depan, mereka bahkan pada waktu itu memiliki pengaruh yang luas atas kebijakan ekonomi negeri ini. Sejak 10 atau 12 tahun yang lalu saya, di dalam lingkungan orang-orang semacam inilah, pertama kali di negeri ini merasa tiba-tiba dipindahkan ke dalam apa yang telah saya pandang sebagai atmosfer intelektual yang bercorak “Jerman” seluruhnya, suatu perasaan yang pada waktu itu masih tak lazim.

kapitalis, dan mereka dengan demikian menjadi salah satu sumber utama bahaya ini. Tanggungjawab mereka tidak diubah oleh fakta bahwa tujuan mereka bukanlah sistem totalitarian, melainkan sejenis masyarakat korporatif yang di dalamnya industri-industri yang terorganisasi akan muncul sebagai “badan-badan usaha” yang semi-independen dan mengatur diri sendiri. Tetapi mereka sama rabunnya dengan kolega-kolega Jerman mereka dalam mempercayai bahwa mereka akan bisa bukan hanya menciptakan tetapi juga mengatur sistem semacam itu dalam jangka waktu panjang. Keputusan-keputusan yang harus terus-menerus diambil para manajer dari industri yang terorganisasi semacam itu bukanlah keputusan-keputusan yang akan dibiarkan oleh masyarakat mana pun berada di tangan privat untuk waktu yang lama. Suatu negara yang mengizinkan tumbuhnya penghimpunan kekuasaan yang besar semacam itu tidak mungkin membiarkan kekuasaan itu berada seluruhnya dalam kontrol privat. Juga bodoh untuk percaya bahwa di dalam kondisi-kondisi semacam itu para pewiraswasta akan dalam waktu lama dibiarkan menikmati posisi istimewa mereka, yang di dalam suatu masyarakat kompetitif dijustifikasi oleh fakta bahwa dari banyak orang yang mengambil risiko hanya segelintir saja yang akan mencapai sukses, yang kesempatan untuk meraihnya membuat risiko itu layak diambil. Tidaklah mengejutkan bahwa para pewiraswasta akan suka menikmati baik penghasilan tinggi yang di dalam masyarakat kompetitif didapat oleh orang-orang yang sukses dari antara mereka, maupun ketahanan ekonomi seorang pegawai negeri. Selama suatu sektor besar industri swasta ada bersisian dengan industri yang dijalankan pemerintah, talenta yang dimiliki seseorang untuk menjalankan industri besar hampir pasti akan memberinya gaji yang tinggi bahkan di dalam posisi-posisi yang cukup aman. Tetapi walaupun para pewiraswasta mungkin akan melihat harapan-harapan mereka terpenuhi selama tahap transisi, waktunya tidak akan lama sebelum mereka menemukan, sebagaimana dialami kolega-kolega Jerman mereka, bahwa mereka bukan lagi tuan, melainkan

dalam segala hal harus puas dengan kekuasaan dan pembayaran apa pun yang akan pemerintah berikan kepada mereka.

Kecuali argumen buku ini telah disalahpahami seluruhnya, penulis tidak akan dicurigai bersikap lembut terhadap kapitalis jika dia menegaskan di sini bahwa bagaimana pun juga adalah keliru menempatkan kesalahan gerakan modern menuju monopoli hanya atau terutama pada kelas itu. Kecenderungan kaum kapitalis ke arah ini bukanlah hal baru, dan juga pada dirinya sendiri tidaklah mungkin akan bermuara pada kekuatan yang dahsyat. Perkembangannya menjadi fatal ketika mereka sukses dalam menghimpun dukungan dari kelompok-kelompok lain yang jumlahnya senantiasa semakin bertambah, dan lewat bantuan mereka akhirnya mendapatkan dukungan negara.

Sampai tahap tertentu, para pemonopoli telah berhasil mendapatkan dukungan ini entah dengan membiarkan kelompok-kelompok lain berpartisipasi dalam keuntungan mereka, atau, dan bahkan mungkin lebih sering, dengan meyakinkan mereka bahwa pembentukan monopoli adalah demi kepentingan publik. Tetapi perubahan di dalam opini publik, yang melalui pengaruhnya pada legislasi dan lembaga yudikatif¹⁰ telah menjadi faktor terpenting untuk membuat perkembangan ini terjadi, adalah, lebih dari hal apa pun, hasil propaganda melawan kompetisi oleh kalangan kiri. Bahkan sangat sering tindakan yang diarahkan melawan pemonopoli sebenarnya berfungsi hanya untuk memperkuat kekuasaan monopoli. Setiap penjarahan terhadap buah-buah monopoli, baik demi kepentingan kelompok tertentu atau demi kepentingan negara secara keseluruhan, cenderung menciptakan pihak-pihak baru yang berkepentingan istimewa yang akan membantu memperkuat monopoli. Suatu sistem yang di dalamnya berbagai kelompok besar yang memiliki privilese mendapatkan laba dari monopoli dapat secara politis jauh lebih berbahaya, dan monopoli di dalam sistem semacam

10 Mengenai hal ini, bandingkan sebuah artikel mutakhir yang mencerahkan, berjudul "Monopoly and the Law", oleh W. Arthur Lewis, di dalam *The Modern Law Review*, vol. VI, no. 3, April 1943.

itu pasti jauh lebih berkuasa, ketimbang di dalam sistem lain di mana laba diperoleh segelintir orang. Tetapi meskipun haruslah jelas bahwa, misalnya, gaji yang lebih tinggi yang bisa dibayar si pemonopoli adalah hasil eksploitasi sekaligus bagian dari labanya sendiri, dan bahwa hal ini pasti membuat lebih miskin bukan saja semua konsumen, tetapi lebih lagi semua penerima gaji lainnya, namun sekarang bukan hanya orang-orang yang mendapatkan keuntungan darinya, tetapi juga publik pada umumnya menerima bahwa kesanggupan membayar gaji yang lebih tinggi adalah argumen yang sah dalam membela monopoli.¹¹

Ada alasan serius untuk meragukan apakah, bahkan di dalam kasus-kasus di mana monopoli tak terhindarkan lagi, cara terbaik untuk mengontrol monopoli adalah dengan menempatkannya di dalam tangan negara. Jika masalahnya hanya suatu industri tertentu, bolehlah demikian. Tetapi ketika kita harus menghadapi banyak industri monopolistik yang berbeda, lebih baik jika industri-industri ini diserahkan ke dalam tangan-tangan swasta yang berlainan ketimbang menggabungkannya di bawah kontrol tunggal negara. Bahkan jika jalan kereta api, jalan raya, dan transportasi udara, atau pasokan gas dan listrik, semuanya adalah monopoli yang tak terhindarkan, konsumen pasti akan berada di dalam posisi yang jauh lebih kuat selama masing-masing tetap adalah monopoli-monopoli yang terpisah ketimbang ketika semuanya “dikoordinasikan” oleh kontrol terpusat. Monopoli swasta jarang

11 Bahkan lebih mengejutkan lagi, mungkin, adalah sikap lembut yang sangat luar biasa yang banyak orang sosialis condong tunjukkan kepada pemilik surat obligasi *rentier* (orang yang hidup dari bunga saja) yang sering mendapat jaminan penghasilan yang aman dari organisasi industri monopoli. Bahwa permusuhan membabi-butakan kepada laba lantas membuat mereka menganggap penghasilan tetap yang diperoleh tanpa kerja sebagai sesuatu yang secara sosial atau secara etis lebih diinginkan ketimbang laba, dan bahkan menerima adanya monopoli untuk mengamankan penghasilan yang terjamin bagi, misalnya, pemilik surat obligasi perusahaan kereta api, adalah salah satu simtom penyimpangan nilai-nilai yang paling luar biasa yang telah terjadi selama generasi yang terakhir.

bersifat total dan bahkan lebih lagi jarang lagi bertahan lama atau dapat mengabaikan kompetisi potensial. Tetapi monopoli oleh negara senantiasa merupakan monopoli yang diproteksi negara—diproteksi baik terhadap kompetisi potensial maupun terhadap kritik yang efektif. Dalam kebanyakan kasus, ini berarti bahwa suatu monopoli sementara telah diberikan kekuasaan untuk mengamankan posisinya selamanya—suatu kekuasaan yang hampir pasti akan digunakannya. Apabila kekuasaan yang seharusnya memeriksa dan mengontrol monopoli justru tertarik untuk memayungi dan membela orang-orang yang harus dikontrolnya, apabila pemerintah hanya dapat mengatasi suatu tindakan sewenang-wenang dengan mengaku bertanggungjawab atas kesewenang-wenangan itu, dan apabila kritik terhadap tindakan monopoli berarti kritik terhadap pemerintah, maka hanya ada harapan kecil bahwa monopoli bisa menjadi pelayan masyarakat. Negara yang terjerat dalam segala arah dalam menjalankan usaha monopolistik, walaupun memiliki kekuasaan untuk menaklukkan individu, akan menjadi negara yang lemah sejauh kebebasannya dalam merumuskan kebijakan tersangkut. Mesin monopoli menjadi identik dengan mesin negara, dan negara sendiri menjadi semakin identik dengan kepentingan-kepentingan dari orang-orang yang mengelola segala sesuatu, ketimbang dengan kepentingan-kepentingan rakyat pada umumnya.

Kemungkinannya adalah bahwa di mana pun monopoli sungguh-sungguh niscaya, maka perencanaan yang biasanya lebih disukai orang Amerika, yakni perencanaan yang memberlakukan kontrol negara yang kuat terhadap monopoli-monopoli swasta, jika dengan konsisten dijalankan, lebih mungkin memberikan hasil yang memuaskan, ketimbang manajemen oleh negara. Setidaknya akan tampak demikian jika negara memberlakukan kontrol harga yang ketat yang tidak meninggalkan ruang apa pun bagi laba yang luar biasa, yang dapat dinikmati juga oleh orang lain ketimbang hanya oleh para pemonopoli. Bahkan jika kontrol harga ini bisa memiliki efek (sebagaimana kadang kala

terjadi terkait dengan pelayanan publik Amerika) berupa layanan industri monopolistik yang kurang memuaskan daripada yang seharusnya, ini adalah biaya kecil yang harus dibayar demi pembatasan yang efektif terhadap kekuasaan monopoli. Sebagai pribadi, saya jauh lebih suka mengalami inefisiensi semacam itu ketimbang membiarkan monopoli yang terorganisasi mengontrol cara-cara saya hidup. Metode semacam itu dalam menghadapi monopoli, yang akan dengan cepat membuat posisi pemonopoli paling sulit didapatkan di antara posisi-posisi lain dalam wirausaha, juga akan sangat banyak mengurangi monopoli sehingga hanya ada di bidang-bidang di mana monopoli tak dapat dihindari dan akan menstimulasi penemuan pengganti-penggantinya yang dapat disediakan secara kompetitif. Cukup dengan membuat posisi pemonopoli sekali lagi sebagai kambing hitam kebijakan ekonomi, maka anda akan kaget mengetahui betapa cepatnya kebanyakan pewiraswasta yang lebih kompeten akan menemukan kembali cita rasa mereka terhadap lingkungan yang mendukung kompetisi!



Masalah monopoli tidak akan sulit diatasi jika yang harus kita perangi hanyalah monopoli kapitalis. Tetapi, sebagaimana sudah dikatakan, monopoli telah menjadi begitu berbahaya, bukan melalui usaha-usaha sedikit orang kapitalis yang berkepentingan, melainkan melalui dukungan yang telah mereka dapatkan dari orang-orang yang telah mereka biarkan mendapat bagian di dalam keuntungan-keuntungan mereka, dan dari lebih banyak orang yang berhasil mereka yakinkan bahwa dengan mendukung monopoli mereka membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan lebih tertata. Momen fatal yang paling penting dalam pembangunan modern adalah ketika gerakan besar yang dapat melayani tujuan-tujuan orisinalnya hanya dengan cara memerangi semua privilese, yakni Gerakan Kaum Buruh itu sendiri, mulai dipengaruhi doktrin-doktrin antikompetisi dan

terperangkap di dalam konflik mengejar privilese. Pertumbuhan monopoli belakangan ini sebagian besar merupakan akibat kolaborasi yang diperhitungkan dengan cermat antara kapital yang terorganisasi dan kaum buruh yang terorganisasi, di mana grup-grup buruh yang diuntungkan ambil bagian di dalam keuntungan-keuntungan monopoli dengan mengorbankan komunitas dan khususnya dengan mengorbankan orang-orang termiskin, orang-orang yang dipekerjakan di dalam industri-industri yang kurang terorganisasi baik, dan golongan tunakarya.

Adalah salah satu tontonan tersedih dalam zaman kita ketika kita melihat suatu gerakan demokratis besar mendukung kebijakan yang pasti bermuara pada kehancuran demokrasi dan yang sementara itu hanya menguntungkan suatu minoritas dari massa yang mendukungnya. Namun dukungan dari sayap kiri terhadap kecenderungan menuju monopoli inilah yang membuat kecenderungan itu sangat tak tertahankan dan prospek masa depan menjadi sangat gelap. Selama Gerakan Kaum Buruh terus membantu menghancurkan satu-satunya tatanan yang di dalamnya setidaknya kemerdekaan dan kebebasan dalam ukuran tertentu telah diperoleh bagi setiap pekerja, maka sesungguhnya hanya ada sedikit harapan bagi masa depan. Para pemimpin kaum buruh yang pada masa kini menyatakan dengan sangat keras bahwa mereka telah “sekali untuk selamanya menolak sistem kompetitif yang tak waras itu”¹² sebetulnya sedang memproklamasikan berakhirnya kebebasan setiap individu. Tak ada kemungkinan lain, selain entah tatanan yang diatur oleh disiplin impersonal pasar, atau tatanan yang diarahkan oleh kehendak sedikit orang; dan orang-orang yang berusaha keras menghancurkan tatanan yang pertama sedang, sadar atau tak

12 Prof. H. J. Laski, dalam pidatonya pada Konferensi Tahunan Partai Buruh yang ke-41, London, 26 Mei 1942 (*Report*, hlm. 111). Patut dicatat bahwa menurut Prof. Laski, adalah “sistem kompetitif gila ini yang mendatangkan kemiskinan kepada semua orang, dan perang merupakan akibat dari kemiskinan itu”—suatu penafsiran yang aneh terhadap sejarah 150 tahun terakhir.

sadar, membantu menciptakan tatanan yang kedua. Meskipun beberapa pekerja mungkin akan makan dengan lebih baik, dan tak diragukan lagi semua orang akan berpakaian lebih seragam di dalam tatanan yang baru itu, bolehlah diragukan apakah mayoritas pekerja Inggris akan akhirnya berterima kasih kepada kalangan cendekiawan di antara para pemimpin mereka yang telah memperkenalkan mereka kepada suatu doktrin sosialis yang membahayakan kebebasan pribadi mereka.

Bagi siapa pun yang mengenal sejarah negeri-negeri Kontinental besar dalam 25 tahun terakhir, studi terhadap program mutakhir Partai Buruh, yang kini bertekad menciptakan “masyarakat terencana”, adalah pengalaman yang paling membuat tawar hati. Terhadap “upaya apa pun untuk memulihkan Britania tradisional”, ada suatu sistem yang melawannya, yang, bukan hanya dalam garis besar umumnya, melainkan juga dalam perincian dan bahkan dalam susunan kalimatnya, tidak dapat dibedakan dari mimpi-mimpi sosialis yang menguasai diskusi-diskusi di Jerman pada 25 tahun lalu. Bukan hanya tuntutan-tuntutan, seperti tuntutan resolusi itu, yang diadopsi berdasarkan usulan Prof. Laski, yang mengharuskan dalam waktu damai dipertahankannya “langkah-langkah pengontrolan pemerintah yang diperlukan untuk memobilisasi sumber-sumber daya nasional pada waktu perang”, tetapi juga semua semboyan yang khas seperti “ekonomi berimbang” yang kini Prof. Laski tuntut dijalankan Britania Raya, atau “konsumsi komunitas”, yang menjadi arah dan tujuan semua produksi, yang harus dikendalikan secara terpusat, semuanya diambil alih bulat-bulat dari ideologi Jerman. Dua puluh lima tahun lalu mungkin masih ada dalih untuk mempertahankan kepercayaan yang naif “bahwa masyarakat yang terencana dapat menjadi suatu masyarakat yang jauh lebih bebas ketimbang tatanan *laissez-faire* kompetitif yang akan digantikannya.”¹³ Tetapi menemukan sekali lagi bahwa

13 *The Old World and the New Society*, Laporan Interim dari Eksekutif Nasional Partai Buruh Britania tentang Masalah-Masalah Rekonstruksi, hlm. 12 dan 16.

kepercayaan ini tetap dianut setelah orang memiliki pengalaman selama 25 tahun dan setelah orang memeriksa kembali kepercayaan-kepercayaan lama yang disorot oleh pengalaman itu, dan pada waktu kita sedang memerangi berbagai akibat dari doktrin-doktrin itu sendiri, adalah suatu kenyataan tragis yang tak dapat diungkap kata-kata. Ihwal bahwa partai besar yang dalam Parlemen dan opini publik telah pada dasarnya mengambil tempat partai-partai progresif masa lampau harus bersekutu dengan apa yang, jika ditinjau dari semua perkembangan di masa lampau, harus dipandang sebagai gerakan reaksioner, adalah suatu perubahan yang menentukan yang telah berlangsung dalam zaman kita dan merupakan sumber bahaya maut bagi segala sesuatu yang seharusnya dihargai seorang liberal. Ihwal bahwa kemajuan-kemajuan di masa lampau terancam oleh kekuatan-kekuatan tradisional sayap kanan adalah fenomena segala zaman yang tidak perlu membuat kita resah. Tetapi jika tempat oposisi, baik dalam diskusi publik maupun dalam Parlemen, selamanya dimonopoli oleh suatu partai reaksioner kedua, maka sesungguhnya tidak akan ada lagi harapan yang tertinggal.

BAB 14

KONDISI-KONDISI MATERIAL DAN TUJUAN-TUJUAN IDEAL

Apakah adil atau masuk akal, apabila kebanyakan suara yang menentang tujuan utama pemerintah mengalahkan suara lebih sedikit orang yang ingin memiliki kebebasan?

Tak diragukan lagi, akan lebih adil, jika yang terjadi adalah, bahwa orang yang jumlahnya lebih sedikit berhasil membujuk orang yang jumlahnya lebih besar agar setuju mempertahankan kemerdekaan mereka bersama, hal yang tidak akan merugikan mereka semua, daripada kalau orang yang jumlahnya lebih besar, untuk memuaskan nilai-nilai mereka yang rendah, berhasil membujuk orang yang jumlahnya lebih sedikit untuk bersama-sama menjadi budak, hal yang jelas menyengsarakan mereka semua. Orang yang mencari hanya kemerdekaan mereka sendiri yang adil, selalu memiliki hak untuk mendapatkannya; dan janganlah hendaknya terlalu banyak suara yang, ketika sedang berkuasa, menentang kemerdekaan.

John Milton

GENERASI kita suka memuji diri sendiri bahwa mereka kurang menghargai pertimbangan ekonomi ketimbang orangtua atau kakek nenek mereka. Slogan “Berakhirnya Manusia Ekonomi” hampir pasti akan menjadi salah satu mitos yang mendominasi zaman kita. Sebelum kita menerima klaim itu, atau memandang perubahan ini sebagai sesuatu yang patut dipuji, kita

harus sedikit lebih jauh menyelidiki sejauh mana klaim itu benar. Ketika kita mempertimbangkan klaim-klaim untuk rekonstruksi sosial yang paling kuat, maka tampaklah bahwa klaim-klaim itu hampir semuanya bersifat ekonomi: telah kita lihat bahwa “penafsiran kembali dalam terminologi-terminologi ekonomi” atas ideal-ideal politik masa lampau, mengenai kemerdekaan, kesetaraan, dan ketahanan atau keterjaminan ekonomi, adalah salah satu tuntutan utama kalangan tertentu yang pada waktu yang sama memproklamasikan tamatnya manusia ekonomi. Juga tidak ada keraguan bahwa di dalam kepercayaan dan aspirasi mereka, orang pada masa kini lebih daripada sebelumnya dikendalikan oleh doktrin-doktrin ekonomi, oleh kepercayaan yang dibangun dengan hati-hati terhadap irasionalitas sistem ekonomi kita, oleh pernyataan-pernyataan yang salah mengenai “keberlimpahan potensial”, oleh teori-teori gadungan mengenai tren yang niscaya menuju monopoli, dan oleh kesan yang diciptakan oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang dibesar-besarkan, seperti perusakan persediaan bahan-bahan mentah atau pemberangusan penemuan-penemuan baru. Berkaitan dengan semua kejadian ini, kompetisi dianggap sebagai biang keladinya, padahal semua kejadian ini persisnya tidak akan dapat terjadi jika kompetisi dijalankan, dan bisa terjadi hanya oleh monopoli dan biasanya oleh monopoli yang dibantu pemerintah.¹

Namun dalam arti yang berbeda, jelas benar bahwa generasi

1 Penghancuran yang kadang kala dilakukan atas gandum, kopi, dan sebagainya, yang sering dipakai sebagai argumen untuk melawan kompetisi, adalah contoh bagus mengenai ketidakjujuran intelektual dari banyak argumen ini. Sebab dengan sedikit berpikir saja akan kelihatan bahwa di dalam pasar kompetitif tidak ada pemilik stok barang dagangan semacam itu yang dapat memperoleh laba jika stok itu dihancurkan. Adanya dugaan kasus penindasan hak paten yang berguna lebih rumit dan tak dapat didiskusikan dengan memadai dalam sebuah catatan; tetapi kondisi-kondisi di mana akan menguntungkan jika sebuah paten dibekukan, yang *demi kepentingan sosial seharusnya digunakan*, sangat luar biasa sehingga lebih meragukan lagi apakah hal seperti ini telah terjadi dalam suatu kasus yang penting.

kita kurang ingin mendengarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi ketimbang para pendahulu mereka. Generasi kita teristimewa tidak ingin mengorbankan tuntutan mereka yang mana pun kepada apa yang disebut argumen-argumen ekonomi; mereka tidak sabar dan tidak toleran terhadap semua pembatasan yang menghalangi ambisi-ambisi mereka yang paling mendesak dan paling berkobar, dan mereka tidak ingin tunduk pada keniscayaan-keniscayaan ekonomi. Apa yang membuat generasi kita unik bukanlah pelecehan terhadap kesejahteraan ekonomi, atau kurangnya keinginan terhadap kesejahteraan ekonomi, melainkan, sebaliknya, suatu penolakan untuk mengakui adanya hambatan dari, atau konflik dengan, tujuan-tujuan lain yang dapat menjegal pemenuhan keinginan-keinginan mereka sendiri. Ekonomofobia adalah deskripsi yang lebih akurat atas sikap ini ketimbang slogan “Berakhirnya Manusia Ekonomi”, yang keliru dua kali: menyiratkan suatu perubahan dari kenyataan yang tidak pernah ada, ke arah yang tidak sedang kita tuju. Orang sedang membenci, dan sedang memberontak melawan, kekuatan-kekuatan netral yang terhadapnya pada masa lalu mereka takluk, meskipun kekuatan-kekuatan ini telah sering menggagalkan berbagai usaha individual mereka.

Pemberontakan ini adalah suatu contoh dari fenomena yang jauh lebih umum, yakni suatu keengganan baru untuk takluk pada norma atau keharusan apa pun yang dasar rasionalnya tidak orang pahami. Pemberontakan ini terasa dalam banyak bidang kehidupan, khususnya dalam bidang moral; dan seringkali dilihat sebagai sikap yang pantas dipuji. Tetapi ada bidang-bidang lain di mana keinginan untuk dapat memahami segala sesuatu ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dan di mana pada waktu yang sama suatu penolakan untuk takluk pada apa pun yang tidak dapat kita pahami akan berujung pada kehancuran peradaban kita. Meskipun adalah alamiah bahwa, sementara dunia di sekeliling kita menjadi lebih rumit, resistensi kita makin tumbuh terhadap kekuatan-kekuatan yang, tanpa kita memahaminya, terus-menerus menghambat harapan-harapan dan rencana-rencana

individual kita, justru dalam situasi-situasi inilah akan semakin kurang mungkin bagi siapa pun untuk sepenuhnya memahami kekuatan-kekuatan ini. Suatu peradaban yang kompleks seperti peradaban kita dengan sendirinya haruslah didasarkan pada penyesuaian diri setiap individu pada perubahan-perubahan yang sebab dan akibatnya tidak dapat dia pahami. Pertanyaan-pertanyaan mengapa dia harus memiliki lebih atau kurang, mengapa dia harus pindah ke pekerjaan lain, mengapa hal-hal yang dia inginkan harus menjadi semakin sulit diperoleh ketimbang hal-hal lain, akan selalu terkait dengan sejumlah besar situasi dan keadaan yang tidak akan dapat dipahami oleh pikiran satu orang tertentu; atau, bahkan lebih buruk, orang-orang yang terkena dampak situasi dan keadaan ini akan sepenuhnya menyalahkan suatu penyebab yang tampak langsung dan jelas dan tak dapat dielakkan, sementara hal-hal yang lebih rumit yang saling berhubungan, yang menentukan perubahan yang dialami mereka, tetap tersembunyi dari mereka. Bahkan si direktur suatu masyarakat yang terencana seluruhnya, jika dia ingin memberikan penjelasan yang memadai kepada setiap orang mengapa dia harus dipindahkan ke pekerjaan lain, atau mengapa gajinya harus berubah, tidak dapat sepenuhnya melakukan hal itu tanpa menjelaskan dan membenarkan seluruh perencanaannya—dan ini berarti, tentu saja, bahwa penjelasannya dapat diberikan hanya kepada segelintir orang.

Tunduknya orang pada kekuatan-kekuatan pasar yang netral di masa lalu telah memungkinkan pertumbuhan suatu peradaban yang, tanpa sikap tunduk ini, tidak dapat berkembang; melalui sikap takluk semacam inilah kita setiap hari membantu membangun sesuatu yang lebih besar ketimbang yang dapat dipahami sepenuhnya oleh siapa pun dari antara kita. Tidak jadi masalah jika orang pada zaman dulu itu tunduk karena kepercayaan-kepercayaan yang kini beberapa orang pandang sebagai takhayul, misalnya semangat kerendahan hati religius, atau penghargaan berlebihan pada ajaran-ajaran kasar para ekonom awal. Poin yang penting dan menentukan di sini adalah bahwa

jauh lebih sulit untuk secara rasional memahami keharusan untuk tunduk pada kekuatan-kekuatan yang cara kerjanya tak dapat kita ikuti secara terperinci, ketimbang bersikap tunduk karena rasa takjub dan hormat yang diilhami agama, atau bahkan yang diilhami oleh rasa hormat dan respek pada doktrin-doktrin ekonomi. Sesungguhnya kita membutuhkan jauh lebih banyak kecerdasan pada setiap orang ketimbang yang kini dimiliki siapa pun, jika kita mau sekadar mempertahankan peradaban kita yang kompleks tanpa seorang pun harus mengerjakan hal-hal yang kepentingannya tidak dia pahami. Penolakan untuk tunduk pada kekuatan-kekuatan yang entah tidak kita pahami atau tak dapat kita akui sebagai pilihan-pilihan sadar seorang makhluk cerdas, adalah produk suatu rasionalisme yang tak lengkap dan karenanya keliru. Tidak lengkap karena rasionalisme semacam ini gagal memahami bahwa koordinasi beranekaragam usaha perorangan di dalam masyarakat yang kompleks harus memperhitungkan fakta-fakta yang tidak dapat disurvei secara lengkap oleh individu mana pun. Dan rasionalisme ini gagal melihat bahwa, kecuali masyarakat yang kompleks ini dibinasakan, satu-satunya pilihan lain dari sikap takluk kepada kekuatan-kekuatan pasar yang netral dan tampak irasional adalah sikap takluk kepada kekuasaan orang lain yang sama-sama tak terkontrol dan karenanya sewenang-wenang. Dalam rasa terburu-burunya untuk lepas dari berbagai kungkungan yang menjengkelkan yang kini dia rasakan, orang tidak menyadari bahwa berbagai kungkungan otoritarian baru yang pasti akan dengan sengaja dikenakan kepadanya sebagai pengganti berbagai keterkungkungan lama bahkan akan lebih menyakitkan.

Orang-orang yang berpendapat bahwa kita telah luar biasa berhasil mengendalikan kekuatan-kekuatan alam, tetapi sayangnya gagal memanfaatkan berbagai kemungkinan melakukan kerja sama sosial, memang benar sejauh pernyataan ini saja. Tetapi mereka salah ketika melangkah lebih jauh dan berargumentasi bahwa kita harus belajar mengendalikan berbagai kekuatan masyarakat dengan cara yang sama seperti kita telah berhasil

mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Ini bukan hanya jalan menuju totalitarianisme, tetapi juga jalan menuju kehancuran peradaban kita dan sudah pasti akan memblokir kemajuan di masa depan. Orang-orang yang menuntut hal ini memperlihatkan, lewat permintaan itu sendiri, bahwa mereka belum memahami sampai sejauh mana usaha-usaha mempertahankan dan memelihara apa yang sejauh ini sudah kita capai itu sendiri bergantung pada koordinasi semua usaha perorangan oleh kekuatan-kekuatan netral.



Kini kita harus kembali singkat saja ke poin yang krusial, bahwa kebebasan individu tidak dapat diperdamaikan dengan supremasi satu tujuan tertentu yang kepadanya seluruh masyarakat secara total dan permanen disubordinasikan. Satu-satunya kekecualian terhadap ketentuan bahwa suatu masyarakat merdeka tidak boleh ditaklukkan pada suatu tujuan tunggal tertentu adalah perang dan bencana-bencana lain yang berlangsung sementara, ketika pengsubordinasian hampir segala sesuatu kepada kebutuhan langsung yang mendesak adalah harga yang harus dibayar agar kita bisa mempertahankan kebebasan kita untuk jangka panjang. Ini juga menjelaskan mengapa sangat banyak frasa yang sekarang sedang populer, bahwa kita harus bertindak dalam masa damai dengan cara yang sama seperti tindakan kita pada masa perang, adalah frasa yang sangat menyesatkan: memang masuk akal jika untuk sementara orang mengorbankan kebebasan supaya membuatnya lebih terjamin di masa depan; tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan jika berkaitan dengan suatu sistem yang diusulkan sebagai pengaturan atau pengorganisasian yang permanen.

Bahwa tidak ada satu tujuan tunggal apa pun yang boleh dalam keadaan damai dibiarkan memiliki preferensi mutlak di atas semua pilihan lain, berlaku bahkan bagi satu tujuan yang, kini setiap orang setuju, berada di peringkat terdepan: mengatasi

pengangguran. Tak ada keraguan bahwa hal ini harus menjadi usaha terbesar kita; meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa tujuan semacam itu boleh dibiarkan mendominasi kita sampai segala hal lain tersingkirkan, yakni, bahwa, seperti dinyatakan ungkapan yang dangkal itu, tujuan tunggal itu harus dicapai “berapa pun biayanya”. Sebetulnya dalam bidang inilah daya pesona frasa-frasa yang populer tetapi samar, seperti “lapangan kerja untuk semua”, dapat bermuara pada tindakan-tindakan yang sangat sembrono, dan dalam bidang inilah ungkapan “ini harus dilakukan berapa pun ongkosnya” yang eksplisit, mutlak dan tak bertanggungjawab, yang diucapkan oleh seorang idealis “berkacamata kuda” yang hanya punya satu arah dan tujuan, mungkin sekali akan mendatangkan kerusakan paling besar.

Sangatlah penting bahwa kita harus mendekati dengan mata terbuka tugas yang dalam bidang ini harus kita hadapi setelah perang, dan bahwa kita harus dengan jelas menyadari apa yang kita harapkan akan tercapai. Salah satu fitur dominan dari situasi pascaperang yang langsung akan kita hadapi adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan khusus selama perang telah menarik ratusan ribu pria dan wanita ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang terspesialisasi yang selama perang telah memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang relatif tinggi. Dalam banyak kasus, setelah perang, tidak akan ada kemungkinan untuk mempekerjakan orang dalam jumlah yang sama di dalam pekerjaan-pekerjaan terspesialisasi ini. Akan ada kebutuhan mendesak untuk mentransfer sejumlah besar orang ke pekerjaan-pekerjaan lain, dan banyak dari antara mereka akan menemukan fakta bahwa pekerjaan yang dapat mereka peroleh setelah perang menghasilkan gaji yang kurang ketimbang yang mereka peroleh selama perang. Bahkan pelatihan ulang yang tentu saja harus disediakan dalam jumlah yang berlimpah tidak dapat menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. Akan ada masih banyak orang yang, jika mereka harus dibayar berdasarkan kelayakan pelayanan mereka kepada masyarakat pascaperang, akan, di bawah sistem apa pun, harus puas dengan posisi material

mereka yang lebih rendah dibandingkan dengan posisi orang-orang lain.

Jika serikat-serikat pekerja sukses melawan pengurangan gaji grup-grup tertentu tersebut, maka akan ada hanya dua alternatif terbuka: entah koersi harus digunakan, maksudnya, individu-individu tertentu akan harus diseleksi untuk dipaksa pindah ke posisi-posisi lain yang dibayar lebih sedikit, atau orang-orang yang tidak dapat lagi dipekerjakan di posisi-posisi dengan gaji yang relatif tinggi seperti yang telah mereka peroleh selama perang harus diperbolehkan untuk tetap menganggur sampai mereka mau menerima pekerjaan dengan gaji yang relatif lebih rendah. Problem ini akan muncul di dalam masyarakat sosialis tidak kurang dari masyarakat jenis lain apa pun. Dan bagian terbesar pekerja mungkin sekali kurang mau menerima untuk selamanya jumlah upah sebesar yang mereka terima sekarang, seperti halnya orang-orang yang dulu ditarik ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara khusus dibayar tinggi karena kebutuhan khusus perang enggan menerima gaji lebih rendah. Suatu masyarakat sosialis tentu saja akan menggunakan koersi dalam posisi ini. Poin yang relevan untuk kita adalah bahwa jika kita bertekad untuk tidak membiarkan pengangguran, apa pun harga yang harus dibayar, dan tidak ingin memakai koersi, kita akan terdorong melakukan segala jenis tindakan yang nekad. Tak ada satu pun dari tindakan-tindakan itu yang dapat mendatangkan kelegaan dan pembebasan jangka panjang, dan semuanya akan dengan serius menghambat dan mengganggu pemakaian paling produktif atas sumber-sumber daya kita. Harus secara khusus dicatat bahwa kebijakan moneter tidak dapat menyediakan solusi nyata terhadap kesulitan ini kecuali melalui inflasi yang umum dan tinggi, yang cukup untuk menaikkan semua gaji dan harga relatif ke tingkat gaji dan harga yang tidak dapat direndahkan lagi, dan bahwa hal ini pun akan mendatangkan akibat yang diinginkan hanya dengan memberlakukan, secara tersembunyi dan di bawah tangan, pengurangan upah real yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun, menaikkan semua gaji dan penghasilan

lain sampai ke jumlah yang cukup untuk menyesuaikan posisi kelompok yang sedang dibahas akan memerlukan peningkatan inflasi dalam skala yang besarnya sedemikian rupa sehingga gangguan-gangguan, kesukaran-kesukaran, dan ketidakadilan yang ditimbulkan inflasi ini akan jauh lebih besar ketimbang masalah yang hendak diselesaikan.

Problem ini, yang akan terjadi sangat parah setelah perang, adalah problem yang akan selalu ada bersama kita selama sistem ekonomi harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terus-menerus. Akan selalu ada kemungkinan menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah maksimum dalam jangka pendek, yang dapat dicapai melalui pemberian pekerjaan kepada semua orang jika mereka memerlukannya, dan yang dapat dicapai melalui ekspansi moneter. Tetapi bukan saja jumlah maksimum ini hanya dapat dipertahankan semata-mata lewat ekspansi inflasi yang makin tinggi, yang juga mengakibatkan terhambatnya redistribusi buruh antar-industri yang harus terjadi karena situasi dan kondisi yang berubah, dan yang, selama para pekerja bebas memilih pekerjaan mereka, akan selalu terjadi dengan sedikit penundaan dan karenanya menimbulkan pengangguran: untuk selalu mempertahankan jumlah maksimum lapangan pekerjaan yang dicapai melalui sarana moneter, adalah kebijakan yang pada akhirnya pasti akan menggagalkan tujuan-tujuannya sendiri. Kebijakan ini cenderung mengurangi produktivitas buruh dan karenanya dengan konstan meningkatkan proporsi populasi pekerja yang dapat dipertahankan untuk tetap bekerja pada tingkat upah yang sekarang mereka terima hanya lewat sarana-sarana artifisial.



Hanya ada keraguan kecil bahwa hikmat kebijaksanaan dalam manajemen urusan ekonomi kita setelah perang bahkan akan lebih penting ketimbang sebelum perang, dan bahwa nasib peradaban kita pada akhirnya akan bergantung pada bagaimana

kita memecahkan masalah-masalah ekonomi yang akan kita hadapi pada waktu itu. Kita mula-mula akan menjadi miskin, bahkan sangat miskin—dan masalah memperoleh kembali dan memperbaiki standar-standar hidup kita sebelumnya dapat dalam kenyataannya terbukti lebih sulit diatasi di Britania Raya ketimbang di banyak negeri lain. Jika kita bertindak dengan bijaksana maka hampir pasti bahwa lewat kerja keras dan dengan mengarahkan sebagian besar usaha kita untuk mereparasi dan memperbarui peranti-peranti industrial dan organisasi kita, kita hanya dalam beberapa tahun akan dapat kembali ke, dan bahkan melampaui, tingkat yang pernah kita capai. Tetapi hal ini mengasumsikan bahwa kita sekarang ini akan puas mengonsumsi tidak lebih dari yang mungkin dikonsumsi tanpa membahayakan tugas merekonstruksi, bahwa tidak ada harapan yang dibesarkan yang menciptakan klaim-klaim yang tak terkontrol, yang mengharapkan lebih dari yang dapat kita hasilkan, dan bahwa kita memandang lebih penting memakai sumber-sumber daya kita sendiri dengan cara yang terbaik dan demi tujuan-tujuan yang menyumbang paling banyak bagi kesejahteraan kita ketimbang bahwa kita pokoknya harus menghabiskan semua sumber daya kita.² Mungkin tak kurang penting untuk ditegaskan adalah bahwa kita tidak boleh, melalui usaha-usaha semberono untuk mengobati kemiskinan lewat redistribusi ketimbang lewat peningkatan penghasilan kita, sangat menekan kelas-kelas besar

2 Ini mungkin tempatnya untuk menekankan bahwa, berapa pun besarnya orang berharap akan kembali ke suatu ekonomi bebas, hal ini tidak berarti penghapusan sebagian terbesar pembatasan di masa perang secara serentak. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendiskreditkan sistem usaha bebas lebih daripada dislokasi dan instabilitas parah, meskipun mungkin berumur singkat, yang akan ditimbulkan oleh tindakan semacam itu. Masalahnya adalah sistem ekonomi jenis apakah yang harus menjadi tujuan kita dalam proses demobilisasi, bukan apakah sistem pada masa perang harus ditransformasi menjadi pengaturan yang lebih permanen oleh kebijakan pengurangan kontrol bertahap yang dikaji dan direncanakan dengan seksama, yang mungkin akan berlangsung selama beberapa tahun.

sehingga menjadikan mereka musuh-musuh yang keras dan gigih yang melawan tatanan politik yang ada. Tidak pernah boleh dilupakan bahwa satu faktor yang penting dan menentukan dalam bangkitnya totalitarianisme di Kontinen (Eropa), yang sejauh ini tidak ada di negeri ini, adalah adanya kelas menengah besar yang belakangan ini telah kehilangan hak milik mereka.

Kalau kita berharap dapat mengelakkan nasib yang sedang mengancam kita, maka kita sesungguhnya harus lebih banyak bergantung pada prospek bahwa kita dapat melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang cepat yang, betapapun rendah tingkatnya ketika kita memulainya, akan terus berkesinambungan membawa kita ke peringkat yang lebih tinggi; dan syarat utama untuk mencapai kemajuan semacam itu adalah bahwa kita semua harus siap untuk dengan cepat mengadaptasikan diri kita dengan dunia yang telah sangat banyak berubah, bahwa tak ada pemihakan apa pun terhadap standar yang biasa dari grup-grup tertentu dibiarkan menghambat pengadaptasian ini, dan bahwa kita sekali lagi belajar untuk mengarahkan semua sumber daya kita ke setiap tempat yang memungkinkan sumber-sumber daya itu menyumbang paling banyak untuk membuat kita semua lebih kaya. Penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan kalau kita mau memulihkan dan melampaui standar-standar kita sebelumnya akan lebih besar ketimbang penyesuaian-penyesuaian yang serupa mana pun yang telah kita buat di masa lampau; dan hanya jika setiap orang dari kita sudah siap secara individu untuk menaati keharusan-keharusan melakukan penyesuaian kembali ini, kita akan dapat melewati periode sulit sebagai orang-orang bebas-merdeka yang dapat memilih jalan hidup kita sendiri. Hendaklah suatu minimum yang seragam dijamin untuk setiap orang; tetapi marilah kita pada waktu yang sama mengakui bahwa dengan jaminan minimum dasar ini semua klaim bagi ketahanan istimewa untuk kelas-kelas tertentu harus dilepaskan, bahwa semua dalih juga harus lenyap, dalih yang memperbolehkan kelompok-kelompok untuk menyingkirkan para pendatang baru sehingga tidak bisa ambil bagian di dalam kemakmuran relatif

mereka, demi mempertahankan standar khusus mereka sendiri.

Mungkin terdengar agung dan mulia jika orang mengatakan: Persetan ekonomi, marilah kita bangun suatu dunia yang layak!—tetapi, faktanya, perkataan ini sungguh-sungguh tak bertanggungjawab. Dengan dunia kita sebagaimana adanya, dengan setiap orang meyakini bahwa kondisi-kondisi material di sana atau di sini harus diperbaiki, maka kesempatan kita satu-satunya untuk membangun dunia yang layak adalah bahwa kita harus terus memperbaiki dan meningkatkan peringkat kekayaan pada umumnya. Satu hal yang tidak dapat dipikul demokrasi modern tanpa menghancurkan dirinya adalah keharusan untuk menurunkan dalam jumlah besar standar-standar kehidupan dalam waktu damai atau bahkan memperpanjang kemandekan atau stagnasi kondisi-kondisi ekonomi.



Orang yang mengakui bahwa tren-tren politik pada masa kini merupakan ancaman serius bagi prospek ekonomi kita, dan melalui efek-efek ekonominya membahayakan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, toh masih condong menipu diri mereka sendiri dengan membayangkan bahwa kita sedang membuat pengorbanan material demi tujuan ideal. Namun sangat meragukan apakah pendekatan menuju kolektivisme yang telah dipakai selama 50 tahun telah berhasil menaikkan standar-standar moral kita, atau apakah perubahan yang sedang terjadi tidak malah bergerak ke arah yang berlawanan. Meskipun kita terbiasa membanggakan diri kita sendiri berkaitan dengan kesadaran nurani sosial kita yang lebih sensitif, namun sama sekali tidaklah jelas apakah memang benar demikian bila kita memperhatikan sikap dan kelakuan kita secara perorangan. Pada sisi negatifnya, dalam kemarahannya terhadap ketidakadilan dan ketimpangan tatanan sosial yang ada, generasi kita mungkin sekali melampaui kebanyakan para pendahulu mereka. Tetapi efek gerakan itu pada standar-standar positif kita dalam bidang-bidang moral

yang sebenarnya, pada sikap dan kelakuan perorangan, dan pada kesungguhan kita untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral berhadapan dengan pragmatisme dan tuntutan mesin sosial adalah suatu perkara yang sangat berbeda.

Isu-isu dalam bidang ini telah menjadi sangat rancu sehingga kita perlu kembali ke hal-hal yang fundamental. Apa yang nyaris dilupakan oleh generasi kita bukanlah semata-mata bahwa nilai-nilai moral haruslah menjadi fenomena sikap dan kelakuan perorangan, tetapi juga bahwa nilai-nilai ini dapat ada hanya di dalam wilayah di mana si individu bebas untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri dan terpanggil untuk dengan sukarela mengorbankan keuntungan personalnya demi menjalankan norma moral. Di luar wilayah tanggungjawab individu, tidak ada kebaikan atau pun keburukan, tidak ada peluang bagi nilai moral atau pun kesempatan untuk membuktikan keyakinan seseorang melalui pengorbanan keinginan-keinginannya demi sesuatu yang dia pikir benar. Hanya apabila kita sendiri bertanggungjawab atas kepentingan-kepentingan kita sendiri dan bebas mengorbankan kepentingan-kepentingan itu, maka keputusan kita memiliki nilai moral. Kita tidak berhak bersikap tidak egois sementara orang lainlah yang harus berkorban untuk kita, dan juga tak ada nilai dan jasa apa pun jika kita tidak egois hanya karena kita tak memiliki pilihan lain. Anggota-anggota suatu masyarakat yang dalam segala hal *dipaksa* mengerjakan hal-hal yang baik tidak berhak dipuji. Seperti Milton katakan, “Jika setiap tindakan yang baik atau yang jahat di dalam diri seseorang yang sudah matang dilakukan karena kewajiban beramal dan perintah dan pemaksaan, maka apakah makna kebajikan selain nama belaka; lantas pujian apakah yang layak bagi perbuatan baik, imbalan apakah yang patut bagi orang yang hidup sederhana, adil, atau pandai menahan diri?”

Kebebasan untuk menata sikap dan kelakuan kita sendiri di dalam wilayah di mana kondisi-kondisi material memaksakan suatu pilihan kepada kita, dan tanggungjawab untuk mengorganisasi kehidupan kita menurut kesadaran nurani kita

sendiri, adalah ruang satu-satunya yang di dalamnya kesadaran moral tumbuh dan yang di dalamnya nilai-nilai moral setiap hari diciptakan kembali dalam bentuk keputusan bebas setiap individu. Tanggungjawab, bukan kepada seorang atasan, melainkan kepada kesadaran nurani diri sendiri, kesadaran akan suatu kewajiban yang tidak dipaksakan, keharusan untuk memutuskan mana dari hal-hal yang orang hargai yang harus dikorbankan demi orang-orang lain, dan untuk memikul akibat-akibat keputusan sendiri, semuanya adalah hakikat sebenarnya dari nilai-nilai moral apa pun yang sungguh-sungguh layak disebut sebagai nilai-nilai moral.

Bahwa di dalam wilayah sikap dan kelakuan individu ini efek kolektivisme bersifat hampir seluruhnya destruktif, adalah sesuatu yang niscaya dan tak dapat disangkal. Suatu gerakan yang janji utamanya adalah pembebasan dari tanggungjawab³ mau tidak mau akan menimbulkan akibat-akibat antimoral, beta-papun tinggi ideal-ideal yang telah melahirkannya. Dapatkah diragukan bahwa merasa diri sendiri wajib untuk menyembuhkan

3 Ini semakin jelas terungkap ketika sosialisme mendekati totalitarianisme, dan di negeri ini paling eksplisit dinyatakan dalam program sosialisme Inggris dalam bentuk yang paling mutakhir dan paling totalitarian, yakni gerakan "*Common-Wealth*" Sir Richard Acland. Fitur pokok dari orde baru yang dia janjikan adalah bahwa di dalamnya komunitas akan "mengatakan kepada si individu 'Janganlah kamu repot dengan urusan bagaimana mendapatkan penghasilanmu sendiri.'" Sebagai akibatnya, tentu saja, "haruslah komunitas secara keseluruhan yang memutuskan apakah seseorang akan dipekerjakan dengan memakai sumber-sumber daya kita atukah tidak, dan bagaimana dan kapan dan dengan cara bagaimana dia akan bekerja", dan bahwa komunitas akan harus "menyelenggarakan kamp bagi para pembolos di dalam kondisi-kondisi yang sangat dapat ditolerir." Apakah mengherankan bahwa si penulis menganggap bahwa Hitler "tanpa diduga-duga telah menemukan (atau perlu menggunakan) satu bagian kecil, atau mungkin harus orang katakan satu aspek tertentu, dari apa yang pada akhirnya akan diharuskan bagi umat manusia"? (Sir Richard Acland, Bt., *The Forward March*, 1941, hlm. 127, 126, 135, dan 32).

ketimpangan dan ketidakadilan, apabila kekuatan individu kita mengizinkan, telah diperlemah ketimbang diperkuat, bahwa baik keinginan untuk memikul tanggungjawab maupun kesadaran bahwa adalah kewajiban individual kita sendiri untuk mengetahui bagaimana memilih telah secara sangat jelas diperlemah? Ada perbedaan yang jelas antara tuntutan agar kondisi yang dibutuhkan dihasilkan oleh penguasa atau bahkan keinginan untuk tunduk asalkan setiap orang lain dipaksa melakukan hal yang sama, dan kesiapan untuk melakukan apa yang orang pikir benar dengan mengorbankan keinginan-keinginannya sendiri dan mungkin di hadapan opini publik yang bermusuhan. Banyak benarnya bahwa kita memang telah menjadi lebih toleran terhadap kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan tertentu, dan jauh lebih tidak peduli terhadap ketimpangan dalam kasus-kasus tertentu, sebab kita telah mematok penglihatan kita pada suatu sistem yang sama sekali berbeda, yang di dalamnya negara akan membereskan segala sesuatu. Sebagaimana sudah dikatakan, bahkan semangat untuk bertindak secara kolektif adalah suatu cara bagi kita sekarang ini, tanpa ragu, untuk secara kolektif memanjakan sikap egoisme yang kita sebagai individu-individu telah sedikit belajar untuk mengendalikannya.

Adalah benar bahwa kebajikan-kebajikan yang kurang dihargai dan dipraktikkan sekarang ini—kemerdekaan, kemandirian, keinginan untuk memikul risiko, kesiapan untuk membela dan mendukung keyakinan sendiri di hadapan mayoritas, dan keinginan untuk bekerja sama secara sukarela dengan sesama—pada dasarnya adalah kebajikan-kebajikan yang menjadi tempat bergantung berfungsinya masyarakat individualis. Kolektivisme tidak memiliki hal apa pun untuk menggantikan nilai-nilai yang utama ini, dan sejauh yang telah terjadi, nilai-nilai kebajikan yang telah dihancurkan kolektivisme hanya digantikan oleh kekosongan yang tak diisi oleh apa pun selain tuntutan bagi ketaatan dan pemaksaan atas setiap individu untuk melakukan apa saja yang secara kolektif dianggap baik. Pemilihan wakil-wakil secara periodik, yang di dalamnya peran pilihan moral

individu cenderung makin lama makin berkurang, bukanlah suatu peristiwa yang dapat dipakai untuk menguji nilai-nilai moralnya, atau di mana dia dengan konstan harus menegaskan kembali dan membuktikan prioritas nilai-nilainya, dan harus mempersaksikan ketulusan profesinya melalui pengorbanan nilai-nilai yang dia anggap lebih rendah demi nilai-nilai yang dia anggap lebih tinggi.

Sementara norma-norma sikap dan kelakuan yang dikembangkan individu-individu merupakan sumber standar-standar moral yang menjadi dasar tindakan politik kolektif, sesungguhnya akan mengejutkan jika menurunnya standar-standar sikap dan kelakuan individu disertai dengan peningkatan standar-standar tindakan sosial. Bahwa ada perubahan-perubahan besar sudahlah jelas. Setiap generasi, tentu saja, menempatkan beberapa nilai lebih tinggi dan beberapa lagi lebih rendah dibandingkan para pendahulunya. Namun, tujuan-tujuan manakah yang kini berada di tempat yang lebih rendah, dan nilai-nilai manakah yang, kini kita diperingatkan, bisa jadi harus disingkirkan jika nilai-nilai ini berkonflik dengan nilai-nilai lain? Nilai-nilai tipe apakah yang berperan kurang penting di dalam gambaran tentang masa depan yang ditawarkan kepada kita oleh para penulis dan pembicara populer dibandingkan peran nilai-nilai yang ada dalam mimpi-mimpi dan harapan-harapan nenek moyang kita? Sudah pasti nilai-nilai yang peringkatnya lebih rendah itu bukanlah kenyamanan material, sudah pasti juga bukan kenaikan standar penghidupan kita atau kepastian mengenai suatu status tertentu di dalam masyarakat. Adakah seorang penulis atau pembicara populer yang berani menyatakan kepada orang banyak bahwa mereka bisa jadi harus mengorbankan prospek-prospek material mereka demi pengembangan suatu tujuan ideal? Bukankah faktanya berlawanan sama sekali? Bukankah hal-hal yang semakin sering diajarkan kepada kita untuk kita pandang sebagai “ilusi-ilusi abad ke-19” adalah semua nilai moral: kebebasan dan kemerdekaan, kebenaran dan kejujuran intelektual, kedamaian dan demokrasi, dan respek terhadap individu sebagai manusia

ketimbang hanya sebagai anggota suatu grup terorganisasi? Lalu apakah tonggak-tonggak permanen yang dipandang sebagai batas-batas yang suci, yang tidak berani disentuh oleh para pembaharu, sebab tonggak-tonggak itu diperlakukan sebagai batas-batas yang tidak bisa dipindahkan yang harus dihormati di dalam setiap perencanaan masa depan? Batas-batas itu sekarang bukan lagi kebebasan individu, kebebasannya untuk bergerak, dan hampir-hampir bukan kebebasan berbicara. Batas-batas itu sekarang adalah standar-standar terproteksi kelompok ini atau kelompok itu, yakni “hak” mereka untuk menyingkirkan orang-orang lain sehingga tidak bisa menyediakan apa yang diperlukan sesama mereka. Diskriminasi di antara anggota dan non-anggota grup-grup tertutup, apalagi di antara warga negeri-negeri yang berlainan, semakin diterima sebagai sesuatu yang sewajarnya. Ketidakadilan yang dialami individu-individu karena tindakan pemerintah yang dilakukan demi kepentingan suatu kelompok diabaikan dengan sikap acuh tak acuh yang hampir tak dapat dibedakan dari sikap tak berperasaan; dan pelanggaran-pelanggaran terberat terhadap hak-hak individu yang paling dasariah, seperti yang terjadi di dalam pemindahan paksa penduduk, semakin sering dibenarkan bahkan oleh orang-orang yang katanya liberal. Semua ini jelas sekali menunjukkan bahwa kesadaran moral kita telah dibuat tumpul alih-alih dipertajam. Ketika kita diingatkan, sebagaimana semakin sering terjadi, bahwa orang tidak dapat membuat telur dadar tanpa memecahkan telur, masalahnya adalah telur-telur yang dipecahkan itu hampir semuanya adalah dari jenis yang satu atau dua generasi lalu dipandang sebagai basis-basis penting kehidupan yang beradab. Dan kekejaman-kekejaman apa yang telah dilakukan para penguasa, yang tidak langsung dimaafkan oleh banyak orang yang disebut sebagai orang “liberal”, yang bersimpati terhadap prinsip-prinsip yang diyakini dan dipegang kalangan penguasa itu?

Ada satu segi dari perubahan dalam nilai-nilai moral yang ditimbulkan oleh perkembangan kolektivisme yang pada saat ini penting dipikirkan. Ini adalah bahwa nilai-nilai kebajikan yang makin kurang dihormati dan yang karenanya menjadi makin jarang, adalah justru nilai-nilai kebajikan yang sewajarnya menjadi kebanggaan dan ciri menonjol orang Britania sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki bangsa Britania, dalam jumlah yang lebih banyak ketimbang yang dimiliki kebanyakan bangsa lain, kecuali hanya sedikit bangsa yang lebih kecil seperti Swiss dan Belanda, adalah ketidakbergantungan dan kemandirian, inisiatif individu dan tanggungjawab lokal, ketergantungan yang sukses pada aktivitas sukarela, sikap tak mencampuri urusan sesama dan toleransi terhadap yang berbeda dan yang aneh, respek terhadap adat istiadat dan tradisi, dan sikap curiga yang sehat terhadap kekuasaan dan otoritas. Kekuatan Britania, watak Britania, dan prestasi-prestasi Britania dihasilkan terutama dari pemupukan spontanitas. Tetapi hampir semua tradisi dan institusi yang di dalamnya puncak moral Britania telah mewujudkan secara paling khas, dan yang pada gilirannya telah membentuk karakter bangsa dan seluruh suasana moral Inggris, adalah tradisi dan institusi yang secara bertahap sedang dihancurkan oleh perkembangan kolektivisme dan tendensi-tendensi sentralistiknya yang inheren.

Latarbelakang asing kadang kala membantu jika orang mau melihat lebih jelas situasi dan kondisi bagaimana yang melahirirkan berbagai keunggulan khusus suasana moral suatu bangsa. Dan jika seseorang yang, apa pun yang mungkin dikatakan hukum, harus selamanya tetap menjadi seorang asing, dizinkan untuk mengatakannya, maka adalah salah satu kejadian yang paling mematahkan semangat dalam zaman kita bahwa kita melihat sampai seberapa jauh pelecehan telah dilakukan di Inggris sendiri terhadap hal-hal yang paling mulia yang telah Inggris berikan kepada dunia. Orang Inggris hampir tidak tahu sampai sebatas mana mereka berbeda dari kebanyakan orang lain dalam hal bahwa mereka semua, apa pun partainya, memegang kurang lebih ide-ide yang dalam bentuknya yang paling jelas

dikenal sebagai liberalisme. Dibandingkan dengan kebanyakan bangsa lain, hanya 20 tahun lalu hampir semua orang Inggris adalah liberal, betapapun bedanya mereka dari liberalisme partai. Dan bahkan pada masa kini seorang konservatif atau sosialis Inggris, tidak kurang dari orang liberal, jika berpergian keluar negeri, meskipun dia dapat menemukan ide-ide dan tulisan-tulisan Carlyle atau Disraeli, pasangan ekonom Webb atau H. G. Wells, luar biasa populer di dalam lingkungan-lingkungan yang memiliki hanya sedikit persamaan dengannya, di antara grup-grup Nazi dan grup-grup totalitarian lain, jika dia menemukan suatu lingkup kecil intelektual di mana tradisi Macaulay dan Gladstone, J. S. Mill atau John Morley masih hidup, akan menemukan sahabat-sahabat yang “berbicara dalam bahasa yang sama” seperti dirinya—betapapun dia sendiri mungkin berbeda banyak dari ideal-ideal yang secara khusus didukung orang-orang ini.

Tidak ada tempat lain mana pun di mana kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai tertentu peradaban Britania lebih kentara, tidak ada tempat lain mana pun di mana terdapat efek yang lebih melumpuhkan pengejaran tujuan agung kita yang paling langsung, selain di dalam inefektivitas yang memprihatinkan dari kebanyakan propaganda Britania. Syarat pertama bagi keberhasilan propaganda yang diarahkan ke bangsa lain adalah pengenalan dan pengakuan yang memuaskan atas nilai-nilai yang khas dan ciri-ciri yang unik, yang membuat negeri yang sedang mencoba menerapkannya dikenal bangsa-bangsa lain. Penyebab utama inefektivitas propaganda Britania adalah bahwa orang-orang yang mengarahkannya tampak telah kehilangan kepercayaan mereka sendiri terhadap nilai-nilai khas peradaban Inggris atau sama sekali tidak mengetahui poin-poin pokok yang membuat nilai-nilai itu berbeda dari yang dianut bangsa lain. Kalangan cendekiawan kiri sesungguhnya telah sangat lama menyembah dewa-dewa asing sehingga mereka tampaknya nyaris tak mampu lagi melihat kebaikan apa pun di dalam lembaga-lembaga dan tradisi-tradisi Inggris yang khas. Bahwa

nilai-nilai moral yang kebanyakan mereka sendiri banggakan terutama adalah produk lembaga-lembaga yang terang-terangan mau mereka hancurkan, tentu tidaklah mau diakui oleh orang-orang sosialis ini. Dan sikap mental semacam ini celaknya tidak terbatas hanya di kalangan sosialis yang mengaku sosialis. Meskipun orang harus berharap bahwa hal ini tidak berlaku bagi orang Inggris terpelajar yang kurang vokal tapi yang jumlahnya banyak, namun jika orang menilai berdasarkan ide-ide yang terekspresikan di dalam propaganda dan diskusi politik masa kini, maka orang Inggris yang bukan hanya “berbicara dalam bahasa yang Shakespeare pakai”, melainkan juga yang “memegang iman dan nilai-nilai moral yang dipegang Milton”, tampak telah hampir lenyap.⁴

Tetapi mempercayai bahwa jenis propaganda yang dihasilkan sikap mental semacam ini dapat mendatangkan dampak yang diinginkan pada musuh-musuh kita dan khususnya pada orang-orang Jerman, adalah suatu kesalahan fatal. Orang Jerman mengenal negeri ini, tidak terlalu baik, mungkin, namun cukup untuk mengetahui apa nilai-nilai tradisional khas kehidupan Britania, dan apa yang selama dua atau tiga generasi lampau telah makin memisahkan pikiran-pikiran kedua negeri ini. Kalau kita mau meyakinkan mereka, bukan hanya mengenai ketulusan hati kita, melainkan juga bahwa kita bisa menawarkan alternatif yang nyata terhadap cara-cara yang telah mereka jalani, caranya bukanlah lewat sikap mengalah terhadap sistem pemikiran mereka. Kita tidak akan memperdaya mereka melalui

4 Meskipun subjek bab ini telah memuat lebih dari satu rujukan ke Milton, sulit untuk menahan godaan untuk menambah di sini satu kutipan lagi yang sangat terkenal, meskipun, kelihatannya, sekarang ini tidak seorang Inggris pun akan berani mengutipnya kecuali seorang asing: “Janganlah bangsa Inggris lupa mereka pernah menjadi teladan bagaimana bangsa-bangsa lain harus hidup.” Mungkin penting untuk dicatat bahwa generasi kita telah melihat banyak orang Amerika dan Inggris yang mengkritik Milton—dan orang pertama dari antara mereka adalah Mr. Ezra Pound, yang selama perang ini menyiarkannya dari Italia!

reproduksi yang sudah klise atas ide-ide nenek moyang mereka yang telah kita pinjam dari mereka—entah itu sosialisme-negara, “Realpolitik”⁵, perencanaan “saintifik”, atau korporatisme. Kita tidak akan bisa meyakinkan mereka dengan mengikuti mereka setengah jalan yang membawa orang ke dalam totalitarianisme. Jika orang demokratis sendiri meninggalkan ideal teragung mereka mengenai kebebasan dan kebahagiaan individu, jika mereka dengan implisit mengakui bahwa peradaban mereka tidak layak dipertahankan, dan bahwa mereka terlalu dungu sehingga mau mengikuti jalan yang telah dibukakan orang Jerman, maka sesungguhnya mereka tak memiliki apa pun untuk ditawarkan. Bagi orang Jerman, semua ini hanyalah pengakuan-pengakuan yang terlambat bahwa orang Britania telah salah dari awal sampai akhir, dan bahwa mereka sendirilah yang sedang memimpin jalan ke suatu dunia yang baru dan lebih baik, betapapun menakutkannya masa transisi sekarang ini. Orang Jerman tahu bahwa apa yang masih mereka pandang sebagai tradisi Britania dan ideal-ideal baru mereka sendiri adalah pandangan-pandangan tentang kehidupan yang secara fundamental bertentangan dan tidak dapat dipertemukan. Mereka mungkin dapat diyakinkan bahwa jalan yang telah mereka pilih salah—tetapi tak ada sesuatu pun yang akan pernah meyakinkan mereka bahwa orang Britania akan menjadi pemandu yang lebih baik pada jalan Jerman.

Sangat tidak mungkin bahwa tipe propaganda itu akan menarik orang Jerman yang pertolongannya pada akhirnya harus kita perhitungkan dalam membangun kembali Eropa karena nilai-nilai mereka paling dekat dengan nilai-nilai kita sendiri. Sebab pengalaman telah membuat mereka lebih bijak dan juga lebih sedih: mereka telah belajar bahwa maksud baik dan efisiensi organisasi sama-sama tidak dapat mempertahankan kepatutan moral di dalam suatu sistem yang di dalamnya kebebasan pribadi

5 Suatu sistem politik yang didasarkan bukan pada prinsip-prinsip moral, melainkan terutama pada situasi, kondisi dan kebutuhan aktual suatu negara atau suatu partai politik, dalam konteks setempat dan konteks global. (*penerjemah*)

dan tanggungjawab individu dihancurkan. Apa yang diinginkan semua orang Jerman dan Italia, yang telah memetik pelajaran di atas, adalah proteksi dari negara monster—bukan sistem yang besar dan rumit bagi organisasi yang berukuran raksasa, melainkan kesempatan untuk dengan damai dan dengan bebas membangun sekali lagi dunia kecilnya sendiri. Ini bukanlah karena mereka percaya bahwa diatur-atur oleh orang-orang Britania lebih baik ketimbang diatur-atur oleh orang-orang Prusia, melainkan karena mereka percaya bahwa di dalam suatu dunia di mana ideal-ideal Inggris telah menang, mereka akan kurang diatur-atur dan akan dibiarkan dalam kedamaian untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri; kepercayaan itulah yang memberi kita harapan untuk mendapat dukungan dari sebagian warga negeri-negeri musuh.

Jika kita ingin berhasil di dalam perang ideologi dan menarik ke pihak kita mereka yang bermoral baik di negeri-negeri musuh, kita pertama-tama harus mendapatkan kembali kepercayaan pada nilai-nilai tradisional yang telah didukung negeri ini di masa lalu, dan harus memiliki keberanian moral untuk membela dengan gigih ideal-ideal yang sedang diserang musuh-musuh kita. Bukan melalui apologia yang memalukan dan pernyataan sikap bahwa kita sedang mereformasi diri dengan cepat, bukan melalui penjelasan bahwa kita sedang mencari kompromi-kompromi di antara nilai-nilai Inggris tradisional dan ide-ide totalitarian baru, kita akan mendapatkan keyakinan dan dukungan orang. Hal yang bernilai dan patut diperhitungkan bukanlah perkembangan-perkembangan mutakhir yang telah kita hasilkan di dalam pranata-pranata sosial kita, yang tidak banyak artinya dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan mendasar di antara kedua cara hidup yang saling bertentangan, melainkan kepercayaan kita yang kokoh dan teguh pada tradisi-tradisi yang telah membuat negeri ini menjadi negeri orang-orang yang bebas dan jujur, toleran dan independen.

BAB 15

PROSPEK TATA INTERNASIONAL

Dari semua cara mengontrol kekuasaan demokrasi, federasi adalah yang paling efektif dan paling ramah.... Sistem federal membatasi dan mengontrol kekuasaan tertinggi dengan memecah-mecah kekuasaan dan dengan memberikan kepada pemerintah hanya hak-hak tertentu yang sudah ditetapkan. Inilah satu-satunya metode untuk mengontrol bukan saja kelompok mayoritas tetapi juga kekuasaan seluruh rakyat.

Lord Acton

TAK ada bidang lain di mana dunia sejauh ini telah membayar dengan sangat mahal karena meninggalkan liberalisme abad ke-19 selain di dalam bidang di mana tindakan menarik diri ini dimulai: hubungan internasional. Namun hanya sebagian kecil dari pelajaran yang seharusnya telah diajarkan kepada kita oleh pengalaman telah kita pelajari. Mungkin bahkan lebih dari di tempat lain mana pun, di negeri ini pandangan-pandangan mutakhir mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang dapat dipraktikkan masih merupakan sejenis pandangan yang dapat menghasilkan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang dijanjikan.

Bagian pelajaran dari masa lampau yang belum lama berlalu, yang dengan lambat dan dengan bertahap sedang diapresiasi,

adalah bahwa banyak jenis perencanaan ekonomi, yang dijalankan sendiri-sendiri pada skala nasional, dalam dampaknya yang menyeluruh, pasti merusak bahkan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi belaka, dan selain itu pasti menghasilkan pergesekan serius antarbangsa. Bahwa hampir tidak mungkin akan ada tata internasional atau perdamaian abadi selama setiap negeri bebas menjalankan tindakan apa pun yang dipikirkannya perlu dalam rangka memenuhi kepentingan langsungnya sendiri, betapa pun merusaknya bagi negeri-negeri lain, tidak perlu banyak ditekankan sekarang ini. Banyak tipe perencanaan ekonomi sesungguhnya dapat dijalankan hanya kalau otoritas perencana dapat dengan efektif menutup semua pengaruh luar; hasil dari perencanaan semacam ini dengan demikian pasti akan menimbulkan tumpukan larangan terhadap gerakan-gerakan manusia dan barang-barang.

Hal yang kurang jelas terlihat tetapi sekali-kali tidak kurang nyata adalah bahaya bagi perdamaian yang muncul dari solidaritas ekonomi yang dipupuk secara dangkal antarsemua penduduk dari suatu negeri, dan dari blok-blok baru kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan yang diciptakan oleh perencanaan dalam skala nasional. Tidaklah perlu dan juga tidaklah diinginkan bahwa batas-batas nasional harus menandakan perbedaan tajam dalam standar hidup, bahwa keanggotaan dalam suatu grup nasional harus mendatangkan hak bagi seseorang untuk mendapat sebagian kue yang sama sekali berbeda dari kue yang dibagi-bagi di antara anggota grup-grup lain. Jika sumber-sumber daya bangsa-bangsa yang berlainan diperlakukan sebagai kepemilikan-kepemilikan eksklusif bangsa-bangsa itu secara keseluruhan, jika hubungan-hubungan ekonomi internasional, alih-alih menjadi hubungan-hubungan di antara individu-individu, makin menjadi hubungan-hubungan di antara bangsa-bangsa secara keseluruhan yang diorganisasikan sebagai badan-badan perdagangan, hubungan internasional ini tak pelak lagi akan menjadi sumber friksi dan iri hati di antara bangsa-bangsa secara keseluruhan. Adalah salah satu ilusi yang paling fatal jika

orang beranggapan bahwa dengan menggantikan kompetisi untuk merebut pasar atau untuk mendapatkan bahan-bahan mentah dengan negosiasi-negosiasi di antara negara-negara atau kelompok-kelompok terorganisasi, friksi internasional akan berkurang. Ini hanya akan menggantikan apa yang hanya dapat secara metaforis disebut sebagai “perjuangan” bagi kompetisi dengan adu kekuatan, dan memindahkan persaingan-persaingan di antara individu-individu yang harus diputuskan tanpa memakai kekuatan, ke persaingan di antara negara-negara yang kuat dan bersenjata, yang tidak tunduk pada hukum yang lebih tinggi. Transaksi-transaksi ekonomi di antara badan-badan nasional yang pada waktu yang sama menjadi hakim-hakim tertinggi bagi sikap dan kelakuan mereka sendiri, yang tidak tunduk pada hukum yang lebih tinggi, dan yang wakil-wakilnya tak dapat diikat oleh pertimbangan-pertimbangan apa pun selain oleh kepentingan langsung bangsa mereka masing-masing, pasti akan bermuara pada benturan-benturan antarpemerintah.¹

Seandainya setelah kemenangan kita tidak berbuat lain selain membiarkan kecenderungan-kecenderungan yang ada sekarang ke arah ini, yang sudah sangat kasat mata sejak 1939, maka mungkin kita akan beranggapan bahwa kita telah mengalahkan Nasional-Sosialisme, namun nyatanya kita semata-mata hanya menciptakan suatu dunia yang terdiri atas banyak sosialisme nasional, yang berbeda-beda rinciannya, tetapi semuanya sama-sama totalitarian, nasionalistik, dan yang berkonflik terus-menerus satu sama lain. Jerman akan tampak sebagai pengganggu perdamaian, sebagaimana telah mereka lakukan kepada beberapa bangsa,² hanya karena mereka adalah pihak pertama yang mengambil jalan yang pada dasarnya akan diikuti oleh semua bangsa lain.

1 Mengenai semua hal ini dan mengenal poin-poin selanjutnya, yang hanya dapat disinggung dengan sangat singkat, lihat karya Prof. Lionel Robbins, *Economic Planning and International Order*, 1937, *passim*.

2 Lihat khususnya buku penting yang ditulis James Burnham, *The Managerial Revolution*, 1941.



Orang-orang yang setidaknya agak menyadari bahaya-bahaya ini biasanya menarik kesimpulan bahwa perencanaan ekonomi harus dibuat secara “internasional”, yakni, oleh suatu otoritas supranasional. Meskipun ini akan mencegah beberapa bahaya yang sudah jelas yang akan ditimbulkan oleh perencanaan dalam skala nasional, tampaknya orang-orang yang mendukung perencanaan ambisius semacam itu kurang menyadari adanya berbagai kesulitan dan bahaya yang bahkan lebih besar lagi yang lahir dari proposal-proposal mereka. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh suatu pengarah sadar atas urusan-urusan ekonomi pada skala nasional tak pelak lagi akan mewujud dalam dimensi-dimensi yang bahkan lebih besar lagi ketika hal yang sama dicoba dilaksanakan secara internasional. Konflik antara perencanaan dan kebebasan pasti akan bertambah serius ketika keserupaan standar-standar dan nilai-nilai berkurang di antara mereka yang tunduk pada suatu perencanaan yang seragam. Tidak ada banyak kesulitan dalam merencanakan kehidupan ekonomi satu keluarga, relatif hanya ada kesulitan kecil dalam komunitas yang kecil. Tetapi ketika skalanya bertambah, maka jumlah kesepakatan mengenai prioritas tujuan-tujuan pun berkurang dan keharusan untuk bergantung pada kekuatan dan pemaksaan pun bertambah. Di dalam komunitas kecil, pandangan-pandangan umum mengenai kepentingan relatif dari tugas-tugas utama, standar-standar dari nilai-nilai yang disepakati, akan ada dalam sangat banyak bidang. Tetapi jumlahnya akan menjadi makin berkurang ketika kita menebarkan jala lebih lebar lagi; dan ketika komunitas-komunitas yang memegang pandangan-pandangan yang sama berkurang jumlahnya, maka kebutuhan untuk bergantung pada kekuatan dan koersi pun meningkat.

Rakyat negeri mana pun dapat dengan mudah diyakinkan untuk berkorban supaya membantu apa yang mereka pandang sebagai industri besi “mereka” atau agrikultur “mereka”, atau supaya di dalam negeri mereka tidak seorang pun dibiarkan

tenggelam di bawah tingkat tertentu. Selama masalahnya adalah menolong orang yang kebiasaan hidup dan cara berpikirkannya sudah kita kenal, atau mengoreksi distribusi penghasilan di antara, atau memperbaiki kondisi-kondisi kerja dari, orang-orang yang dapat kita bayangkan dengan baik dan yang pandangan-pandangannya mengenai status mereka yang pantas pada dasarnya serupa dengan pandangan-pandangan kita, maka kita biasanya siap untuk berkorban seperlunya. Tetapi orang hanya perlu membayangkan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perencanaan ekonomi bagi suatu wilayah seperti Eropa Barat saja, untuk melihat bahwa basis moral untuk usaha semacam itu sama sekali tidak ada. Siapa yang dapat membayangkan adanya ideal-ideal umum mengenai keadilan distributif sedemikian rupa sehingga akan membuat seorang nelayan Norwegia setuju melepaskan prospek perbaikan ekonomi demi menolong nelayan Portugis, atau seorang buruh Belanda membayar lebih mahal bagi sepedanya untuk menolong mekanik Coventry³, atau seorang petani Prancis membayar pajak lebih tinggi demi menolong industrialisasi Italia?

Jika kebanyakan orang tidak ingin melihat kesulitannya, hal ini terutama karena mereka, sadar atau tak sadar, berasumsi bahwa merekalah yang akan membereskan persoalan-persoalan ini bagi orang-orang lain, dan karena mereka meyakini kemampuan mereka sendiri untuk melakukan hal ini dengan adil dan tak memihak. Orang Inggris, bahkan mungkin lebih dari orang lain, mulai menyadari apa artinya perencanaan-perencanaan semacam itu hanya ketika kepada mereka diberberkan bahwa mereka mungkin akan menjadi suatu minoritas di dalam otoritas perencanaan, dan bahwa jalur-jalur utama pembangunan ekonomi Britania Raya di masa depan mungkin akan ditentukan oleh suatu mayoritas bukan-Britania. Berapa banyak orangkah dalam negeri ini siap untuk tunduk pada keputusan suatu otoritas internasional, walaupun otoritas itu dibentuk secara

3 Coventry adalah sebuah kota dan sektor metropolitan di wilayah kabupaten West Midlands di Inggris. (*penerjemah*)

demokratis, yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan bahwa pembangunan industri besi Spanyol harus didahulukan ketimbang pembangunan yang serupa di Wales Selatan, bahwa industri optik lebih baik dipusatkan di Jerman dengan menyingkirkan Britania Raya, atau bahwa hanya bensin yang sepenuhnya sudah dikilang boleh diimpor ke Britania Raya dan semua industri yang terkait dengan pengilangan hanya boleh dibangun negeri-negeri produsen?

Membayangkan bahwa kehidupan ekonomi suatu wilayah yang sangat luas, yang mencakup banyak orang yang berlainan, dapat diarahkan atau direncanakan oleh prosedur demokratis memperlihatkan ketiadaan mutlak kesadaran atas masalah-masalah yang dapat dimunculkan oleh perencanaan semacam itu. Perencanaan pada skala internasional, bahkan lebih daripada pada skala nasional, sesungguhnya adalah pemerintahan dengan kekuasaan telanjang, suatu pemaksaan yang dilakukan kelompok kecil atas seluruh masyarakat, pemaksaan standar dan pekerjaan yang para perencana pikir cocok untuk semua orang lain. Yang pasti terjadi adalah *Grossraumwirtschaft*, “ekonomi yang lebih besar”, jenis ekonomi yang menjadi tujuan Jerman, yang dapat dengan sukses diwujudkan hanya oleh suatu ras penguasa, suatu *Herrenvolk*, yang dengan kejam memaksakan tujuan-tujuan dan ide-idenya pada ras-ras lain. Adalah salah jika orang memandang kebrutalan dan pencampakan semua keinginan dan ideal bangsa yang lebih kecil, yang diperlihatkan dan dilakukan Jerman, semata-mata adalah tanda kekejaman khas mereka; sesungguhnya adalah watak dari tugas yang mereka pikul yang membuat hal-hal ini tak terhindarkan. Menjalankan kendali dan pengarahan kehidupan ekonomi suatu bangsa yang memiliki ideal-ideal dan nilai-nilai yang beranekaragam, adalah memikul tanggungjawab yang memaksa orang menggunakan kekerasan, adalah mengambil posisi yang membuat orang-orang yang memiliki maksud-maksud terbaik tak dapat menghindar dari keharusan bertindak dalam cara tertentu yang bagi orang-orang

yang terkena dampaknya terlihat sangat tidak bermoral.⁴

Hal ini tetap benar walaupun kita menganggap kekuasaan yang dominan sebagai kekuasaan yang idealistik dan tidak egois seperti yang mungkin dapat kita bayangkan. Tetapi betapa kecil kemungkinannya bahwa kekuasaan itu tidak akan loba, dan betapa besar cobaan-cobaannya! Saya percaya standar-standar moralitas dan keadilan, khususnya yang berkaitan dengan urusan-urusan internasional, sama tingginya, kalau tidak lebih tinggi, di negeri ini ketimbang di negeri lain mana pun. Namun sekarang pun kita dapat mendengar orang berdebat bahwa kemenangan harus digunakan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan industri Britania menggunakan sepenuhnya peranti khusus yang telah dibangunnya selama perang, bahwa rekonstruksi Eropa harus diarahkan sedemikian rupa supaya pas dengan persyaratan-persyaratan tertentu dari industri-industri di negeri ini, dan supaya menjamin jenis-jenis pekerjaan yang setiap orang di negeri ini pandang paling cocok dengan dirinya sendiri. Hal yang mengkhawatirkan mengenai saran-saran ini bukanlah bahwa saran-saran ini telah diajukan, melainkan bahwa saran-saran ini dibuat tanpa rasa salah dan dipandang sebagai sudah seharusnya oleh orang-orang yang berhati baik yang sepenuhnya tak menyadari besarnya kejahatan moral yang tercakup di dalam penggunaan kekuasaan demi mencapai tujuan-tujuan semacam itu.⁵

-
- 4 Pengalaman di wilayah-wilayah penjajahan, yang dimiliki negeri ini dan juga negeri lain, telah dengan luas memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk perencanaan yang ringan pun, yang kita kenal sebagai pembangunan kolonial, mencakup juga, entah kita kehendaki atau tidak, pemaksaan nilai-nilai dan ideal-ideal tertentu pada orang-orang yang coba kita bantu. Sesungguhnya pengalaman inilah yang telah membuat para pakar kolonial yang memiliki wawasan paling internasional pun sangat skeptis terhadap kemungkinan dapat dijalankannya suatu administrasi wilayah-wilayah jajahan secara “internasional”.
 - 5 Jika ada yang masih gagal melihat kesulitan-kesulitan ini, atau masih menghargai kepercayaan bahwa dengan sedikit kemauan baik semua kesulitan itu dapat diatasi, akan membantu jika dia mencoba untuk



Mungkin hal yang paling kuat dalam menciptakan kepercayaan pada kemungkinan suatu kehidupan ekonomi dari banyak bangsa yang berbeda dikendalikan secara terpusat ke satu arah saja melalui sarana-sarana demokratis adalah delusi yang fatal bahwa jika keputusan-keputusan diserahkan kepada “rakyat”, komunitas kepentingan dari kelas-kelas pekerja akan segera bisa mengalahkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kelas-kelas penguasa. Ada cukup alasan untuk memperkirakan bahwa dengan adanya perencanaan dunia, benturan kepentingan-kepentingan ekonomi yang kini mencuat sehubungan dengan kebijakan ekonomi suatu bangsa mana pun akan dalam kenyataannya muncul dalam bentuk yang bahkan lebih keras sebagai benturan kepentingan-kepentingan di antara semua bangsa yang dapat diputuskan hanya dengan memakai kekuasaan. Berkaitan dengan persoalan-persoalan yang harus diatasi suatu otoritas perencana internasional, kepentingan-kepentingan dan opini-opini kelas-kelas pekerja yang terdiri atas bangsa-bangsa yang berbeda pasti akan berada dalam konflik yang sama banyaknya, sedangkan basis bersama untuk menemukan penyelesaian yang adil pun akan kurang, dibandingkan dengan basis yang tersedia sehubungan dengan kelas-kelas yang berbeda di dalam satu negeri

mengikuti implikasi-implikasi pengarahannya terpusat terhadap aktivitas ekonomi yang diterapkan pada skala global. Dapatkah ada banyak keraguan bahwa ini akan berarti kurang lebih suatu usaha sadar untuk mengamankan dominasi orang kulit putih, dan akan dengan benar dianggap demikian oleh semua ras lain? Sampai saya menemukan orang waras yang dengan serius percaya bahwa ras-ras Eropa akan dengan sukarela menyerahkan standar kehidupan mereka dan kecepatan kemajuan mereka untuk ditentukan oleh suatu Parlemen Dunia, saya tidak dapat memandang perencanaan-perencanaan semacam itu sebagai sesuatu yang masuk akal. Tetapi celaknya ini tidak mencegah langkah-langkah tertentu, yang dapat dibenarkan hanya kalau prinsip pengarahannya dunia merupakan ideal yang masuk akal, dengan serius didukung orang.

mana pun. Bagi seorang pekerja di suatu negeri miskin, tuntutan rekan sejawatnya yang lebih beruntung untuk dilindungi dari kompetisi upah rendahnya melalui undang-undang tentang upah minimum, yang dianggap melayani kepentingannya, seringkali tidak lebih dari sarana untuk merampas satu-satunya kesempatannya untuk memperbaiki kondisi-kondisinya untuk mengatasi ketidakberuntungan alamiah dengan melakukan pekerjaan berupah lebih rendah ketimbang yang diterima rekan-rekannya di negeri-negeri lain. Dan baginya, fakta bahwa dia harus menukar produk pekerjaannya selama 10 jam dengan produk pekerjaan orang lain di tempat lain yang diperlengkapi lebih baik dengan mesin-mesin selama lima jam, sebetulnya sama saja dengan “eksploitasi” yang dilakukan kalangan kapitalis mana pun.

Hampir pasti bahwa di dalam suatu sistem internasional yang terencana, bangsa-bangsa yang lebih kaya dan karenanya paling berkuasa akan menjadi objek kebencian dan kedengkian bangsa-bangsa yang lebih miskin, jauh melampaui kebencian yang terjadi di dalam suatu ekonomi bebas. Bangsa-bangsa yang lebih miskin ini akan sepenuhnya diyakinkan, entah benar atau salah, bahwa posisi mereka dapat diperbaiki jauh lebih cepat jika mereka betul-betul bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sesungguhnya, jika dipandang sebagai tugas dan kewajiban otoritas internasional untuk menciptakan keadilan distributif di antara bangsa-bangsa yang berlainan, tidaklah lebih dari suatu perkembangan yang konsisten dan niscaya dari doktrin sosialis bahwa perjuangan kelas akan menjadi suatu perjuangan di antara kelas-kelas pekerja dari negeri-negeri yang berlainan.

Sekarang ini ada banyak percakapan tidak keruan mengenai “perencanaan untuk menyetarakan standar-standar kehidupan”. Ada manfaatnya jika kita meninjau dengan sedikit lebih terperinci salah satu proposal ini untuk melihat apa persisnya yang tercakup di dalamnya. Wilayah yang pada masa kini sangat disukai para perencana kita untuk disiapkan bagi pelaksanaan perencanaan semacam itu adalah Lembah Danube dan Eropa

Tenggara. Tidak ada keraguan mengenai kebutuhan mendesak untuk membuat lebih baik kondisi-kondisi ekonomi di wilayah ini, dilihat dari pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan ekonomi dan juga demi kepentingan perdamaian Eropa di masa depan; juga tak ada keraguan bahwa hal ini dapat dicapai hanya di dalam suatu latar politik yang berbeda dari masa lampau. Tetapi ini tidak sama dengan menginginkan kehidupan ekonomi di wilayah ini diarahkan menurut suatu rencana induk tertentu, untuk memupuk pembangunan industri-industri yang berbeda menurut jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya lewat strategi yang membuat keberhasilan inisiatif lokal bergantung pada persetujuan otoritas pusat dan pada dimasukkannya pembangunan ini ke dalam perencanaannya. Orang tidak dapat, misalnya, menciptakan sejenis “Otoritas Lembah Tennessee” bagi Lembah Danube tanpa menentukan lebih dulu, untuk jangka waktu bertahun-tahun ke depan, kecepatan relatif kemajuan ras-ras yang berbeda yang menghuni wilayah ini, atau tanpa menempatkan semua aspirasi dan kehendak individual mereka di bawah kepentingan tugas ini.

Perencanaan jenis ini mau tak mau harus dimulai dengan menetapkan urutan prioritas dari klaim-klaim yang berlainan. Merencanakan penyeteraan yang seksama atas standar-standar penghidupan berarti bahwa klaim-klaim yang berbeda-beda harus diperingkat berdasarkan kegunaan dan kepatutannya, bahwa beberapa klaim harus didahulukan ketimbang klaim-klaim lain, dan bahwa klaim-klaim lain ini harus menunggu giliran—bahkan meskipun ini berarti bahwa orang yang kepentingan-kepentingannya terkena penurunan peringkat semacam itu sebetulnya yakin, bahwa jika dia betul-betul diberikan kebebasan untuk bertindak menurut cara-caranya sendiri, dia akan mampu mendapatkan bukan hanya hak-haknya yang lebih baik, tetapi juga mampu mencapai tujuannya dengan lebih cepat. Tidak ada basis yang memungkinkan kita memutuskan apakah klaim-klaim petani miskin Rumania lebih atau kurang mendesak ketimbang klaim-klaim orang Albania yang lebih miskin lagi,

atau kebutuhan para gembala gunung Slovakia lebih besar ketimbang kebutuhan gembala Slovenia. Tetapi jika peningkatan standar-standar kehidupan mereka harus dilaksanakan menurut perencanaan yang seragam, seseorang harus dengan sadar mempertimbangkan kepatutan dan kegunaan semua klaim ini dan mengambil keputusan mana yang harus didahulukan. Dan sekali perencanaan semacam itu dijalankan, semua sumber daya dari wilayah yang direncanakan harus melayani perencanaan itu—tidak boleh ada kekecualian bagi orang-orang yang merasa dapat berbuat lebih baik bagi diri mereka sendiri. Sekali klaim mereka diberikan peringkat yang lebih rendah, mereka harus bekerja demi pemenuhan semua kebutuhan orang-orang lain yang telah didahulukan. Dalam keadaan demikian, maka *setiap orang* akan dengan benar merasa bahwa dia lebih miskin ketimbang jika suatu perencanaan lain dijalankan, dan bahwa adalah keputusan dan kekuasaan penguasa-penguasa yang dominan yang telah memberikannya tempat yang kurang menyenangkan ketimbang yang dia pikir selayaknya dia terima. Mencoba menjalankan hal semacam itu di wilayah yang dihuni oleh bangsa-bangsa kecil, yang masing-masing percaya dengan sama fanatiknya pada superioritasnya sendiri di atas bangsa-bangsa lain, adalah menjalankan tugas yang dapat dilakukan hanya lewat penggunaan kekuasaan. Dalam praktik, hal ini sama dengan kasus orang Britania yang lewat keputusan dan kekuasaan harus menentukan apakah standar-standar para petani Makedonia atau para petani Bulgaria yang harus ditingkatkan lebih cepat, apakah para petambang Ceko atautkah Hungaria yang harus lebih cepat diangkat mendekati standar-standar Barat. Tak perlu banyak pengetahuan mengenai sifat-sifat manusia, dan tentu saja hanya perlu sedikit pengetahuan tentang orang Eropa Tengah, untuk melihat bahwa apa pun keputusan yang dipaksakan, akan ada banyak orang, mungkin mayoritas, yang menilai bahwa urutan tertentu yang telah dipilih akan tampak sebagai ketidakadilan paling parah, dan bahwa kebencian yang sama-sama ada di dalam hati mereka akan segera diarahkan kepada kekuasaan

yang, bagaimana pun netralnya, dalam kenyataannya telah memutuskan nasib kehidupan mereka.

Meskipun tidak diragukan akan ada banyak orang yang dengan jujur percaya bahwa jika mereka diizinkan untuk menangani pekerjaan itu, mereka akan dapat membereskan semua problem dengan adil dan tak memihak, dan yang akan sungguh-sungguh terkejut ketika menemukan kecurigaan dan kebencian diarahkan kepada mereka, mereka mungkin sekali akan menjadi orang pertama yang memakai kekuasaan ketika orang-orang yang dimaksudkan oleh mereka untuk diuntungkan ternyata keras kepala dan bandel, orang pertama yang akan memperlihatkan diri mereka sendiri sangat kejam dalam memaksa orang untuk menerima apa yang dianggap sebagai kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri. Apa yang tidak dilihat para idealis yang berbahaya ini adalah bahwa apabila pelaksanaan suatu tanggungjawab moral mengharuskan pandangan-pandangan moral seseorang, dengan memakai kekuasaan, dibuat menang atas pandangan-pandangan moral yang dominan di dalam komunitas-komunitas lain, pelaksanaan tanggungjawab itu dapat menempatkan seseorang dalam posisi yang tak memungkinkannya untuk bertindak secara bermoral. Membebaskan tugas moral yang mustahil semacam itu pada bangsa-bangsa pemenang adalah cara yang pasti untuk secara moral merusak dan mendiskreditkan mereka.

Marilah kita dengan segala cara membantu orang yang lebih miskin dalam usaha-usaha mereka untuk membangun kehidupan mereka dan meningkatkan standar-standar hidup mereka. Suatu otoritas internasional dapat sangat adil dan memberi sumbangan luar biasa besar pada kesejahteraan ekonomi jika otoritas itu hanya memelihara ketertiban dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan orang membangun kehidupan mereka sendiri; tetapi mustahil menjadi adil atau membiarkan orang menjalani kehidupan mereka sendiri jika otoritas pusat itu mendistribusikan bahan-bahan baku dan mengalokasikan pasar-pasar, jika setiap usaha spontan harus "disetujui" dan tak ada

sesuatu pun yang dapat dikerjakan tanpa izin otoritas pusat.



Setelah diskusi-diskusi dalam bab-bab terdahulu, hampir tak perlu lagi ditekankan bahwa kesulitan-kesulitan ini tak dapat diatasi dengan memberikan kepada bermacam-macam otoritas internasional “hanya” kekuasaan ekonomi tertentu. Kepercayaan bahwa ini adalah suatu solusi yang realistik dilandaskan pada kesalahan berpikir bahwa perencanaan ekonomi hanyalah tugas teknis, yang dapat diselesaikan dengan cara yang sungguh-sungguh objektif oleh para ahli, dan bahwa hal-hal yang sungguh-sungguh penting masih bisa dibiarkan berada di dalam tangan otoritas politik. Otoritas ekonomi internasional mana pun, yang tak tunduk pada suatu kekuatan politik superior, bahkan jika dibatasi hanya pada suatu bidang tertentu, dapat dengan gampang tergoda menggunakan kekuasaan yang paling lalim dan tak bertanggungjawab yang dapat dibayangkan. Kontrol eksklusif atas suatu komoditas yang penting atau atas suatu pelayanan umum (misalnya, transportasi udara) sebetulnya adalah salah satu kekuasaan yang berjangkauan paling luas yang dapat diberikan kepada otoritas apa pun. Dan karena hampir tak ada hal apa pun yang tidak dapat dijustifikasi oleh “kebutuhan-kebutuhan teknis”, yang tidak dapat dipertanyakan dengan efektif oleh orang luar—atau bahkan dijustifikasi oleh argumen-argumen humanitarian dan argumen-argumen yang mungkin seluruhnya tulus mengenai kebutuhan-kebutuhan suatu grup yang lemah yang tidak dapat ditolong dengan cara lain apa pun—tidak banyak kemungkinan untuk mengontrol kekuasaan itu. Tipe organisasi yang mengelola sumber-sumber daya dunia, di bawah kekuasaan badan-badan yang kurang lebih otonom, yang kini sangat sering mendapat dukungan dari orang-orang yang tidak kita sangka-sangka, suatu sistem monopoli-monopoli komprehensif yang diakui oleh semua pemerintah nasional, tetapi tidak tunduk pada pemerintah mana pun, pasti akan menjadi

sistem terburuk dari semua sistem bisnis preman yang dapat dibayangkan—bahkan jika pun orang-orang yang dipercayakan untuk mengelolanya terbukti sebagai penjaga yang paling setia atas kepentingan-kepentingan tertentu yang ditempatkan dalam pengawasan mereka.

Orang hanya perlu dengan serius mempertimbangkan akibat-akibat sepenuhnya dari proposal-proposal semacam itu yang tampaknya tak berbahaya, yang di mana-mana dipandang sebagai basis penting bagi tata ekonomi masa depan, seperti kontrol dan distribusi yang sadar atas pasokan bahan-bahan baku yang penting, supaya dapat melihat apa kesulitan-kesulitan politik dan bahaya-bahaya moral yang menakutkan yang diciptakan oleh proposal-proposal itu. Pengontrol pasokan bahan baku semacam itu, seperti bensin atau kayu, karet atau timah, akan menjadi tuan dan penguasa nasib semua industri dan negeri. Dalam memutuskan apakah boleh persediaan barang meningkat dan harga atau pendapatan para produsen jatuh, si pengontrol akan memutuskan apakah suatu negeri diperbolehkan untuk memulai suatu industri baru atau apakah harus dilarang melakukan itu. Sementara dia “memproteksi” standar-standar kehidupan orang-orang yang dia pandang sebagai orang-orang yang secara khusus dipercayakan ke dalam perhatiannya, dia akan mengambil dari banyak orang, yang berada dalam posisi yang jauh lebih buruk, kesempatan terbaik dan mungkin satu-satunya untuk memperbaiki posisi mereka itu. Jika semua bahan baku yang penting dikontrol seperti itu, maka pasti tidak akan ada industri baru, tak akan ada usaha baru yang dapat dimulai oleh rakyat suatu negeri tanpa izin para pengontrol, tak akan ada rencana pembangunan atau perbaikan yang tidak dapat digagalkan oleh veto mereka. Hal yang sama juga akan terjadi pada pengaturan internasional untuk “alokasi” pasar-pasar dan bahkan lebih lagi untuk “distribusi” kontrol atas penanaman modal dan pengembangan sumber-sumber daya alam.

Mengherankan melihat bagaimana orang-orang yang mengaku realis yang paling tegas, dan yang tidak pernah menyia-

nyiakan kesempatan untuk mengejek “utopianisme” kalangan yang percaya pada kemungkinan membangun suatu tata politik internasional, namun menganggap lebih realistis suatu campuran yang lebih langsung dan tak bertanggungjawab atas kehidupan berbagai-bagai bangsa, yang akan terjadi dalam suatu perencanaan ekonomi. Mereka juga percaya bahwa, sekali kekuasaan yang sampai sejauh ini tidak terbayangkan dibagikan kepada suatu pemerintah internasional, yang baru saja mereka gambarkan sebagai tidak memiliki kemampuan untuk memberlakukan Kedaulatan Hukum yang sederhana, kekuasaan yang lebih besar ini akan bisa digunakan dengan cara yang begitu tidak egois dan jelas sangat adil sehingga pasti disetujui semua orang. Sudah jelas bahwa, sementara bangsa-bangsa mungkin menaati aturan-aturan formal yang telah mereka sepakati, mereka jelas tak akan pernah tunduk pada pengarahan politik dan ekonomi yang menjadi bagian dari suatu perencanaan ekonomi internasional—bahwa walaupun mereka mungkin menyepakati aturan-aturan permainan, mereka tidak akan pernah menyepakati urutan preferensi yang membuat suara mayoritas menentukan peringkat kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri dan menentukan seberapa cepat mereka boleh membangun. Bahkan jika, mula-mula, bangsa-bangsa itu, karena suatu ilusi mengenai makna proposal-proposal semacam itu, akan sepakat untuk mentransfer kekuasaan-kekuasaan semacam itu ke suatu otoritas internasional, mereka akan segera menemukan bahwa apa yang telah mereka delegasikan bukanlah semata-mata tugas teknis, melainkan kekuasaan yang paling komprehensif atas seluruh kehidupan mereka.

Apa yang ada di belakang pikiran kalangan “realis” yang tidak sepenuhnya tidak praktis ini, yang mendukung perencanaan-perencanaan, adalah bahwa, walaupun pemerintah-pemerintah yang kuat tak akan mau tunduk pada suatu otoritas superior, mereka akan dapat menggunakan otoritas-otoritas “internasional” itu untuk memaksakan kehendak mereka pada bangsa yang lebih kecil yang ada di dalam wilayah yang dikua-

sainya. Ini sungguh-sungguh adalah “realisme”, sehingga, dengan menyamakan otoritas-otoritas perencanaan sebagai otoritas “internasional”, akan lebih mudah mencapai kondisi satu-satunya yang memungkinkan perencanaan internasional itu dipraktikkan, maksudnya, bahwa sebetulnya perencanaan internasional itu disusun oleh satu pemerintah yang paling berkuasa. Kamufase semacam ini, bagaimana pun juga, tidak akan mengubah fakta bahwa, bagi semua negara yang lebih kecil, hal ini akan berarti bahwa mereka harus lebih tunduk kepada suatu kekuasaan eksternal, yang tidak memungkinkan lagi untuk betul-betul dilawan, daripada yang akan terjadi jika mereka memang hanya melepaskan sebagian tertentu kedaulatan politik mereka.

Adalah penting untuk dicatat bahwa para pendukung yang paling bersemangat terhadap Tata Baru ekonomi untuk Eropa yang diarahkan secara terpusat ternyata memperlihatkan, seperti prototipe-prototipe Fabian dan Jerman mereka, pengabaian habis-habisan terhadap individualitas dan hak-hak bangsa-bangsa kecil. Pandangan-pandangan Prof. Carr, yang dalam hal ini, bahkan lebih daripada dalam kebijakan internal, adalah pelopor kecenderungan menuju totalitarianisme di negeri ini, telah membuat salah seorang sejawat profesionalnya mengajukan pertanyaan yang sangat penting: “Jika cara Nazi berhubungan dengan negara-negara berdaulat yang kecil memang akan menjadi bentuk umum, apa gunanya perang ini?”⁶ Orang-orang yang telah mengamati berapa banyak keresahan dan kekhawatiran telah ditimbulkan, di antara sekutu-sekutu kita yang lebih kecil, oleh beberapa pernyataan mutakhir mengenai persoalan-persoalan ini di dalam makalah-makalah yang diterbitkan di dalam jurnal-jurnal yang sangat berbeda seperti *The Times* dan *New Statesman*⁷,

6 Prof. C. A. W. Manning, dalam sebuah tinjauan terhadap buku Prof. Carr, *Conditions of Peace*, dalam *International Affairs Review Supplement*, Juni 1942.

7 Adalah signifikan dalam banyak segi bahwa, sebagaimana baru-baru ini diamati dalam suatu jurnal mingguan, “orang sudah mulai tidak

tidak akan ragu betapa sikap dan posisi semacam ini pada masa kini pun telah dibenci di antara rekan-rekan terdekat kita, dan betapa mudahnya menghancurkan kehendak baik yang telah terpujuk selama perang jika para penasihat ini diikuti.



Orang-orang yang begitu gampang mengabaikan hak-hak negara-negara kecil itu, tentu saja, benar dalam satu hal: kita tidak dapat mengharapkan ketertiban atau perdamaian abadi setelah perang ini jika negara-negara, besar atau kecil, mendapatkan kembali kedaulatan mereka yang tak terbatas di dalam bidang ekonomi. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu negara adidaya yang baru harus diberikan kekuasaan, yang belum kita ketahui bagaimana menggunakannya secara bijaksana bahkan dalam skala nasional, bahwa suatu otoritas internasional harus diberikan kekuasaan untuk mengatur tiap-tiap bangsa dalam menggunakan sumber-sumber daya mereka. Ini hanya berarti bahwa harus ada suatu kekuasaan yang dapat menghambat bangsa-bangsa dari tindakan-tindakan yang membahayakan negara-negara lain di sekitar mereka, seperangkat aturan yang menentukan hal-hal yang dapat dilakukan tiap-tiap negara, dan suatu otoritas yang mampu memaksakan aturan-aturan itu. Kekuasaan yang diperlukan oleh otoritas semacam itu terutama adalah jenis kekuasaan negatif: kekuasaan ini pada prinsipnya harus dapat mengatakan “tidak” kepada semua jenis tindakan pembatasan.

Jauh dari benar jika dikatakan bahwa, sebagaimana kini dipercaya banyak orang di mana-mana, kita memerlukan suatu otoritas ekonomi internasional sementara negara-negara pada waktu yang sama dapat mempertahankan kedaulatan politik mereka yang tak terbatas. Hampir persis sebaliknya yang

heran bahwa cita rasa Carr akan hadir dalam halaman-halaman *New Statesman* seperti halnya dalam halaman-halaman *The Times* (“Four Winds” dalam *Time and Tide*, 20 Februari 1943).

benar. Apa yang kita butuhkan dan dapat diharapkan untuk dicapai bukanlah kekuasaan yang lebih banyak di tangan otoritas ekonomi internasional yang tak bertanggungjawab, melainkan, sebaliknya, suatu kekuasaan politik superior yang dapat membatasi kepentingan-kepentingan ekonomi, dan ketika terjadi konflik antarkepentingan dapat benar-benar bersikap adil, sebab kekuasaan ini sendiri tidak ikut terlibat dalam permainan ekonomi. Kita membutuhkan suatu otoritas politik internasional yang, tanpa memiliki kekuasaan untuk memaksa orang melakukan tindakan tertentu, harus dapat membatasi mereka dari tindakan-tindakan yang akan merusak orang lain. Kekuasaan yang harus diserahkan kepada otoritas internasional bukanlah kekuasaan-kekuasaan baru yang dimiliki oleh negara-negara pada masa belakangan ini, melainkan kekuasaan minimum yang jika tidak dimiliki akan tidak memungkinkan pemeliharaan hubungan yang damai, yakni kekuasaan-kekuasaan yang pada hakikatnya dimiliki negara ultra-liberal "*laissez-faire*". Dan bahkan lebih daripada di dalam wilayah nasional, sangatlah penting bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki otoritas internasional itu sungguh-sungguh dibatasi oleh Kedaulatan Hukum. Kebutuhan untuk memiliki otoritas adinasional semacam itu sesungguhnya menjadi lebih besar ketika negara-negara individual semakin menjadi unit-unit administrasi ekonomi, menjadi pelaku ketimbang sekadar pengawas lapangan ekonomi, dan karena dengan demikian gesekan yang mungkin terjadi bukanlah di antara individu-individu melainkan di antara negara-negara itu sendiri.

Bentuk pemerintahan internasional, yang memungkinkan kekuasaan-kekuasaan yang terbatas dengan tegas ditransfer ke suatu otoritas internasional, sementara dalam semua segi lain masing-masing negara masih tetap bertanggungjawab dalam urusan-urusan internal mereka, tentu saja adalah bentuk federasi. Kita tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang banyak jumlahnya itu, yang seringkali sangat dungu dan tidak dipikirkan masak-masak, yang dibuat atas nama suatu organisasi

federal seluruh dunia selama masa puncak propaganda bagi “Uni Federal”, mengaburkan fakta bahwa prinsip federasi adalah satu-satunya bentuk asosiasi berbagai bangsa yang akan menciptakan suatu tata internasional tanpa penindasan yang tak patut terhadap keinginan sah mereka untuk merdeka.⁸ Tentu saja federalisme hanyalah aplikasi demokrasi dalam urusan-urusan internasional, satu-satunya metode perubahan yang damai yang sejauh ini telah orang temukan. Tetapi federalisme adalah suatu demokrasi dengan kekuasaan sangat terbatas. Selain ideal yang lebih tidak realistik, peleburan negeri-negeri yang berbeda ke dalam satu negara tunggal yang tersentralisasi (keinginan yang belum tentu ada), federalisme adalah satu-satunya jalan di mana ideal hukum internasional dapat terwujud. Kita tidak boleh menipu diri sendiri bahwa ketika kita di masa lampau menyebut aturan-aturan yang mengatur sikap dan kelakuan internasional sebagai hukum internasional, kita sekadar mengekspresikan suatu keinginan yang tulus. Ketika kita ingin mencegah orang membunuh satu sama lain, kita tidak puas hanya dengan mengeluarkan pernyataan bahwa membunuh adalah sesuatu yang tidak diinginkan, melainkan kita memberikan kekuasaan kepada suatu otoritas untuk mencegahnya. Demikian juga, tidak mungkin ada hukum internasional tanpa kekuasaan untuk memberlakukannya. Hambatan bagi penciptaan kekuasaan internasional semacam itu terutama adalah ide bahwa kekuasaan itu perlu mengendalikan semua kekuasaan yang pada dasarnya tidak terbatas, yang dimiliki negara-negara modern. Tetapi dengan adanya pembagian kekuasaan di bawah sistem federal,

8 Sangatlah mengecewakan bahwa banjirnya publikasi federalis dalam tahun-tahun belakangan ini telah membuat sedikit karya dari antaranya, yang penting dan berisi pemikiran yang mendalam, tidak diperhatikan orang dengan sepatutnya. Satu di antaranya, yang secara khusus harus dipertimbangkan dengan serius dan seksama kalau sudah datang waktunya untuk menyusun suatu struktur politik baru Eropa, adalah buku kecil Dr. W. Ivor Jennings, *A Federation for Western Europe* (1940).

tidak harus demikian halnya.

Pembagian kekuasaan ini akan tak pelak lagi pada waktu yang sama juga berlaku sebagai pembatasan kekuasaan semua negara dan juga kekuasaan masing-masing negara. Sesungguhnya banyak tipe perencanaan yang kini merupakan tren umum akan mungkin sekali menjadi sama sekali mustahil.⁹ Tetapi hal ini sama sekali bukan kendala bagi semua perencanaan. Faktanya, adalah salah satu keuntungan utama federasi bahwa sistem ini dapat dijalankan sedemikian rupa sehingga akan menyulitkan pelaksanaan kebanyakan perencanaan yang berbahaya, sementara semua perencanaan yang memang diinginkan dapat dengan bebas dilaksanakan. Sistem federasi mencegah, atau dapat dibuat mencegah, banyak bentuk restriksionisme, dan juga membatasi perencanaan internasional hanya pada bidang-bidang di mana kesepakatan yang sejati dapat dicapai—bukan saja di antara “kepentingan-kepentingan” yang langsung terkait, tetapi juga di antara semua pihak yang terkena dampaknya. Bentuk-bentuk perencanaan yang diinginkan yang dapat dijalankan di tingkat lokal dan tanpa perlu langkah-langkah pembatasan, dibiarkan bebas dan diserahkan ke dalam tangan-tangan yang paling kompeten untuk melakukannya. Bahkan bisa diharapkan, di dalam suatu federasi, tak akan ada lagi alasan-alasan yang sama untuk membuat masing-masing negara sekuat mungkin, dan proses sentralisasi yang dilakukan pada masa lalu dapat dalam batas-batas tertentu dibalik dan beberapa desentralisasi kekuasaan dari negara ke otoritas-otoritas setempat menjadi dimungkinkan.

Patut diingat bahwa ide mengenai dunia yang pada akhirnya mendapatkan perdamaian melalui penyerapan negara-negara yang terpisah ke dalam grup-grup besar yang terfederasi, dan pada akhirnya mungkin ke dalam satu federasi tunggal, sama sekali bukan sebuah ide baru, dan sesungguhnya merupakan

9 Tentang hal ini, lihat artikel penulis mengenai “Economic Conditions of Inter-State Federation” dalam *The New Commonwealth Quarterly*, vol. V, September 1939.

ideal kebanyakan pemikir liberal abad ke-19. Sejak Tennyson—yang visinya mengenai “pertempuran di udara”, yang banyak dikutip orang, disusul oleh visi mengenai federasi bangsa-bangsa yang akan muncul setelah pertempuran besar mereka yang terakhir—sampai akhir abad ini, pencapaian terakhir dalam bentuk organisasi federal tetap merupakan harapan yang tak pernah lenyap, suatu langkah besar selanjutnya dalam kemajuan peradaban. Orang-orang liberal abad ke-19 mungkin tidak menyadari sepenuhnya *betapa* pentingnya suatu organisasi federal dari negara-negara yang berbeda menjadi pelengkap bagi prinsip-prinsip mereka sendiri¹⁰; tetapi tidak banyak dari antara mereka yang tidak mengekspresikan kepercayaan mereka pada federalisme sebagai suatu tujuan pamungkas.¹¹ Hanyalah menjelang abad ke-20, ketika *Realpolitik* bangkit dan menang, harapan-harapan itu mulai dipandang tidak realistis dan utopis.



Kita tidak akan membangun kembali peradaban secara besar-besaran. Bukanlah kebetulan bahwa pada umumnya ada lebih banyak keindahan dan kesantunan yang dapat ditemukan di dalam kehidupan bangsa-bangsa yang kecil, dan bahwa di antara bangsa-bangsa yang besar, jumlah kebahagiaan dan kepuasan mereka sesuai dengan proporsi keberhasilan mereka menghindari sentralisasi yang mematikan itu. Kita tidak mungkin bisa mempertahankan demokrasi atau memupuk pertumbuhannya

10 Tentang ini, lihat buku Prof. Robbins yang telah dikutip, hlm. 240-257.

11 Sampai tahun-tahun terakhir abad ke-19, Henry Sidgwick berpendapat “tidaklah melampaui batas-batas prediksi yang rasional kalau orang menerka bahwa suatu integrasi di masa depan dapat terjadi di dalam negara-negara Eropa Barat: dan jika hal ini terjadi, tampaknya mungkin bahwa contoh Amerika akan diikuti, dan bahwa kesatuan gabungan politik baru akan dibentuk berdasarkan politik pemerintahan federal” (*The Development of European Polity*, diterbitkan anumerta tahun 1903, hlm. 439).

jika semua kekuasaan dan kebanyakan keputusan yang penting berada di tangan suatu organisasi yang jauh terlalu besar bagi orang biasa untuk bisa mereka pelajari atau pahami. Demokrasi tak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa ada sejumlah besar pemerintahan lokal yang mengatur diri sendiri, yang menjadi sekolah pelatihan politik bagi seluruh rakyat serta bagi para pemimpin masa depan mereka. Hanya apabila tanggung-jawab dapat dipelajari dan dipraktikkan dalam urusan-urusan yang sudah dikenal kebanyakan orang, apabila kesadaran atas keberadaan sesama, ketimbang pengetahuan teoretis mengenai kebutuhan orang lain, yang memandu tindakan, maka orang biasa dapat mengambil bagian nyata dalam urusan-urusan publik karena urusan-urusan itu menyangkut dunia yang dia kenal. Apabila jangkauan tindakan-tindakan politik menjadi sangat besar dan luas, sehingga pengetahuan yang perlu dimiliki hampir secara eksklusif dipunyai hanya oleh birokrasi, maka dorongan-dorongan kreatif seseorang sebagai pribadi pasti merosot. Saya percaya bahwa di sini pengalaman negeri-negeri kecil seperti Belanda dan Swiss berisi banyak hal berharga yang dapat dipelajari bahkan oleh negeri-negeri besar yang paling beruntung seperti Britania Raya. Kita semua beruntung jika kita dapat menciptakan sebuah dunia yang cocok dihuni negara-negara kecil.

Tetapi negara-negara kecil dapat memelihara kemerdekaan mereka baik di dalam wilayah internasional maupun di dalam wilayah nasional hanya di dalam suatu sistem hukum sejati yang menjamin bahwa aturan-aturan tertentu diberlakukan secara konsisten, dan bahwa otoritas yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan aturan-aturan itu tidak bisa memakainya bagi tujuan lain mana pun. Walaupun otoritas adinasional ini haruslah sangat berkuasa agar dapat menjalankan tugasnya memberlakukan hukum umum, konstitusinya haruslah pada waktu yang sama dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencegah otoritas-otoritas nasional dan otoritas-otoritas internasional berbuat lalim. Kita tidak akan pernah bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan jika kita tidak siap untuk membatasi

kekuasaan dengan suatu cara yang akan juga sekali-sekali mencegah penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang diinginkan. Kesempatan besar yang akan kita miliki pada akhir perang ini adalah bahwa kekuasaan-kekuasaan akbar yang telah menang perang, dengan pertama-tama menaklukkan diri mereka sendiri pada suatu sistem aturan-aturan yang dapat mereka berlakukan dengan memakai kekuasaan yang ada pada mereka, dapat pada waktu yang sama memperoleh hak-hak moral untuk memberlakukan aturan-aturan yang sama pada pihak-pihak lain.

Suatu otoritas internasional yang dengan efektif membatasi kekuasaan negara atas diri setiap individu akan menjadi penjaga dan pemelihara perdamaian yang paling baik. Kedaulatan Hukum internasional harus menjadi pelindung individu-individu terhadap tirani negara dan pelindung komunitas-komunitas nasional terhadap tirani negara adidaya yang baru. Tujuan kita bukanlah negara adidaya yang mahakuasa, juga bukan asosiasi longgar “negara-negara bebas”, melainkan komunitas bangsa-bangsa yang dibangun oleh orang-orang merdeka. Kita telah lama menyarankan bahwa sudah tidak mungkin lagi di dalam urusan-urusan internasional untuk berperilaku seperti yang kita pikir harus kita lakukan, karena orang-orang lain tidak akan menyukainya. Kesepakatan dan penyelesaian yang akan datang akan menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita sungguh tulus dan bahwa kita siap menerima pembatasan-pembatasan yang sama pada kebebasan bertindak kita, yang, demi kepentingan bersama, kita pandang perlu dikenakan juga pada orang-orang lain.

Jika dipakai dengan bijaksana, prinsip organisasi federal sesungguhnya dapat terbukti sebagai solusi terbaik atas beberapa problem dunia yang paling sulit. Tetapi menerapkan prinsip ini adalah tugas yang sangat sulit dan kita tidak mungkin akan berhasil jika kita menariknya melampaui kapasitasnya, berhubung kita mencobanya dengan sangat ambisius. Mungkin akan ada tendensi kuat untuk menjadikan organisasi internasional yang baru sebagai organisasi yang serba komprehensif dan serba

mendunia; dan, tentu saja, akan ada kebutuhan krusial yang mendesak untuk membangun organisasi yang komprehensif semacam itu, suatu Liga Bangsa-Bangsa yang baru. Bahaya besarnya adalah, jika dalam upaya untuk bergantung semata-mata pada organisasi dunia semacam itu, organisasi ini lalu diberi tanggungjawab untuk menjalankan semua tugas yang tampaknya bagus bila ditempatkan di dalam tangan suatu organisasi internasional, tugas-tugas ini dalam kenyataannya tidak akan dijalankan dengan memadai. Selalu merupakan keyakinan saya bahwa ambisi-ambisi semacam itu merupakan akar kelemahan Liga Bangsa-Bangsa: bahwa dalam upaya (yang tidak sukses) untuk membuat organisasi ini mendunia, organisasi ini harus dibuat lemah, dan bahwa Liga yang lebih kecil dan serentak lebih berkuasa dapat menjadi instrumen yang lebih baik dalam memelihara perdamaian. Saya percaya bahwa pertimbangan-pertimbangan ini masih berlaku dan bahwa suatu kerja sama dalam batas tertentu dapat dicapai antara, katakanlah, Imperium Britania dan bangsa-bangsa Eropa Barat dan mungkin Amerika Serikat, yang mustahil dicapai dalam skala dunia. Asosiasi yang relatif erat yang diwujudkan oleh suatu Uni Federal mula-mula tidak akan dapat diterapkan melampaui mungkin suatu wilayah sesempit sebagian Eropa Barat, kendati dimungkinkan juga untuk diperluas secara bertahap.

Adalah benar bahwa, dengan pembentukan federasi-federasi regional semacam itu, kemungkinan berkobarnya perang di antara blok-blok yang berbeda masih tetap ada, dan bahwa untuk sebanyak mungkin mengurangi risiko ini kita harus bersandar pada suatu asosiasi yang lebih besar dan lebih longgar. Poin saya adalah bahwa kebutuhan untuk membangun suatu organisasi lain semacam itu tidak boleh menjadi hambatan bagi suatu asosiasi yang lebih erat yang didirikan negeri-negeri itu, yang peradabannya, pandangan-pandangannya, dan standar-standarnya lebih serupa. Sementara kita harus bertujuan untuk sejauh mungkin menghindari perang di masa depan, kita tidak boleh percaya bahwa kita dapat sekali gebrak menciptakan

suatu organisasi permanen yang akan membuat semua perang di bagian dunia mana pun sama sekali mustahil terjadi. Kita pasti bukan saja tidak akan berhasil dalam usaha semacam itu, tetapi kita juga, karenanya, mungkin akan menghancurkan kesempatan-kesempatan kita untuk mencapai sukses di wilayah yang lebih terbatas. Sebagaimana benar ihwalnya berkaitan dengan kejahatan-kejahatan besar lain, langkah-langkah yang sama sekali tidak memungkinkan perang terjadi di masa depan dapat lebih buruk dibandingkan bahkan dengan perang itu sendiri. Kalau kita dapat mengurangi risiko friksi yang mungkin akan bermuara pada perang, ini mungkin adalah segalanya yang dapat dengan rasional kita harapkan tercapai.



KESIMPULAN

TUJUAN buku ini bukan untuk membuat gambaran program yang terperinci mengenai tata masyarakat masa depan yang dikehendaki. Jika menyangkut urusan-urusan internasional kita telah sedikit melebihi tugas yang pada hakikatnya penting, ini karena dalam bidang ini kita mungkin akan segera ter-panggil untuk menciptakan kerangka kerja yang di dalamnya pertumbuhan di masa depan mungkin akan berlangsung untuk jangka panjang. Banyak hal akan bergantung pada bagaimana kita menggunakan kesempatan yang akan kita punyai di masa depan itu. Tetapi apa pun yang kita lakukan, ini hanyalah permulaan dari suatu proses baru yang berat dan panjang, yang di dalamnya kita semua berharap akan tahap demi tahap menciptakan suatu dunia yang sangat berbeda dari dunia yang telah kita kenal selama seperempat abad. Setidaknya meragukan apakah pada tahap ini cetak biru yang terperinci dari suatu tata masyarakat internal yang diinginkan akan banyak gunanya—atau apakah ada seseorang yang kompeten untuk menyediakannya.

Hal yang penting sekarang adalah bahwa kita akan bisa sependapat mengenai prinsip-prinsip tertentu dan membebaskan diri kita dari beberapa kesalahan yang telah mengendalikan kita di masa lampau yang baru berlalu. Betapapun pengakuan semacam ini tidak menyenangkan, kita harus mengakui bahwa sebelum perang ini kita telah sekali lagi mencapai tahap yang membuat lebih penting bagi kita untuk menyingkirkan

rintangan-rintangan yang telah menghambat jalan kita karena kebodohan insani kita, dan untuk menyalurkan energi kreatif setiap individu, ketimbang menggunakan lebih jauh mesin yang dibuat untuk “memandu” dan “mengarahkan” mereka— untuk menciptakan kondisi-kondisi yang cocok bagi kemajuan ketimbang untuk “merencanakan kemajuan”. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membebaskan diri kita sendiri dari rupa terburuk obskurantisme masa kini, yang berusaha meyakinkan kita bahwa apa yang telah kita lakukan di masa lampau yang baru berlalu itu semuanya entah memang bijaksana atau niscaya. Kita tidak akan tumbuh menjadi lebih bijaksana sebelum kita mengerti bahwa banyak hal yang telah kita lakukan adalah hal-hal yang sangat bodoh.

Jika kita mau membangun dunia yang lebih baik, kita harus memiliki keberanian untuk memulai awal yang baru—bahkan jika itu berarti *reculer pour mieux sauter*, suatu “langkah mundur untuk melompat lebih jauh ke depan”. Bukan orang yang percaya pada kecenderungan-kecenderungan yang tak terelakkan yang akan menunjukkan keberanian ini, juga bukan orang yang mengkhotbahkan suatu “Tata Baru” yang sebetulnya tidak lebih dari sekadar proyeksi kecenderungan-kecenderungan 40 tahun terakhir, dan yang tahunya hanya meniru Hitler. Sesungguhnya orang-orang yang berteriak paling keras bagi terciptanya Tata Baru adalah orang-orang yang paling dalam berada di bawah pengaruh ide-ide yang telah menciptakan perang ini dan banyak kejahatan yang telah membuat kita menderita. Benarlah kaum muda kita jika mereka kurang percaya pada ide-ide yang mengendalikan kebanyakan sesepuh mereka. Tetapi mereka keliru atau tersesat kalau mereka percaya bahwa ide-ide yang mengendalikan sesepuh mereka itu masih merupakan ide-ide liberal abad ke-19, yang dalam kenyataan hampir tidak dikenal generasi yang lebih muda. Meskipun kita tidak dapat berkehendak, juga tidak memiliki kemampuan, untuk kembali ke realitas abad ke-19, kita memiliki kesempatan untuk mewujudkan ideal-idealnya—dan ideal-ideal ini tidak buruk atau hina. Malah, dalam hal ini, kita tidak berhak

merasa superior dibandingkan kakek nenek kita; dan kita tidak boleh pernah melupakan bahwa kitalah, orang-orang abad ke-20, dan bukan mereka, yang telah mengacaukan segala sesuatu. Jika mereka belum sepenuhnya menyadari apa yang diperlukan untuk menciptakan dunia yang mereka inginkan, pengalaman yang telah kita peroleh sejak abad lalu seharusnya telah melengkapi kita dengan lebih baik untuk tugas itu. Jika dalam usaha pertama untuk menciptakan suatu dunia orang-orang merdeka kita telah gagal, kita harus mencoba lagi. Prinsip pemandunya, bahwa kebijakan yang menjamin kebebasan bagi setiap individu adalah satu-satunya kebijakan yang benar-benar progresif, tetap benar pada masa kini seperti halnya pada abad ke-19.

CATATAN BIBLIOGRAFIS

PENJELASAN suatu titik pandang yang terperinci, yang selama bertahun-tahun telah jelas-jelas tidak didukung, sulit diberikan karena, dalam cakupan sedikit bab, tidak mungkin mendiskusikan lebih dari beberapa segi saja darinya. Bagi pembaca yang memiliki posisi yang telah dibentuk seluruhnya oleh pandangan-pandangan yang dominan selama 20 tahun terakhir, penjelasan terperinci dalam buku ini hampir tidak memadai untuk menyediakan landasan umum yang diperlukan bagi suatu diskusi yang bermanfaat. Tetapi meskipun tidak mengikuti tren mutakhir, pandangan-pandangan penulis buku ini tidaklah sangat unik seperti yang mungkin tampak di mata beberapa pembaca. Posisi dasarnya sama dengan posisi para penulis di banyak negeri, yang jumlahnya dengan konstan bertambah. Kajian-kajian yang telah mereka lakukan telah membawa mereka secara independen ke kesimpulan-kesimpulan yang serupa. Pembaca yang ingin tahu lebih jauh tentang apa yang mungkin akan dia anggap suasana intelektual yang tidak biasa tetapi ramah dan bersahabat, dapat menemukan daftar berikut ini, yang memuat beberapa karya sejenis yang lebih penting, bermanfaat, termasuk beberapa karya yang di dalamnya fitur esai ini, yang pada dasarnya kritis, dilengkapi dengan diskusi yang lebih penuh mengenai struktur suatu masyarakat masa depan yang diinginkan.

- W. H. Chamberlin. *A False Utopia. Collectivism in Theory and Practice* (Duckworth) 1937.
- F. D. Graham. *Social Goals and Economic Institutions* (Princeton University Press) 1942.
- E. Halévy. *L'Ere des Tyrannies*. Paris (Gallimard) 1938. Versi Inggris dari dua esai terpenting dalam buku ini ada dalam *Economica*, Februari 1941, dan dalam *International Affairs*, 1934.
- G. Halm, L. v. Mises, dan lain-lain. *Collectivist Economic Planning*, disunting oleh F. A. Hayek. (Routledge) 1937.
- W. H. Hutt. *Economists and the Public*. (Cape) 1935.
- W. Lippmann. *An Inquiry into the Principles of the Good Society*. (Allen & Unwin) 1937.
- L. v. Mises. *Socialism*, diterjemahkan oleh J. Kahane. (Cape) 1936.
- R. Muir. *Liberty and Civilization*. (Cape) 1940.
- M. Polanyi. *The Contempt of Freedom*. (Watts) 1940.
- W. Rappard. *The Crisis of Democracy*. (University of Chicago Press) 1938.
- L. C. Robbins. *Economic Planning and International Order*. (Macmillan) 1937.
- L. C. Robbins. *The Economic Basis of Class Conflict and Other Essays in Political Economy*. (Macmillan) 1939.
- L. C. Robbins. *The Economic Causes of War*. (Cape) 1939.
- W. Roepke. *Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart*. Zürich (Eugen Rentsch) 1942.
- L. Rougier. *Les mystiques économiques*. Paris (Librairie Medicis) 1938.
- F. A. Voigt. *Unto Caesar*. (Constable) 1938.
- Para pendukung "Public Policy Pamphlets", disunting oleh University of Chicago Press.
- H. Simons. *A Positive Program for Laissez-Faire. Some Proposals for a Liberal Economic Policy*. 1934.
- H. D. Gideonse. *Organised Scarcity and Public Policy*. 1939.
- F. A. Hermens. *Democracy and Proportional Representation*. 1940.
- W. Sulzbach. "Capitalist Warmongers": *A Modern Superstition*. 1942.
- M. A. Heilperin. *Economic Policy and Democracy*. 1943.

Ada juga karya-karya penting dalam bahasa Jerman dan Italia, yang sifatnya serupa. Demi keselamatan para penulisnya, tidaklah bijaksana jika sekarang ini nama-nama mereka disebutkan.

Ke dalam daftar ini saya menambahkan judul-judul tiga buku yang, melebihi buku-buku lain mana pun yang saya ketahui, membantu orang untuk memahami sistem ide-ide yang mengendalikan musuh-musuh kita dan perbedaan-perbedaan yang memisahkan pikiran mereka dari pikiran kita.

E. B. Ashton. *The Fascist, His State and Mind*. (Putnam) 1937.

F. W. Foerster. *Europe and the German Question*. (Sheed) 1940.

H. Kantorowicz. *The Spirit of English Policy and the Myth of the Encirclement of Germany*. (Allen & Unwin) 1931.

Berikut ini sebuah karya mutakhir yang luar biasa mengenai sejarah modern Jerman yang di negeri ini tidak dikenal sebagaimana sepatutnya:

F. Schnabel. *Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert*. 4 jilid. Freiburg, i. B. 1929-37.

Mungkin panduan-panduan terbaik untuk mengenali beberapa masalah kontemporer kita masih bisa ditemukan di dalam karya-karya beberapa filsuf politis akbar dari zaman liberal, de Tocqueville atau Lord Acton, dan, jauh lebih ke belakang, Benjamin Constant, Edmund Burke, dan *Federalist Papers* yang dikarang Madison, Hamilton, dan Jay, generasi-generasi yang memandang kebebasan masih sebagai suatu perkara dan suatu nilai yang harus dibela, sementara generasi kita pada waktu yang sama menerima kebebasan sebagai sesuatu yang sudah ada begitu saja, tanpa perlu diargumentasikan atau dibuktikan, dan tidak menyadari dari mana datangnya bahaya yang mengancam, dan juga tidak memiliki keberanian untuk membebaskan diri dari doktrin-doktrin yang membahayakan mereka.

INDEKS

- Adam Smith 17, 41, 42, 48, 69
A. Feiler 135
A. Moeller van den Bruck 207, 219
Amerika Serikat 4, 56, 57, 62, 122,
129, 130, 296
Anglo-Saxon 165
antisemitisme 174
à rebours 146
August Bebel 209
Auguste Comte 20, 208
A. V. Dicey 227
A.V. Dicey 90
Axis 7
- Balila* 143
Beamtenstaat 164, 221
B. E. Lippincott 180
Benjamin Franklin 165
Bernard Shaw 178
Bertrand Russell 179
Bismarck 209, 216, 220, 227
B. Mussolini 53
Britania 9, 18, 19, 28, 34, 50, 58,
62, 122, 168, 178, 204, 227,
232, 237, 248, 260, 268-272,
277, 278, 279, 283, 294, 296
Burnham 130, 275
- Carl Schmitt 98, 219, 220, 232
Ceko 179, 283
Chamberlin 33, 34, 304
Cicero 17
Cobden 17
Colin Clark 121
- D. C. Coyle 157
Demokrasi vii, 27, 30, 69, 86, 87,
209, 294
de Tocqueville 16, 30, 305
Disraeli 134, 269
Donoughmore 77, 78, 81
Dopolavoro 143
Dugald Stewart 42
- Eastman 33, 129, 132
E. B. Ashton 104, 305
Eduard Heimann 36
E. H. Carr 177, 191, 231-235, 288,
289
Elie Halévy 39, 83, 178
Engels 179
Erasmus 17
Ernst Jünger 219
Ezra Pound 270

- fasisme 4, 33-35, 37, 70, 145-147,
 168, 171
 F.A. Voigt 34
 F. Borkenau 176
 F.D. Roosevelt 13
 federasi 273, 290-293, 296
 Ferdinand Fried 223
 F. H. Knight 189
 Fichte 209, 210
 Findlay MacKenzie 178
 F. M. Taylor 180
 Frederick William 11
Freirechtsschule 99
Freizeitgestaltung 124
 Friedrich List 234
 Friedrich von Hardenberg 11

 Georges Sorel 196, 208
 Gestapo 188
 Gladstone 227, 269
 Gladstonian 178
Gleichschaltung 192
 Goering 215
Grossraumwirtschaft 235, 278
 G. Wieser 143

 hak-hak individu 106, 107, 267
 Hans Freyer 219
 Hardenberg 11, 219
 Harold Laski 77, 78, 165, 247, 248
 H.D. Gideonse xi
 Hegel 26, 212, 231, 234
 Heine 167
 Hendrick de Man 146
 Henry Sidgwick 227, 293
 Heydrich 167
 H. G. Wells 105, 212, 269
 Hilaire Belloc 17, 109
 Himmler 167

 Hitler 3, 7, 35, 37, 84, 97, 101, 214,
 223, 229, 235, 240, 264, 300
 Hitlerian 209
 Hitlerisme 36, 37
 Hitlerjugend 143
 Houston Stewart Chamberlain 8,
 208
 Humboldt 8, 219
 Hume 17

 individualisme vii, 17, 27, 39, 206,
 228
 Italia 9, 11, 15, 18, 19, 34-36, 58,
 65, 104, 124, 142, 145, 146,
 168, 171, 188, 270, 277, 305
 Irving Kristol xiii

 Jacob Buckhardt 179
 Janet 31
 J. Benda 239
 J. B. Priestly 241
 J. G. Crowther 204
 Johann Plenge 212-214, 216, 219
 John Dewey 31
 John Milton 251
 John Morley 269
 John Stuart Mill 8, 141
 Justice Darling 103

 Kapitalisme 27
 Karl Mannheim 26, 84, 197
 Killinger 167
 kebijakan liberal 24, 100
 kolektivisme 18, 29, 41, 42, 69, 70,
 169, 174, 176, 177, 207, 262,
 264, 265, 268
 Kraft durch Freude 143

laissez-faire 15, 22, 44, 100, 123,

- 233, 235, 248, 290
 Lassall 209
 Laval 35
 legislasi 16, 77, 78, 104, 105, 243
 Lenard 201
 Lenin 33, 135, 149, 221
 Lensch 216, 217, 218, 219, 220
Leviathan 236
 Ley 167
 liberalisme 3, 10, 17, 22-24, 29,
 32, 37, 44, 70, 81, 147, 152,
 176, 217, 218, 220-223, 226,
 269, 273
 List 26, 234
 Locke 17, 102
 Lord Acton 1, 16, 86, 127, 167,
 179, 227, 273, 305
 Lord Cecil 232
 Lord Eustace Percy 83
 Lord Hewart 103
 Lord Keynes 227
 Lord Morley 8, 227
 L. Trotsky 149

 Mannheim 26, 84, 89, 197
 Margaret Thatcher xiv
 Marx 26, 131, 179, 210, 212, 231,
 234
 Marxisme 34, 35, 37, 208, 212,
 222, 240
 Max Eastman 33, 129, 132
 Michels 35
 Mill 8, 141, 269
 Milton Friedman v, xiii, 17, 251,
 263, 270
 minoritas 86, 107, 131, 198, 205,
 208, 247, 277
 mitos 195, 196, 200, 251
 M. Muggeridge 135

 Moeller van den Bruck 207, 219,
 221, 222
 monopoli 23, 50, 53-58, 61, 62,
 115, 234, 239, 241, 243-247,
 252, 285
 Montaigne 17
 motif x, 30, 110, 111, 169
 Mussolini 35, 53, 58, 196

 Napoleon 219
 Naumann iv, 215, 309
 Nazi 3, 9, 10, 17, 27, 35, 36, 95, 98,
 136, 142, 146, 196, 202-204,
 215, 220, 225, 229, 232, 233,
 237, 269, 288
 Nazisme vii, 4, 207, 219, 230
 Niebuhr 57, 177
 Nietzsche 176
 Nordik 41, 201

 Partai Buruh 77, 78, 178, 247, 248
 partikularisme 174, 176
 Perikles 17
 perjuangan kelas 201, 281
 Peter Drucker 35, 197
 Plato 196, 228
 Polandia 179
 Prancis 11, 18, 29, 31, 106, 122,
 212, 217, 218, 220, 222, 236,
 277
privilese 24, 97, 99, 111, 145, 148,
 150, 154, 159, 162, 243, 246,
 247
 propaganda 6, 7, 32, 35, 36, 49,
 121, 163, 191, 192, 193, 198,
 205, 233, 237, 243, 269, 270,
 271, 291
 proteksi 57, 58, 62, 81, 161, 216,
 272

- Quisling 35
raison d'état 183
 R. D. Butler 208, 215
 Rechtsstaat 90, 97, 98
 Recollections 8
 Renaisans 17, 18, 238
 restriksionisme 160, 292
 Revolusi Prancis 29
 Robbins 54, 111, 275, 293, 304
 Robert Nozick xiii
 Rochester 104
 Rodbertus 209, 210
 Romawi 17, 101
 Ronald reagan xiv
 Rusia 4, 11, 15, 27, 33, 35, 104,
 124, 129, 135, 173, 175, 188,
 199, 202, 210, 233

 Saint-Simon 30, 31
 Schmoller 26
 Sidney Webb 178
 Sir Oswald Mosley 83
 Sir Richard Acland 241, 264
 Sir Stafford Cripps 83
 Sombart 26, 57, 209, 210, 211, 212
 sosialisme 6, 8, 10, 11, 31, 32, 34,
 37, 78, 98, 144-147, 178,
 179, 185, 203, 207, 209, 214,
 217, 219, 221, 223, 236, 275
 Spengler 219, 220, 222
 Streicher 167
 Stuart Chase 109

 Tacitus 17
The Economist 106, 107
The Spectator 50, 226

The Times 225, 288, 289, 321
 Thomas Carlyle 8, 208
 Thusydides 17
 totalitarian 14, 15, 16, 18-20, 35,
 70, 81, 97, 104, 107, 124,
 136, 143, 167-170, 173, 176,
 185-188, 191-193, 195-198,
 200-203, 220, 225, 229, 230,
 232, 237-240, 242, 264, 269,
 272, 275
 Toynbee 232
 Trotsky 130, 149

 utopia vii, 29, 34, 304

 V. I. Lenin 149
 Voltaire 101

 Waddington 238-240
 Walter Lippmann 34, 304
 W. Arthur Lewis 243
 Webb 77, 178, 199, 201, 269
Weltanschauung 142, 148
 Werner Sombart 209
 W.H. Chamberlin 33
 W. H. Hutt 154, 304
 Wilhelm Oostwald 215
 Wilhelm von Humboldt 8
 William Buckley Jr xiii
 W. Ivor Jennings 291
 W. Roepke 157, 304

 Yahudi 173, 195, 201, 229, 237

 Zarathustra 176
Zivilcourage 184

TENTANG PENULIS

FRIEDRICH AUGUST HAYEK (1899–1992), lahir dengan nama Friedrich August von Hayek, di Wina, ibukota Austria-Hungaria waktu itu, adalah seorang pemikir ekonomi-politik liberal klasik abad ke-20 yang pengaruhnya tetap kuat hingga sekarang. Dalam buku yang ada di tangan Anda sekarang ini, dengan berani dan meyakinkan Hayek membela paham kebebasan individu dari ancaman paham kolektivis yang saat itu sedang jaya di Barat, khususnya di Inggris pasca Perang Dunia I dan menjelang PD II. Hayek menunjukkan bahwa kebijakan kolektivis alias sosialisme adalah peretas jalan bagi sistem komunisme, bahkan fasisme, yang pada akhirnya memusnahkan kemerdekaan individu.



Saat buku Hayek ini pertama kali terbit pada 1944, ekonom besar yang pandangannya hingga kini selalu diposisikan berseberangan dengan Hayek, John Maynard Keynes (1883-1946), menyurati Hayek, memujinya: *“Morally and philosophically I find myself in agreement with virtually the whole of it; and not only in agreement, but in deeply moved agreement.”* Dalam sejarah pemikiran ekonomi-politik sejak awal abad ke-20 hingga sekarang, Hayek juga terkenal sebagai salah satu pendiri Austrian School, bersama antara lain gurunya sendiri, Ludwig von Mises (1881-1973), yang bukunya *Liberalisme Klasik* juga diterbitkan oleh Freedom Institute. Hayek pernah tinggal di Austria, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Jerman, dan sejak 1938 menjadi warga negara Inggris. Hayek mengajar di London School of Economics, Universitas Chicago, dan Universitas Freiburg.

Pada 1974, Hayek menerima Hadiah Nobel untuk kepeloporan pemikiran di bidang ekonomi, khususnya, demikian menurut pertimbangan panitia Nobel waktu itu, melalui karyanya tentang teori keuangan dan fluktuasi ekonomi serta analisis tajamnya atas kesalingterkaitan fenomena ekonomi, sosial dan kelembangaan.

FREEDOM INSTITUTE yang berdiri sejak akhir 2001, adalah lembaga *think tank* yang bergerak di bidang penyemaian gagasan-gagasan tentang masyarakat merdeka. Berbagai kegiatannya meliputi penerjemahan dan penerbitan buku, pengadaan Perpustakaan Freedom yang terbuka untuk umum, pelatihan wartawan muda, kelas-kelas pengenalan pemikiran kebebasan bagi mahasiswa, berbagai jenis diskusi publik, juga studi dan advokasi kebijakan publik. Mulai akhir 2010, Freedom Institute menggiatkan penyemaian gagasan kemerdekaan individu lewat forum Kine Klub, yang aktif menggelar pemutaran dan diskusi film bertema kebebasan, serta Diskusi Sastra yang menggali kembali kekayaan pemikiran sastrawan klasik tanah air. Konsisten dengan misinya menghidupkan dunia pemikiran di Indonesia, Freedom Institute juga aktif mempromosikan perkembangan sains mutakhir ke khalayaknya.

Selain bisa diikuti lewat website, berbagai kegiatan dan dokumentasi program Freedom Institute juga dapat diikuti lewat jaringan media sosial baru seperti Facebook dan Twitter (@freedominst).

FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT (FNS) didirikan pada 1958 oleh Presiden pertama Republik Federal Jerman, Theodor-Heuss. Dia menamakan lembaga ini sesuai dengan nama seorang pemikir Jerman, Friedrich-Naumann (1860-1919), yang memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan di Jerman untuk mewujudkan warga yang sadar dan terdidik secara politik.

Beroperasi di 62 negara di seluruh dunia, FNS membagi pengetahuan dan nasihat kepada para politisi, pembuat keputusan, masyarakat sipil, dan masyarakat secara umum. Lembaga ini bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat dan institusi-institusi pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan membantu menciptakan perubahan yang positif dan damai pada masyarakat di negara-negara itu.

FNS mengawali kegiatannya di Indonesia pada 1969 dan memulai kerjasama resminya dengan Pemerintah Indonesia sejak 26 April 1971. Dalam kurun waktu 40 tahun, FNS telah membantu pengembangan sosial ekonomi rakyat Indonesia melalui serangkaian program, mulai dari riset ekonomi dan kebijakan ekonomi pesantren sampai pada penguatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.

Kalau dilihat secara *post-factum*, sejarah kelihatannya berjalan sendiri dengan begitu mudah dan terang benderang. Tetapi di Eropa, saat Friedrich A. Hayek menerbitkan *Road to Serfdom*, ia lebih dianggap sebagai kaum pinggiran yang berusaha membendung arus deras perubahan. Dibutuhkan hampir tiga dekade sebelum Hayek, bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Milton Friedman, pada akhirnya mulai mencuri perhatian publik, dan kemudian, dengan munculnya Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, dianggap sebagai kaum visioner yang mengubah sejarah.

Kalau sekarang kita membaca kembali karya-karya Hayek tidak berarti bahwa kita bersikap romantis terhadap sejarah yang tidak mungkin lagi berulang. Pandangan Hayek terhadap kebebasan dan kaitannya dengan sistem ekonomi dan sistem politik masih terus relevan dan perlu kita pelajari. Hayek tidak melihat sistem ekonomi, politik, hukum dan perilaku alamiah manusia sebagai kotak-kotak yang terpisah. Ia merangkai semua itu dalam sebuah pandangan yang menyeluruh dan mengaitkannya dengan satu hal yang menjadi titik tolak pemikirannya, yaitu kebebasan manusia.

Mudah-mudahan buku ini bisa membantu, khususnya kaum muda di negeri kita, dalam melihat panorama intelektual dunia secara lebih lengkap.

Rizal Mallarangeng, Pengantar

ISBN 978-602-99571-0-5



freedom institute
CENTER FOR DEMOCRACY, NATIONALISM, AND MARKET ECONOMY STUDIES

Friedrich Naumann
STIFTUNG **FÜR DIE FREIHEIT**